



**PEMERINTAH
KOTA MAGELANG**



RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

KOTA MAGELANG

TAHUN 2021-2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2021 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkelanjutan dan terarah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dokumen perencanaan mengenai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, perlu menyusun rencana jangka menengah daerah yang memuat tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan dari 2020 sampai dengan Tahun 2024.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Magelang untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Magelang untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

16. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
19. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Pasal 2

- (1) Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan melalui rencana Pembangunan Daerah yang sesuai dengan Visi dan Misi Walikota terpilih serta permasalahan dan kebutuhan Daerah.
- (2) Penyusunan RPJMD bertujuan:
 - a. memberikan arahan bagi Perencanaan Pembangunan Daerah jangka menengah;
 - b. memberikan arahan bagi penyusunan RKPD; dan
 - c. menyediakan pedoman penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahun dan rencana kerja Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 3

RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 4

RPJMD merupakan penjabaran dari:

- a. Visi, Misi, dan program Walikota;
- b. Tujuan, sasaran, Strategi, arah kebijakan Pembangunan Daerah, dan keuangan Daerah;
- c. program Perangkat Daerah;
- d. program lintas Perangkat Daerah; dan
- e. rencana kerja dalam Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 5

RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, rencana tata ruang wilayah, RPJMD kabupaten/kota sekitar.

Pasal 6

RPJMD menjadi pedoman:

- a. penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan rencana kerja Perangkat Daerah;
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026.

Pasal 7

- (1) Sistematika penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun sebagai berikut:
 - a. BAB I : pendahuluan;
 - b. BAB II : gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. BAB III : gambaran keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi dan arah kebijakan;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. BAB XI : penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUSI

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan pembangunan Daerah.

- (5) Evaluasi dilaksanakan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD dan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD.
- (6) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam hal RPJMD Tahun 2026-2031 belum tersusun, penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RPJMN, RPJPD, serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 Agustus 2021

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

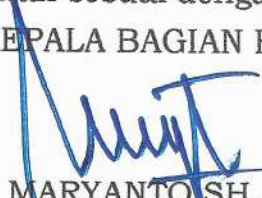
ttd

JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(4-177/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO SH., MH.

Pembina Tk.I

NIP. 19680817 198903 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun RPJMD selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMN serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip: keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, dan keterukuran. Di samping itu secara terpadu juga menerapkan pendekatan-pendekatan: partisipatif (*bottom up*), *top down*, teknokratis, politis, dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada

ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mana RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
MAGELANG TAHUN 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan kata lain perencanaan merupakan kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dan dalam waktu tertentu. Sebagai usaha yang sistematis dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan pembangunan disusun berjenjang menurut periode tahun perencanaan yaitu rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. RPJMD merupakan penjabaran 5 (lima) tahunan dari RPJPD, menjadi panduan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan dijabarkan dalam dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Dengan telah dilantiknya Kepala Daerah Kota Magelang periode 2021-2024 pada tanggal 26 Pebruari 2021, yaitu: dr. H. Muchamad Nur Aziz, Sp.PD selaku Walikota dan Drs. KH. M Mansyur, M.Ag. selaku Wakil Walikota, maka seiring pula harus dilaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sesuai dengan ketentuan harus sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat 6 bulan setelah pelantikan. RPJMD ini merupakan tahap ke-empat periode RPJPD Kota Magelang 2005-2025 yang menjabarkan Visi **“Kota Magelang Maju, Sehat, Bahagia”**.

RPJMD ini akan dijabarkan dalam RKPD sebagai pentahapan perencanaan pembangunan tahunan dan menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis (Renstra) perangkat daerah. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis menjadi dokumen penting untuk memastikan

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipedomani dalam penyusunan tujuan dan arah kebijakan yang kemudian dituangkan dalam program-program pembangunan. Demikian pula dengan dokumen rancangan teknokratik yang menggambarkan potensi Kota Magelang serta hasil analisa dan evaluasi capaian kinerja program pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD sampai dengan tahun berjalan, yang memberikan gambaran capaian kinerja program, permasalahan, serta isu strategis yang harus disolusikan pada RPJMD 2021-2026.

1.1.1 Proses Penyusunan

RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Visi Misi Walikota Terpilih, yang disusun tahun 2021 dengan berpedoman pada RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025 tahap ke IV (Tahun 2021-2025), RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031. Proses penyusunannya dilaksanakan melalui tahapan sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rangkaian proses penyusunan RPJMD Kota Magelang telah dimulai pada tahun 2020 dengan melaksanakan penyusunan dokumen pendukung yang harus tersedia sebagai gambaran umum kondisi potensi daya dukung dan daya tampung di wilayah Kota Magelang, permasalahan dan isu strategis, termasuk gambaran tentang pengelolaan keuangannya yang tersaji sebagai dokumen berikut:

1. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD yang disusun dengan pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk masa jabatan tahun 2021-2024. Rancangan Teknokratik menyajikan gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan, dan isu sgrategis daerah. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta memperhatikan isu-isu global, nasional, provinsi, serta memperhatikan pula kondisi dan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk juga terhadap standar pelayanan minimal.

2. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang disusun dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang termuat di dalam RPJMD telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS menyajikan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Magelang. KLHS memuat rekomendasi skenario pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui rangkaian analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif.

Rancangan Awal RPJMD yang merupakan penyempurnaan Rancangan teknokratik dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik dan “*focus group discussion*” (FGD) dengan maksud untuk lebih menggali saran dan masukan melalui pembahasan yang lebih fokus terhadap satu permasalahan. Selanjutnya, Rancangan Awal diajukan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD, dan kemudian dikonsultasikan kepada Gubernur Jawa Tengah. Hasil konsultasi dimaksud sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal menjadi Rancangan RPJMD yang dibahas bersama pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang untuk memperoleh saran masukan guna penyempurnaan menjadi Rancangan Akhir RPJMD. Rancangan akhir ini dimuat dalam Rancangan Perda tentang RPJMD yang disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan, sehingga Perda RPJMD Kota Magelang 2021-2026 dapat ditetapkan.

1.1.2 Prinsip dan Pendekatan Penyusunan

Proses penyusunan RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026 dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RPJMD 2016-2021 sampai dengan tahun berjalan yang juga tersaji dalam rancangan Teknokratik. Penyusunannya dilaksanakan dengan memperhatikan dan mendasarkan pada data dan informasi pembangunan daerah serta permasalahan dan isu strategis daerah yang harus disolusikan pada RPJMD 2021-2026. RPJMD yang berkualitas yang menyajikan jabaran Visi Misi Kepala Daerah dengan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dengan penepatan indikator kinerja daerah serta indikator kinerja utama sebagai upaya pencapaian Visi melalui Misi yang ditetapkan.

Untuk menjamin kualitas RPJMD yang taat regulasi dan operasional, maka penyusunan dokumen RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip penyusunan rencana pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Prinsip Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Prinsip	Indikator
Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional	Konsistensi dan sinergitas perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kota Magelang tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, dan RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031
Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing	Pelibatan para pemangku kepentingan pada proses penyusunan dokumen perencanaan melalui Musrenbang, forum konsultasi publik, dan “ <i>focus group discussion</i> ”
Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah	Pendekatan yang berorientasi pada substansi, dengan penyusunan RPJMD berdasar potensi, struktur dan pola ruang untuk pengembangan wilayah sesuai dengan RTRW sebagaimana Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW 2011-2031. Memperhatikan pula pembangunan kewilayahan Propinsi Jawa Tengah dan Nasional
Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional	Penetapan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan, untuk mencapai target indikator kinerja daerah dan indikator kinerja utama setiap urusan dengan memperhatikan kondisi potensi, daya dukung dan daya tampung serta menyesuaikan dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional

Sumber: Diolah Tim Penyusun RPJMD, 2021

Pada sisi yang lain penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada proses yaitu pendekatan teknokratik, politik, *bottom up/top down* serta partisipatif, serta pendekatan yang berorientasi pada substansi yaitu pendekatan tematik-holistik, integratif, dan spasial, sebagaimana Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Pendekatan Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Berorientasi pada Proses

Kriteria	Parameter
Dari Bawah (<i>Bottom- Up</i>)	Memperhatikan usulan, saran masukan dari Musrenbang, sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD
	Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan melalui kegiatan forum konsultasi publik (FGD), dan “ <i>focus group discussion</i> ”
Dari Atas (<i>Top-Down</i>)	Sinkronisasi Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Program Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Program Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024.
	Sinergitas hasil forum konsultasi publik, “ <i>focus group discussion</i> ”, dokumen KLHS, Regulasi Nasional dan Provinsi

Kriteria	Parameter
Teknokratik	Dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
	Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026.
	Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026.
	Mendasarkan pada Rancangan Teknokratik RPJMD yang disusun tahun 2020 untuk RPJMD 2021-2026.
Partisipatif	Dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang dilaksanakan melalui forum-forum yang diselenggarakan seperti Musrenbang, Konsultasi Publik, dan “ <i>focus group discussion</i> ”
Politik	Dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala Daerah terpilih yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Sumber: Diolah Tim Penyusun RPJMD, 2021

Tabel 1.3
Pendekatan Penyusunan Dokumen Perencanaan yang berorientasi pada Substansi

Pendekatan	Parameter
Holistik-Tematik	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya
Integratif	Menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Penyelesaian permasalahan yang dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antar urusan yang dilaksanakan secara bersama sama.
Spasial	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan, memperhatikan RTRW, rencana pengembangan wilayah, dan menunjuk pada lokasi yang spesifik.

Sumber: Diolah Tim Penyusun RPJMD, 2021

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan berpedoman dan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

11. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Peyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-

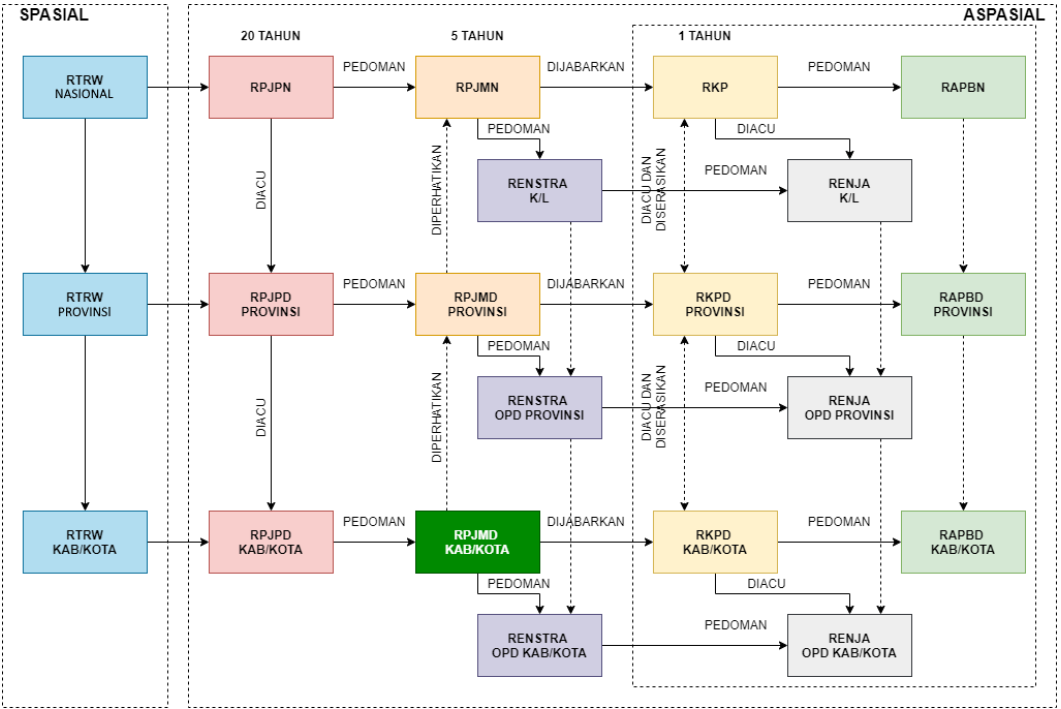
Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: 5-69/2019);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender;
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
31. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Daerah harus memperhatikan dan mendukung kebijakan Nasional dan Provinsi sehingga terjadilah keselarasan rencana dan pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran, tepat tempat, dan tepat waktu dengan menyesuaikan potensi, tantangan, dan peluang yang dimiliki. Dokumen RPJMD Kota Magelang 2021-2026 selaras dan sinergi dengan dokumen perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dokumen perencanaan strategis, serta dokumen sektoral lainnya. Sinergitas dan keselarasan ditunjukkan dengan penyusunan dokumen RPJMD yang mempedomani RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RTRW Kota Magelang, termasuk RPJMD daerah sekitar.



Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
Sumber: Diolah Tim Penyusun RPJMD, 2021

1.3.1 Arah Kebijakan Nasional dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan ketentuan, dokumen perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan Provinsi dan Nasional, sehingga arah kebijakan Kota Magelang disusun dengan memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Arah kebijakan Nasional ditetapkan untuk tahun 2020-2024 sesuai dengan agenda pembangunan sebagai implementasi 5 (lima) arahan Presiden dalam melaksanakan Misi Presiden untuk mencapai Visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ditetapkan untuk menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan tahunan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menentukan fokus dan prioritas pembangunan setiap

tahunnya. Berikut adalah tabel yang menggambarkan arah kebijakan nasional dan provinsi Jawa Tengah yang dipedomani dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Tabel 1.4
Arah Kebijakan Nasional dan Arah Kebijakan
Provinsi Jawa Tengah

AGENDA PEMBANGUNAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	ARAH KEBIJAKAN NASIONAL					
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan		Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi : 1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan				
		Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi : 1. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi 2. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi 3. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 4. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi				
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan		Meningkatkan pemerataan antar wilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan Luar Jawa :				
		Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah				
		Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah				
		Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah				
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan				
		Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial				
		Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (<i>Primary Health Care</i>) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi				
		Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas				
		Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda				
		Mengentaskan Kemiskinan				
		Meningkatkan produktivitas dan daya saing				

AGENDA PEMBANGUNAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan		Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk meperkukuh ketahan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter				
		Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia				
		Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial				
		Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter				
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		Infrastruktur Pelayanan Dasar : 1. Penyediaan Akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau dengan meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni 2. Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan dengan percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku 3. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak dan aman 4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi 5. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur 6. Optimalisasi waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi				
		Infrastruktur Ekonomi : 1. Konektivitas Jalan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan 2. Konektivitas Kereta Api 3. Konektivitas Laut 4. Konektivitas Udara 5. Konektivitas Darat				
		Infrastruktur Perkotaan : 1. Transportasi Perkotaan 2. Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan 3. Penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman di Perkotaan 4. Penyediaan Perumahan dan Permukiman layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan				

AGENDA PEMBANGUN AN	2019	2020	2021	2022	2023	202 4
		Energi dan Ketenagalistrikan : 1. Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan 2. Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik 3. Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik 4. Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan 5. Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan				
		Transformasi Digital : 1. Penuntasan Infrastruktur TIK 2. Pemanfaatan Infrastruktur TIK 3. Fasilitas pendukung transformasi digital				
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup				
		Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim melalui konvergensi antara pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim				
		Pembangunan Rendah Karbon melalui upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang-bidang prioritas meliputi bidang energi, lahan, limbah, industri, dan kelautan				
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		Konsolidasi Demokrasi : 1. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi 2. Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan 3. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik				
		Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri : 1. Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri 2. Memperkuat kerja sama pembangunan internasional 3. Meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional 4. Meningkatkan peran Indonesia di tingkat regional dan global				
		Penegakan Hukum Nasional : 1. Penataan regulasi 2. Perbaikan sistem hukum pidana dan perdata 3. Penguatan sistem anti korupsi 4. Peningkatan akses terhadap keadilan				
	ARAH KEBIJAKAN PROVINSI JAWA TENGAH					

AGENDA PEMBANGUNAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Peningkatan daya saing daerah melalui pemerataan pembangunan dan pemanfaatan IPTEK	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM	Percepatan pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing SDM	Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi dan SDM	Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari	

Sumber: Diolah Tim Penyusun RPJMD, 2021

1.3.2 Hubungan RPJMD dengan RPJPD

Periode pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026 merupakan periode ke empat dari pentahapan RPJP Kota Magelang tahun 2005-2025 dengan Visi **“Magelang sebagai Kota Jasa Yang Berbudaya, Maju dan Berdaya Saing Dalam Masyarakat Madani”**. RPJMD ke-empat ini berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ketiga dengan prioritas untuk:

1. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang;
2. Mewujudkan tercapainya perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi, berlandaskan budaya yang unggul, sumber daya manusia yang berkualitas dan madani; dan
3. Mewujudkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat madani.

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Magelang Tahun 2005-2025 mempunyai tantangan yang cukup kuat sebagai dampak bencana non alam penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), terutama keterkaitan dengan kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan. Implikasi COVID-19 telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan sosial yang memerlukan penyelamatan serta pemulihan perekonomian termasuk dunia usaha dan masyarakat terdampak.

RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026 merupakan penjabaran RPJPD Kota Magelang tahun 2005-2025 tahap ke-empat, tahun 2021-2025. Keterkaitan tersebut RPJPD 2005-2025 dengan VISI MISI RPJMD tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.5
Sinergitas Visi Misi RPJMD Kota Magelang 2021-2026 dengan RPJPD Kota
Magelang 2005-2025

Uraian	RPJPD Kota Magelang 2005-2025	RPJMD Kota Magelang 2021-2026	
VISI	Magelang Sebagai Kota Jasa Yang Berbudaya, Maju Dan Berdaya Saing Dalam Masyarakat Madani		Kota Magelang Maju Sehat dan Bahagia
Misi 1	Mewujudkan Kota Magelang sebagai pusat pelayanan jasa yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas yang memadai	Misi 2	Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Misi 2	Mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab	Misi 1	Meningkatkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran berlandaskan IMTAQ
Misi 3	Meningkatkan daya saing daerah melalui pengelolaan pembangunan Kota Magelang yang efisien, efektif, profesional dan berwawasan lingkungan serta mengembangkan potensi daerah secara kreatif dan inovatif didukung oleh penguasaan iptek dan sumber daya manusia yang berkualitas.	Misi 5	Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur
Misi 4	Mengembangkan perekonomian Kota Magelang yang bertumpu pada penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat	Misi 4	Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan
Misi 5	Mewujudkan good governance dan clean goverment dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat madani (<i>civil society</i>), dan media massa untuk menuju kehidupan masyarakat Kota Magelang yang damai, demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran	Misi 3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Inovatif

Sumber: Diolah Tim Penyusun RPJMD, 2021

1.3.3 Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Sinergitas dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah menjadi keharusan dalam substansi RPJMD Kota Magelang, karena secara kewilayahan Kota Magelang berada pada Wilayah Jawa Tengah bahkan lebih fokus, Kota Magelang menjadi bagian wilayah pembangunan Jawa Tengah **Purwomangung** Bersama

Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Purworejo.

Di dalam Rencana Pembangunan Jawa Tengah, secara kewilayahan, Kota Magelang berada pada kawasan pengembangan wilayah Purwomanggung bersama Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Wonosobo. Sampai dengan tahun 2023, target dukungan Kota Magelang terhadap Provinsi Jawa Tengah untuk pertumbuhan ekonomi (1,69-2,24*); Kemiskinan (11,87-10,76*); Tingkat Pengangguran Terbuka (8,37-8,26*); dan Indeks Pembangunan Manusia (70,67*). Target dukungan tersebut telah diperhitungkan dengan memperhatikan dampak pandemi COVID-19 yang diprediksikan akan masih terasa dan harus menjadi perhatian sampai dengan tahun 2023, sebagaimana secara tersirat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Untuk mencapainya, dilaksanakan upaya antara lain adalah peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dengan reaktivasi jalur Kereta Api, pembangunan jalan Tol Bawen-Yogyakarta, dan pembangunan TPST Regional Magelang. Rencana pengembangan agropolitan dan pariwisata khususnya KSPN Borobudur dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sinergitas Visi Misi RPJMD Kota Magelang dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.6
Sinergitas Visi Misi RPJMD Kota Magelang dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Uraian	Provinsi Jateng 2018-2023	Kota Magelang 2021-2026	
VISI	Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi		Kota Magelang Maju Sehat dan Bahagia
Misi 1	Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI;	Misi 1	Meningkatkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran berlandaskan IMTAQ
Misi 2	Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota	Misi 3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Inovatif
Misi 3	Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;	Misi 4	Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan
Misi 4	Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	Misi 5	Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur

Uraian	Provinsi Jateng 2018-2023	Kota Magelang 2021-2026	
		Misi 2	Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Sumber: Diolah Tim Penyusun RPJMD, 2021

1.3.4 Hubungan RPJMD dengan RPJMN

Perencanaan pembangunan di Kota Magelang harus dinergi dengan perencanaan pembangunan tingkat nasional. Salah satu upaya membangun sinergitas adalah keselarasan antara RPJMD dengan RPJMN. Program dan kegiatan yang menjadi prioritas nasional harus dilaksanakan di Kota Magelang. Sinergitas visi misi RPJMD Kota Magelang dengan RPJM Nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.7
Sinergitas Visi Misi RPJMD Kota Magelang 2021-2026 dengan RPJM Nasional 2020-2026

Uraian	Nasional 2020-2024	Kota Magelang 2021-2026	
VISI	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong		Kota Magelang Maju Sehat dan Bahagia
Misi 1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 2	Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Misi 2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Misi 4	Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan
Misi 3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 4	Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan
Misi 4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Misi 5	Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur
		Misi 2	Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Misi 5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 1	Meningkatkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran berlandaskan IMTAQ

Uraian	Nasional 2020-2024		Kota Magelang 2021-2026
Misi 6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Misi 3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Inovatif
Misi 7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	Misi 1	Meningkatkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran berlandaskan IMTAQ
Misi 8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Misi 3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Inovatif
Misi 9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Misi 3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Inovatif

Sumber: Diolah Tim Penyusun RPJMD, 2021

1.3.5 Hubungan RPJMD dengan RTRW Kota Magelang

RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan non spasial. Namun demikian, pendekatan spasial tetap dilaksanakan melalui pertimbangan dimensi keruangan yang berorientasi pada substansi, guna mewujudkan pembangunan yang komprehensif dan selaras dengan struktur dan pola ruang yang telah direncanakan dalam RTRWK. Perencanaan Pembangunan Daerah, berprinsip untuk mengintegrasikan RTRW ke dalam rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW, baik dalam rencana struktur maupun pola ruang. Keselarasan hubungan antara RPJMD dengan RTRW bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang mencakup rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi pemanfaatan ruangnya. Dengan demikian tujuan pembangunan akan tercapai, kesenjangan wilayah berkurang tetapi sesuai dengan tata kelola fungsi keruangan, serta akan terwujud keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan, dan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.

1.3.6 Hubungan RPJMD dengan RKPD

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi Misi Walikota. RPJMD memuat perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan program perangkat daerah. Rancangan RPJMD dibahas bersama DPRD dan ditetapkan sebagai produk Peraturan Daerah, sehingga merupakan dokumen resmi yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD sebagai penjabaran RPJMD ke dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah.

RPJMD memuat strategi, arah kebijakan dan program yang secara bertahap akan diimplementasikan dalam perencanaan tahunan melalui penterjemahan tema pentahapan tahunannya. RPJMD memuat indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagai upaya untuk mencapai target akhir tahun rencana. Program-program yang dituangkan dalam RKPD harus sesuai dengan program yang dituangkan dalam RPJMD.

1.3.7 Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Dokumen perencanaan pembangunan daerah harus juga selaras dan dalam penyusunannya harus memperhatikan dokumen rencana pembangunan sektoral, sehingga terintegrasi karena akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis daerah, RKPD, maupun rencana kerja perangkat daerah. Dokumen dimaksud antara lain adalah KLHS, Roadmap Reformasi Birokrasi, Master Plan Kebu Raya Gunung Tidar, Master Plan Sukarno Hatta, Master Plan GOR Samapta, dan dokumen rencana pembangunan sektoral lainnya.

Khusus KLHS yang merupakan dokumen kajian lingkungan hidup strategis yang diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam penyusunan program dan kegiatan. RPJMD ini juga memperhatikan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan dengan peraturan Pemerintah No.2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

RPJMD memperhatikan pula Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang, yang memuat percepatan pembangunan di Jawa Tengah dalam upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 7% di Tahun 2023, yang diantaranya adalah rencana proyek pembangunan yang akan dilaksanakan di Kota Magelang. Proyek pembangunan yang strategis akan dibangun di Kota Magelang adalah Pembangunan Terminal Tipe A “TIDAR” dan pembangunan Rumah Sakit Kanker. Proyek strategis ini, harus ditangkap dan ditindak lanjuti dengan program pembangunan yang dituangkan pula dalam RPJMD Kota Magelang 2021-2026.

Kebijakan dan program Nasional maupun Provinsi serta isu global, diperhatikan untuk pencermatan potensi, peluang, dan tantangan Kota Magelang yang dilakukan melalui pengkajian dari berbagai aspek untuk menentukan permasalahan serta isu strategis untuk kemudian disusun arah kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan selama masa periode

2021-2026. Selain kebijakan Nasional dan Provinsi, penentuan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam rencana pembangunan juga memperhatikan dan mempertimbangkan isu global, nasional, dan daerah. Isu pandemi *Corona Virus Disease* (COVID) 19 telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global dan secara berjenjang juga dari tingkat pusat, provinsi dan Kota Magelang juga telah ditetapkan sebagai pandemi bencana non alam.

Pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*Social Safety Net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat terdampak.

Secara jelas, selain pada kesehatan, dampak pandemi adalah menurunnya kondisi ekonomi makro, pelaku ekonomi, pelaku usaha, perbankan, yang nampak dengan terjadinya PHK di perusahaan-perusahaan yang harus diperhatikan *multiplier effect*-nya yaitu banyaknya pengangguran yang ditunjukkan dengan peningkatan angka Tingkat Pengangguran Terbuka yang sangat signifikan, dan kemiskinan yang memerlukan *recovery* dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kewenangan daerah.

Kebijakan nasional yang harus ditindaklanjuti oleh daerah terutama terkait dengan kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Kebijakan keuangan dilaksanakan dengan penyesuaian defisit anggaran yang melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB). Setelah masa penanganan pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian, besaran defisit **secara bertahap** kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari PDB sejak tahun anggaran 2023. Hal tersebut mengindikasikan bahwa *recovery* dampak COVID-19 dari berbagai aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian dari fokus prioritas dan arah kebijakan yang dituangkan dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026,

selain tentu harus berfokus pula prioritas RPJMD ke empat sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Magelang tahun 2005-2025.

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut.

1.4.1 Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 disusun dengan pendekatan yang berorientasi proses dan berorientasi pada substansi sebagai dokumen perencanaan resmi yang dilegalkan sebagai Peraturan Daerah Kota Magelang. Dokumen RPJMD tersebut disusun dengan maksud untuk:

1. Menyediakan dokumen resmi yang akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis sehingga tercipta sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah.
2. Menyediakan dokumen resmi yang akan menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) dan rencana kerja perangkat daerah.

1.4.2 Tujuan

RPJMD yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dengan efisiensi sumber daya dan memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah untuk pembangunan berkelanjutan ini disusun dengan tujuan:

1. Menjabarkan visi misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah sehingga rencana pembangunan daerah yang ditetapkan dapat terwujud.
2. Menciptakan sinergitas RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya antar tingkat kewilayahan maupun antar periode

waktu, dokumen perencanaan sektoral, dokumen perencanaan kewilayahan, dokumen perencanaan wilayah sekitar, serta dokumen strategis dan sektoral lainnya.

3. Sebagai pedoman penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
4. Sebagai pedoman penyusunan dokumen RKPD yang merupakan penjabaran tahunan pelaksanaan RPJMD.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang tahun 2021-2026 terdiri dari 9 (sembilan) bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen maksud dan tujuan, tahapan dan metode, serta sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menguraikan gambaran umum kondisi daerah dengan data-data dan analisisnya, serta hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2016-2020. Gambaran umum yang disajikan meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis, serta menjadi pijakan perumusan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kota Magelang sampai dengan Tahun 2026.

Bab III : Gambaran Keuangan Daerah

Memberikan gambaran tentang kondisi pengelolaan keuangan daerah saat ini, asumsi-asumsi perencanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Magelang sampai dengan tahun 2026.

Bab IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Menguraikan tentang permasalahan dan isu strategis daerah yang harus disolusikan oleh Kota Magelang sampai dengan tahun 2026.

Bab V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Menguraikan tentang Visi Misi pembangunan daerah Kota Magelang yang sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah disertai indikator kinerja dan terget yang akan dicapai.

Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dengan menyajikan keterkaitan antara sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam upaya pencapaian setiap misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Bab ini juga menguraikan arah pengembangan wilayah yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah.

Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Menguraikan program prioritas dalam pencapaian Visi Misi serta seluruh program yang dirumuskan berserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan yang disajikan setiap pentahapan tahunan dan target akhir periode RPJMD.

Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Menguraikan penjelasan indikator kinerja utama (IKU) daerah, IKU perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah yang menggambarkan capaian kinerja program setiap pentahapan tahunan yang menjadi instrumen pemantauan dan evaluasi RPJMD.

Bab IX : Penutup

Menguraikan arti penting RPJMD bagi pembangunan Kota Magelang

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

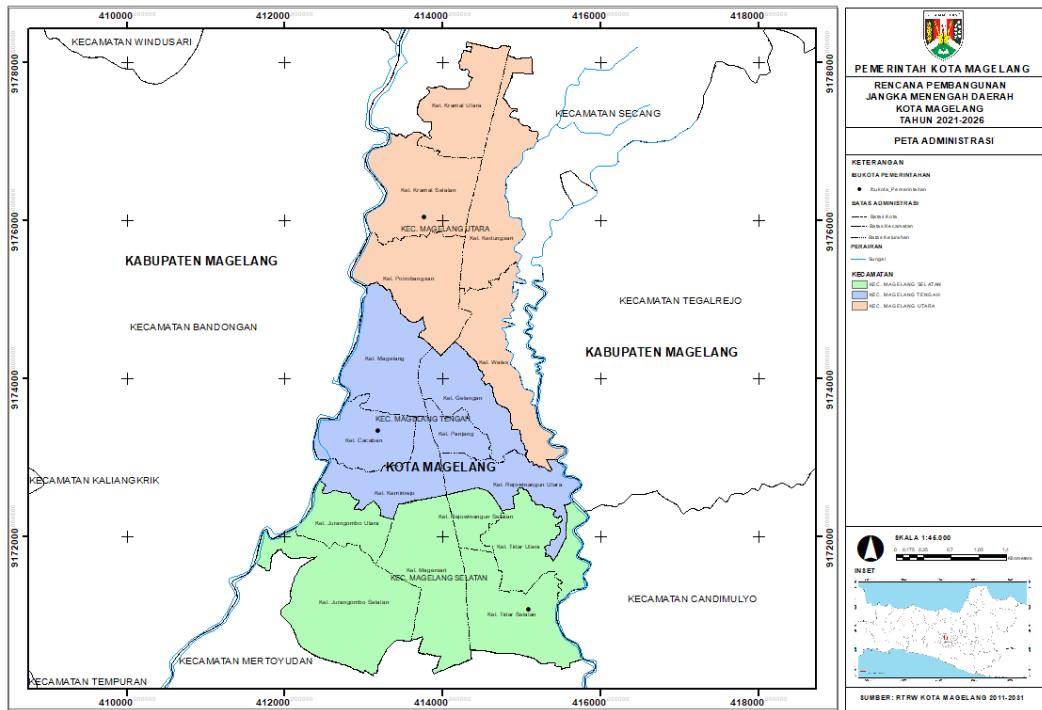
Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek geografi, demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

2.1. Aspek Geografi Dan Demografi

Aspek geografis dan aspek demografi merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan dalam melakukan sebuah perencanaan pembangunan perlu diketahui terlebih dahulu kondisi geografi dan kondisi demografi wilayah tersebut agar tepat sasaran dan tepat tujuan. Analisis pada aspek geografi Kota Magelang perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Aspek demografi Kota Magelang dapat digambarkan melalui kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu.

2.1.1. Letak, Luas Dan Batas Wilayah

Kota Magelang terletak antara 110°12'30"- 110°12'52" BT (Bujur Timur) dan 7°26'18"- 7°30'9" LS (Lintang Selatan). Secara geografis Kota Magelang terletak di tengah-tengah Kabupaten Magelang, sehingga Kota Magelang secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Magelang. Pada sisi utara, Kota Magelang berbatasan langsung dengan Kecamatan Secang, sisi timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Tegalrejo, sisi selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Mertoyudan, dan sisi barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Bandongan.



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Magelang
Sumber : RTRW Kota Magelang 2011-2031

Kota Magelang terletak pada persilangan jalur transportasi utama di Jawa Tengah, menghubungkan antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Magelang-Temanggung dan persimpangan jalur pariwisata lokal, regional dan nasional yaitu Yogyakarta-Borobudur-Kopeng-Ketep Pass dan Dataran Tinggi Dieng.

Letak Kota Magelang yang sangat strategis menjadikan Kota Magelang ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Wilayah seperti yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Nasional tahun 2008-2028. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029, Kota Magelang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Purwomanggung (Purworejo, Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung) yang mempunyai potensi pertanian, pariwisata, dan industri pertanian dengan arah kebijakan “Pengembangan Purwomanggung Berbasis Pertanian dan Pariwisata Guna Mendorong Sektor Industri Pertanian Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”.

Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang, Propinsi Jawa Tengah, maka wilayah Kota Magelang adalah seluas 1.853,64 Ha atau 18,54 km². Secara Administratif Kota Magelang terbagi atas 3 Kecamatan dan 17 kelurahan dengan luas wilayah rata-rata tidak lebih dari 2 km². Gambaran secara rinci

luas tiap kecamatan/kelurahan di Kota Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang

No.	Kecamatan Dan Kelurahan	Luas / Area (Ha)	Persentase (%)
1	Kec. Magelang Selatan	716	38,60
	1. Kel. Jurangombo Utara	66	3,54
	2. Kel. Jurangombo Selatan	215	11,60
	3. Kel. Magersari	156	8,42
	4. Kel. Tidar Utara	110	5,93
	5. Kel. Tidar Selatan	132	7,11
	6. Kel. Rejowinangun Selatan	37	2,01
2	Kec. Magelang Tengah	510	27,51
	1. Kel. Magelang	124	6,69
	2. Kel. Kemirirejo	86	4,63
	3. Kel. Cacaban	85	4,60
	4. Kel. Rejowinangun Utara	90	4,87
	5. Kel. Panjang	36	1,91
	6. Kel. Gelangan	89	4,79
3	Kec. Magelang Utara	628	33,87
	1. Kel. Wates	117	6,31
	2. Kel. Potrobangsari	135	7,28
	3. Kel. Kedungsari	132	7,12
	4. Kel. Kramat Utara	99	5,36
	5. Kel. Kramat Selatan	145	7,80
	Jumlah	1.854	100,00

Sumber: Permendagri Nomor 64 Tahun 2017

2.1.2. Topografi

Kota Magelang secara topografi merupakan wilayah dataran yang kelilingi oleh gunung dan barisan pegunungan, diantaranya Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Pegunungan Gianti, Pegunungan Menoreh, Pegunungan Andong, dan Pegunungan Telomoyo. Kota Magelang memiliki kondisi dataran yang secara umum termasuk dalam dataran rendah dengan kategori dataran aluvial dengan sudut kemiringan yang bervariasi yaitu berada di ketinggian antara 375-500 mdpl dengan titik ketinggian tertinggi pada Gunung Tidar yaitu 503 mdpl. Keberadaan Gunung Tidar merupakan kekhasan (*landmark*) Kota Magelang yang tidak dimiliki oleh banyak wilayah lain. Selain sebagai kawasan lindung dengan kemiringan hingga 30-40%, Gunung Tidar yang saat ini statusnya menjadi Kebun Raya juga berfungsi sebagai paru-paru kota yang menjadikan iklim Kota Magelang berhawa sejuk.

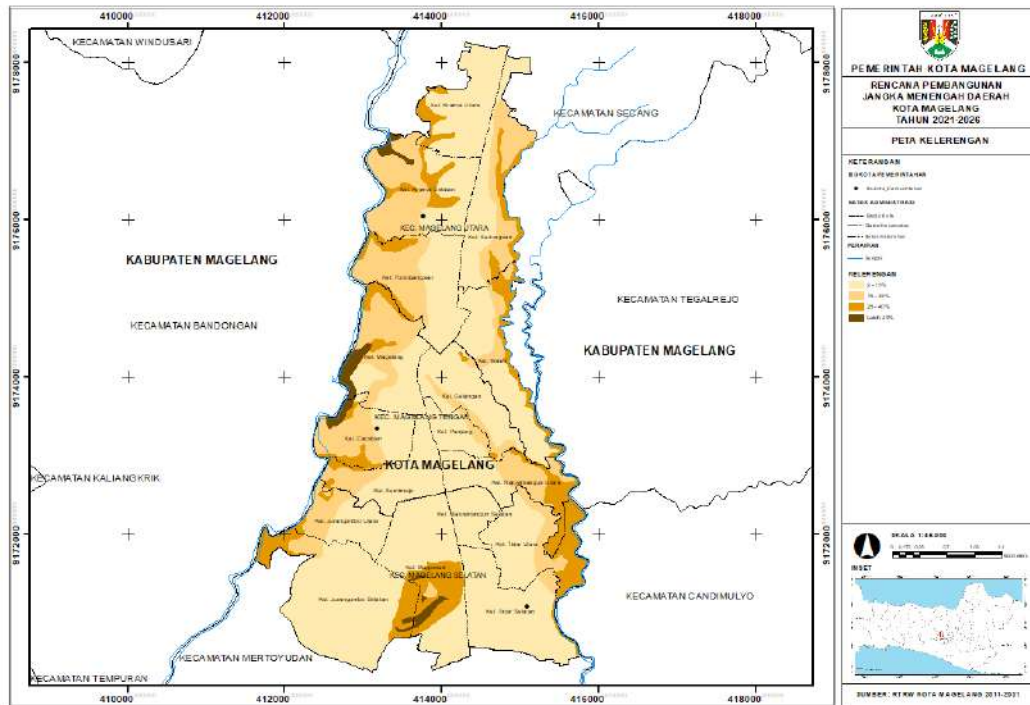
Tabel 2.2
Kemiringan Lereng

No	Kemiringan lereng	Luas (Ha)	Persentase
1	2-15%	1.164,671674	62,79
2	15-25%	421,3464476	22,72
3	25-40%	237,8845045	12,83
4	Lebih 40%	30.77723945	1,66
Total		1.854,679865	100,00

Sumber: Dokumen RTRW Kota Magelang 2011-2031

Kota Magelang termasuk dataran rendah dengan sudut kemiringan relatif bervariasi. Kemiringan topografi yang terjal berada di bagian barat (sepanjang Sungai Progo) dan di sebelah timur (di sekitar Sungai Elo) sampai dengan kemiringan 15-25%. Mayoritas wilayah kota Magelang ada pada tingkat kemiringan 2-15% dan mencapai luasan 62,79% dari luas wilayah Kota Magelang. Wilayah dengan tingkat kemiringan 2-15% memiliki medan yang landai dan berelief sedang-halus. Wilayah dengan kemiringan 2-15% ini berada pada daerah di sebelah timur kompleks Akmil ke Utara hingga daerah di sekitar RSJ Magelang.

Bentuk fisik Kota Magelang saat ini relatif memanjang mengikuti jaringan jalan arteri. Dengan kondisi fisik tersebut, kecenderungan pertumbuhan alamiah Kota Magelang adalah ke arah utara dan selatan dengan dominasi area terbangun di daerah yang mempunyai topografi relatif datar. Dengan kondisi topografi tersebut, maka kawasan permukiman pada umumnya berlokasi di daerah yang relatif datar, namun dengan kondisi luas lahan yang terbatas, maka pengembangan permukiman juga ke daerah-daerah yang bertopografi dan berkontur tajam.

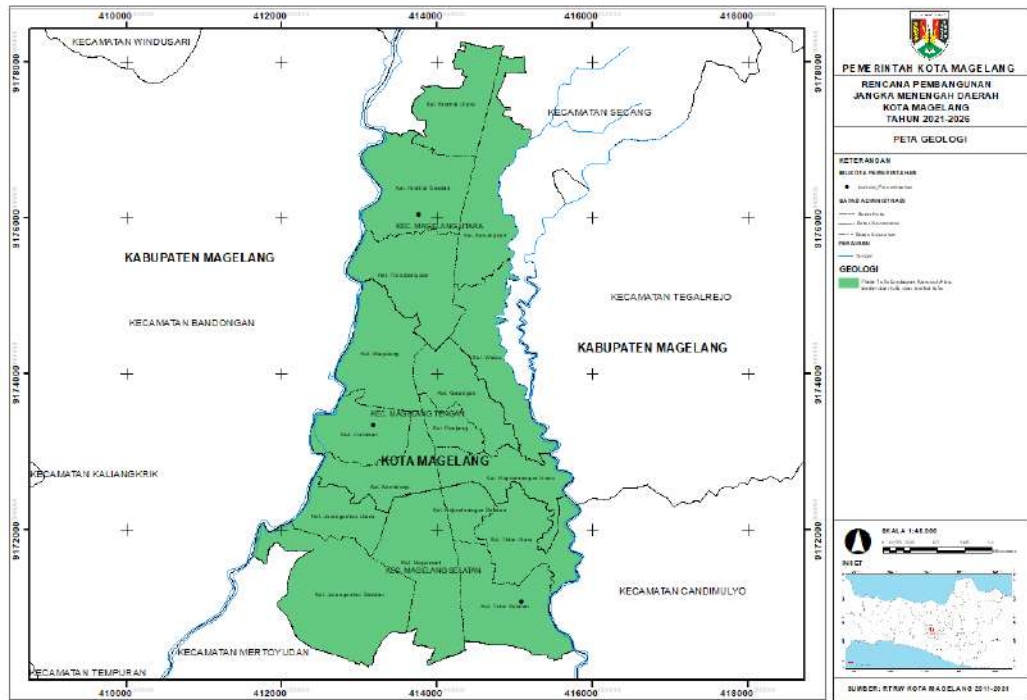


Gambar 2.2
Pola Kelerengan Kota Magelang
Sumber : RTRW Kota Magelang 2011-2031

2.1.3. Geologi

Formasi batuan di Kota Magelang termasuk batuan gunungapi, sehingga litologi yang menempati Kota Magelang sebagian besar batu pasir tufaan (lepas) dan breksi. Potensi kandungan tanah Kota Magelang sebagian besar berupa batu pasir lepas dan konglomerat hasil produksi gunung berapi yang merupakan endapan kwarter yang mempunyai sifat sangat *poreous* (kelulusan air tinggi), serta penurunan terhadap beban kecil, mendekati nol (0). Daya dukung terhadap bangunan berkisar antara 5kg/cm²-19 kg/cm².

Ditinjau dari satuan morfologi, pendataran alluvium tersebar sampai di bagian selatan dan tempat-tempat di pinggir Sungai Progo dan Sungai Elo. Tersusun oleh batuan hasil rombakan batuan yang lebih tua, yang bersifat lepas. Umumnya berada pada ketinggian antara 250-350 m, berelief halus dengan kemiringan sebesar 3-8%. Daerah ini dialiri oleh Sungai Progo dan Sungai Elo yang mengalir dengan pola Sum Meander.



Gambar 2.3
Peta Geologi Kota Magelang
Sumber : RTRW Kota Magelang 2011-2031

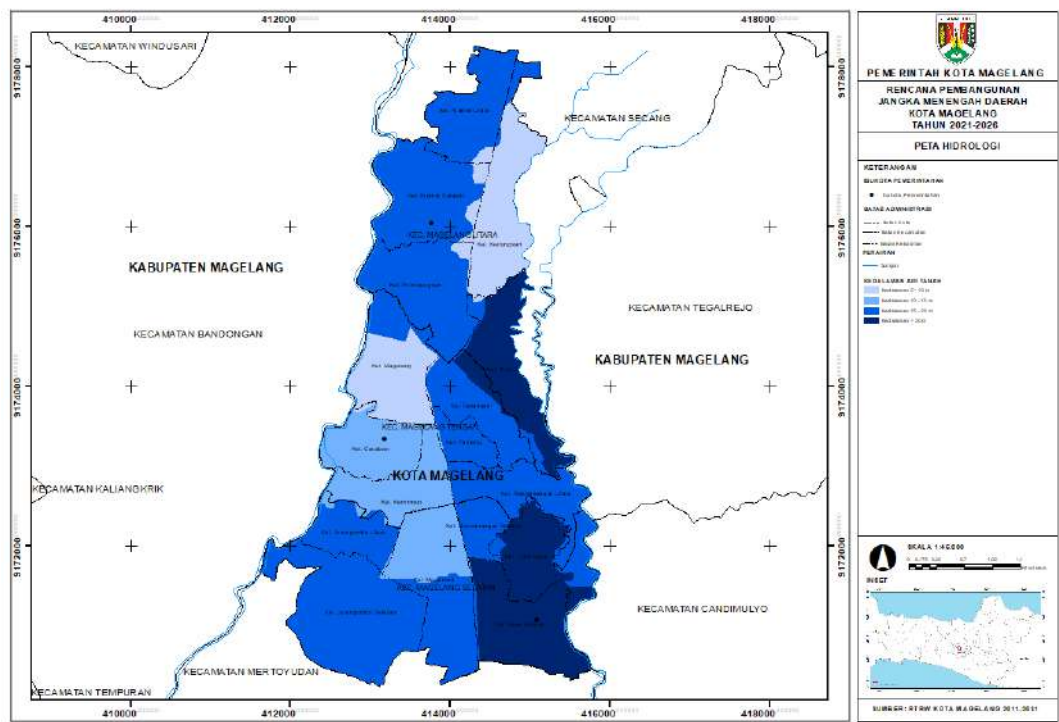
2.1.4. Hidrologi

Sumber air di Kota Magelang dapat digolongkan menjadi air permukaan dan air tanah. Air permukaan di Kota Magelang berupa sungai, saluran irigasi dan mata air. Kota Magelang memiliki 2 (dua) sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Elo di sebelah timur dan Sungai Progo di sebelah barat. Kedua sungai tersebut juga menjadi batas alamiah yang menentukan letak administrasi Kota Magelang. Sedangkan potensi air tanah relatif bervariasi dengan kedalaman antara 5 meter sampai dengan 20 meter. Air tanah di Kota Magelang kurang menguntungkan jika dikembangkan mengingat air tanah yang ada mayoritas cukup dalam dengan akuifer yang dangkal, sehingga sulit untuk dipompa. Kota Magelang juga memiliki 2 (dua) saluran air yaitu: Kali Bening (Kali Kota), dan Kali Progo Manggis. Saluran tersebut juga dapat berfungsi sebagai saluran irigasi teknis.

Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk Kota Magelang sampai saat ini bergantung pada sumber-sumber air yang ada di luar wilayah Kota Magelang yaitu dari mata air yang berada di wilayah Kabupaten Magelang. Satu-satunya mata air yang berada di Kawasan Kota Magelang adalah Mata Air Tuk Pecah. Sumber mata air tersebut adalah:

1. Mata air Wulung dan Karang sebesar 71 lt/det;
2. Mata air Kalimas I sebesar 81 lt/ det;
3. Mata air Kalimas II sebesar 87 lt/ det;

- 4. Mata air Kanoman I sebesar 74 lt/ det;
- 5. Mata air Kanoman II sebesar 69 lt/ det; dan
- 6. Mata air Tuk Pecah sebesar 102 lt/det.



Gambar 2.4
Peta Hidrologi Kota Magelang
Sumber : RTRW Kota Magelang 2011-2031

2.1.5. Klimatologi

Kota Magelang merupakan wilayah yang tergolong memiliki iklim sejuk dengan tingkat curah hujan yang tinggi dan merupakan wilayah dengan iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur, serta memiliki tingkat kelembaban kurang lebih 88,8%. Berdasarkan data iklim Kota Magelang, didapati rata-rata curah hujan di Kota Magelang cenderung tinggi. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, rata-rata curah hujan per hari tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebanyak 335,36 mm dengan jumlah hari hujan 21,45 hari, sedangkan terendah yaitu pada tahun 2018 hanya sebanyak 193 mm dengan jumlah hari hujan 12 hari. Data rata-rata curah hujan bulanan pada kawasan Kota Magelang dalam kurun waktu waktu empat tahun sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Rata-rata Curah Hujan per Bulan Kota Magelang
Tahun 2017-2020

No	Bulan	2017	2018	2019	2020
1	Januari	713	430	875	503
2	Februari	450	528	437	422
3	Maret	447	271	328	409

No	Bulan	2017	2018	2019	2020
4	April	615	203	318	301
5	Mei	170	83	42	180
6	Juni	127	77	-	60
7	Juli	80	-	-	21
8	Agustus	-	-	-	59
9	September	128	26	-	122
10	Oktober	207	13	3	306
11	November	369	377	211	481
12	Desember	383	308	379	515
	Jumlah curah hujan (mm)	3.689	2.316	2.593	3.378
	Jumlah hari hujan	172	153	122	177
	Rata-rata curah hujan (mm/hari)	21,45	15,14	21,25	19,09

Sumber: DPUSDAPR Provinsi Jateng, Kota Magelang dalam Angka (diolah)

Curah hujan yang tinggi pada bulan-bulan tertentu dapat menimbulkan dampak negatif seperti banjir dan pohon tumbang. Kewaspadaan akan hal ini perlu diupayakan agar tidak menimbulkan kerugian. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kelerengan curam dengan tingkat kemiringan relatif tinggi dikombinasikan sifat tanah yang memiliki kelulusan air tinggi yang dapat meningkatkan resiko terjadi tanah longsor ketika curah hujan tinggi.

2.1.6. Penggunaan Lahan

Tata guna lahan di Kota Magelang didominasi oleh pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman. Sebesar 69,49% dari luas Kota Magelang 1.854,67 Ha merupakan lahan terbangun yang berupa permukiman, perdagangan dan jasa, pendidikan, perkantoran, kesehatan, pariwisata, industri dan kawasan terbangun lainnya.

No	Jenis Tanah		Luas Tanah (Hektar)				
			2016	2017	2018	2019	2020
	5.	Perkebunan/Hutan Rakyat	99,56	99,56	99,56	70,00	70,00
	6.	Industri	51,90	51,90	51,90	53,44	53,44
	7.	Lainnya (Makam, Dll)	103,38	103,38	103,38	327,90	327,90
		Jumlah	1812,00	1812,00	1854,00	1854,00	1854,00

Sumber: DataGo Kota Magelang, 2021

Lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi area terbangun perlu dikendalikan. Upaya perlindungan dan penekanan alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun dapat dilakukan salah satunya dengan melindungi lahan pertanian melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam Perda No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda No.4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang 2011-2031, telah ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luasan lahan sebesar 63 ha. Sebagai tindak lanjutnya, upaya perlindungan lahan pertanian produktif perlu dilakukan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang perlu merumuskan kebijakan insentif bagi pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani yang lahan sawahnya digunakan dan ditetapkan sebagai LP2B. Selain hal tersebut, perlu adanya upaya tersendiri bagi Pemerintah Kota Magelang dalam optimalisasi pemanfaatan lahan pada wilayah permukiman terutama padat penduduk dengan pola pembangunan vertikal.

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Magelang menurut pola ruangnya terbagi dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Tata Ruang Kota Magelang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 sebagaimana diubah dengan Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (yang selanjutnya disebut RTRW Kota Magelang), lebih mempertajam potensi pengembangan wilayah

internal serta mendukung pengembangan wilayah secara eksternal. Penajaman potensi tersebut tergambarkan pada struktur ruang dan pola ruang, serta penajaman fungsi pada masing-masing Bagian Wilayah Perencanaan (BWP).

A). Rencana Struktur Ruang

Terdapat 4 (empat) arahan Kebijakan pengembangan struktur ruang daerah meliputi:

- (1). Penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang mampu meningkatkan peran dan fungsi daerah menjadi PKW di Jawa Tengah dan pusat di Wilayah Pengembangan (WP) Purwomangung;
- (2). Pengembangan dan peningkatan akses, serta jangkauan pelayanan kawasan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah daerah yang merata dan berhierarki guna meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah;
- (3). Pengembangan sistem prasarana dan sarana yang terintegrasi dengan sistem regional, provinsi, dan nasional;
- (4). Pengembangan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah daerah sesuai dengan arahan penyediaan yang berdasarkan standar dan ketentuan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah Kota Magelang pada Pasal 15, terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu (1) sistem pusat kegiatan dan (2) sistem jaringan prasarana wilayah daerah. Sistem pusat kegiatan di Kota Magelang terdiri dari tiga macam sistem, yaitu (1) Pusat Pelayanan Kota; (2) Subpusat Pelayanan Kota; dan (3) Pusat Lingkungan. Selanjutnya, sistem perkotaan Kota Magelang dibagi ke dalam 5 (lima) BWP (Bagian Wilayah Perencanaan), dimana Pembagian Wilayah Kota dalam unit-unit lingkungan atau ke dalam kawasan fungsional yang lebih kecil yang selanjutnya disebut sebagai Bagian Wilayah Perencanaan (BWP). Rincian pembagian BWP beserta unit lingkungannya yang ada di Kota Magelang adalah sebagai berikut.

1). BWP I

BWP I mempunyai luas kurang lebih 246 ha (dua ratus empat puluh enam hektare), dengan fungsi utama sebagai kawasan pusat pelayanan sosial dan ekonomi skala kota/regional, kesehatan, rekreasi wisata perkotaan, dan Perumahan. BWP I terdiri dari sebagian Kelurahan Cacaban; sebagian Kelurahan Kemirirejo; sebagian Kelurahan Magelang; sebagian Kelurahan Magersari; Kelurahan Panjang; Kelurahan Rejowinangun Selatan; dan sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara.

2). BWP II

BWP II mempunyai luas kurang lebih 506 ha (lima ratus enam hektare), dengan fungsi utama pusat pelayanan Perumahan, Perdagangan dan jasa, perguruan tinggi, dan pendidikan angkatan darat. BWP II meliputi sebagian Kelurahan Cacaban; sebagian Kelurahan Magelang; Kelurahan Potrobangsari; Kelurahan Wates; dan Kelurahan Gelangan.

3). BWP III

BWP III dengan luas kurang lebih 399 ha (tiga ratus sembilan puluh sembilan hektare), dengan fungsi pusat pelayanan rekreasi kota/wisata alam skala kota/regional, RTH Kebun Raya, pendidikan angkatan darat, dan Perumahan. BWP III terdiri dari sebagian Kelurahan Magersari; sebagian Kelurahan Kemirirejo; Kelurahan Jurangombo Selatan; dan Kelurahan Jurangombo Utara.

4). BWP IV

BWP IV dengan luas kurang lebih 327 ha (tiga ratus dua puluh tujuh hektare), dengan fungsi pusat pelayanan pemerintah, pengembangan Perdagangan dan jasa, simpul pergerakan barang, jasa dan orang, dan Perumahan. BWP IV meliputi sebagian Kelurahan Magersari; Kelurahan Tidar Utara; Kelurahan Tidar Selatan; dan sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara.

5). BWP V

BWP V dengan luas kurang lebih 376 ha (tiga ratus tujuh puluh enam hektare), dengan fungsi pusat pelayanan perguruan tinggi, Perdagangan dan jasa, kesehatan, kawasan pengembangan sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dan Perumahan. BWP V meliputi Kelurahan Kramat Utara; Kelurahan Kramat Selatan; dan Kelurahan Kedungsari.

Berikutnya, rincian mengenai 3 (tiga) hirarki sistem kegiatan yang direncanakan pada struktur ruang Kota Magelang yaitu sebagai berikut.

1). Pusat Pelayanan Kota Magelang

Mempunyai cakupan pelayanan seluruh wilayah Kota Magelang dan Regional yaitu Kawasan PURWOMANGGUNG sebagai *hinterland*. Mempunyai makna sebagai fungsi pelayanan eksternal. Pusat pelayanan Kota ditetapkan di BWP I yaitu Kawasan Alun-Alun Kota Magelang.

2). Subpusat Pelayanan Kota Magelang

Direncanakan mempunyai cakupan pelayanan subwilayah kota atau memberikan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat pada masing-masing bagian wilayah kota (fungsi pelayanan internal) yaitu:

- a. Subpusat Pelayanan Kota BWP I yaitu Kawasan Rejowinangun;
- b. Subpusat Pelayanan Kota BWP II yaitu Kawasan Kebonpolo;
- c. Subpusat Pelayanan Kota BWP III yaitu Taman Kyai Langgeng;
- d. Subpusat Pelayanan Kota BWP IV yaitu Kawasan Sukarno-Hatta;
- e. Subpusat Pelayanan Kota BWP V yaitu Kawasan Armada Estate.

3). Pusat Lingkungan

Pusat Lingkungan memiliki cakupan pelayanan skala lingkungan di Bagian Wilayah Perencanaan (BWP), meliputi:

(1). Pusat Pelayanan Lingkungan di BWP I

- Kawasan Rejowinangun di Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan.

(2). Pusat Pelayanan Lingkungan di BWP II

- Kawasan Karesidenan di Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah;
- Kawasan Tuguran di Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara; dan
- Kawasan Urip Sumoharjo di Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara.

(3). Pusat Pelayanan Lingkungan di BWP III

- Kawasan Taman Parkir di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan; dan
- Kawasan Karet di Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan.

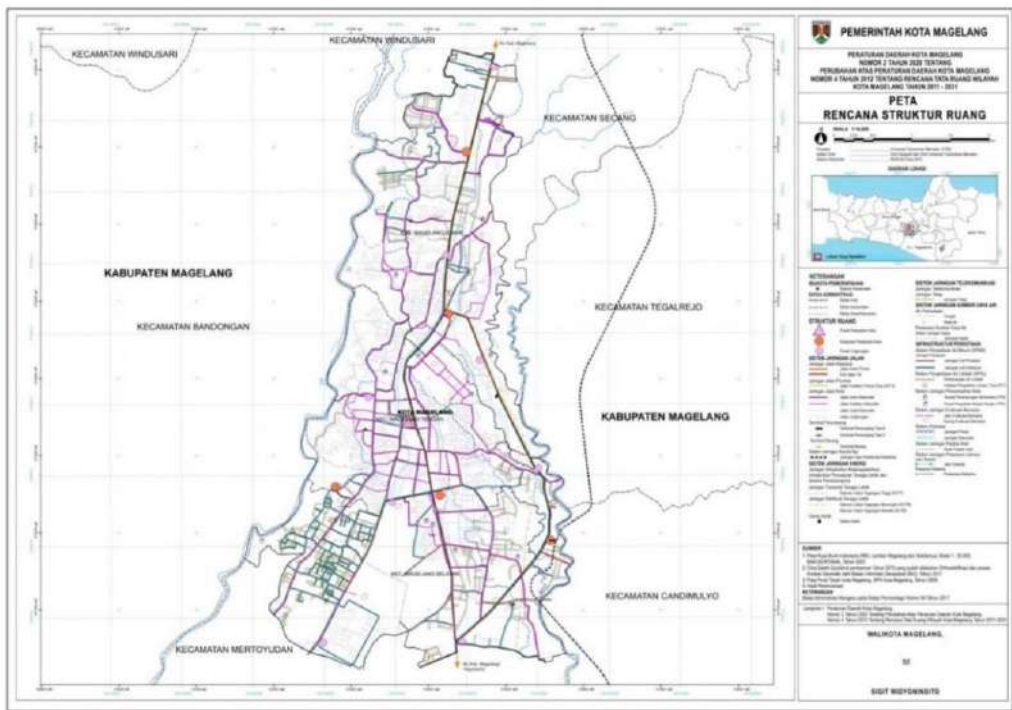
(4). Pusat Pelayanan Lingkungan di BWP IV

- Kawasan Sokka di Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Utara; dan
- Kawasan Cangkuk di Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Utara.

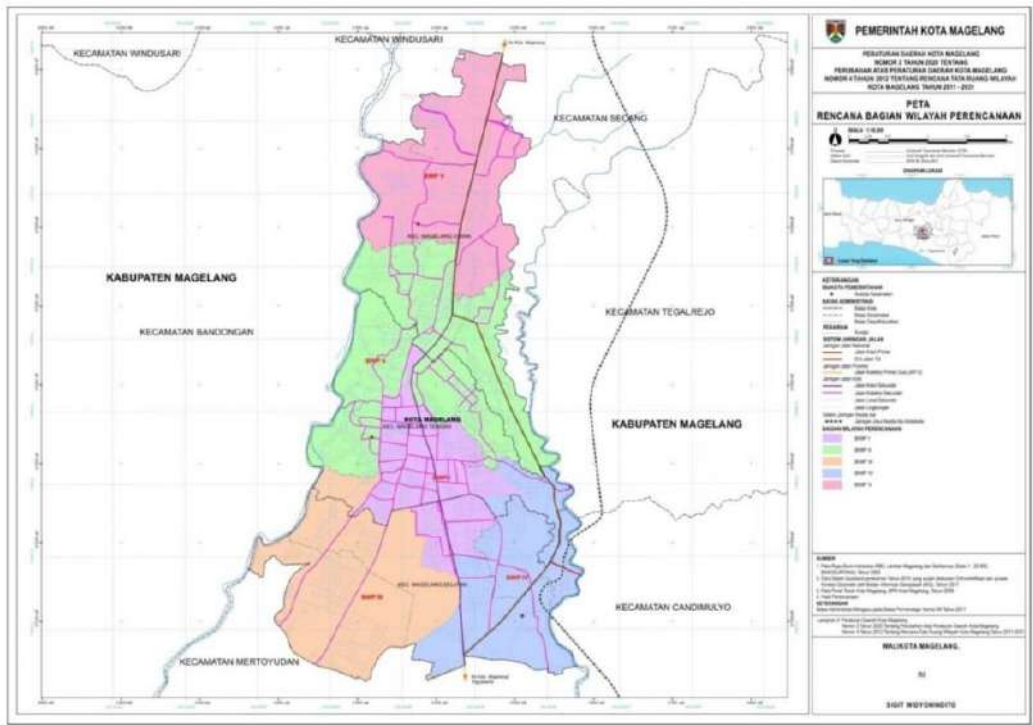
(5). Pusat Pelayanan Lingkungan di BWP V

- Kawasan Menowo di Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara; dan
- Kawasan Sambung di Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara.

Selanjutnya terkait dengan jaringan prasarana wilayah daerah pada rencana struktur ruang RTRW Kota Magelang, didalamnya memuat rencana terkait sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan energi, dan infrastruktur perkotaan.



Gambar 2.6
Peta Rencana Struktur Ruang RTRW Kota Magelang
Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031



Gambar 2.7
Rencana Pembagian BWP RTRW Kota Magelang
Tahun 2011-2031

Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031

B). Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang Kota Magelang melalui Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 diklasifikasikan menjadi dua yaitu rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya. Perincian lebih lanjutnya yaitu sebagai berikut:

1). Kawasan Lindung

Kawasan Lindung terdiri dari 4 (empat) kawasan peruntukan berupa:

a. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat memiliki luas kurang lebih 24 ha (dua puluh empat hektare) meliputi sempadan sungai, sempadan irigasi, dan sempadan jalur kereta api. Kawasan sempadan sungai meliputi sempadan Sungai Elo dan sempadan Sungai Progo. Kawasan sempadan irigasi meliputi sempadan saluran Kali Manggis, sempadan Kali Bening, sempadan Saluran Kota, sempadan Saluran Ngaran, sempadan Saluran Gandekan, dan sempadan Saluran Kedali. Kawasan Sempadan jalur kereta api yang dimaksud yaitu sempadan jaringan KA antarkota jalur Ambarawa-Secang-Magelang-Yogyakarta.

b. Kawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau)

RTH Kota direncanakan mempunyai proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah daerah dengan proporsi yaitu RTH publik dengan total luas paling rendah sebesar kurang lebih 371 ha (tiga ratus tujuh puluh satu hektare) dan RTH privat dengan luas paling rendah sebesar 185 ha (seratus delapan puluh lima hektare). RTH publik yang direncanakan meliputi RTH publik Kebun Raya pada Gunung Tidar, RTH publik Taman, dan RTH publik fungsi tertentu. Sedangkan RTH privat meliputi pekarangan rumah, halaman perkantoran, pertokoan, pendidikan, kesehatan dan tempat usaha, taman atap bangunan, dan taman RT, RW, Kelurahan, serta Kecamatan.

c. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi meliputi (1) kawasan CAT dan (2) Sempadan Mata Air.

- 1) Kawasan CAT, Kawasan CAT meliputi CAT Magelang-Temanggung.
- 2) Sempadan Mata Air, Kawasan sempadan mata air yaitu sempadan mata air Tuk Pecah dengan luas kurang lebih ha 1 (satu hektare).

d. Kawasan Cagar Budaya,

Kawasan cagar budaya menurut Perda Nomor 2 Tahun 2020 yaitu:

- 1) Rumah Sakit Soejono;
- 2) Menara Air Kota Magelang;
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Tidar;
- 4) Kelenteng Liong Hok Bio;
- 5) eks-Karesidenan Kedu;
- 6) Kepolisian Resor Magelang Kota;
- 7) Museum Badan Pemeriksa Keuangan;
- 8) Plengkung;
- 9) Pondok Sriti;
- 10) Wisma Diponegoro;
- 11) Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Magelang;
- 12) Museum Jend. Sudirman;
- 13) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Magelang;
- 14) Pasturan St. Ignatius;
- 15) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata (SMIP) Wiyasa;

- 16) Komando Distrik Militer Magelang;
- 17) Gereja St. Ignatius;
- 18) Gereja Kristen Jawa Magelang;
- 19) Kantor Koordinasi Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Tengah;
- 20) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 21) eks-Kepolisian Wilayah Kedu;
- 22) Bangunan Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Tidar;
- 23) Petilasan Mantyasih; dan
- 24) Cagar Budaya lain yang ditemukan di kemudian hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2). Kawasan Budidaya

Pola ruang untuk kawasan budidaya di Kota Magelang terdiri dari 7 (tujuh) kawasan peruntukan budidaya meliputi:

- a. **Kawasan Permukiman**, yang dirinci kedalam 9 (sembilan) rumpun kawasan peruntukan permukiman meliputi:

1) Kawasan Perumahan;

Kawasan perumahan meliputi perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan sedang, dan perumahan kepadatan rendah dengan luas kurang lebih 881 ha (delapan ratus delapan puluh satu hektare):

2) Kawasan Perdagangan dan Jasa;

Kawasan perdagangan dan jasa memiliki luas kurang lebih 264 ha (dua ratus enam puluh empat hektare).

3) Kawasan Perkantoran;

Kawasan perkantoran meliputi kawasan perkantoran pemerintahan dengan luas kurang lebih 42 ha (empat puluh dua hektar).

4) Kawasan Sektor Informal;

Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal atau kawasan khusus bagi Pedagang Kaki Lima, yaitu:

- a) Lokasi Binaan Armada *Real Estate*;
- b) Lokasi Binaan Kauman Barat;
- c) Lokasi Binaan Lembah Tidar;
- d) Lokasi Binaan Sigaluh;
- e) Lokasi Binaan Sejuta Bunga;
- f) Lokasi Binaan Kalingga;
- g) Lokasi Binaan Sriwijaya;

- h) Lokasi Binaan Rejomulyo;
- i) Lokasi Binaan Jenggolo;
- j) Lokasi Binaan Pajajaran;
- k) Lokasi Binaan Daha;
- l) Lokasi Binaan Puri Boga Kencana;
- m) Lokasi Binaan Jendralan;
- n) Lokasi Binaan Alibasah Sentot;
- o) Lokasi Binaan Tuin Van Java;
- p) Lokasi Binaan Badaan ;
- q) Lokasi Binaan Kapten S Parman;
- r) Lokasi Binaan Kartika Sari;
- s) Lokasi Binaan lain yang akan ditetapkan lebih lanjut.

5) Kawasan Pendidikan, dengan luas kurang lebih 68 ha (enam puluh delapan hektare);

6) Kawasan Transportasi, dengan luas kurang lebih 4 ha (empat hektare);

7) Kawasan Kesehatan, dengan luas kurang lebih 51 ha (lima puluh satu hektare);

8) Kawasan Peribadatan, dengan luas kurang lebih 9 ha (sembilan hektare); dan

9) Kawasan Olahraga, meliputi Kawasan Gelanggang Olahraga Samapta, Kawasan Abu Bakrin, lapangan olahraga, dan sarana olahraga lainnya dengan luas kurang lebih 61 ha (enam puluh satu hektare).

b. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi (1) sentra industri kecil dan menengah, dan (2) perusahaan industri. Sentra industri kecil dan menengah dikembangkan pada seluruh wilayah Kota Magelang dan perusahaan industr dikembangkan untuk perusahaan industri kecil dan menengah pada seluruh wilayah Kota Magelang.

c. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata terdiri dari Taman Kyai Langgeng dan lokasi lain yang ditetapkan lebih lanjut dengan luas kurang lebih 17 ha (tujuh belas hektare).

d. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi kawasan tanaman pangan yang ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang memiliki luas kurang lebih 63 ha (enam puluh tiga hektare).

e. Kawasan Perikanan

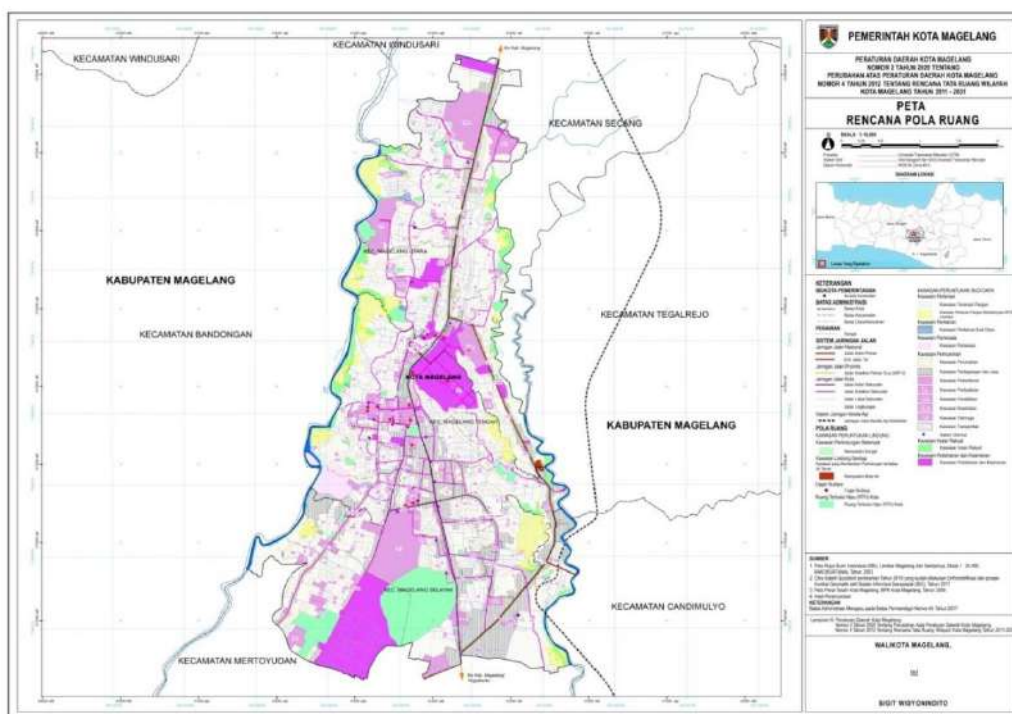
Kawasan perikanan meliputi perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 3 ha (tiga hektare).

f. Kawasan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat memiliki luas kurang lebih 35 ha (tiga puluh lima hektare).

g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

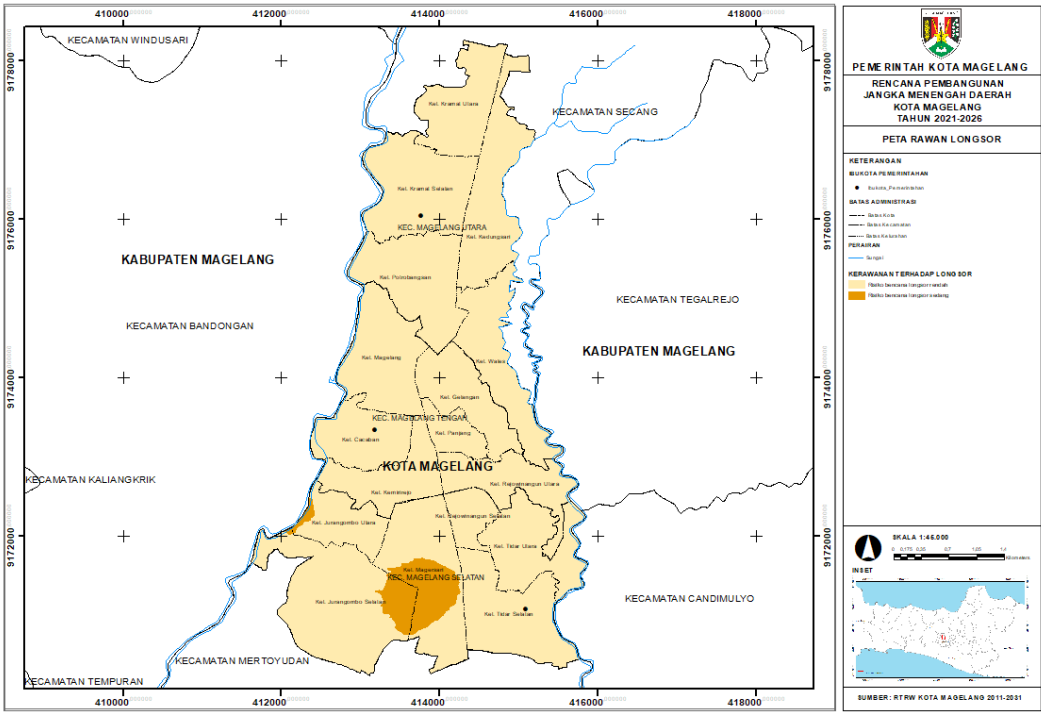
Kawasan pertahanan dan keamanan memiliki luas kurang lebih 147 ha (seratus empat puluh tujuh hektare) yang terdiri dari Resimen Induk Militer (Rindam) IV Diponegoro, Akademi Militer (Akmil), Sekolah Calon Bintara (Secaba) Rindam IV Diponegoro, Komando Rayon Militer (Koramil) Magelang Utara dan Magelang Selatan, Batalyon Artileri Medan-3, Batalyon Artileri Medan-11, Lapas Kelas IIA, dan Rumah Dinas Susun Kodam IV Diponegoro.



Gambar 2.8
Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kota Magelang
Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031

2.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Kota Magelang merupakan kota dengan kondisi klimatologi, geologi, dan topografi yang beresiko terjadi bencana berupa tanah longsor. Kondisi tersebut disebabkan karena sebagian wilayah Kota Magelang berada dalam tingkat kemiringan lereng yang curam dan termasuk dalam DAS Elo dan Progo. Wilayah yang perlu diwaspadai yaitu Wilayah Barat Kota Magelang dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Progo meliputi Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Magelang Utara, Kelurahan Potrobangsari, Kelurahan Magelang, Kelurahan Cacaban; serta Wilayah Timur Kota Magelang dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Elo meliputi Kelurahan Kedungsari, Rejowinangun Utara dan Kelurahan Wates.

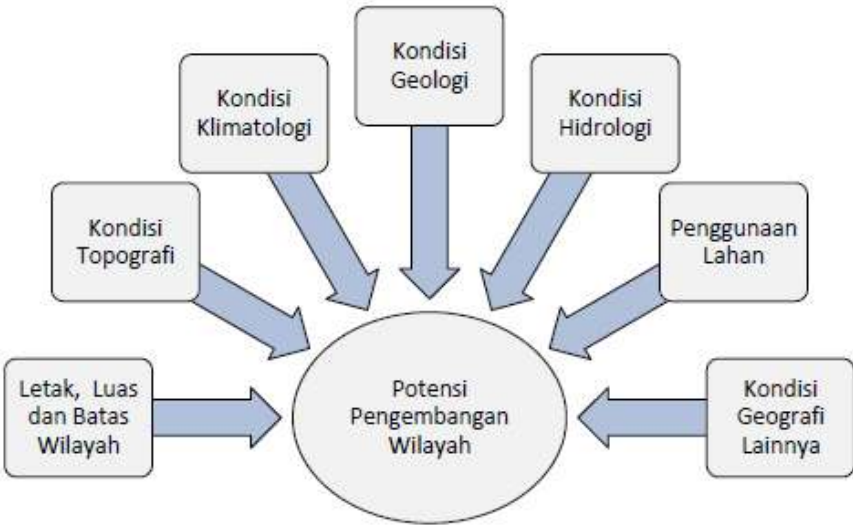


Gambar 2.9
Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kota Magelang
Sumber : RTRW Kota Magelang 2011-2031

Disamping potensi bencana tanah longsor, hal yang perlu diwaspadai adanya resiko bencana banjir genangan perkotaan sebagai akibat limpasan drainase yang tidak mampu menampung volume air hujan atau karena tersumbatnya saluran drainase. Alih fungsi lahan yang tinggi di Kota Magelang menjadi lahan terbangun menyebabkan berkurangnya resapan air ke dalam tanah. Selain itu, banjir kiriman di wilayah tepi Sungai Progo dan Elo perlu diwaspadai, terutama untuk wilayah yang ada disekitarnya,

1 (satu) kali dan pohon tumbang 2 (dua) kali. Bencana yang terjadi di Kota Magelang sangat rentan mengingat beberapa wilayah di Kota Magelang merupakan wilayah padat penduduk sehingga ke depan membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Magelang agar terminimalisir kejadian, korban jiwa dan kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Meskipun skala kerusakan tidak masuk dalam kategori bencana nasional akan tetapi berdampak pada kerugian material dan nonmaterial.

Potensi Pengembangan Wilayah dapat dilihat melalui kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.11
Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2.1.9. Aspek Demografi

Penduduk merupakan potensi sumber daya manusia yang mampu menghasilkan barang dan jasa. Namun demikian penduduk juga merupakan konsumen barang/jasa untuk menunjang kehidupannya. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tidak terkendali dan persebaran yang tidak seimbang, ditambah dengan daya dukung alam dan lingkungan yang terbatas, akan menimbulkan masalah dan beban bagi suatu wilayah. Kuantitas dan kualitas sumber daya alam akan mengalami penurunan yang cepat jika angka pertumbuhan penduduk terus meningkat tanpa kendali. Oleh karenanya pengendalian pertumbuhan penduduk menjadi penting dalam perencanaan pembangunan. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu fertilitas (tingkat kelahiran), mortalitas (tingkat kematian) dan migrasi (perpindahan).

Jumlah penduduk Kota Magelang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berfluktuasi. Di tahun 2020 kepadatan penduduk di Kota Magelang

sebesar 6.905 jiwa/km². Secara spasial kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Magelang Tengah, sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Magelang Selatan. Indikator ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi karakter wilayah dan strategi pembangunan di masing-masing wilayah kecamatan.

Tabel 2.5
Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kota Magelang
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk (jiwa)	132.662	130.857	130.007	130.284	128.020
Kepadatan Penduduk (jiwa / km ²)	7.321	7.062	7.012	7.027	6.905

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2021

Pada skala yang lebih kecil yaitu kelurahan, kepadatan penduduk yang tinggi di tahun 2020 terdapat di Kelurahan Rejowinangun Selatan (22.408 jiwa/km²), Kelurahan Panjang (18.013 jiwa/km²) dan Kelurahan Rejowinangun Utara (13.331 jiwa/km²). Kepadatan penduduk yang relatif tinggi ini merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan khususnya dalam penataan ruang dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

Tabel 2.6
Kepadatan Penduduk per Kelurahan di Kota Magelang
Tahun 2016-2020 (Jiwa/Km²)

Kecamatan / Kelurahan	2016	2017	2018	2019	2020
Magelang Selatan	6.339	5.913	6.030	6.046	5.922
Rejowinangun Selatan	20.635	1.982	22.954	22.991	22.408
Magersari	7.462	4.859	5.576	5.545	5.490
Jurangombo Utara	3.185	7.391	6.444	6.491	6.360
Jurangombo Selatan	8.847	3.217	3.429	3.432	3.393
Tidar Utara	4.596	8.796	7.667	7.776	7.486
Tidar Selatan	6.420	4.609	4.430	4.436	4.370
Magelang Utara	6.340	6.201	5.999	6.029	5.982
Wates	7.899	7.628	7.548	7.642	7.569
Potrobangsari	6.836	6.631	6.315	6.360	6.309
Kedungsari	5.718	5.644	5.589	5.605	5.596
Kramat Utara	5.774	5.631	4.856	4.825	4.774
Kramat Selatan	5.592	5.518	5.597	5.634	5.582
Magelang Tengah	9.827	9.733	9.625	9.620	9.407
Kemirirejo	12.690	6.696	6.824	6.710	6.509
Cacaban	7.025	9.808	9.499	9.610	9.341
Rejowinangun Utara	9.896	12.663	13.390	13.388	13.331
Magelang	6.394	6.414	6.441	6.489	6.299

Kecamatan / Kelurahan	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang	19.526	19.374	18.711	18.461	18.013
Gelangan	10.290	10.333	9.364	9.288	9.188
Total	7.321	7.062	7.012	7.027	6.905

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2021

Selain itu, pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun cenderung rendah. Pada akhir tahun 2020, tingkat pertumbuhan penduduk mengalami minus atau penurunan karena adanya pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diantaranya penghapusan data kependudukan ganda / sudah tercatat di daerah lain. Tingkat pertumbuhan penduduk Kota Magelang selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Statistik Kependudukan Kota Magelang, 2016-2020

Tahun	Penduduk (jiwa)			Kelahiran (jiwa)	Kematian (jiwa)	Imigrasi (jiwa)	Emigrasi (jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah					
2016	65.375	67.287	132.662	2.854	564	2.291	2.382	0,30
2017	64.419	66.438	130.857	2.852	533	2.221	3.110	-1,36
2018	63.950	66.057	130.007	1.306	1.284	2.503	2.234	-0,65
2019	64.101	66.183	130.284	1.406	1.403	2.632	2.304	0,21
2020	63.052	64.968	128.020	1.339	1.248	2.240	2.044	-1,73

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2021

Sedangkan perkembangan penduduk serta laju pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin selama lima tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Tingkat Pertumbuhan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Magelang Tahun 2016-2020

Tahun	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah Total (jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
2016	65.375	67.287	132.662	0.30
2017	64.419	66.438	130.857	-1.36
2018	63.950	66.057	130.007	-0.65
2019	64.101	66.183	130.284	0.21
2020	63.052	64.968	128.020	-1.73

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2021

Mencermati aspek demografi Kota Magelang bila dilihat dari kelompok umur, maka Kota Magelang saat ini sudah mengalami bonus demografi. Hal tersebut ditunjukkan dari tingginya angka jumlah penduduk pada usia

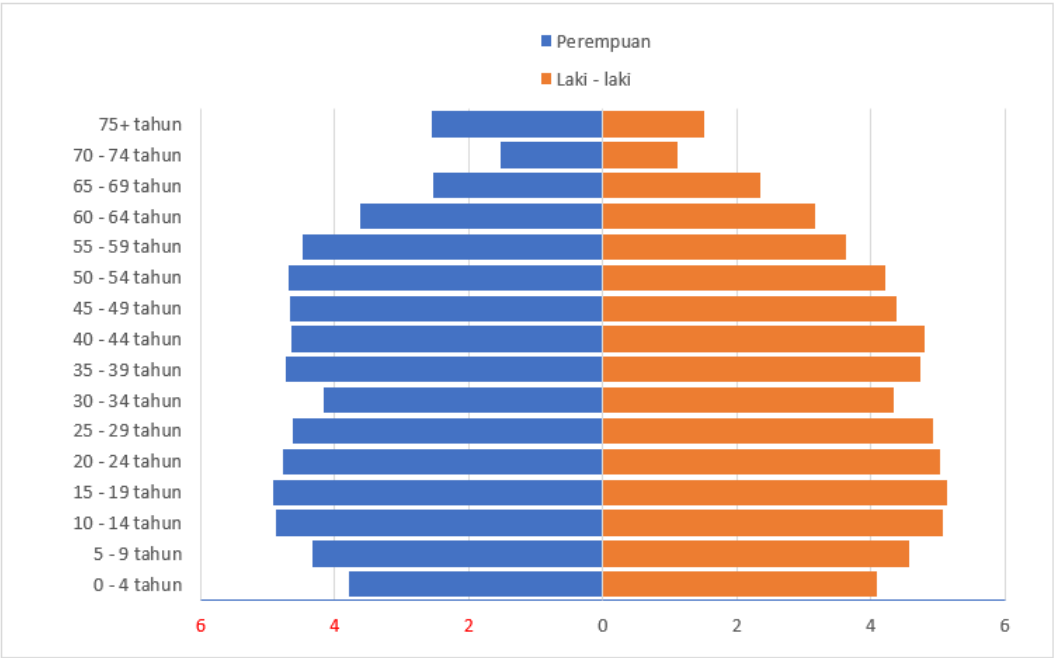
produktif (15-64 tahun) di tahun 2020 sebanyak 89.696 jiwa (70,06% dari total penduduk). Bonus demografi akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan apabila dikelola dengan baik, namun sebaliknya akan menimbulkan banyak masalah terutama masalah sosial bila Pemerintah kurang mampu mengelola dan memanfaatkan peluang potensi tersebut.

Tabel 2.9
Banyak Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kota Magelang Tahun 2016-2020

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk				
	2016	2017	2018	2019	2020
0 - 4	7.893	7.797	7.836	7.915	7.869
5 - 9	9.395	9.296	9.253	9.073	8.901
10 - 14	10.062	10.016	9.920	9.968	9.950
15 - 19	10.305	10.121	10.204	10.369	10.063
20 - 24	10.333	10.167	10.059	9.892	9.808
25 - 29	9.388	9.447	9.448	9.633	9.552
30 - 34	9.866	9.128	8.853	8.606	8.507
35 - 39	10.521	10.394	10.214	9.955	9.469
40 - 44	10.052	9.581	9.544	9.624	9.444
45 - 49	10.251	10.092	9.824	9.412	9.047
50 - 54	9.377	9.134	9.168	9.258	8.889
55 - 59	8.133	8.217	8.264	8.227	8.112
60 - 64	6.302	6.494	6.523	6.801	6.805
65 - 69	3.758	4.112	4.236	4.722	4.892
70 - 74	2.911	2.537	2.512	2.647	2.646
75+	4.115	4.324	4.172	4.182	4.066

Sumber: DataGo, Modul DDA, Dispendukcapil Kota Magelang, 2021

Berdasarkan piramida komposisi penduduk, Kota Magelang masuk dalam kategori Penduduk Tua (*Constructive*) dengan angka kelahiran dan kematian rendah, dengan pertumbuhan penduduk yang cukup rendah (< 1%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 2.12
Piramida Penduduk Kota Magelang Tahun 2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2021

Berdasarkan struktur demografi menurut tingkat pendidikan, penduduk Kota Magelang didominasi lulusan SMA dengan porsi yang cukup besar (43,85%). Porsi selanjutnya adalah tamatan SD dan SMP yang masing-masing memiliki porsi 17,62% dan 15,96%. Di sisi lain, penduduk yang tidak/belum tamat SD menunjukkan angka yang relatif kecil, yaitu sebesar 1,71%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kota Magelang sudah cukup baik.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Kota Magelang Usia Di Atas 25 Tahun Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2016-2020

Kelompok Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
Tidak/ Belum Tamat SD	1.871	1.794	1.662	1.559	1.393
Tamat SD	16.886	16.270	15.637	15.223	14.353
SLTP	13.937	13.633	13.418	13.371	13.003
SLTA	35.526	35.334	35.488	35.919	35.713
D1, D2	429	428	427	421	427
D3, D4	4.013	3.956	3.950	4.029	4.020
S1, S2, S3	12.162	12.045	12.188	12.545	12.520
Jumlah	84.824	83.460	82.770	83.067	81.429

Sumber: Dispendukcapil Kota Magelang, 2021

Mata pencaharian penduduk Kota Magelang cukup beragam. Seperti halnya fenomena yang banyak terjadi di daerah perkotaan, jumlah penduduk bermata pencaharian sebagai petani relatif kecil. Penduduk Kota Magelang sebagian besar bergerak di bidang perdagangan dan usaha. Mata pencaharian terbesar ada di beberapa sektor seperti sektor industri, perdagangan dan perkantoran. Pada tahun 2020, porsi mata pencaharian penduduk Kota Magelang usia di atas 15 tahun yang dominan adalah sebagai buruh industri (25.58%) dan pengusaha (11.68%). Sedangkan mata pencaharian paling kecil adalah sebagai petani (0,14%) dan buruh tani (0,06%)

Tabel 2.11
Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian di Kota Magelang Tahun 2016-2020

Mata Pencaharian	2016	2017	2018		2019		2020	
			L	P	L	P	L	P
Pertanian	195	179	124	63	118	58	106	50
Buruh Tani	73	69	39	25	40	25	44	22
Pengusaha	12.275	11.980	7.700	4.122	7.766	4.107	7.589	4.006
Buruh Industri	25.541	25.482	16.237	9.368	16.434	9.506	16.070	9.322
Buruh Bangunan	9.226	9.088	6.540	2.507	6.515	2.409	6.379	2.268
Pedagang	2.136	2.087	1.268	1.518	1.238	1.480	1.180	1.413
Angkutan	252	242	262	-	259	-	255	-
PNS/TNI/Polri	5.696	5.417	3.504	1.720	3.440	1.714	3.334	1.692
Guru/ Dosen	1.473	1.428	431	992	420	979	397	955
Pensiunan	3.570	3.465	2.051	1.328	2.018	1.301	1.956	1.257
Lainnya	40.388	44.311	11.983	31.271	12.092	31.409	11.019	29.951
JUMLAH	100.825	103.748	50.139	52.914	50.340	52.988	48.329	50.936

Sumber: DATAGO, Modul DDA, Dispendukcapil Kota Magelang, 2021

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Terjadinya pandemi sepanjang tahun 2020 cukup melemahkan pertumbuhan ekonomi Kota Magelang. Secara riil PDRB Kota Magelang di tahun 2020 mencapai 6,314 Triliun Rupiah dengan pertumbuhan -2,45%. Hampir seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Magelang mengalami perlambatan di tahun 2020. Lapangan usaha yang paling terdampak adalah Transportasi dan Pergudangan (-27,68%). Lapangan usaha yang masih mampu tumbuh positif di tahun 2020 diantaranya adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,37%), Pengadaan Listrik dan Gas (1,8%), Informasi dan Komunikasi (17,32%), Jasa Keuangan dan Asuransi (1,2%) dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8,63%).

Tabel 2.12
Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, Jawa Tengah dan Indonesia Tahun 2016-2020

Pertumbuhan Ekonomi (%)	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Magelang	5,23	5,42	5,46	5,44	-2,45
Jawa Tengah	5,28	5,27	5,32	5,40	-2,65
Indonesia	5,02	5,07	5,17	5,02	-2,07

Sumber: BPS, 2021

Perolehan PDRB Kota Magelang secara nominal mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sejak tahun 2016 dengan total nilai tambah bruto di tahun 2019 sebesar 8,81 triliun Rupiah (atas dasar harga berlaku). Pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB riil Kota Magelang melambat sebesar 1% dengan perolehan sebesar 8,72 triliun Rupiah.

Jika dibandingkan dengan enam kota di Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Kota Magelang pada tahun 2020 terkontraksi paling dalam. Demikian juga dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kawasan Purwomangung.

Tabel 2.13
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang dengan Beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (%) Tahun 2016-2020

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Magelang	5.23	5.42	5.46	5.44	-2,45
Kota Surakarta	5.35	5.70	5.75	5.78	-1,74
Kota Salatiga	5.17	5.27	5.58	5.84	-1,68
Kota Semarang	5.89	6.70	6.52	6.86	-1,61
Kota Pekalongan	5.36	5.32	5.69	5.50	-1,87
Kota Tegal	5.49	5.95	5.87	5.77	-2,25
Kab. Purworejo	5.15	5.27	5.38	5.45	-1,66
Kab. Magelang	5.39	5.50	5.28	5.30	-1,68
Kab. Wonosobo	5.36	4.14	5.06	5.61	-1,66
Kab. Temanggung	5.02	5.03	5.13	5.05	-2,13

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Tabel 2.14
Pertumbuhan Lapangan Usaha Pembentuk PDRB Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (%), Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019*		2020**	
	adhb	adhk	adhb	adhk	adhb	adhk	adhb	adhk	adhb	adhk
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,87	1,87	3,82	2,00	4,37	0,86	7,84	5,17	2,21	0,37
Industri Pengolahan	8,85	4,35	7,49	4,36	6,22	3,48	6,01	4,53	2,23	-0,21
Pengadaan Listrik dan Gas	6,86	2,23	13,01	4,20	9,58	6,35	5,90	5,82	1,23	1,80

Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019*		2020**	
	adhb	adhk	adhb	adhk	adhb	adhk	adhb	adhk	adhb	adhk
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,61	2,25	5,49	4,58	5,10	4,14	5,88	4,03	5,83	-0,47
Konstruksi	6,27	4,30	7,94	4,93	9,66	5,10	7,46	4,24	-1,00	-1,70
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,83	3,28	7,86	5,32	8,66	5,86	8,16	5,54	-2,36	-3,50
Transportasi dan Pergudangan	5,37	4,82	7,39	5,85	7,36	6,51	10,24	8,32	-25,16	-27,68
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,68	6,15	7,29	6,18	7,85	6,90	9,96	8,66	-8,94	-9,52
Informasi dan Komunikasi	8,24	7,89	16,31	11,35	10,72	10,57	8,32	7,17	17,49	17,32
Jasa Keuangan dan Asuransi	11,85	8,83	9,13	4,67	7,08	3,55	5,38	3,79	1,52	1,20
Real Estate	7,19	5,90	7,38	4,71	8,38	5,46	5,27	3,42	0,13	-0,46
Jasa Perusahaan	13,32	8,82	11,44	7,84	11,03	8,16	11,85	8,68	-4,31	-6,26
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,04	5,68	5,65	2,28	4,54	3,37	4,79	3,42	-0,10	-1,58
Jasa Pendidikan	10,68	7,38	11,44	7,10	8,92	6,11	8,78	6,03	2,35	-0,20
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,74	7,90	10,41	8,72	9,20	7,82	8,36	6,36	11,65	8,63
Jasa lainnya	10,34	6,20	11,24	9,26	10,36	9,30	9,51	8,84	-5,84	-7,03
PDRB	8,38	5,23	8,29	5,42	7,83	5,46	7,42	5,44	-1,00	-2,45

Sumber: BPS Kota Magelang, 2021

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Beberapa lapangan usaha pembentuk PDRB mengalami perlambatan pada tahun 2020. Perlambatan tertinggi terjadi pada sektor lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (-25,16%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-8,94%) serta lapangan usaha Jasa Lainnya (-5,84%). Sementara itu beberapa lapangan usaha tetap mampu tumbuh positif dengan pertumbuhan tercepat pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (17,49%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (11,65%) serta lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (5,83%). Rincian nilai tambah tiap sektor lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Magelang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.13.

Tabel 2.15
Nilai Tambah Bruto (Juta Rp) dan Pertumbuhan (%) Lapangan Usaha Pembentuk
PDRB Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2016-
2020

Lapangan Usaha	2016		2017		2018*		2019*		2020**	
	NTB	Growth	NTB	Growth	NTB	Growth	NTB	Growth	NTB	Growth
ATAS DASAR HARGA BERLAKU										
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	136.091,13	2,87	141.283,19	3,82	147.452,86	4,37	159.013,91	7,84	162.529,51	2,21
Industri Pengolahan	1.136.281,28	8,85	1.221.422,28	7,49	1.297.390,66	6,22	1.375.400,40	6,01	1.405.963,90	2,23
Pengadaan Listrik dan Gas	19.611,13	6,86	22.162,03	13,01	24.285,82	9,58	25.718,22	5,90	26.034,51	1,23
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.979,24	5,61	9.471,97	5,49	9.955,30	5,10	10.540,22	5,88	11.154,74	5,83
Konstruksi	1.163.178,22	6,27	1.255.477,36	7,94	1.376.757,80	9,66	1.479.438,44	7,46	1.464.629,57	-1,00
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1.007.688,44	6,83	1.086.883,10	7,86	1.181.001,47	8,66	1.277.405,90	8,16	1.247.270,32	-2,36
Transportasi dan Pergudangan	474.054,33	5,37	509.095,42	7,39	546.587,52	7,36	602.543,24	10,24	450.947,90	-25,16
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	419.989,77	10,68	450.610,03	7,29	485.960,85	7,85	534.347,17	9,96	486.566,12	-8,94
Informasi dan Komunikasi	334.582,07	8,24	389.137,14	16,31	430.855,09	10,72	466.689,25	8,32	548.303,87	17,49
Jasa Keuangan dan Asuransi	361.804,95	11,85	394.842,20	9,13	422.778,43	7,08	445.533,46	5,38	452.307,91	1,52
Real Estate	225.252,98	7,19	241.877,59	7,38	262.141,55	8,38	275.953,66	5,27	276.302,74	0,13
Jasa Perusahaan	24.810,72	13,32	27.648,28	11,44	30.698,00	11,03	34.337,00	11,85	32.856,05	-4,31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	845.340,29	11,04	893.111,67	5,65	933.680,85	4,54	978.446,27	4,79	977.448,25	-0,10
Jasa Pendidikan	529.908,56	10,68	590.546,02	11,44	643.227,01	8,92	699.729,49	8,78	716.138,15	2,35
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	195.766,24	9,74	216.139,28	10,41	236.020,79	9,20	255.758,90	8,36	285.567,23	11,65
Jasa lainnya	140.560,73	10,34	156.362,97	11,24	172.566,23	10,36	188.984,40	9,51	177.947,71	-5,84

Lapangan Usaha	2016		2017		2018*		2019*		2020**	
	NTB	Growth	NTB	Growth	NTB	Growth	NTB	Growth	NTB	Growth
PDRB	7.023.900,08	8,38	7.606.070,53	8,29	8.201.360,23	7,83	8.809.839,93	7,42	8.721.968,47	-1,00
ATAS DASAR HARGA KONSTAN										
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	106.735,73	1,87	108.869,60	2,00	109.809,02	0,86	115.481,55	5,17	115.906,67	0,37
Industri Pengolahan	828.143,74	4,35	864.272,22	4,36	894.350,14	3,48	934.870,61	4,53	932.910,91	-0,21
Pengadaan Listrik dan Gas	19.086,34	2,23	19.887,10	4,20	21.149,94	6,35	22.379,92	5,82	22.782,58	1,80
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.868,22	2,25	8.228,40	4,58	8.569,30	4,14	8.914,87	4,03	8.872,97	-0,47
Konstruksi	907.490,87	4,30	952.201,56	4,93	1.000.726,27	5,10	1.043.119,08	4,24	1.025.386,06	-1,70
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	844.737,97	3,28	889.686,20	5,32	941.850,09	5,86	994.030,89	5,54	959.216,92	-3,50
Transportasi dan Pergudangan	418.762,00	4,82	443.250,98	5,85	472.092,23	6,51	511.366,87	8,32	369.819,56	-27,68
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	318.041,12	6,15	337.687,35	6,18	360.973,97	6,90	392.225,82	8,66	354.869,81	-9,52
Informasi dan Komunikasi	347.340,64	7,89	386.751,83	11,35	427.612,45	10,57	458.256,15	7,17	537.630,70	17,32
Jasa Keuangan dan Asuransi	272.244,60	8,83	284.960,96	4,67	295.081,77	3,55	306.268,29	3,79	309.950,90	1,20
Real Estate	196.818,98	5,90	206.097,24	4,71	217.344,58	5,46	224.784,90	3,42	223.750,89	-0,46
Jasa Perusahaan	19.446,70	8,82	20.970,50	7,84	22.681,34	8,16	24.650,84	8,68	23.108,93	-6,26
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	615.023,35	5,68	629.054,75	2,28	650.260,50	3,37	672.482,41	3,42	661.857,19	-1,58
Jasa Pendidikan	360.681,63	7,38	386.306,42	7,10	409.900,30	6,11	434.616,25	6,03	433.747,02	-0,20
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	144.790,58	7,90	157.412,71	8,72	169.715,19	7,82	180.514,13	6,36	196.096,83	8,63
Jasa lainnya	114.313,07	6,20	124.894,17	9,26	136.505,66	9,30	148.576,93	8,84	138.139,40	-7,03
PDRB	5.521.525,54	5,23	5.820.532,00	5,42	6.138.622,75	5,46	6.472.539,51	5,44	6.314.047,34	-2,45

Sumber: BPS Kota Magelang, 2021

* Angka sementara ** Angka sangat sementara

Perlambatan ekonomi Kota Magelang tercatat lebih dalam dibandingkan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2020 (-2,07%), namun masih lebih baik dibandingkan Jawa Tengah (-2,65%). Sementara itu jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah, kontraksi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang termasuk cukup dalam. Diantara enam kota di Jawa Tengah dan daerah di Kawasan Purwomanggung pertumbuhan ekonomi Kota Magelang pada tahun 2020 tumbuh paling lambat sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2.13. Kondisi ini terkait dengan fungsi Kota Magelang sebagai kota jasa bagi wilayah di sekitarnya, sehingga ketika aktivitas sektor jasa mengalami perlambatan maka pertumbuhan ekonomi akan terpengaruh.

Tabel 2.16
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang
dengan Beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (%),
Tahun 2016-2020

Wilayah	2016	2017	2018	2019*	2020**
Kota Magelang	5.23	5.42	5.46	5.44	-2,45
Kota Surakarta	5.35	5.70	5.75	5.78	-1,74
Kota Salatiga	5.17	5.27	5.58	5.84	-1,68
Kota Semarang	5.89	6.70	6.52	6.86	-1,61
Kota Pekalongan	5.36	5.32	5.69	5.50	-1,87
Kota Tegal	5.49	5.95	5.87	5.77	-2,25
Purworejo	5.15	5.27	5.38	5.45	-1,66
Kabupaten Magelang	5.39	5.50	5.28	5.30	-1,68
Wonosobo	5.36	4.14	5.06	5.61	-1,66
Temanggung	5.02	5.03	5.13	5.05	-2,13

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021
 * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

2.2.2. PDRB Perkapita

Indikator kesejahteraan masyarakat yang terukur dari PDRB per kapita di Kota Magelang mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 dengan proyeksi penduduk sebesar 122.111 jiwa, besarnya PDRB per kapita tercatat sebesar 6,012 juta Rupiah/bulan atau 72,126 juta Rupiah/tahun (atas dasar harga berlaku). Nilai ini melambat -1,21% di tahun 2020 seiring dengan kontraksi perolehan PDRB. Pada tahun 2020 dengan proyeksi penduduk sebesar 122.375 jiwa, PDRB per Kapita Kota Magelang mencapai 71,27 juta Rupiah/tahun (atas dasar harga berlaku) atau rata-rata 5,939 juta Rupiah/bulan. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan PDRB per Kapita Nasional (56,9 juta Rupiah/tahun) dan Jawa Tengah (38,6 juta Rupiah/tahun). Optimalisasi indikator ini dapat dilakukan antara lain melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan produktivitas ekonomi di sektor-sektor potensial.

Tabel 2.17
PDRB per Kapita (Ribuan Rupiah/tahun) dan Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Magelang Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB per Kapita adhb (Ribuan Rp/tahun)	57.995,08	62.614,80	67.294,87	72.146,16*	71.272,47**
PDRB per Kapita adhk (Ribuan Rp/tahun)	45.590,24	47.915,87	50.369,43	53.005,38*	51.595,89**
Proyeksi Penduduk	121.112,00	121.474,00	121.872,00	122.111,00	122.375,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021; BPS Kota Magelang, 2020 (Diolah)
 * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

2.2.3. Inflasi

Perkembangan harga komoditas Kota Magelang sepanjang tahun 2016-2019 terkendali dengan baik. Inflasi akhir tahun dicapai pada angka yang rendah.

Tabel 2.18
Inflasi Year on Year Kota Magelang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Inflasi (%)	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Magelang	2,25	3,90	2,65	2,19	1,84%-3,84%*
Jawa Tengah	2,36	3,71	2,82	2,81	1,56
Nasional	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

Sumber: BPS, 2021
 * Prediksi oleh Diskominsta Kota Magelang, 2020

Tabel 2.19
Perbandingan Inflasi Kota Magelang dengan Beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (%), Tahun 2016-2020

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Magelang	2,25	3,90	2,65	2,19	1,84%-3,84%*
Kota Surakarta	2,15	3,10	2,45	2,94	1,38
Kota Salatiga	2,19	3,50	2,47	2,81	na
Kota Semarang	2,32	3,64	2,76	2,93	1,49
Kota Pekalongan	2,94	3,61	2,92	2,76	na
Kota Tegal	2,71	4,03	3,08	2,66	2,36
Purworejo	2,66	4,29	3,10	2,47	na
Kabupaten Magelang	2,86	3,47	2,66	2,12	na
Wonosobo	2,97	3,21	3,52	na	na
Temanggung	2,42	3,12	2,89	2,66	na

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021
 * Prediksi oleh Diskominsta Kota Magelang, 2020

Di tahun 2019 Pemerintah Kota Magelang menginisiasi inovasi pemantauan harga komoditas pokok di tiga pasar besar yaitu pasar Rejowinangun, pasar Kebon Polo dan pasar Gotong Royong melalui aplikasi IndiGO yang terintegrasi dengan portal data terbuka. Dengan inovasi ini Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mampu memantau harga komoditas harian secara *realtime* dan mendapatkan notifikasi jika terdapat lonjakan harga komoditas tertentu. IndiGO berkontribusi dalam menyediakan data terkini dan sebagai *early warning system* bagi TPID sehingga perumusan kebijakan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat berdasar data yang akurat.

Pada tahun 2020 perhitungan inflasi hanya dilakukan di Kabupaten/Kota penyelenggara Survei Biaya Hidup (SBH). Di Jawa Tengah hanya terdapat enam wilayah penyelenggara SBH yaitu Kota Cilacap, Kota Tegal, Kota Purwokerto, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kabupaten Kudus. Sehubungan dengan hal tersebut dan terkait dengan adanya perubahan tahun dasar perhitungan inflasi (2018=100), maka sejak Januari 2020 angka inflasi Kota Magelang tidak dapat disediakan resmi oleh BPS.

Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang menginisiasi pelaksanaan kegiatan penelitian ilmiah untuk perhitungan proyeksi inflasi di tahun 2020 bermitra dengan Universitas Gadjah Mada. Output penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran laju inflasi tahun 2020 sehingga dapat menjadi rujukan dalam perumusan rekomendasi kebijakan pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2020 diprediksi tidak ada gejolak harga yang berarti di Kota Magelang meski di tengah pandemi. Perkembangan harga relatif stabil dengan proyeksi inflasi pada rentang 1,84%-3,84%. Kondisi ini sesuai dengan pola pergerakan harga di Jawa Tengah dan Nasional yang menunjukkan masih rendahnya tingkat daya beli sebagai akibat pandemi, dengan capaian inflasi masing-masing sebesar 1,56% dan 1,68%.

2.2.4. Pemerataan Pendapatan

Pendekatan yang digunakan dalam identifikasi pemerataan pendapatan menggunakan kriteria dari Bank Dunia. Tahun 2017-2019 terjadi penurunan pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpenghasilan terendah di Kota Magelang, namun angka ini kembali naik di tahun 2020 dengan porsi 16,26%. Pada tahun 2020 tercatat bahwa 40% penduduk berpendapatan rendah di Kota Magelang memiliki proporsi pendapatan sebesar 16,26%, masih timpang dengan yang diperoleh 20% penduduk dengan pendapatan tinggi yang menerima pendapatan sebesar 46,95%.

Tabel 2.20
Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Magelang Menurut Kriteria Bank Dunia, 2017-2020

Tahun	Kriteria Bank Dunia		
	40% Pendapatan Bawah	40% Pendapatan Menengah	20% Pendapatan Tinggi
2017	17,77	38,88	43,35
2018	16,29	39,30	44,41
2019	15,17	37,58	47,25
2020	16,26	36,80	46,95

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Dibandingkan dengan Jawa Tengah porsi pendapatan penduduk Kota Magelang dalam kelompok 40% berpendapatan rendah tercatat lebih rendah. Proporsi jumlah pendapatan penduduk Kota Magelang pada kelompok 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk yang berada pada rentang 12%-17% dikategorikan dalam ketimpangan pendapatan sedang/menengah, sedangkan Jawa Tengah masih masuk dalam kategori ketimpangan rendah (ditunjukkan tabel 2.19).

Tabel 2.21
Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Magelang Menurut Kriteria Bank Dunia Kota Magelang dan Jawa Tengah, 2020

	40% Pendapatan Bawah	40% Pendapatan Menengah	20% Pendapatan Tinggi
Kota Magelang	16,26	36,8	46,95
Jawa Tengah	18,53	37,75	43,72

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

2.2.5. Kemiskinan

Kemiskinan di Kota Magelang menunjukkan tren menurun secara gradual sejak tahun 2016 hingga tahun 2019, meskipun tingkat penurunannya kurang signifikan. Tahun 2016 tercatat angka kemiskinan sebesar 8,79% dengan indeks kedalaman sebesar 1,20 dan indeks keparahan sebesar 0,23; angka tersebut di tahun 2019 mengalami penurunan sehingga angka kemiskinan sebesar 7,46%, indeks kedalaman 0,99 dan indeks keparahan 0,19. Data tersebut menunjukkan bahwa selain jumlah penduduk miskin berkurang, pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan yang ditunjukkan dari penurunan P0, P1 dan P2 dengan tren angka yang turun.

Perkembangan yang cukup bagus tersebut tidak berlanjut di tahun 2020. Indikator kemiskinan di tahun 2020 kembali mengalami peningkatan sehingga angka kemiskinan menjadi 7,58%, indeks kedalaman 1,12 dan indeks keparahan 0,24. Peningkatan indikator kemiskinan di Kota Magelang

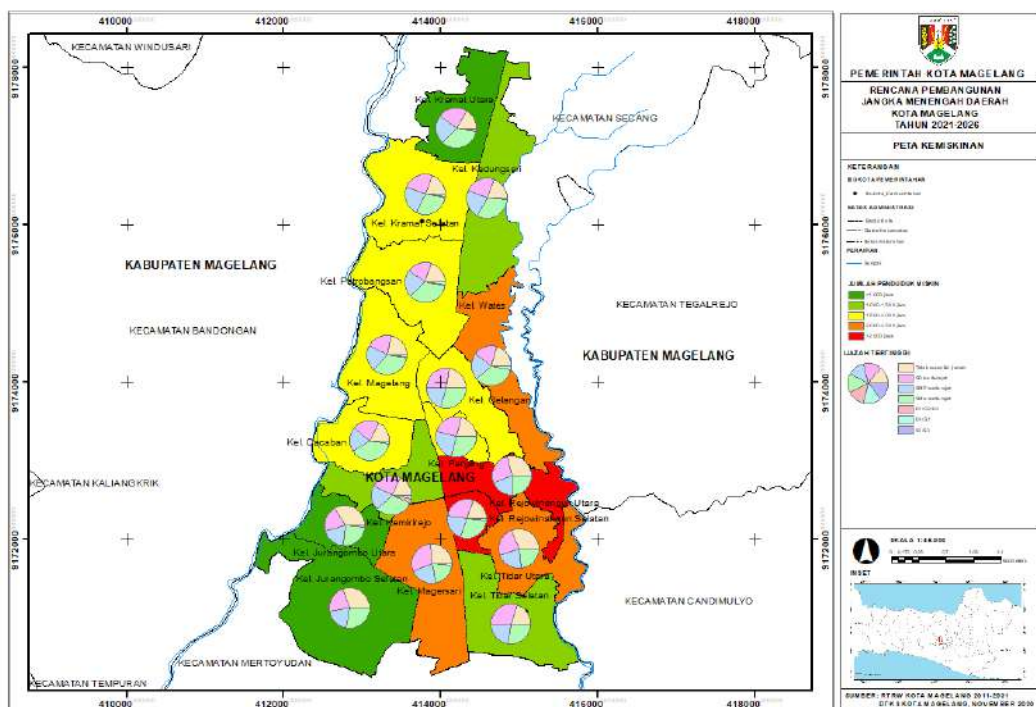
juga dialami oleh beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Pandemi COVID 19 dan kenaikan garis kemiskinan menjadi penyebab peningkatan indikator-indikator tersebut. Sebagai informasi garis kemiskinan Kota Magelang tahun 2020 adalah sebesar Rp. 522.099,-. Perkembangan penurunan angka kemiskinan selama 5 tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.22
Indikator Kemiskinan Kota Magelang Tahun 2016-2020

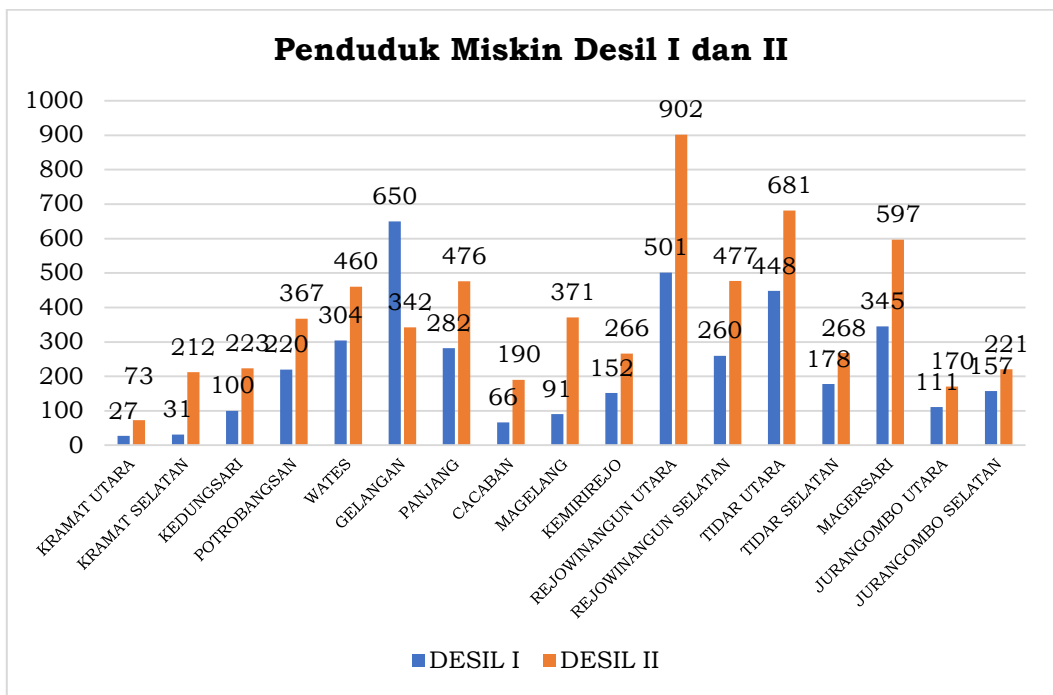
Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk (Jiwa)	121.193	121.673	121.992	122.243	122.526
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	10.640	10.630	9.590	9.100	9.270
Jumlah Penduduk Miskin (persen) (P0)	8,79	8,75	7,87	7,46	7,58
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,20	1,30	1,07	0,99	1,12
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,23	0,32	0,21	0,19	0,24
Garis Kemiskinan	425.191	450.908	476.582	481.282	522.099

Sumber: BPS Kota Magelang

Dalam penanganan penduduk miskin, pemerintah menetapkan sasaran program pengentasan kemiskinan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penduduk Kota Magelang yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berdasarkan kelurahan dapat digambarkan sebagai berikut:



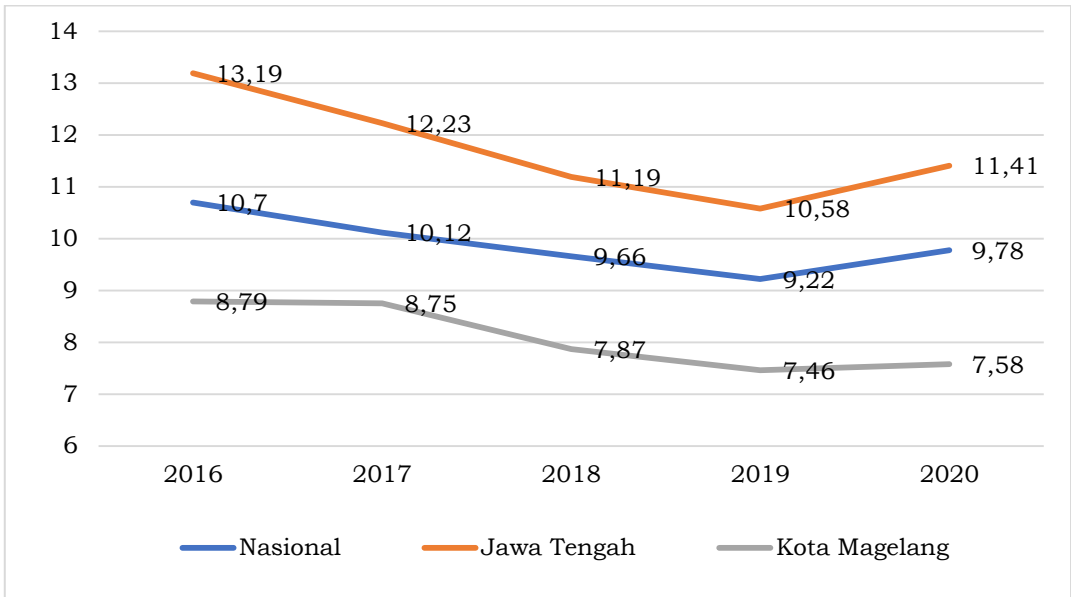
Gambar 2.13
Peta Tingkat Kemiskinan di Kota Magelang
Sumber: Dinas Sosial Kota Magelang, 2021



Gambar 2.14
Rekapitulasi Masyarakat Kota Magelang dalam Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial
Sumber: Dinas Sosial Kota Magelang, 2021

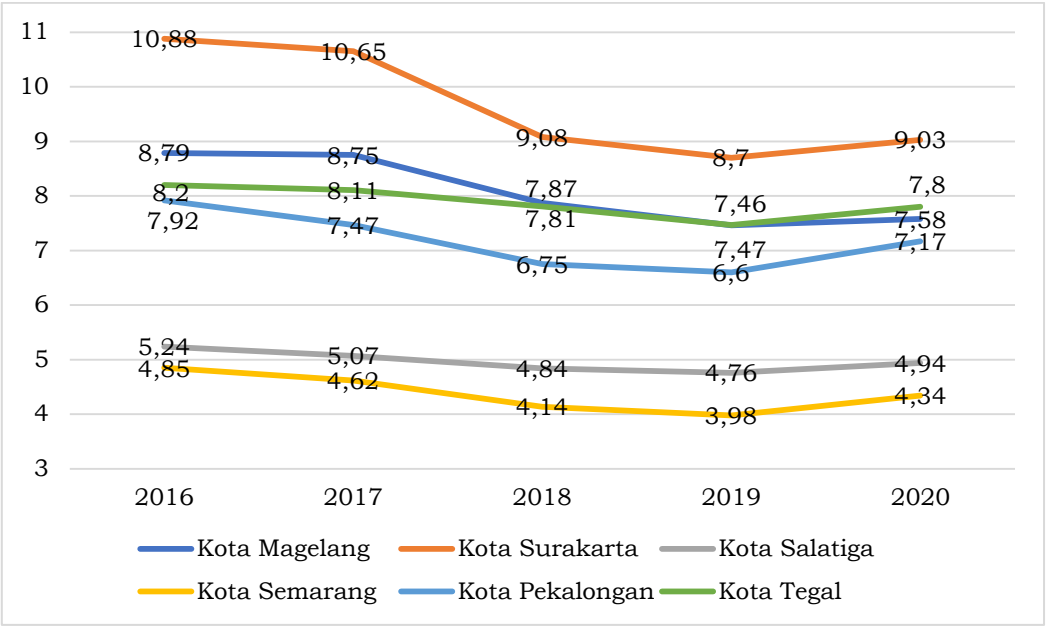
Gambar di atas menunjukkan bahwa DTKS menunjukkan tingkat kesejahteraan terendah ada di Kelurahan Rejowinangun Utara disusul oleh Kelurahan Rejowinangun Selatan. Dalam kerangka pembangunan kesejahteraan sosial, maka angka kemiskinan Kota Magelang tidak terlepas dari angka kemiskinan baik nasional maupun provinsi. Bila dibandingkan

dengan angka kemiskinan nasional dan provinsi Jawa Tengah, maka posisi Kota Magelang adalah sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.13 berikut ini.



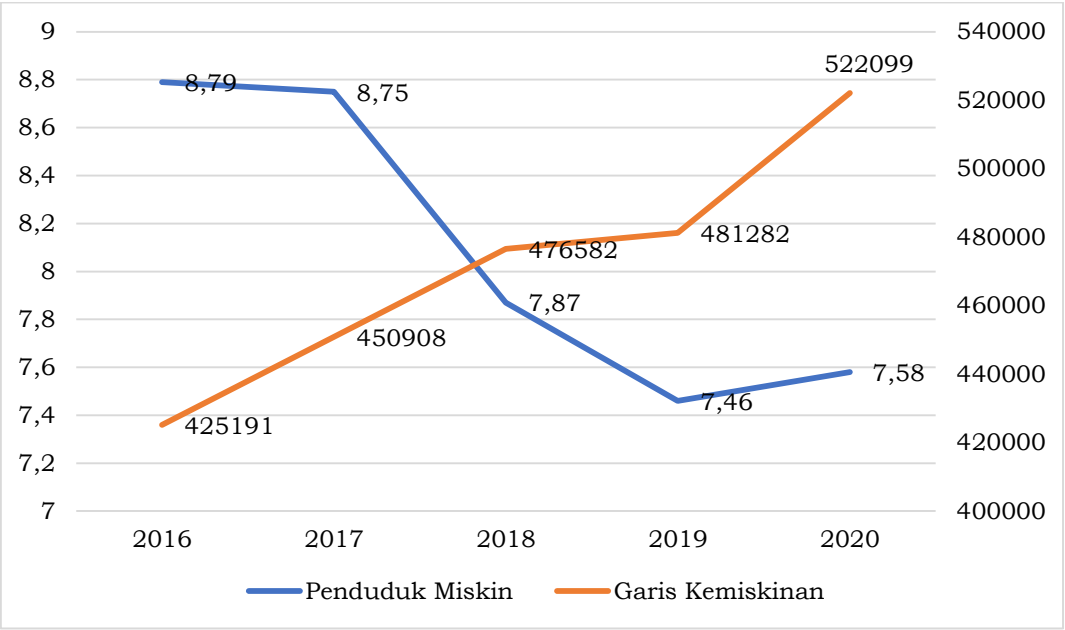
Gambar 2.15
Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang Tahun 2016-2020
Sumber : BPS Kota Magelang

Perbandingan tingkat kemiskinan antar kota-kota yang ada di Jawa Tengah tahun 2020 memperlihatkan bahwa Kota Semarang memiliki tingkat kemiskinan paling rendah dibanding kota-kota lain. Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Kota Salatiga dan Kota Pekalongan. Kota Magelang berhasil menggeser Kota Tegal untuk menduduki peringkat keempat dari enam kota yang ada di Jawa Tengah. Dengan demikian Kota Surakarta merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi dibanding kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2.16
Persentase Penduduk Miskin (PO) Kota-kota di Jawa Tengah, 2016-2020
Sumber : BPS Kota Magelang

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh angka Garis Kemiskinan. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika penduduk tersebut memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Pada tahun 2020 Garis Kemiskinan di Kota Magelang lebih besar daripada garis kemiskinan tahun sebelumnya. Terdapat kenaikan garis kemiskinan sebesar 40.817 rupiah atau sebesar 8,48 persen dibandingkan dengan garis kemiskinan tahun 2019. Peningkatan Garis Kemiskinan tersebut disebabkan adanya penyesuaian harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat.



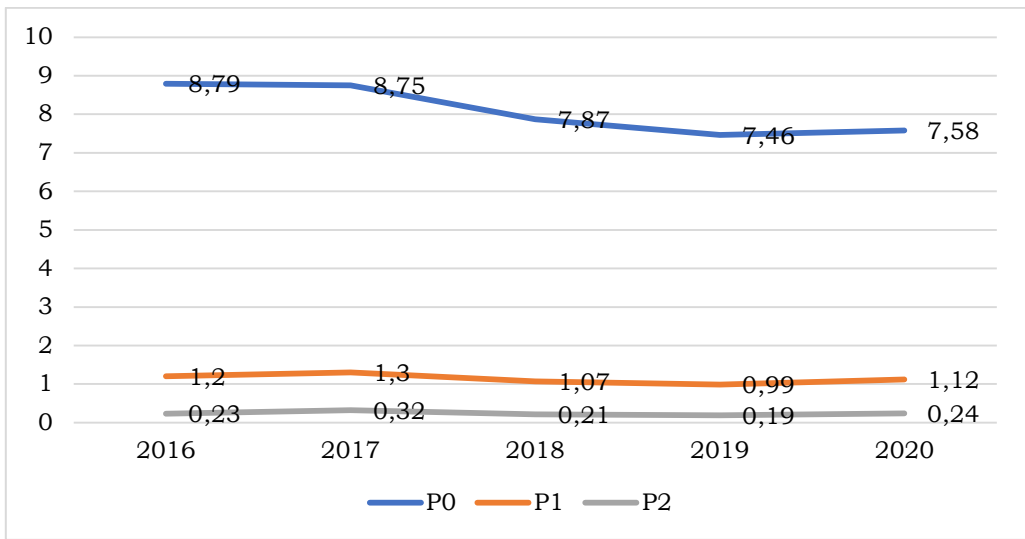
Gambar 2.17
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Magelang 2016 -2020

Sumber: BPS Kota Magelang

Kenaikan angka garis kemiskinan tidak selalu bersamaan dengan peningkatan penduduk miskin. Pada tahun 2016-2020 garis kemiskinan Kota Magelang selalu mengalami kenaikan, tetapi pada 2016-2019 persentase penduduk miskin mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan penduduk pada periode waktu tersebut mampu mengimbangi atau bahkan melampaui kenaikan pengeluaran pemenuhan kebutuhan hidup. Peningkatan pendapatan penduduk Kota Magelang yang lebih tinggi dari angka garis kemiskinan, menyebabkan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan semakin menurun. Kondisi berbeda terjadi pada tahun 2020, dimana kenaikan garis kemiskinan bersamaan dengan kenaikan penduduk miskin. Kenaikan biaya pemenuhan hidup pada tahun 2020 tidak diimbangi kenaikan pendapatan sehingga angka kemiskinan naik.

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya berbicara mengenai kemampuan wilayah dalam mengurangi tingkat kemiskinan (persentase dan jumlah penduduk miskin yang semakin menurun) namun ada dimensi lain yang secara bersamaan harus turut diselesaikan. Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan dimensi penting lain dalam analisis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan selama tahun 2016 hingga 2020 terlihat berfluktuasi. Namun demikian, tingkat kedalaman kemiskinan di Kota Magelang menunjukkan tren yang semakin turun selama periode 2017 sampai dengan periode 2019. Angka indeks yang semakin mengecil mengindikasikan bahwa rata rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati angka garis kemiskinan. Kalau pola mengecilnya angka indeks kedalaman kemiskinan terjaga, maka tahapan pengentasan kemiskinan akan semakin lebih mudah direalisasikan.

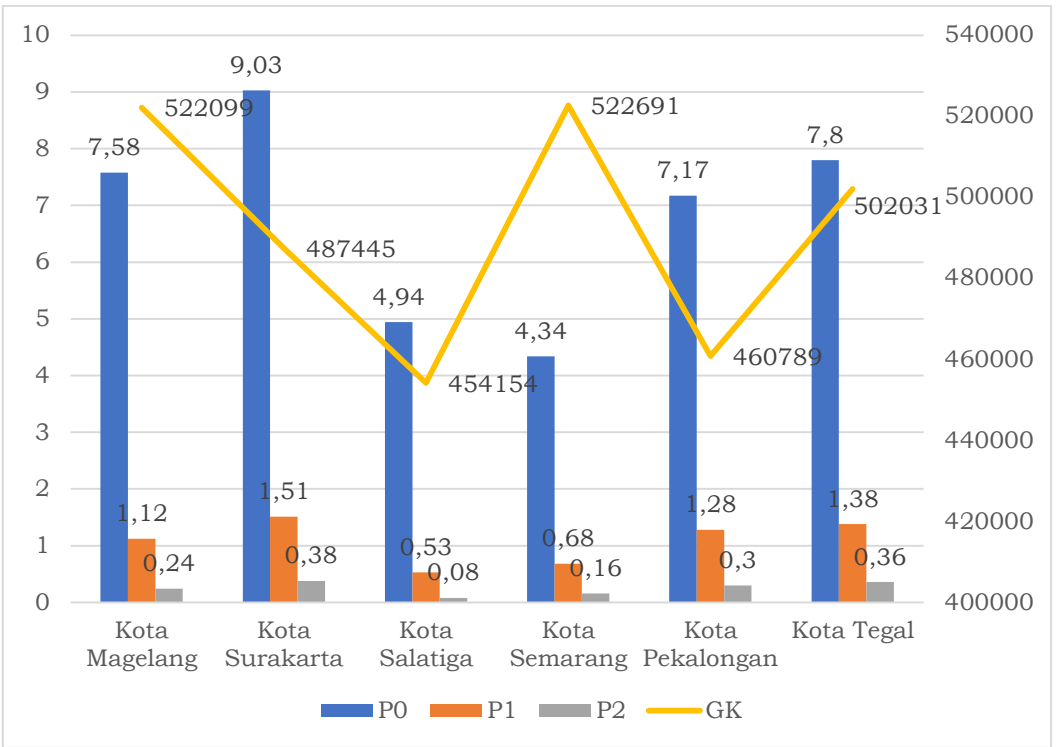


Gambar 2.18
Persentase Kemiskinan (P0), P1 dan P2 Kota Magelang,
2016-2020

Sumber: BPS Kota Magelang

Selain indeks kedalaman kemiskinan, indikator lain yang perlu dilihat adalah dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Pola grafik yang dibentuk oleh indeks keparahan kemiskinan pada periode 2016 sampai dengan tahun 2020 serupa dengan pola grafik yang dibentuk oleh indeks kedalaman kemiskinan, yaitu mengalami kenaikan di tahun 2017 dan menurun sampai dengan tahun 2019 dan naik Kembali di tahun 2020.

Di antara enam wilayah kota yang ada di Jawa Tengah, Kota Magelang merupakan daerah perkotaan dengan garis kemiskinan tertinggi kedua setelah Kota Semarang. Angka garis kemiskinan Kota Magelang sebesar 522.099 rupiah, sementara garis kemiskinan Kota Semarang sebesar 522.691 rupiah. Meskipun angka garis kemiskinan Kota Magelang cukup tinggi, namun hal ini tidak cukup berpengaruh terhadap peringkat kemiskinan di Jawa Tengah, bahkan ada perbaikan peringkat dari peringkat 8 menjadi peringkat 7.



Gambar 2.19
Persentase Penduduk Miskin (P0) dan Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kota-kota di Jawa Tengah, 2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Meskipun Kota Magelang memiliki garis kemiskinan paling tinggi kedua diantara enam Kota di Jawa Tengah namun tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan Kota Magelang tidak berada dalam posisi paling tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa meski biaya hidup Kota Magelang lebih tinggi dari kota lainnya di Jawa Tengah (kecuali Kota Semarang), namun hasil pembangunan Pemerintah Kota Magelang mampu menahan masyarakat miskin untuk tidak terjerumus ke dalam tingkat kemiskinan yang lebih parah.

2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tren IPM Kota Magelang selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, walaupun tingkat pertumbuhannya masih rendah dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain di Jawa Tengah. Tingkat pertumbuhan IPM Kota Magelang terendah dalam periode 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2020. Di tahun 2018 dan 2019 tingkat pertumbuhan IPM Kota Magelang mencapai 0,6% tiap tahun, namun di tahun 2020 pertumbuhan IPM Kota Magelang hanya 0,24%.

Tabel 2.23
IPM Kota Magelang Tahun 2016-2020

Tahun	AHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (Rp .000,-)	IPM
2016	76,62	13,55	10,29	11.090	77,16
2017	76,66	13,29	10,30	11.525	77,34
2018	76,72	13,80	10,31	11.994	78,31
2019	76,75	13,81	10,33	12.514	78,80
2020	76,85	14,14	10,39	12.210	78,99

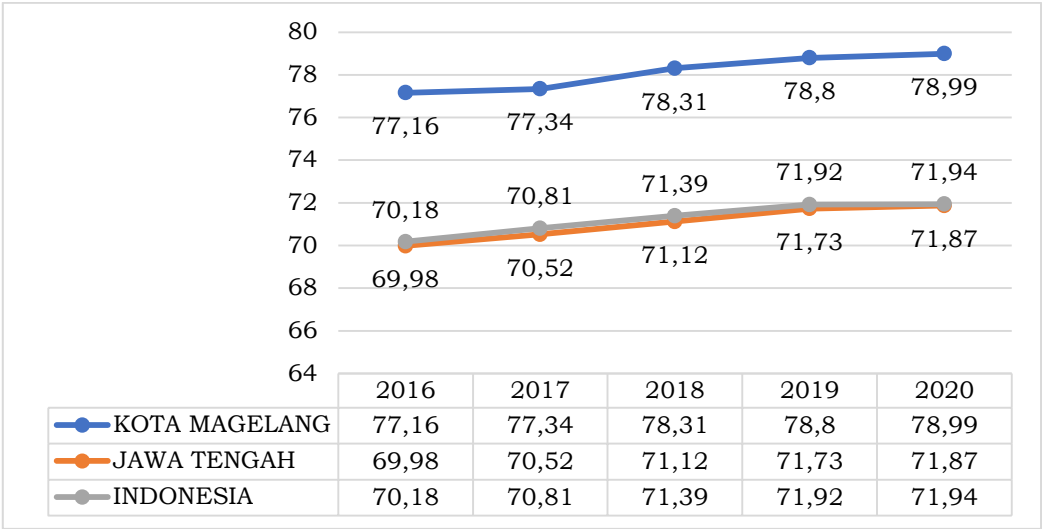
Sumber : BPS Kota Magelang, 2021

Komponen Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2020, AHH Kota Magelang menduduki peringkat 6 se-Provinsi Jawa Tengah, meskipun tingkat pertumbuhannya mencapai 0,13% (pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2010).

Harapan Lama Sekolah Kota Magelang mengalami pertumbuhan tercepat se-Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,39%, walaupun dari segi peringkat hanya menempati urutan ke 4 se-Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah Kota Magelang di tahun 2020 hanya mampu tumbuh 0,58% dan termasuk pertumbuhan yang lambat diantara Kab/Kota se-Jawa Tengah. Rata-rata Lama Sekolah dihitung berdasarkan rata-rata lama sekolah yang dialami oleh penduduk berusia 25 tahun, sehingga pencapaian indikator RLS merupakan hasil dari kebijakan jangka panjang.

Pengeluaran per kapita penduduk Kota Magelang selalu meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2019, sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan dari Rp. 12.514.000,- menjadi Rp. 12.210.000,-. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Magelang tahun 2020 yang melambat - 2,45%. Pengeluaran per kapita Kota Magelang di tahun 2020 menempati peringkat ke-8 (12.210) dan terendah di antara 6 kota di provinsi Jawa Tengah.

Grafik di bawah menyandingkan IPM Kota Magelang dengan IPM nasional dan IPM Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016 hingga 2020.

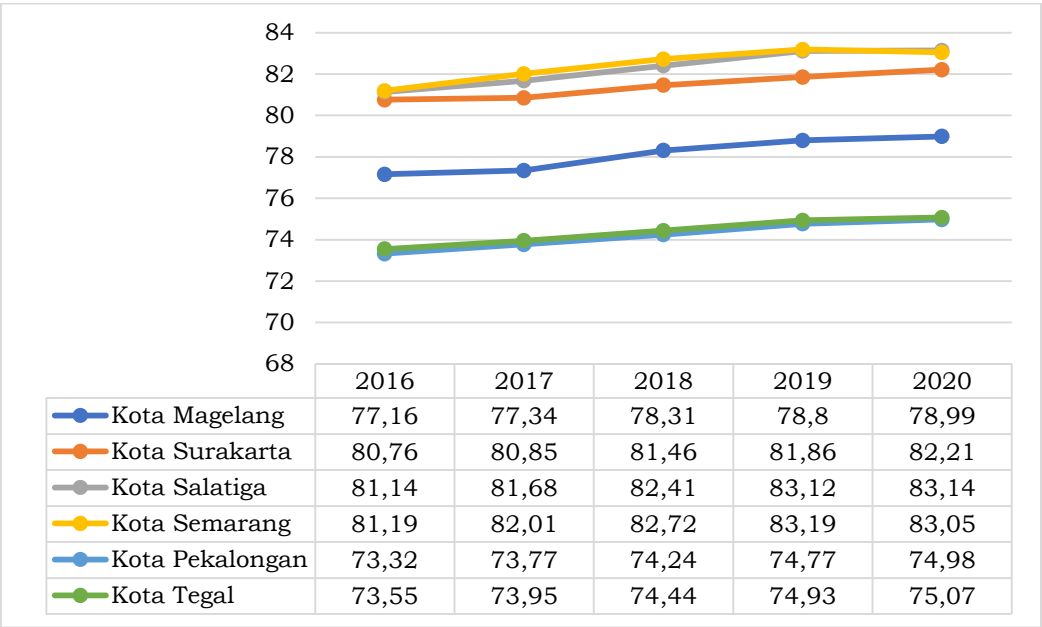


Gambar 2.20
IPM Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang
Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Kota Magelang

Bila dibandingkan dengan IPM nasional dan IPM provinsi Jawa Tengah, IPM Kota Magelang selalu berada jauh di atas IPM nasional dan provinsi Jawa Tengah. Rata-rata pertumbuhan IPM dari tahun 2016 hingga tahun 2020 Kota Magelang (0,59%) lebih kecil daripada nasional (0,62%) dan provinsi Jawa Tengah (0,67%). Meski demikian di tahun 2020, tingkat pertumbuhan IPM Kota Magelang (0,24%) lebih tinggi dari nasional (0,03%) maupun provinsi Jawa Tengah (0,19%).

Diantara IPM di kota lain di provinsi Jawa Tengah, maka posisi Kota Magelang dalam 5 tahun terakhir selalu berada di peringkat ke 4 setelah Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Surakarta. Tingkat pertumbuhan IPM Kota Magelang jika dibandingkan dengan kota lain pun menduduki peringkat ke 4, di atas Kota Pekalongan dan Kota Tegal.



Gambar 2.21
IPM Kota-Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020
Sumber : BPS Kota Magelang

2.2.7. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

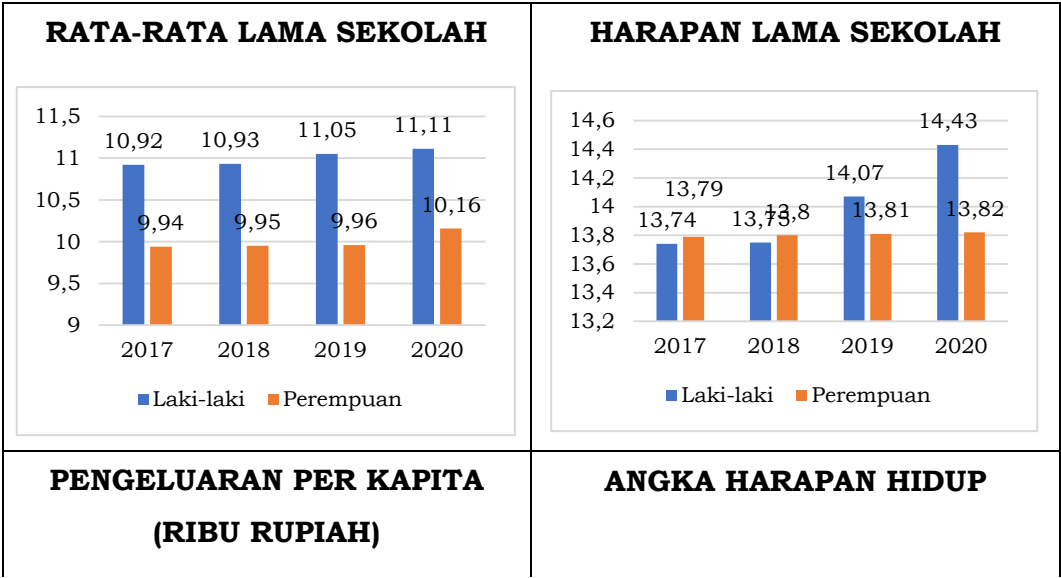
Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pembangunan manusia seperti halnya IPM, dengan memperhatikan aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi serta dengan memperhatikan ketimpangan gender. Hal ini untuk lebih mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan dirasakan oleh semua penduduk (*no one left behind*). IPG digunakan untuk mengukur kesenjangan dampak pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender semakin nyata apabila angka mendekati 100.

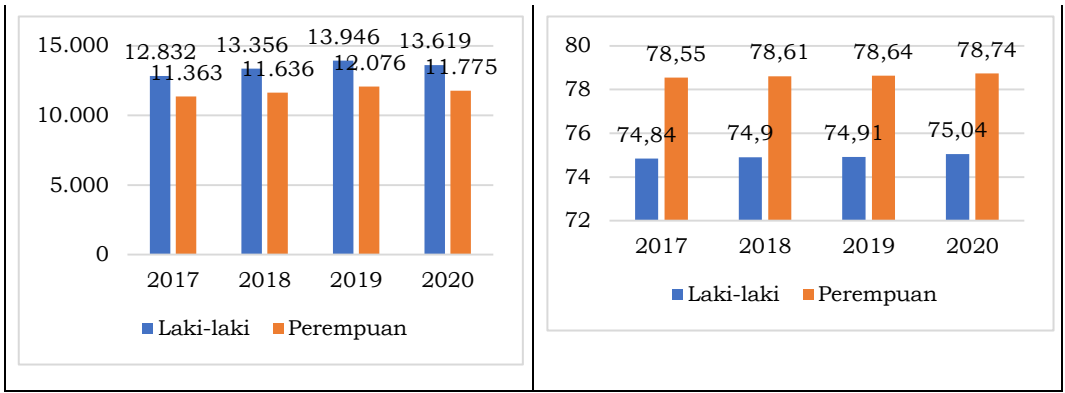
Tabel 2.24
Indeks Pembangunan Gender Kota Magelang
Tahun 2016-2020

IPG	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Magelang	95,8	96,26	96,07	95,51	95,27

Sumber : BPS Kota Magelang

Pembangunan kesetaraan gender di Kota Magelang sudah mendekati angka 100. IPG Kota Magelang mengalami kenaikan di 2016, namun menurun secara gradual di tahun berikutnya hingga tahun 2020. Komponen dari IPG disajikan pada gambar di bawah ini. Komponen IPG disajikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dikarenakan data komponen IPG tahun 2016 tidak dipublikasi oleh BPS.

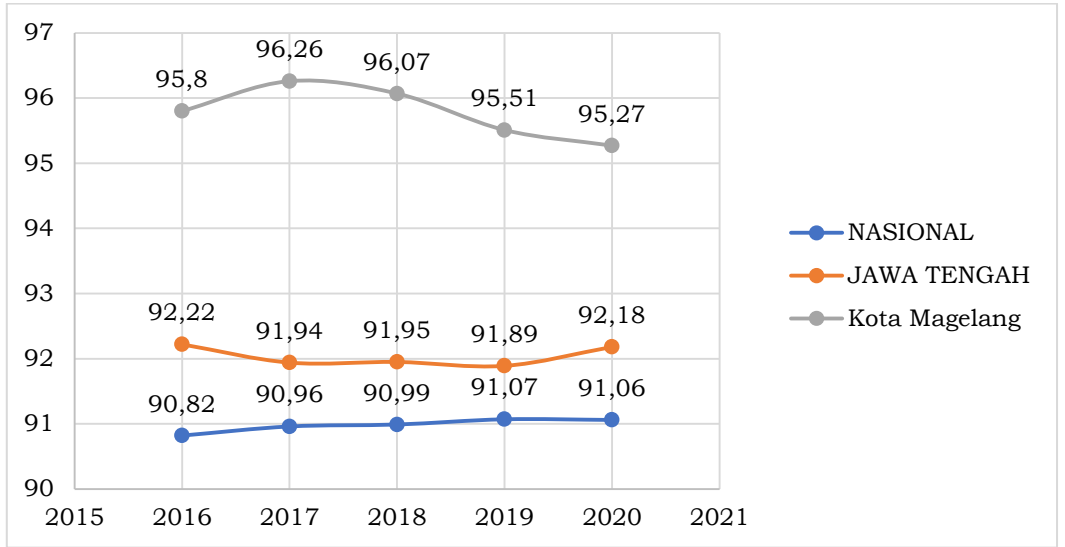




Gambar 2.22
Grafik IPG Kota Magelang berdasarkan Indikator Pembentuknya Tahun 2017-2020

Sumber : BPS Kota Magelang

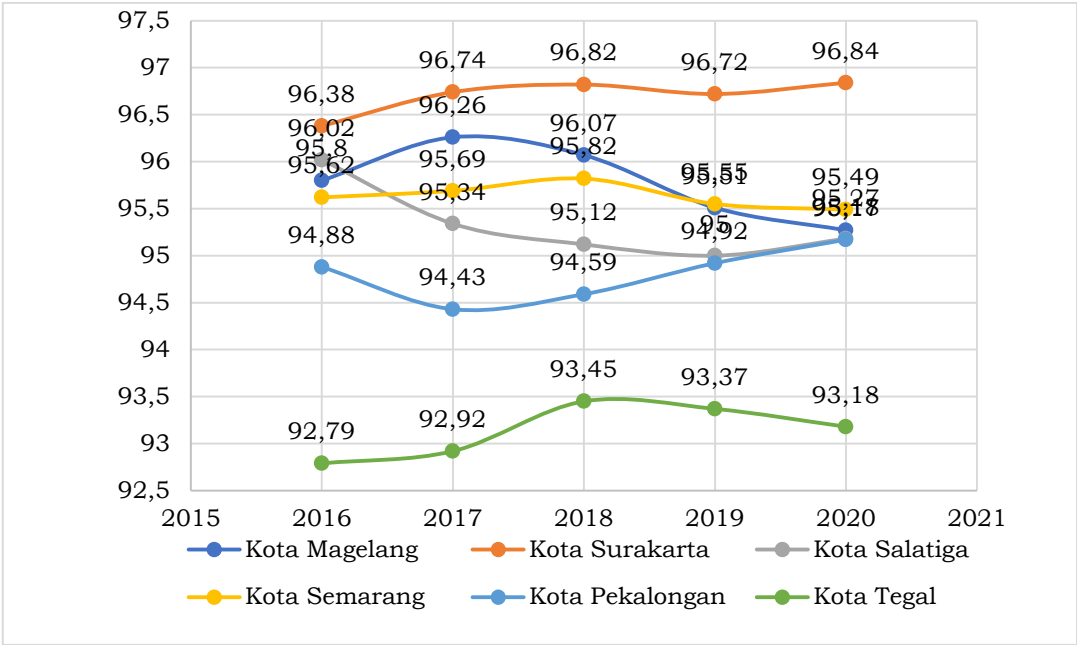
IPG Kota Magelang berada jauh di atas IPG nasional maupun provinsi, namun tingkat pertumbuhan IPG Kota Magelang negatif sejak 2017, sementara baik nasional maupun provinsi mengalami pertumbuhan positif.



Gambar 2.23
IPG Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Kota Magelang

Disandingkan dengan kota lain di wilayah provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Magelang menempati urutan ke 3 setelah Kota Surakarta dan Kota Semarang. Pembangunan gender di Kota Magelang perlu mendapatkan perhatian, terlebih lagi karena terjadi penurunan tren pada tahun 2017.



Gambar 2.24
Perbandingan IPG Kota-Kota se-Jawa Tengah Tahun 2016-2020
Sumber : BPS Kota Magelang

2.2.8. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk menjelaskan lebih jauh pemberian kesempatan kepada perempuan terutama dalam politik dan ekonomi. IDG meliputi keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan.

Tabel 2.25
Indeks Pemberdayaan Gender Kota Magelang
Tahun 2016-2020

Indikator IDG	2016	2017	2018	2019	2020
Keterlibatan di Parlemen	NA	20%	20%	20%	20%
Sebagai Tenaga Profesional	NA	51,78%	47,02%	52,51%	55.07%
Sumbangan Pendapatan	NA	41,83%	41,81%	41,83%	41,97%

Sumber: BPS Kota Magelang, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di Kota Magelang semakin meningkat bila dilihat dari jumlah perempuan sebagai tenaga professional. Sementara sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 jumlah perempuan yang terlibat dalam parlemen dan sumbangan pendapatan perempuan cenderung stabil. Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Magelang pada tahun 2020 sebesar 76,35.

2.2.9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif, tahun 2016 tidak tersedia data dikarenakan adanya

pengurangan sampel survei Tenaga Kerja Nasional. Pada tahun 2017 TPAK Kota Magelang sebesar 66,16%, dan meningkat 2,48% menjadi 68,64% di tahun 2018. Pada tahun 2019 kondisinya menurun sebesar 4,02% menjadi 64,62%, kemudian meningkat kembali sebesar 2,99% pada tahun 2020 menjadi 67,61%. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh peningkatan dan penurunan jumlah ketersediaan tenaga kerja.

Selama tahun 2016-2020 terlihat bahwa jumlah penduduk usia kerja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2017 sebanyak 94.883 jiwa dan meningkat menjadi 98.078 jiwa pada tahun 2020, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2.24.

Tabel 2.26
Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Tahun	Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	Angkatan Kerja (Jiwa)	TPAK (%)
1	2016	N.A	N.A	N.A
2	2017	94.883	62.775	66,16
3	2018	96.720	66.389	68,64
4	2019	97.229	62.829	64,62
5	2020	98.078	66.311	67,61

Sumber: Sakernas 2016-2020, BPS RI

Jumlah Angkatan kerja di Tahun 2018 menunjukkan kenaikan sebesar 3.614 orang, kemudian menurun di Tahun 2019 sebesar 3.560 orang dan kembali meningkat sebesar 3.482 orang. Berdasarkan jenis kelamin, dalam 5 tahun terakhir TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. Pada tahun 2018 baik TPAK laki-laki maupun perempuan mencapai angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir, sebagaimana disajikan dalam tabel 2.25.

Tabel 2.27
Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut jenis kelamin Kota Magelang Tahun 2016-2020

Tahun	Penduduk Usia Kerja (Jiwa)		Angkatan Kerja (Jiwa)		TPAK (%)	
	L	P	L	P	L	P
2016	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
2017	46.766	49.342	34.354	28.421	73,46	57,60
2018	47.106	49.614	36.135	30.254	76,71	60,98
2019	47.334	49.895	34.218	28.611	72,29	57,34
2020	47.952	50.126	36.312	29.999	75,73	59,85

Sumber: Sakernas 2016-2020, BPS RI

Kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dalam tabel di atas dapat diartikan bahwa pada tahun 2020 dari 100 orang penduduk usia kerja laki-

laki, 76 jiwa laki-laki adalah angkatan kerja sementara dari 100 penduduk usia kerja perempuan, hanya 60 orang wanita yang masuk dalam angkatan kerja.

2.2.10. Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam empat tahun pertama yaitu di Tahun 2016-2019 TPT Kota Magelang cenderung menurun, namun di Tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Magelang di Tahun 2020, menunjukkan peningkatan tertinggi ke-2 di Jawa Tengah yaitu sebesar 4,23 persen. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah, Kota Magelang menduduki peringkat tertinggi ke-5 dengan jumlah pengangguran 5,669 jiwa.

Jumlah Penganggur menurun seiring dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu 2016-2019. Jumlah penganggur menurun sebanyak 955 jiwa di Tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya, dan Kembali menurun sebanyak 457 jiwa di Tahun 2019. Namun mengalami peningkatan sebanyak 2.918 jiwa di tahun 2020.

Tabel 2.28
Jumlah Angkatan Kerja, Penganggur, Penduduk yang bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Magelang Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Pengangguran Terbuka	n.a	6,68%	4,78%	4,37%	8,59%
Jumlah Angkatan Kerja	n.a	62.775	66.389	62.829	66.311
Jumlah Penganggur	n.a	4.193	3.238	2.781	5.699
Jumlah penduduk yang bekerja	n.a	58.582	63.151	60.048	60.612
Pengangguran karena Covid	n.a	n.a	n.a	n.a	1.314
BAK karena Covid	n.a	n.a	n.a	n.a	881
Sementara tidak bekerja karena Covid	n.a	n.a	n.a	n.a	2.136
Pengurangan jam kerja karena Covid	n.a	n.a	n.a	n.a	19.191

Sumber: Sakernas 2016-2020, BPS RI

Pandemi Covid 19 tahun 2020 berpengaruh pada tenaga kerja di Kota Magelang. Pengaruh tersebut ditunjukkan dengan jumlah pengangguran karena dampak Covid sebanyak 1.314 jiwa, sementara tidak bekerja sebanyak 2.136 orang, pengurangan jam kerja sebanyak 19.191 jiwa dan bukan angkatan kerja yang ikut terkena imbas Covid sebanyak 881 jiwa.

2.2.11. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja diukur dari seberapa besar PDRB yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. Tingkat produktivitas tenaga kerja penduduk Kota Magelang selama periode 2017 sampai dengan 2020 cukup fluktuatif. Penurunan produktivitas terjadi pada tahun 2018 dan 2020. Penurunan di tahun 2020 kemungkinan dipengaruhi oleh pandemi Covid 19 yang menyebabkan proses produksi terganggu.

Tabel 2.29
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah dan Kota se-Jateng Tahun 2016-2020

Provinsi/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Magelang	NA	99,36	96,37	106,72	104,17
Surakarta	NA	122,15	127,79	127,85	130,89
Salatiga	NA	85,53	86,84	97,60	93,12
Semarang	NA	137,01	148,59	152,57	148,98
Pekalongan	NA	44,86	46,33	46,80	50,18
Tegal	NA	87,38	92,00	91,31	95,98
Jateng	NA	52,00	54,04	56,35	55,06

Sumber : BPS Kota Magelang

Secara umum, tingkat produktivitas tenaga kerja Kota Magelang hampir dua kali lipat tingkat produktivitasnya tenaga kerja yang ada di Jawa Tengah. Nilai PDRB dan jumlah penduduk yang bekerja Kota Magelang menempati peringkat terkecil di Jawa Tengah, tetapi produktivitas tenaga kerjanya bukan yang paling kecil. Bila dibandingkan dengan Kota se-Jawa Tengah, maka produktivitas tenaga kerja menempati urutan ketiga sebagai tenaga kerja yang paling produktif di bawah Kota Semarang dan Surakarta dengan output per tenaga kerja sebesar 104,17 juta rupiah.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Magelang dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum dapat dilihat dari indikator variabel aspek pelayanan umum berikut.

2.3.1. Fokus Urusan Pelayanan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Pendidikan

Kondisi Pendidikan di Kota Magelang akan dijelaskan dari beberapa aspek yaitu akses terhadap layanan pendidikan, Angka Putus Sekolah dan Angka Melanjutkan, dan mutu pendidikan yang dijabarkan pada poin-poin berikut.

a. Akses Terhadap Layanan Pendidikan

Akses terhadap layanan pendidikan dapat dilihat dari beberapa komponen seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Rasio Guru-Murid. Kondisi terkait pemerataan tersebut disajikan pada rincian berikut.

1) Angka Partisipasi Kasar

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan dalam pembangunan pendidikan PAUD telah mampu meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Magelang selama lima tahun, dari 67,12% pada tahun 2016 meningkat menjadi 89,69% pada tahun 2020. Sampai saat ini APK PAUD di Kota Magelang masih kurang dari 100% hal ini disebabkan salah satunya masih kurangnya kesadaran orang tua akan arti pentingnya pendidikan anak usia dini bagi anaknya, beberapa hal yang mengakibatkan pentingnya pendidikan usia dini adalah sebagai titik sentral untuk membangun pondasi dasar kepribadian anak, demi menjadi manusia yang beradab di masa mendatang. Selain itu, pentingnya pendidikan usia dini yang lainnya meliputi: meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan fisik maupun mental.

Tabel 2.30
Angka Partisipasi Kasar PAUD, SD/MI/Sederajat, dan SMP/MTs/Sederajat Kota Magelang Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	67,12	72,18	81,5	87,1	89,69
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat	133,41	127,73	144,13	133,21	119,68
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat	145.76	149.87	168.86	176.09	158.58

Sumber: Profil Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang 2016-2020

Kondisi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Kota Magelang selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2016 sampai 2020 telah mencapai 100%, begitu pula dengan capaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B Kota Magelang dalam kurun waktu lima

tahun dari tahun 2016 sampai 2020 juga mencapai 100%. APK SD/MI/Paket A dan juga APK SMP/MTs/Paket B di Kota Magelang juga telah mencapai target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

2) Angka Partisipasi Murni

Kondisi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Kota Magelang selama kurun waktu empat tahun dari tahun 2016 sampai 2019 telah mencapai 100%, dan pada Tahun 2020 belum bisa mencapai 100% hanya sebesar 98,09%.

Tabel 2.31
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat, dan SMP/MTs/Sederajat Kota Magelang Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A	120,76	114,45	132,36	109,18	98,09
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B	115,73	118,99	134,06	136,92	123,44
3	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di SD/ MI/ sederajat;	120,76	82,48	99,60	98,09	109.18
4	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di SMP/ MTs/ sederajat;	115,73 %	79,94%	84,43%	105,45 %	123,44 %

Sumber: Profil Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang 2016-2020

3) Rasio Pendidikan

Rasio siswa per guru merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa. Rasio terbaik pada saat tidak terlalu banyak siswa yang dilayani oleh seorang guru, hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hubungan siswa dengan guru.

Tabel 2.32
Rasio Guru-Murid Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	894	894	870	862	851
1.2.	Jumlah Murid	15.686	15.934	15.313	15.333	15.541
1.3.	Rasio (per 10.000)	569,93	561,06	567,40	562,17	547,58
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	752	752	777	760	744
2.2.	Jumlah Murid	10.186	10.186	10.691	11.010	10.694

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2.3.	Rasio (per 10.000)	738,27	738,27	726,78	690,28	695,71

Sumber: *Profil Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang 2016-2020*

Data menunjukan bahwa rasio terbaik ada pada MI, kemudian secara berurutan diikuti oleh MTs, SMP, dan SD.

b. Angka Putus Sekolah dan Angka Melanjutkan

Angka Putus Sekolah (APS) siswa di tingkat SD/MI di Kota Magelang selama periode 2016 sampai 2020 cenderung rendah pada kisaran 0,01 pada tahun 2016 dan mengalami penurunan sampai pada 0 pada tahun 2020. Kondisi yang hampir sama juga dijumpai pada jenjang SMP/MTs, Angka Putus Sekolah SMP/MTs di Kota Magelang selama kurun waktu 5 tahun dari 0,38 pada tahun 2016, menurun hingga mencapai 0 pada tahun 2020.

Tabel 2.33
Angka Putus Sekolah dan Angka Melanjutkan Kota Magelang Tahun 2016-2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,01	0,01	0,02	0,01	0,00
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,38	0,09	0,10	0,16	0,00
3	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	149,50	149,67	146,26	135,90	123,03

Sumber: *Profil Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang 2016-2020*

Angka Melanjutkan penduduk Kota Magelang selama kurun waktu lima tahun dari SD ke SMP menunjukkan tren yang semakin menurun. Angka melanjutkan dari SD ke SMP pada tahun 2016 sebesar 149,50% mengalami penurunan hingga mencapai 123,03 pada tahun 2020.

c. Mutu Pendidikan

Mutu Pendidikan dapat dilihat dari kualitas sekolah, tenaga pendidik, dan juga peserta didik. Kondisi terkait hal-hal tersebut dijelaskan lebih detil pada bahasan berikut.

1) Angka Kelulusan

Angka Kelulusan tingkat SD/MI dan SMP/MTS selama kurun waktu 5 tahun dari 2016 sampai 2020 dapat mencapai 100%. Capaian indikator Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A dan Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B selama kurun waktu lima tahun dari periode tahun 2016 sampai 2020 dapat mencapai 100%.

Tabel 2.34
Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs Kota Magelang
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100

Sumber: Profil Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang 2016-2020

2) Kualifikasi Guru

Guru merupakan salah satu komponen terpenting dan strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Peningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru dilaksanakan melalui peningkatan kualifikasi yang disinergikan dengan peningkatan kompetensi dan uji sertifikasi guru. Untuk meningkatkan pendidik dan tenaga pendidik, Pemerintah Kota Magelang melakukan beberapa strategi dan program utama yaitu peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan melaksanakan sertifikasi pendidik, Pembinaan kelompok kerja guru (KKG), Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi, Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, *Workshop* manajemen perencanaan terpadu, Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal.

Ketersediaan dan kapasitas guru turut menentukan derajat kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa kualifikasi guru dipersyaratkan minimal S1/D4. Selanjutnya pada pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualitas akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Komposisi guru di Kota Magelang secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Jumlah Guru dan Pendidikan Guru Kota Magelang
Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Guru PAUD	263	263	283	262	262
	Lulusan S1/S2	190	191	213	212	212
	Persentase	72,24%	72,62%	75,27%	80,92%	80,92%
2	Guru SD/MI	894	894	870	862	851
	Lulusan S1/S2	747	751	780	817	811
	Persentase	83,56%	84,00%	89,66%	94,78%	95,30%
3	Guru SMP/MTs	815	719	601	639	629
	Lulusan S1/S2	683	680	566	614	602
	Persentase	83,80%	94,58%	94,18%	96,09%	95,71%

Sumber: Profil Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang 2016-2020

Pada tingkat SMP/MTs sudah 95,71% guru yang mengajar sudah berpendidikan minimal S1. Terbanyak kedua adalah di tingkat SD/MI sebanyak 95,30% sudah berpendidikan minimal S1. Jumlah guru yang berpendidikan minimal S1 paling rendah adalah pada tingkat PAUD yaitu sebesar 80,92%.

3) Kondisi Sarana Prasarana Pendidikan

Penggunaan sarana dan prasarana sangat penting untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan untuk meningkatkan kualitas belajar baik untuk siswa maupun guru. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang amat penting di sekolah, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah dibutuhkan suatu proses sebagaimana terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemeliharaan dan pengawasan. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah perlu direncanakan dengan cermat berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran. Sampai saat ini masih ada beberapa sekolah SD/MI maupun SMP/MTs yang belum memenuhi syarat sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN), hal ini disebabkan masih belum memenuhi 2 standar dari 8 Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar Sarana Prasarana dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Kondisi sarana prasarana pendidikan di Kota Magelang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Kondisi Ruang Kelas Sekolah (SD, MI, SMP, dan MTs)
Kota Magelang Tahun 2016-2020

Jenjang	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah	76	76	77	77	77
	Jumlah Ruang Kelas	545	546	561	563	578
	Rusak Berat	16	7	21	21	1
	Rusak Ringan	34	51	73	75	77
	Baik	495	488	467	467	500
Madrasah Ibtidaiyah	Jumlah Sekolah	2	2	2	2	2
	Jumlah Ruang Kelas	12	12	12	12	15
	Rusak Berat	0	0	0	0	1
	Rusak Ringan	4	4	2	2	4
	Baik	8	8	8	8	10
Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah	20	20	20	20	20
	Jumlah Ruang Kelas	379	373	320	235	298
	Rusak Berat	4	10	0	4	0
	Rusak Ringan	37	61	11	54	148
	Baik	338	302	309	285	150

Jenjang	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Madrasah Tsanawiyah	Jumlah Sekolah	2	2	3	3	3
	Jumlah Ruang Kelas	39	39	43	44	45
	Rusak Berat	0	0	0	0	0
	Rusak Ringan	0	0	0	21	3
	Baik	39	39	43	23	42

Sumber: Profil Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang 2016-2020

Tabel di atas menyediakan beberapa informasi pokok tentang jumlah sekolah, jumlah ruang kelas dan kondisinya, dan jumlah rombongan belajar pada setiap jenjang pendidikan. Jumlah sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs relatif tetap. Dilihat dari sisi kondisi ruang kelas (rusat berat, rusak ringan, dan baik), ditemukan data bahwa sebagian besar ruang kelas pada semua jenjang pendidikan kondisinya sudah baik. Tetapi ada di tingkat SD/MI dan SMP masih ditemukan kondisi beberapa ruang kelas yang rusak berat.

4) Akreditasi Satuan dan Lembaga Pendidikan

Salah satu faktor penjaminan mutu Pendidikan dalah akreditasi. Dari semua satuan dan Lembaga Pendidikan yang ada di Kota Magelang, SMP dan PKBM di Kota Magelang sudah semuanya terakreditasi sampai dengan tahun 2020. Untuk PAUD, dari total 127 sudah terakreditasi sebanyak 99 PAUD. Pada tingkatan sekolah Dasar, hingga tahun 2020, masih menyisakan 2 SD yang belum terakreditasi. Sedangkan untuk LKP, baru 8 LKP yang terakreditasi dari total 30 LKP yang ada.

Tabel 2.37
Akreditasi PAUD, SD, SMP, PKBM, dan LKP Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	PAUD	127	127	127	127	127
	PAUD terakreditasi	67	75	80	93	99
	% PAUD terakreditasi	52,76%	59,06%	62,99%	73,23%	77,95%
2	SD	75	75	76	76	76
	SD terakreditasi	64	64	73	74	74
	% SD terakreditasi	85,33%	85,33%	96,05%	97,37%	97,37%
3	SMP	21	21	20	20	20
	SMP terakreditasi	19	18	20	20	20
	% SMP terakreditasi	90,48%	85,71%	100%	100%	100%
4	PKBM	3	3	3	3	3
	PKBM terakreditasi	0	1	1	1	3
	% PKBM terakreditasi	0%	33,33%	33,33%	33,33%	100%
5	LKP	30	30	30	30	30
	LKP terakreditasi	6	6	8	8	8
	% LKP terakreditasi	20%	20%	26,67%	26,67%	26,67%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2021

Pandemi Covid-19 berdampak pada aktivitas belajar mengajar. Selama masa pandemi Covid-19 aktivitas belajar mengajar di Kota Magelang dilaksanakan dengan metode Pendidikan jarak jauh (PJJ). Hal tersebut untuk melindungi anak didik dari bahaya Covid-19. Dalam pelaksanaannya, banyak kendala dialami seperti, kurangnya kesiapan baik siswa maupun pendidik dalam pelaksanaan PJJ, terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki peserta didik dan pendidik, dan kualitas PJJ yang kurang dapat dipantau. Dampak lain dari pelaksanaan PJJ adalah jam belajar siswa yang relatif lebih sedikit, membuat siswa kurang terpantau dalam beraktivitas sepanjang hari. Kedepan perlu dikembangkan kurikulum PJJ yang dapat memberikan system pembelajaran yang efektif bagi siswa

2.3.1.2. Kesehatan

Hakekat Pembangunan adalah adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Adapun salah satu syarat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia adalah keberhasilan dari pembangunan kesehatan masyarakat. Keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat ini dapat di lihat dari meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang akan dijelaskan kondisi yang ada di Kota Magelang sebagai berikut.

a. Kesehatan Ibu dan Anak

1) Kesehatan Ibu

Jumlah kematian Ibu di Kota Magelang dalam beberapa tahun terakhir ini relatif sama pada kisaran angka 2 s/d 3 kematian ibu dan jumlah ini relatif cukup kecil apabila dibandingkan dengan kejadian di daerah lain yang ada di Jawa Tengah. Namun, angka *absolute* ini menjadi cukup besar apabila dikonversikan ke dalam perhitungan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup mengingat angka kelahiran hidup di Kota Magelang relatif cukup kecil di kisaran 1.500-an kelahiran hidup.

Tabel 2.38
Kondisi Kesehatan Ibu Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	AKI/ 100.000 KH	0	192,43	130,98	130,55	138,79
2	Jumlah kasus kematian ibu	0	3	2	2	2
3	Jumlah anemia ibu hamil	34	44	39	46	56

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2021

Angka Kematian Ibu di Kota Magelang menunjukkan tren yang mengesankan. Yang mana sejak 2017 terjadi 192,43 AKI/100.000 Kelahiran Hidup, bisa ditekan menjadi 138,79 pada tahun 2020. Meskipun terjadi kenaikan ketimbang tahun sebelumnya, namun angka capaian yang ada di Kota Magelang telah mencapai target dari salah satu indikator dalam Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan yang mana pada indikator tersebut di targetkan AKI menurun menjadi 306 kasus.

2) **Kesehatan Anak**

Kematian bayi pada tahun 2016 terjadi sebanyak 16 kasus. Kondisi ini mengalami kenaikan di tahun 2017 dimana terjadi kematian bayi sebanyak 19 kasus, 10 laki-laki dan 9 perempuan. Jumlah kelahiran hidup tahun 2017 sebanyak 1.559 jiwa. AKB Kota Magelang tahun 2018 sebesar 13,10 per 1.000 kelahiran hidup, di mana bayi meninggal berjumlah 20 orang (12 laki-laki dan 8 perempuan) dengan sebagian besar penyebabnya adalah BBLR (Berat Badan Lahir Rendah). Di tahun 2019 terdapat kematian bayi sebanyak 16 kasus, 10 laki-laki dan 6 perempuan. Jumlah kelahiran hidup tahun 2019 sebanyak 1.532 jiwa. Pada tahun 2020 terjadi 20 kasus, 13 laki-laki dan 7 perempuan. Kematian bayi dengan berbagai penyebab kematian. Tren realisasi indikator kinerja selama 5 tahun terakhir menunjukkan fluktuasi, dan terjadi peningkatan di tahun 2020.

Sementara untuk balita, di tahun 2017 terdapat kematian balita sebanyak 22 kasus, 12 laki-laki dan 10 perempuan. Data pada tahun 2018 terdapat kematian balita sebanyak 23 kasus, 14 laki-laki dan 9 perempuan. Di tahun 2019 terdapat kematian balita sebanyak 18 kasus, 11 laki-laki dan 7 perempuan. Tahun 2020 terdapat sebanyak 24 kasus kematian balita, 15 laki-laki dan 9 perempuan.

Tabel 2.39
Kondisi Kesehatan Anak Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	AKB/ 1.000 KH	10,66	12,19	13,10	10,44	13,88
2	Kematian Neonatal (perinatal 0-6 hari dan neonatal 7-28 hari)	11	15	12	9	16
3	Kematian Bayi (usia 29 hari-11 bulan)	5	4	8	7	4
4	AKABA	12,66	14,11	15,06	11,75	16,66
5	Kematian Balita	19	22	23	18	24
6	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,28	0,39	0,32	0,19	0,69
7	Jumlah Gizi Buruk	15	20	17	10	17
8	Jumlah Stunting/Wasting	280	425	561	443	626

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2021

Jumlah balita gizi buruk di Kota Magelang pada tahun 2017 sebanyak 20 anak dan jumlah balita ditimbang sebesar 5.156 anak. Data jumlah balita gizi buruk di Kota Magelang pada tahun 2018 sebanyak 17 anak dengan jumlah balita yang ditimbang sebanyak 5.245. Kondisi tahun 2019 jumlah penderita gizi buruk sebanyak 10 anak dengan jumlah balita ditimbang sebanyak 5340.

Adapun untuk kondisi tahun 2020 jumlah penderita gizi buruk meningkat sebanyak 17 anak dengan jumlah balita ditimbang sebanyak 1.888 sehingga diperoleh angka prevalensi gizi buruk sebesar 0,90%. Sementara itu Angka Kematian Bayi yang ada di Kota Magelang masih fluktuatif. Namun angka yang ada saat ini sudah mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni menurun menjadi 24, sementara di Kota Magelang sendiri telah berada di angka 13,88.

b. Layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan yang harus diselenggarakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM. Kondisi pelayanan Kesehatan di Kota Magelang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Kondisi Pelayanan Kesehatan Kota Magelang
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Peserta JKN	107.480	106.290	124.757	127.512	125.206
2	Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K4	1.556	1.597	1.621	1.613	1.499
3	Jumlah Ibu Hamil	1.631	1.706	1.674	1.676	1.560
4	Jumlah Komplikasi Kebidanan yang ditangani	337	463	532	542	533
5	Jumlah Komplikasi Kebidanan	337	463	532	542	533
6	Jumlah persalinan yang di tangani tenaga kesehatan	1.492	1.564	1.532	1.526	1.440
7	Jumlah persalinan	1.492	1.564	1.532	1.526	1.440
8	Jumlah pelayanan Nifas (KF3)	1.492	1.562	1.530	1.524	1.438
9	Jumlah Ibu Melahirkan	1.492	1.564	1.532	1.526	1.440
10	Jumlah Usia Lanjut yang mendapatkan Layanan Kesehatan	NA	11.284	13.243	14.425	14.356
11	Jumlah Usia Lanjut	NA	16.096	17.443	18.352	18.468

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2021

Jumlah peserta JKN dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pelayanan Kesehatan terhadap lansia, menurut data tabel, masih ada sekitar 5.000-an

yang belum terlayani. Setiap tahun, pelayananan Kesehatan terhadap lansia terus meningkat.

Jumlah kunjungan ibu hamil K4, menunjukkan belum semua ibu hamil melakukan kunjungan K4. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab adanya kematian ibu karena pemantuan tidak optimal. Untuk penanganan komplikasi kebidanan dan persalinan yang ditangani tenaga Kesehatan, semuanya sudah ditangani. Kondisi ini menunjukkan kinerja pelayanan Kesehatan terkait penanganan tersebut yang sudah baik. Sedangkan untuk pelayanan nifas (KF3), masih ada Sebagian kecil yang belum tertangani. Jumlahnya berkisar antara 2-4 ibu melahirkan yang tidak tertangani pelayanan nifas-nya.

c. Penyakit Menular

Beberapa penyakit menular yang masih menjadi ancaman antara lain adalah Tuberkulosis, Demam Berdarah, Malaria, Kusta, dan HIV/AIDS. Kejadian kasus penyakit menular di Kota Magelang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Kejadian Penyakit Menular Kota Magelang
Tahun 2016-2020

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Pravelensi TB	122,54	153,49	154,61	174,23	195,28
2	Jumlah Penderita TB	148	204	201	227	250
3	Jumlah Kasus DB	87	66	52	76	23
4	Jumlah Kasus Malaria	0	0	0	0	0
5	Jumlah Kasus Kusta	1	2	3	0	0
6	Jumlah Kasus HIV/AIDS	15	18	14	10	21

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2021

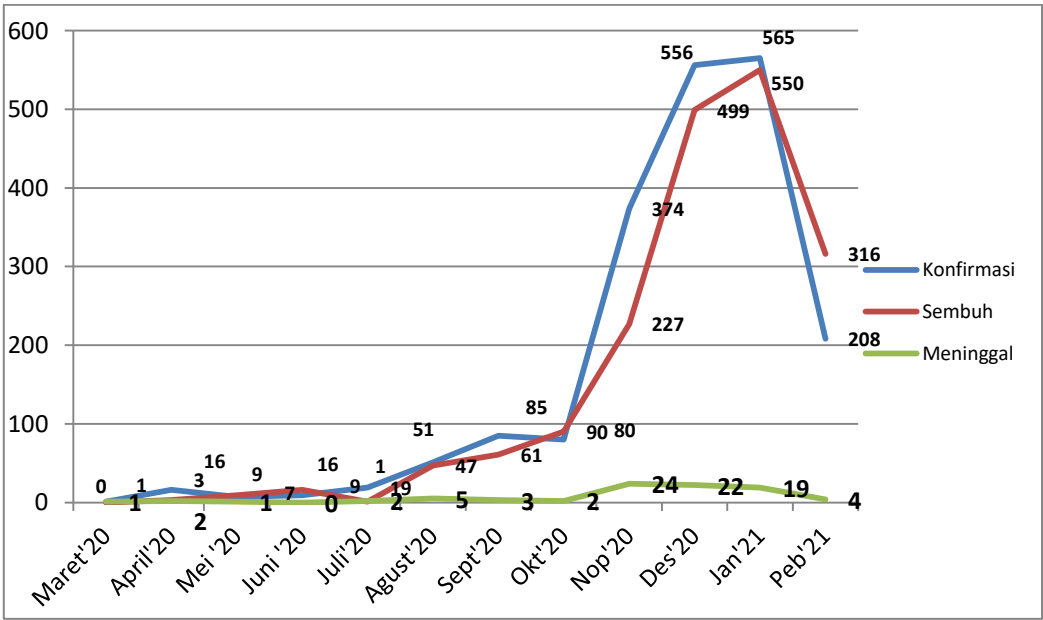
Jumlah penderita baru HIV AIDS usia 15-49 tahun di Kota Magelang di tahun 2017 adalah sebanyak 18 penderita dengan jumlah penduduk usia 15-49 tahun menurut data Disdukcapil sebesar 70.687 jiwa. Jumlah penderita baru HIV AIDS usia 15-49 tahun di Kota Magelang di tahun 2018 adalah sebanyak 14 penderita dengan jumlah penduduk usia 15-49 tahun sebesar 81.007 jiwa. Data pada tahun 2019 menunjukkan jumlah penderita baru HIV AIDS usia 15-49 tahun sebanyak 10 penderita dengan jumlah penduduk usia 15-49 tahun 67.487 jiwa sedangkan penderita HIV pada tahun 2020 menunjukkan tren yang meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya sehingga perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah seiringdengan meningkatnya tantangan ke depan seperti gaya hidup dan pengaruh media yang sangat gencar membawa dampak dan pengaruh yang di khawatirkan akan meningkatkan jumlah penderita HIV/AIDS

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah adalah terkait dengan pandemi Covid-19. Kondisi pandemi Covid-19 sampai dengan saat ini masih menjadi perhatian serius dari Pemerintah termasuk di Kota Magelang. Berbagai upaya sudah di lakukan oleh Pemerintah untuk menekan laju penularan Covid-19 mulai dari upaya preventif, deteksi ataupun respond namun kondisinya sampai dengan saat ini masih belum stabil. Di bawah ini di sajikan data terkait kasus Covid-19 di Kota Magelang sampai dengan Februari 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.42
Perkembangan Kasus Covid-19 di Kota Magelang
Bulan Maret 2020 s/d Februari 2021

No	Bulan	Kasus Pasien Covid-19		
		Konfirmasi	Sembuh	Meninggal
1.	Maret 2020	1	0	1
2.	April 2020	16	3	2
3.	Mei 2020	7	9	1
4.	Juni 2020	9	16	0
5.	Juli 2020	19	1	2
6.	Agustus 2020	51	47	5
7.	September 2020	85	61	3
8.	Oktober 2020	80	90	2
9.	November 2020	374	227	24
10.	Desember 2020	556	499	22
11.	Januari 2021	565	550	19
12.	Februari 2021	208	316	4

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2021



Gambar 2.25
Perkembangan Kasus Covid-19 di Kota Magelang Maret 2020 s/d Maret 2021
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2021

d. Penyakit Tidak Menular

Penyakit tidak menular masih menjadi ancaman bagi masyarakat. Beberapa penyakit tidak menular tersebut antara lain darah tinggi, obesitas, dan diabetes militus. Kondisi prevalensi penyakit tersebut di Kota Magelang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Kejadian Penyakit Tidak Menular Kota Magelang
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Prevalensi Darah Tinggi	1,27	4,28	0,15	2,38	4,76
2	Angka Prevalensi Obesitas	0,16	0,19	0,15	0,15	0,89
3	Angka Prevalensi Diabetes Militus	0,81	NA	0,96	1,88	2,67

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2021

Angka pravelensi darah tinggi menunjukkan tren yang fluktuatif, namun jika dilihat dari tahun 2016 ke tahun 2020 menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi. Kondisi ini juga hampir sama dengan angka pravelensi obesitas. Pravelensi ini menunjukkan kenaikan di tahun 2020 menjadi 0,89. Sementara pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 berada pada kisaran dibawah 0,20. Diabetes militus juga menunjukkan peningkatan di tahun 2020. Pada tahun 2016, angka pravelensi diabetes militus berada pada angka 0,81 meningkat menjadi 2,67 di tahun 2020.

e. SDM dan Sarana Prasarana Kesehatan

1) SDM Kesehatan

Sumber daya manusia Kesehatan menjadi salah satu komponen dalam penyediaan layanan Kesehatan yang berkualitas. Secara total, jumlah SDM bidang Kesehatan di Kota Magelang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (2016-2020). Secara detil, jumlah dokter dan bidan mengalami kenaikan selama tahun 2016 sampai tahun 2020. Namun, untuk perawat terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi 1.509 orang, setelah mengalami kenaikan sampai tahun 2019 menjadi 1.564 orang.

Tabel 2.44
Jumlah Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan Kota Magelang Tahun
2016-2020

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dokter	149	231	306	305	380
2	Bidan	183	187	183	188	197
3	Perawat	1.408	1.464	1.560	1.564	1.509

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2021

2) **Sarana Prasarana Kesehatan**

Sarana kesehatan yang ada di Kota Magelang sudah cukup merata dalam melayani masyarakat. Rumah sakit yang ada bertambah 1 di tahun 2019, yaitu Rumah sakit Tipe D. Laboratorium Kesehatan juga menunjukkan penambahan 1 unit di tahun 2019. Laboratorium Kesehatan yang pada tahun 2016 berjumlah 4 unit bertambah menjadi 5 unit sampai dengan tahun 2020. Untuk puskesmas dan puskesmas pembantu tidak ada penambahan unit. Jumlah puskesmas yang ada sebanyak 5 puskesmas, dan 12 puskesmas pembantu.

Tabel 2.45
Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan Kota Magelang
Tahun 2016-2020

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Sakit	7	7	7	8	8
	Type A khusus	1	1	1	1	1
	Type B	2	2	2	2	2
	Type C	1	1	1	1	1
	Type C khusus	1	1	1	1	1
	Type D	2	2	2	3	3
2	Puskesmas	5	5	5	5	5
3	Puskesmas Pembantu	12	12	12	12	12
4	Klinik/Balai Kesehatan	NA	NA	NA	NA	16
5	Laboratorium Kesehatan	4	4	4	5	5

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2021

2.3.1.3. **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

a. **Jalan dan Jembatan**

Dalam mendukung aksesibilitas antar pusat kegiatan gambaran struktur dan kondisi fisik jaringan jalan Kota Magelang secara umum hampir dalam kondisi baik dan terawat, baik jalan kota maupun jalan lingkungan. Kondisi jalan Kota Magelang selama kurun waktu 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Kondisi Jalan Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Panjang Jalan Kab/Kota (Km)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Jenis Permukaan	118,92	118,92	118,92	118,92	118,92
1	Aspal	118,92	118,92	118,92	118,92	118,92
2	Kerikil	0	0	0	0	0
3	Tanah	0	0	0	0	0
4	Tidak Dirinci	0	0	0	0	0
B	Kondisi Jalan	118,92	118,92	118,92	118,92	118,92
1	Baik	70,08	70,08	73,12	81,39	76,05
2	Sedang	38,98	36,94	38,27	29,59	35,78
3	Rusak	9,15	11,19	7,53	7,93	7,09
4	Rusak Berat	0	0,70	0	0	0
C	Kelas Jalan	118,92	118,92	118,92	118,92	118,92
1	Kelas I	0	0	0	0	0
2	Kelas II	0	0	0	0	0
3	Kelas III	0	0	0	0	0
4	Kelas III A	0	0	0	0	0

No	Uraian	Panjang Jalan Kab/Kota (Km)				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Kelas III B	0	0	0	0	0
6	Kelas III C	118,92	118,92	118,92	118,92	118,92
7	Tidak Dirinci	0	0	0	0	0

Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2021

Struktur jalan di Kota Magelang sebagian besar berupa jalan aspal dengan perkerasan aspal/hotmix terutama untuk jalan utama kota dan lingkungan serta sebagian dengan perkerasan rigid pavement atau betonisasi untuk jalan-jalan lingkungan. Secara fisik ruas jalan di Kota Magelang sudah dalam keadaan yang baik dan sedang 94.04%, oleh karena itu untuk menjaga kondisi tersebut perlu adanya pemeliharaan dan peningkatan baik secara rutin dan berkala. Indikator masih menyisakan kondisi jalan yang rusak atau dikarenakan tidak sesuai spesifikasi lebar dan perkerasan jalan sepanjang 5.96%.

Tabel 2.47
Kondisi Jembatan Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jembatan dalam kondisi baik	67	69	69	70	76
2	Jumlah Jembatan	79	79	79	79	79

Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2021

Kondisi jembatan di Kota Magelang selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami perbaikan. Dari tahun 2016, dimana terdapat 67 jembatan dalam kondisi baik dari total 79 jembatan yang ada, terjadi penambahan jembatan dalam kondisi baik menjadi 76 jembatan di tahun 2020. Kondisi ini tetap harus ditingkatkan untuk peningkatan kondisi jembatan dalam kondisi baik karena jembatan sebagai salah satu faktor pendukung aksesibilitas kawasan.

b. Drainase

Drainase merupakan salah satu prasarana dasar perkotaan yang vital karena berperan untuk mengalirkan limpasan air hujan dari kawasan perkotaan untuk meminimalisir terjadinya genangan. Sistem drainase Kota Magelang didominasi oleh sistem jaringan drainase tertutup yang diarahkan menuju Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Elo di sebelah timur yang berfungsi sebagai badan air. Kondisi drainase di Kota Magelang tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.48
Persentase Drainase/Gorong-Gorong dalam Kondisi Baik

	2016	2017	2018	2019	2020
Drainase dalam kondisi baik (m)	199,777	202,156	207,534	209,156	219,859
Total Panjang Drainase (m)	237,830	237,830	237,830	237,830	237,830
Persentase	84.00%	85.00%	87.26%	87.94%	92.44%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

Selain dilihat dari saluran drainase, sistem pelayanan drainase di Kota Magelang juga menggunakan shipon. Shipon merupakan bagian dari bangunan perlintasan drainase utama yang melewati jaringan irigasi di Kota Magelang dimana pembangunannya diharapkan untuk menjaga debit saluran irigasi agar tidak tercampur dengan drainase kota. Hingga taun 2020 sudah dilakukan pembangunan 9 (sembilan) unit shipon.

Keterpaduan penanganan drainase menjadi penting ketika berhadapan dengan lintas kewenangan, hal tersebut terlihat ketika terjadi permasalahan menahun adanya genangan di sisi perbatasan selatan Kota Magelang, dimana penanganan drainase diidentifikasi melekat pada kewenangan jalan dan saluran irigasi pengendali banjir yang masih menjadi satu belum terpisahkan. Permasalahan mulai ditangani semenjak Tahun 2019 dengan pembangunan drainase di Jalan Soka perbatasan Kabupaten dan Kota Magelang, serta Jalan Soekarno-Hatta kewenangan Kementerian PUPR melalui BPJN VII sedang diupayakan penanganan sebagian drainase jalan dan sudatan dengan drainase Jalan Sudirman kewenangan Kota. Sedangkan pengelolaan saluran irigasi berada di BBWS untuk pintu air dan peningkatan kapasitas saluran. Kejelasan, keterpaduan, dan kolaborasi sangat penting kedepan dalam peningkatan dan pembangunan saluran drainase, selain tentu saja penanganan drainase selalu berjalan atau beriringan dengan peningkatan jalan, baik untuk peningkatan kapasitas, kualitas, dan umur konstruksi drainase.

c. Sumber Daya Air

Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu-Opak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air KEMENPUPR RI, dimana dokumen rencana tersebut sudah diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang Tahun 2011-2031 beserta Perda perubahannya. Termasuk diakomodir di Indikasi Program Utama yaitu dengan masuknya Program *River Amenity* Sungai Progo yang diatur dalam Perpres 79/2019. Setiap tahun Pemerintah Kota

Magelang juga berkoordinasi mengirimkan matriks hasil evaluasi pengelolaan DAS Progo antara lain capaian pada luasan RTH Publik, pembuatan sumur resapan, biopori, sampai pengendalian sempadan sungai.

Sumber Daya Air di Kota Magelang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan domestik penduduk dan aktivitas perkotaan, serta non domestik (pertanian). Adapun sumber daya air di Kota Magelang berupa air permukaan dan cekungan air tanah. Sumber daya air permukaan berupa sungai, mata air, dan irigasi, sedangkan cekungan air tanah berupa Cekungan Air Tanah (CAT) Magelang Temanggung. Sungai yang berada di Kota Magelang berupa Sungai Elo dan Sungai Progo, yang merupakan sungai lintas batas Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di bawah kewenangan BBWS Serayu-Opak, dan di Kota Magelang digunakan sebagai badan air penerima dari drainase kota. Jaringan irigasi di Kota Magelang merupakan satu kesatuan sistem untuk mengairi Daerah Irigasi (D.I.) Progo Manggis-Kalibening yang meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung dengan total seluas 3.633 Ha.

Berdasarkan PERMENPU Nomor 14 /PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Bagian luasan D.I. berada di Kota Magelang mampu mengairi seluas 214 Ha. Dikarenakan satu kesatuan D.I. dengan luasan yang lebih dari 3000 Ha., maka wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekundernya berada pada Pemerintah Pusat dalam hal ini BBWS Serayu-Opak, sedangkan sampai saat ini aset irigasi tersebut masih tercatat pada Balai PSDA Progo-Bogowonto-Luk Ulo DINPUSDATARU Jawa Tengah. Sedangkan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem irigasi jaringan dibawahnya yaitu jaringan tersier di petak sawah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ditambah dengan saluran irigasi sekunder Kali Kota peninggalan Belanda yang mengambil air (pintu air) dari Irigasi Progo-Manggis namun lebih berfungsi sebagai saluran penggelontor drainase kota, dalam keadaan sedang sekitar 4.050 m dan sekitar 950 m rusak ringan hanya perlu pemeliharaan.

Tabel 2.49
Jaringan Irigasi Utama yang Melalui Kota Magelang

No	Jaringan Irigasi Teknis	Panjang (km)	Konstruksi Bangunan	Kewenangan
1	Saluran Progo-Manggis	10,46	Teknis	BBWS Serayu-Opak
2	Saluran Bening	12,66	Teknis	BBWS Serayu-Opak
3	Saluran Kali Kota	5	Teknis	Pemerintah Kota Magelang

No	Jaringan Irigasi Teknis	Panjang (km)	Konstruksi Bangunan	Kewenangan
4	Saluran Ngaran	2,96	Semi	BBWS Serayu-Opak
5	Saluran Gandekan	3,48	Semi	BBWS Serayu-Opak
6	Saluran Kedali	4,97	Semi	BBWS Serayu-Opak
7.	Saluran JITUT (Petak KP2B Kota Magelang)			
	a. Kramat Selatan	na	-	Petak Sawah Perorangan / Lembaga
	b. Kedungsari	na	-	Petak Sawah Perorangan / Lembaga
	c. Wates	na	-	Petak Sawah Perorangan / Lembaga
	d. Potrobangsari	na	-	Petak Sawah Perorangan / Lembaga
	e. Magelang	na	-	Petak Sawah Perorangan / Lembaga
	f. Gelangan	na	-	Petak Sawah Perorangan / Lembaga
	g. Cacaban	na	-	Petak Sawah Perorangan / Lembaga
	h. Jurangombo Utara	na	-	Petak Sawah Perorangan / Lembaga
	i. Tidar Utara	na	-	Petak Sawah Perorangan / Lembaga
	j. Tidar Selatan	na	-	Petak Sawah Perorangan / Lembaga

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pertanian dan Pangan 2020

Upaya peningkatan jaringan irigasi di Kota Magelang kedepan perlu dilakukan upaya kerja sama dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, kerja sama tersebut dalam hubungan pelimpahan

wewenang meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi lintas kewenangan.

Amanat RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RTRW Provinsi dalam rangka menjaga kedaulatan pangan, adalah menetapkan Luasan KP2B untuk Provinsi Jawa Tengah sebesar 1.022.571 ha atau 31,13% dari luas wilayah Jawa Tengah. Dari luas tersebut, Kota Magelang telah menetapkan KP2B seluas 63,34 Ha, pada RTRW Kota Magelang 2021-2031 terdiri dari lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dengan sebaran:

Tabel 2.50
Sebaran KP2B Kota Magelang sesuai dengan RTRW
Kota Magelang

No	Kelurahan	Luas (HA)	
		LP2B	LCP2B
1	Kedungsari	-	3.254505
2	Kramat Utara	-	-
3	Kramat Selatan	8.217404	0.823749
4	Potrobangsari	-	7.065934
5	Wates	-	0.790426
6	Kemirirejo	-	-
7	Magelang	8.554317	4.93151
8	Panjang	-	-
9	Gelangan	5.585652	-
10	Cacaban		4.090142
11	Rejowinangun Utara	0.001596	-
12	Rejowinangun Selatan	-	-
13	Magersari	-	-
14	Tidar Utara	13.615403	1.045252
15	Tidar Selatan	-	3.310022
16	Jurangombo Utara	-	2.054469
17	Jurangombo Selatan	-	-
Luas Total (HA)		35.974372	27.366009
		63.340381	

Sumber: Perda 2/2020 tentang Perubahan RTRW Kota Magelang 2011-2031

Upaya Pemerintah Kota Magelang untuk menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut kedepan masih perlu upaya melakukan perbaikan kualitas jaringan irigasi tersier, identifikasi dan inventarisasi upaya pensertifikasian lahan LP2B dan LCP2B menjadi hak pakai untuk mengamankan keberlanjutan dan ketersediaan KP2B secara bertahap.

d. Air Minum

Sumber air bersih bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Magelang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu sumber air bersih dari air tanah

(sumur) dan air bersih perpipaan yang dikelola oleh PDAM Kota Magelang. Sebagian besar kebutuhan air bersih penduduk sudah dapat dilayani melalui jaringan perpipaan yang telah menjangkau hampir di seluruh wilayah Kota Magelang.

Sistem jaringan air bersih di Kota Magelang terbagi menjadi sistem perpipaan dan sumur air dalam. Sistem perpipaan dikelola oleh PDAM dengan jumlah pelanggan pada tahun akhir tahun tahun 2019 sebanyak 27.661 dengan total pemakaian pada akhir tahun 2019 sebesar 7.700.534 liter/ tahun. Sedangkan kondisi pada tahun 2018, jumlah pelanggan sebanyak 27.300 dengan tingkat penggunaan air bersih sebesar 7.851.440 liter/ tahun. Sementara apabila dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah rumah tangga pada tahun 2017 yang menggunakan leding/perpipaan sebanyak 26.252 rumah tangga dengan tingkat penggunaan air bersih 7.633.558 liter/ tahun. Berdasarkan data strategis Kota Magelang Tahun 2019, pemakaian terbanyak oleh golongan II yaitu sebanyak 25.028 pelanggan atau 91,51%.

Tabel 2.51
Jumlah Pelanggan Air Minum, Total Pemakaian Air Minum, Jumlah Rumah Tangga dan Prosentase RT yang Menggunakan Air Bersih di Kota Magelang Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pelanggan Air Minum	25.103	26.252	27.300	27.661	27.694
Total Pemakaian Air (m ³)	7.606.319	7.633.558	7.851.440	7.700.534	3.794.958
Jumlah Rumah tangga	43.026	42.997	43.247	43.720	43.610
Prosentase rumah tangga menggunakan air bersih (Pelanggan PDAM Kota Magelang)	58,34%	61,06%	63,13%	63.26%	64%

Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang

Selain penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan, di Kota Magelang juga masih terdapat masyarakat yang menggunakan sistem penyediaan air bersih melalui sumur air tanah. Persentase rumah tangga yang menjadi Pelanggan PDAM pada akhir tahun 2019 sebesar 63,26%, sedangkan sisanya mendapatkan air bersih dari beberapa hidran umum air bersih yang disediakan Pemerintah Kota Magelang. Sebagian lainnya dengan memanfaatkan mata air baik yang diambil dari sumur maupun dari sumber-sumber mata air lainnya.

Akses air minum non perpipaan di Kota Magelang berdasarkan data yang ada dari Dinas Kesehatan Kota Magelang berasal dari sumur. Dari segi kesehatan penggunaan sumur gali ini kurang baik bila cara pembuatannya tidak benar-benar diperhatikan, tetapi untuk memperkecil kemungkinan

terjadinya pencemaran dapat diupayakan pencegahannya. Pencegahan-pencegahan ini dapat dipenuhi dengan memperhatikan syarat- syarat fisik dari sumur tersebut yang didasarkan atas kesimpulan dari pendapat beberapa pakar di bidang ini, diantaranya lokasi sumur tidak kurang dari 10 meter dari sumber pencemar, lantai sumur sekurang-kurang berdiameter 1 meter jaraknya dari dinding sumur dan kedap air, saluran pembuangan air limbah minimal 10 meter dan permanen, tinggi bibir sumur 0,8 meter, memiliki cincin (dinding) sumur minimal 3 meter dan memiliki tutup sumur yang kuat dan rapat.

Dari data dan hasil analisis baik dari akses Jaringan Perpipaan (PDAM dan SPAM Berbasis Masyarakat) maupun akses dari Bukan Jaringan Perpipaan (Sumur) maka dapat diketahui profil akses air minum penduduk Kota Magelang tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.52
Akses Air Minum Kota Magelang Tahun 2018

No	Kecamatan/Kelurahan	Akses Jaringan Perpipaan (JP) (%)	Akses Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) (%)	Cakupan Akses Total (%)
A	Magelang Selatan	33,25	0,41	33,66
1	Rejowinangun Selatan	6,82	0,10	6,92
2	Magersari	6,32	0,04	6,36
3	Jurangombo Utara	3,63	0,11	3,74
4	Jurangombo Selatan	5,59	0,01	5,60
5	Tidar Utara	5,91	0,13	6,03
6	Tidar Selatan	4,98	0,02	5,00
B	Magelang Utara	27,39	0,73	28,12
1	Wates	6,13	0,19	6,32
2	Potrobangsari	6,34	0,16	6,50
3	Kedungsari	3,86	0,10	3,96
4	Kramat Utara	4,54	0,11	4,65
5	Kramat Selatan	6,52	0,17	6,68
C	Magelang Tengah	34,52	0,86	34,75
1	Kemirirejo	4,93	0,05	4,98
2	Cacaban	5,96	0,08	6,04
3	Rejowinangun Utara	7,65	0,19	7,83
4	Magelang	6,40	0,10	6,50
5	Panjang	3,50	0,21	3,71
6	Gelangan	6,09	0,23	6,32
	TOTAL	95,16	2,00	97,16

Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang

Potensi sumber daya air (PSA) di Kota Magelang tahun 2020 adalah 5.364.021 m3/tahun ditambah 4.506.179 m3/tahun dengan asumsi bahwa potensi air permukaan mencukupi semua kebutuhan sawah untuk irigasi. Dari penjumlahan tersebut didapatkan total PSA adalah 9.870.200 m3/tahun. Sementara itu, kebutuhan air Kota Magelang di tahun yang sama adalah 12.793.817 m3/tahun. Berdasarkan kondisi tersebut, daya dukung air (DDA)

terhitung adalah 0,771 atau kurang dari 1. Maka dapat disimpulkan bahwa daya dukung air di Kota Magelang telah terlampaui atau defisit air.

e. Sanitasi

Sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Kondisi sanitasi yang kurang baik akan berdampak negatif di berbagai aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya penyakit pada balita, turunnya daya saing maupun citra kota, hingga menurunnya perekonomian kota.

Tabel 2.53
Cakupan Pelayanan Sanitasi di Kota Magelang
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	7%	3,73%	3,01%	0.85%	2,2%
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	88	65.19	93.34	97,18	97,80

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak dan berkelanjutan di Kota Magelang dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan kinerja yang cukup baik. Sampai akhir tahun 2020 capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan sebesar 97,8% dengan jumlah KK yang terlayani sejumlah 31.298 KK. Sedangkan untuk Rasio Rumah Tangga yang masih BABS masih sebesar 2,2 % dengan jumlah KK yang BABS masih sekitar 703 KK.

Adapun Faktor kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sanitasi adalah sebagai berikut :

- Keterbatasan lahan untuk pembuatan IPAL secara komunal
- Kondisi topografi wilayah Kota Magelang
- Muka air tanah tinggi
- Kemampuan masyarakat dalam mengakses ke IPAL yang sudah dibangun
- Masih kurang kesadaran masyarakat terhadap sanitasi
- Kurangnya penegakan Regulasi
- Kondisi perumahan di kawasan Kota Magelang yang sangat padat, keterbatasan akses jalan masuk armada operasional mobil tinja.

Upaya yang dilakukan adalah dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Magelang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk mendukung program Pemerintah Kota Magelang dalam penanganan sanitasi ke depan dengan Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3). Dengan adanya program ini diharapkan bisa semakin meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik skala Kawasan.

f. Infrastruktur dan Penataan Bangunan

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Jumlah Bangunan yang Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah bangunan ber-IMB	8.716	9.472	9.800	10.347	10.606
2	Jumlah total bangunan	40.602	40.602	40.602	40.602	40.602

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan pada tahun 2016 baru sekitar 20%, dengan jumlah sebesar 8.716 bangunan dari total 40.602 bangunan. Kondisi ini mengalami kenaikan dimana pada tahun 2020 secara kumulatif mencapai 26,12% yaitu dari total 40.602 unit bangunan tercapai 10.606 unit bangunan.

Selanjutnya terkait dengan pengendalian tata ruang dan bangunan gedung, dari tahun-tahun masih terus ada temuan-temuan terkait dengan pelanggaran yang terjadi di Kota Magelang. Dalam kurun waktu 2016-2020 terlihat kecenderungan bahwa semakin meningkat pelanggaran yang ditemukan. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa kegiatan pengendalian yang dilakukan telah menunjukkan hasil sekaligus menjadi tantangan bahwa pemahaman masyarakat terkait tata ruang masih perlu ditingkatkan. Pernyataan-pernyataan tersebut didukung dengan data yang memperlihatkan bahwa jumlah surat teguran yang keluar pada tahun 2020 mencapai 271 surat dan jumlah surat teguran yang paling banyak keluar selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2019 dengan 375 surat teguran.

g. Penataan Ruang

Dengan terbatasnya ruang yang ada dan semakin meningkatnya aktivitas, maka mutlak diperlukan adanya penyelenggaraan penataan ruang sehingga tercapainya harmonisasi ruang yang aman, nyaman dan berkelanjutan, salah satunya dimulai dari perencanaan tata ruang. Terkait dengan perencanaan tata ruang, Kota Magelang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031. Pemerintah Kota Magelang sesuai amanat UU 26/2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, masih mempunyai target pemenuhan operasional RTRW berupa Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) pada 5 (lima) Bagian Wilayah Perencanaan dalam bentuk Peraturan Walikota yang diselesaikan setidaknya sampai dengan Tahun 2022. Dokumen RDTR inilah yang harus disusun sebagai pedoman dalam mengimplementasikan tujuan, strategi dan kebijakan penataan ruang, rencana struktur dan rencana pola ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang kota. Kendala yang masih dihadapi dalam penyusunan RDTRK berupa data dasar dan pendukung dimasing-masing sektoral dengan tingkat kedetailan 1:5.000 yang belum dimiliki Daerah, membutuhkan upaya dan waktu untuk menyediakannya terlebih dahulu sebelum dapat dilakukan kajian lebih lanjut. Hal tersebut menjadi dasar bahwa dalam perencanaan tata ruang masih memerlukan dokumen perencanaan sektoral-keruangan sebagai turunan atau dukungan.

Pada sisi pemanfaatan ruang capaian kinerja selama ini diukur dari prosentase jumlah perizinan bangunan (IMB) yang dikeluarkan pertahunnya, dimana capaian selama ini 26,12% dari total bangunan pada penjelasan penataan bangunan. Indikator pemanfaatan ruang sesuai PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang diukur dari pelaksanaan kegiatan perizinan pemanfaatan ruang yang sesuai prosedur yang berlaku, adanya dokumen sinkronisasi program, dan terwujudnya indikasi program tersebut.

Pemanfaatan Ruang masih diperlukan adanya penyesuaian penilaian indikator kinerja tersebut. Pemanfaatan Ruang sesuai dengan tugas pokoknya, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, berkaitan dengan aspek kesesuaian pemanfaatan ruang untuk mendukung investasi dan pelaksanaan arahan indikasi program pemanfaatan ruang. Kesesuaian Pemanfaatan ruang melalui investasi untuk mengisi ruang dan menjaga konsistensi perencanaan, agar mencapai tujuan penataan ruang. Kesesuaian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui mekanisme perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) sebagai sistem

yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha secara elektronik dengan didasarkan pada kesesuaian terhadap RDTRK. Dikarenakan RDTR Kota Magelang belum tersusun dan sistem OSS belum ada, perizinan tersebut masih dilakukan secara offline melalui mekanisme persetujuan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang).

Selain pelaksanaan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, komponen kegiatan pemanfaatan ruang selanjutnya adalah sinkronisasi program pemanfaatan ruang baik jangka menengah maupun jangka pendek. Indikator kinerjanya adalah adanya dokumen sinkronisasi tersebut. Indikator kinerja lainnya adalah terwujudnya tata ruang yang sesuai dengan indikasi program dalam rencana tata ruang yang dihitung dengan jumlah program dalam indikasi program yang terwujud dibandingkan dengan keseluruhan jumlah program dalam indikasi program dalam dokumen rencana tata ruang. Beberapa penyesuaian dan kebutuhan yang perlu dilaksanakan berupa Penyusunan Perda/Perkada/SK/SE mengenai mekanisme Pelaksanaan KKPR, Penyusunan Perda/Perkada/SK/SE terkait sinkronisasi program pemanfaatan ruang, Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Selain 3 (tiga) pokok komponen pelaksanaan penataan ruang di atas, ada kegiatan tambahan untuk mendukung penyelenggaraan penataan ruang di Kota Magelang, yaitu pembinaan tata ruang. Pembinaan tata ruang bersifat lintas seksi/komponen pelaksanaan penataan ruang. Sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan oleh 3 seksi secara bersama-sama. Di antara kegiatan yang harus dilaksanakan adalah koordinasi penyelenggaraan penataan ruang atau pelaksanaan forum penataan ruang daerah; sosialisasi penataan ruang; pelaksanaan bimbingan atau konsultasi penataan ruang; pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada instansi atau masyarakat; penelitian, kajian, atau inovasi; pengembangan sistem informasi penataan ruang; penyebarluasan informasi penataan ruang; dan pembinaan/ pengembangan jabatan fungsional penata ruang. Selama ini kegiatan yang telah terlaksana adalah koordinasi penyelenggaraan penataan ruang, sosialisasi, pelaksanaan konsultasi, pelaksanaan pelatihan, inovasi pada kegiatan pengendalian, pengembangan sistem informasi, serta penyebarluasan informasi melalui banner dan pemasangan peta analog pola ruang yang dipasang di beberapa tempat strategis.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Magelang selama ini dilaksanakan melalui monitoring terhadap pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang dimana pengendalian ruang melibatkan kelurahan dalam monitoringnya dengan dibentuknya Tim Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Tim Wasmanru) yang juga didukung oleh beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) seperti DPUPR, DLH, Dishub, Satpol PP, dan Bagian Hukum. Beberapa SOP juga sudah

dibentuk untuk mendongkrak kinerja, indikator capaian dari kegiatan berupa laporan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang tiap bulan hasil dari monitoring terhadap pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang di seluruh Kelurahan di Kota Magelang. Dalam kegiatan pengawasan lapangan, Tim Wasmanru Kota Magelang dilengkapi dengan alat survei yang didesain dan dikeluarkan oleh DPUPR Kota Magelang yaitu Surat Tilang. Surat Tilang ada sejak tahun 2019 sebagai inovasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Mekanisme pemberian Surat Tilang sama dengan pemberian Surat Pemberitahuan, namun surat tilang bisa disampaikan langsung oleh anggota Tim Wasmanru kepada masyarakat. Surat Tilang diberikan kepada masyarakat yang terindikasi melanggar pemanfaatan ruang Kota Magelang. Banyak Surat Tilang yang sudah diberikan sejak 2019 hingga 2020, berikut adalah rekapitulasinya:

Tabel 2.55
Jumlah Surat Teguran Pelanggaran Tata Ruang

	2016	2017	2018	2019	2020*
Jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan	41.00	51.00	28.00	375.00	646.00
Jumlah bangunan dan reklame yang belum ber-IMB	150.00	167.00	168.00	168.00	29,996.00
Persentase	27.33 %	30.54%	16.67%	223.21%	2.15%

Catatan: angka tahun 2020 merupakan akumulasi dengan angka 2011-2016

Gambaran realisasi capaian indikator dalam pelaksanaan Tahun 2016 surat teguran yang dilayangkan sejumlah 41 dan Tahun 2017 sebesar 51 dan kinerja tercapai, sedangkan Tahun 2018 hanya mengirimkan 28 surat teguran dengan kinerja 50.51%, Tahun 2019 surat teguran untuk pembangunan bangunan yang tidak berizin sebanyak 375 buah, bahkan pada akhir Tahun 2020 sudah mencapai 271 buah surat teguran yang dilayangkan, atau mencapai kinerja 402,27%. Peningkatan Kinerja akibat adanya penyederhanaan mekanisme pengawasan lapangan dengan adanya efektifitas kinerja dari tim Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan adanya inovasi blangko surat teguran yang berada pada petugas/anggota tim di setiap kelurahan, sehingga cepat memberikan teguran, agar pemilik objek dapat memproses perizinan lebih lanjut.

Surat Tilang merupakan inovasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Magelang, kedepan dimungkinkan inovasi tersebut akan berkembang

mengikuti zaman dan teknologi yang ada. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di perlu dikuatkan kedepan agar tidak ada pemanfaatan ruang di Kota Magelang yang tidak sesuai dengan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Magelang.

Selain Pemberian Surat Tilang, diberikan juga Surat Peringatan kepada masyarakat yang telah melanggar pemanfaatan ruang di Kota Magelang. Contoh dari pelanggaran pemanfaatan ruang diantaranya adalah membangun tidak sesuai pola ruang, membangun tanpa perizinan dari pemangku kepentingan, membangun tidak sesuai perizinan bangunan yang telah diterbitkan, dan sebagainya.

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Penanganan Kawasan Kumuh

Tujuan nasional dalam pengentasan permukiman kumuh adalah dengan mencapai 100% pelayanan air bersih, 100% pelayanan sanitasi dan 0% kawasan kumuh. Sehingga masalah ketersediaan air minum yang layak, pemenuhan jamban keluarga/ komunal serta perbaikan RTLH merupakan langkah strategis yang harus dipenuhi. Sedangkan menurut data *baseline*, aspek kumuh yang memiliki permasalahan cukup besar antara lain adalah proteksi kebakaran, pengelolaan persampahan, jalan, dan pengelolaan limbah tinja (jamban).

Sesuai dengan SK Walikota Magelang No 050/105/II.2 Th 2018 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Magelang dengan luasan kumuh awal seluas 121,17 akhirnya pada tahun 2020 luasan kumuh bisa terselesaikan semua sesuai dengan berita acara yang ditandatangani antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang dengan Pokja PKP Kota Magelang dan Tim KOTAKU. Adapun penanganan kumuh dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di Kota Magelang dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.56
Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Magelang
Tahun 2016-2020

No	Kelurahan	Luasan Kumuh (Ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kelurahan Cacaban	5,61	2,81	1,34	1,12	1,84
2	Kelurahan Gelangan	5,55	5,28	1,06	0,92	2,99
3	Kelurahan Jurangombo Selatan	3,14	0	0	0	3,05
4	Kelurahan Jurangombo Utara	2,45	1,4	1,1	0	0
5	Kelurahan Kedungsari	6,46	4,462	4,122	1,33	1,20

No	Kelurahan	Luasan Kumuh (Ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
6	Kelurahan Kemirirejo	9,98	0,4	0,4	0,38	0,63
7	Kelurahan Kramat Selatan	4,6	4,37	4,37	0,37	1,89
8	Kelurahan Kramat Utara	15,2	4,11	0,28	0	1,75
9	Kelurahan Magelang	4,87	7,9	7,9	0	1,13
10	Kelurahan Magersari	4,59	0,19	0,19	0	0
11	Kelurahan Panjang	7,26	7,71	0	0	0
12	Kelurahan Potrobangsari	2,89	1,85	1,85	0,80	2,31
13	Kelurahan Rejowinangun Selatan	4,42	1,04	0,42	-	6,50
14	Kelurahan Rejowinangun Utara	12,12	10,895	4,791	1,29	1,76
15	Kelurahan Tidar Selatan	2,34	4,092	1,702	0,40	1,23
16	Kelurahan Tidar Utara	2,88	3,77	2,16	0,80	1,20
17	Kelurahan Wates	2,41	7,126	5,516	3,36	2,19
	Jumlah	96,77	67,405	37,201	10,78	39,91

Sumber: Disperkim dan KOTAKU

Luas Kawasan kumuh mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 terjadi peningkatan lagi. Hal ini terjadi karena adanya pemutakhiran data baseline luasan kumuh sesuai dengan Permen PUPR no 14 tahun 2018 dengan 16 parameter.

b. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Program pengurangan jumlah RTLH dilakukan melalui fasilitas perbaikan kualitas rumah yang diwujudkan dengan bantuan stimulan perumahan swadaya. Kriteria RTLH berdasarkan kesepakatan pemangku kepentingan terkait yang meliputi atap, lantai dan dinding. Kriteria atap yaitu atap yang terbuat dari ijuk atau rumbia, lantai masih berupa tanah dan dinding terbuat dari bambu atau kayu murahan. Total pengentasan RTLH sampai dengan akhir tahun 2020 sebanyak 1.688 unit.

Intervensi program penanganan RTLH telah dilakukan mulai tahun 2017 dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah serta didukung oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari swasta. Penanganan RTLH ini dilakukan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin di Jawa Tengah. Adapun perkembangan penanganan RTLH beserta Rasio Rumah Layak Huni di Kota Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Perkembangan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Magelang
Tahun 2017-2020

Tahun	RTLH (Unit)	Realisasi (Unit)
2017	4.207	500
2018	3.740	467
2019	3.296	444
2020	2.852	277

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

c. Penyediaan Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain dapat berupa prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Demikian juga dalam Pasal 88 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun menegaskan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan insentif kepada pelaku pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta memberikan bantuan dan kemudahan bagi MBR berupa bantuan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sesuai dengan tupoksinya, akan membantu dan memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam suatu perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang memadai.

Hal ini merupakan amanat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa perumahan sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Pemerintah Kota Magelang berkomitmen dalam penyediaan Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum, dengan segala potensi dan keterbatasan sumber daya alam yang ada di Pemerintah Kota Magelang. Adapun data kebutuhan rumah tersedia dalam tabel berikut :

Tabel 2.58
Rekapitulasi Backlog Data Kebutuhan Rumah Tahun 2020

No	Kecamatan, Kelurahan	Rumah Tangga	Data Rumah			Backlog Kepemilikan	Backlog Penghunian (Menumpang)	MBR (KK)
			Rumah	Rumah SHM	Rumah Sewa			
	Magelang Utara							
1	Kramat Utara	1.389	1.284	1.050	234	339	105	183
2	Kramat Selatan	2.405	2.052	1.934	118	471	353	459
3	Potrobangsari	2.322	2.005	1.615	390	707	317	89
4	Kedungsari	2.067	1.773	1.439	334	628	294	47
5	Wates	2.521	2.166	1.704	462	817	355	365
	Sub Total	10.704	9.280	7.742	1.538	2.962	1.424	1.143
	Magelang Tengah							
6	Magelang	2.169	1.708	1.494	214	675	461	595
7	Cacaban	2.059	1.724	1.415	309	644	335	595
8	Kemirirejo	1.170	1.040	884	156	286	132	396
9	Gelangan	2.024	1.910	1.196	714	828	215	564
10	Panjang	1.589	1.342	1.024	318	565	247	692
11	Rejowinangun Utara	3.122	2.579	2.110	469	1.012	543	1.070
	Sub Total	12.133	10.303	8.123	2.180	4.010	1.933	3.912
	Magelang Selatan							
12	Rejowinangun Selatan	2.253	1.738	1.400	338	853	515	956
13	Tidar Utara	1.995	1.605	1.434	171	561	390	665
14	Tidar Selatan	1.122	1.088	942	146	180	34	363
15	Magersari	1.962	1.659	1.409	250	553	303	735
16	Jurangombo Utara	1.085	894	803	91	282	191	364
17	Jurangombo Selatan	1.826	1.643	1.466	177	360	183	235
	Sub Total	10.243	8.627	7.454	1.173	2.789	1.616	3.318
	Total	33.080	28.210	23.319	4.891	9.761	4.973	8.373

Sumber: Disperkim Kota Magelang, 2020

Dari data tersebut bisa dilihat bahwa kebutuhan penyediaan perumahan di kota Magelang masih sangat tinggi sekitar 4.973, dengan kondisi masih menumpang. Luas Kota Magelang 1.854,67 Ha dengan jumlah penduduk 128.020, jumlah KK 33.080 serta Kepadatan Penduduk (jiwa / km²) 6.905. Sebesar 69,49% dari luas Kota Magelang 1.854,67 Ha merupakan lahan terbangun yang berupa permukiman, perdagangan dan jasa, pendidikan, perkantoran, kesehatan, pariwisata, industri dan kawasan terbangun lainnya.

Tata guna lahan di Kota Magelang didominasi oleh pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman. Sedangkan kawasan perumahan mempunyai luas sekitar 881 ha. Kawasan ini merupakan kawasan dengan kepadatan perumahan tinggi, kepadatan perumahan sedang, dan kepadatan perumahan rendah. Melihat kebutuhan perumahan semakin meningkat setiap tahunnya, untuk mengurangi perubahan penggunaan lahan, maka pengembangan perumahan akan dilakukan dengan cara vertikal.

Kondisi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan perumahan Kota Magelang masih menjadi permasalahan karena selama ini belum ada serah terima aset PSU dari para pengembang ke Pemerintah Kota Magelang, sehingga terjadi kendala dalam pemeliharaan dan perawatannya. Untuk saat ini sudah disusun Peraturan Daerah no 8 Tahun 2020 tentang PSU. Dimana mengatur tentang penyelenggaraan Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, salah satunya mengatur kewajiban dari Pengembang untuk menyediakan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan sampai serah terima aset ke Pemerintah Kota Magelang. Dan di tahun 2021 dilakukan penyusunan Peraturan Walikota tentang Peraturan Teknis penyelenggaraan Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum.

Jumlah perumahan “komersil” yang terfasilitasi PSU sesuai dengan data Capaian LPPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman s.d Th 2020 adalah sebesar 25 Perumahan. Adapun Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU tercapai sebesar 90,28%, sehingga kondisi PSU Permukiman yang tidak memenuhi syarat sekitar 9,72%.

2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

a. Kondusifitas/Stabilitas Daerah

Kondusifitas Kota Magelang menunjukkan perbaikan selama tahun 2016 sampai tahun 2020. Salah satunya ditunjukkan dengan penurunan angka kriminalitas. Salah satunya ditunjukkan dengan penurunan angka kriminalitas yang menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, angka kriminalitas menunjukkan angka 170 yang kemudian menurun menjadi 134 di tahun 2020. Sedangkan untuk penanganan kriminalitas, masih berada pada kisaran 70-an persen. Jumlah demo/unjuk rasa menunjukkan tren yang fluktuatif. Jumlah demo cukup tinggi pada tahun 2016 dan tahun 2019 dimana menunjukkan adanya 13 demo. Selain tahun tersebut, jumlah demo berjumlah kisaran 5, dan pada tahun 2018 hanya terjadi 2 kali demo. Untuk kasus konflik sosial tidak pernah terjadi di Kota Magelang.

Tabel 2.59
Kondusivitas Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka kriminalitas	170	162	153	142	134
2	Angka kriminalitas yang tertangani (jumlah)	120	118	115	107	99
	Angka kriminalitas yang tertangani (%)	70,59	72,84	75,16	75,35	73,88
3	Jumlah demo/unjuk rasa	13	6	2	13	5
4	Jumlah penyakit masyarakat	283	280	273	261	180
5	Jumlah konflik sara/konflik sosial	0	0	0	0	0
6	Jumlah kasus narkoba	20	30	33	35	25
7	Jumlah petugas satpol PP	60	65	101	218	215
8	Jumlah siskamling aktif	178	182	191	252	94
9	Jumlah linmas	680	733	803	1027	1027

Sumber: Satpol PP dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang, 2021

Kasus narkoba menunjukkan angka peningkatan sampai dengan tahun 2019, yang kemudian menurun di tahun 2020. Jumlah kasus narkoba di tahun 2016 sebanyak 20 kasus, yang kemudian pada tahun 2019 ditemukan 35 kasus. Pada tahun 2020, kasusnya menurun menjadi 25 kasus.

Dalam rangka mendukung kondusivitas wilayah, diperlukan juga aparatur dan peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban wilayah. Jumlah petugas satpol dan linmas di Kota Magelang menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2016 sampai 2020. Petugas satpol pp yang pada tahun 2016 berjumlah 60 personil meningkat menjadi 215 personil di tahun 2020. Kondisi ini juga berlaku pada jumlah linmas. Pada tahun 2020, jumlah linmas meningkat menjadi 1.027 personil dari jumlah 680 personil di tahun 2016. Peran serta masyarakat dalam menjaga kondusivitas ditunjukkan dalam siskamling. Jumlah siskamling aktif menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2019, tetapi menurun di tahun 94. Kondisi ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan berkumpulnya masyarakat.

b. Stabilitas Politik dan Wawasan Kebangsaan

Tingkat partisipasi politik di Kota Magelang masih belum cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi politik dalam pemilihan umum masih berada di bawah 90%. Pada pemilu Gubernur Jawa Tengah tahun 2018, tingkat partisipasi politik berada pada angka 76,10%. Pada tahun 2019, masa pemilu Presiden, tingkat partisipasi politik meningkat menunjukkan angka 86,90%. Sementara, pada pemilu Kepala Daerah tahun 2020, tingkat partisipasi politik menurun menjadi 77,41%.

Tabel 2.60
Partisipasi Politik dan Wawasan Kebangsaan
Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Partisipasi politik dalam pemilihan umum	NA	NA	68.910	79.371	73.280
2	Tingkat partisipasi politik	NA	NA	76,10%	86,90%	77,41%
3	Jumlah masyarakat yang mendapat pendidikan politik dan wasbang	800	1.018	1.030	1.050	1.200
4	Jumlah ormas yang dibina dan difasilitasi	10	19	23	20	0

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang, 2021

Sementara itu, jumlah masyarakat yang mendapatkan Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, jumlah masyarakat yang mendapatkan Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan berjumlah 800 orang, yang kemudian meningkat hingga tahun 2020 yang emnunjukkan angka 1.200 orang. Untuk pembinaan dan fasilitasi ormas menunjukkan angka yang fluktuatif. Fasilitasi ormas dilakukan menyesuaikan dengan undangan dari provinsi. Pada tahun 2020 tidak ada ormas yang difasilitasi karena tidak ada kegiatan terkait hal tersebut disebabkan pembatasan kegiatan mengumpulkan masa akibat pandemi Covid-19.

c. Penanggulangan Bencana

Berdasarkan data dari BNPB (inarisk.bnpb.go.id), Indeks Resiko Bencana Kota Magelang berada pada angka 75,6 pada tahun 2019. Namun terkait dengan pemahaman mitigasi bencana menjadi hal yang pokok untuk dapat diketahui masyarakat secara luas, sehingga kedepan diharapkan masyakat dapat mengatasi kejadian-kejadian bencana khususnya bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekitarnya. Data masyarakat yang tanggap bencana sampai dengan tahun 2020 dapat tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.61
Kondisi Penanggulangan Bencana Kota Magelang
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah dokumen mitigasi bencana	NA	NA	2	4	4
2	Jumlah masyarakat tanggap bencana	46.335	49.103	52.203	52.403	52.728
3	Jumlah kelurahan tangguh bencana	NA	1	2	4	4

Sumber: Satpol PP Kota Magelang, 2021

Sampai saat ini, dokumen terkait mitigasi bencana yang sudah dibuat ada 4 yang merupakan rencana kontijensi bencana yang ada di Kota Magelang. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan dalam rangka menjangkau masyarakat agar lebih tanggap bencana. Jumlah masyarakat yang paham terkait bencana mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, belum dapat menjangkau keseluruhan penduduk Kota Magelang. Sejalan dengan hal tersebut diatas guna memaksimalkan fungsi perlindungan masyarakat terhadap ancaman bencana maka perlu disorot juga terkait dengan cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana yang capaian sampai dengan tahun 2021 baru terbentuk 4 kelurahan atau sekitar 23,53% dari total 17 kelurahan, sehingga kedepan perlu dilakukan akselasi pembentukannya.

2.3.1.6. Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti pembangunan kehidupan beragama. Target pembangunan sosial diarahkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Penanganan masalah sosial di Kota Magelang menjadi perhatian yang cukup serius karena jumlah PMKS yang terus meningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Hal ini terlihat dari tingginya PMKS pada tahun 2020 yaitu sebesar 11.898 jiwa, meningkat dari tahun 2019 sebesar 7.305 jiwa.

Tabel 2.62
Kondisi PMKS dan Tenaga Penanganan Masalah Sosial Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS	8.224	7.502	8.228	7.305	11.898
2	Jumlah PSKS	293	350	268	268	899
3	Jumlah Tagana	6	45	6	6	13

Sumber: Dinas Sosial Kota Magelang, 2021

Tenaga Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan unsur masyarakat yang memberikan dukungan riil dalam penanganan PMKS di sekitarnya. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) PSKS mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Populasi PSKS, sebagaimana hasil pemuktahiran data tahun 2020 terdiri atas 899 orang, mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebanyak 268 orang. Dalam hal penanganan bencana masih perlu

ditingkatkan jumlah personil dan kapasitas Tagana yang merupakan bagian dari PSKS, saat ini hanya ada 13 anggota Tagana di Kota Magelang.

Jika dilihat dari jumlah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), jumlah penerima program menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2016 berada pada angka 1.571 yang kemudian meningkat menjadi 1.900-an di tahun 2017. KPM PKH bertambah lagi di tahun 2018 dan sempat menurun di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 3.429 orang pada penerima tahap 4.

Tabel 2.63
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Magelang Tahun 2016-2020

Tahun	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
2016	1.571	1.571	1.571	1.571
2017	1.996	1.980	1.977	1.941
2018	1.934	1.913	3.008	2.979
2019	2.898	2854	2.815	2.659
2020	3.036	3142	3.430	3.429

Sumber: Dinas Sosial Kota Magelang, 2021

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah validitas data kesejahteraan sosol yang masih perlu ditingkatkan. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial lebih akurat, memuat 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah dan dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut dengan desil. Saat ini masih terdapat *inclusion error* dan *exclusion error* pada data kesejahteraan sosial yang ada. Dengan data yang baik, diharapkan program kegiatan yang dilaksanakan oleh lintas sektor menjadi lebih tepat sasaran dan efektif dalam penanggulangan kemiskinan. Kendala yang dihadapi saat ini bahwa masih adanya ego sektoral dimana masing-masing instansi/lembaga memiliki kriteria sendiri yang berbeda dengan DTKS dalam penentuan sasaran penerima manfaat.

2.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan menunjukkan hasil positif dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, namun menurun di tahun 2020. Kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh turunnya permintaan akan barang dan jasa yang disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat. Kenaikan TPT di tahun 2020 berpengaruh secara langsung terhadap penurunan persentase tenaga kerja

formal sebesar 5,81 persen menjadi 54,18 persen dan peningkatan lapangan kerja informal non pertanian sebesar 4,61 persen menjadi 44,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu 2016-2020 proporsi lapangan kerja informal non pertanian cenderung fluktuatif. Secara umum proporsi lapangan kerja informal non pertanian perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki dalam 5 tahun terakhir. Sejalan dengan hal tersebut, persentase tenaga kerja formal laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Kondisi ini menggambarkan bahwa kesempatan kerja laki-laki di sektor formal lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini bisa disebabkan oleh budaya maupun kondisi fisiologi, dimana perempuan mempunyai kewajiban untuk mengurus anak, mengalami haid, hamil dan melahirkan sehingga dianggap mengurangi produktivitas kerja. Sementara kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga perempuan dituntut untuk ikut membantu laki-laki dalam mencari tambahan penghasilan.

Tabel 2.64
Perkembangan Pembangunan Ketenagakerjaan

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Proporsi lapangan kerja informal non pertanian	43.8	39.95	45.18	40.01	44.62
	a. laki-laki	39.36	36.2	40.68	38.32	39.91
	b. perempuan	49.1	44.34	50.39	42.04	50.27
2.	Persentase tenaga kerja formal	56.23	59.69	54.65	59.99	54.18
	a. laki-laki	60,65	63,47	59,31	61,68	58,74
	b. perempuan	50,89	55,25	49,25	57,96	48,72
3.	Persentase tenaga kerja informal sector pertanian	0	0.37	0.17	0	0.1
4.	Upah rata-rata per jam pekerja (Rp)	12.091,88,-	13.866,5,-	14.302,05,-	n.a	14.560,86,-
5.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	93,21%	86,80%	68.90%	85.62%	51.50%
	a. Pencari kerja terdaftar	452	574	531	1008	636
	b. Lowongan kerja terdaftar	1.145	3.280	4.903	1.617	836
6.	Persentase Wirausaha Baru	12,50%	15,00%	10%	26%	16,7%
7.	Persentase Perselisihan HI terselesaikan melalui PB	50%	83,33%	100%	89%	63.6%
8.	Coverage asuransi ketenagakerjaan	69%	71.85%	71.99%	52.67%	74%

Sumber : Sakernas, BPS dan Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, 2016-2020

Upah rata-rata per jam pekerja menunjukkan tren yang terus meningkat selama lima tahun terakhir. Kondisi ini menggambarkan kesejahteraan pekerja formal yang semakin membaik dan perlindungan tenaga kerja semakin meningkat. Sejalan dengan indikator tersebut, peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 21,33% persen poin di tahun 2020, meskipun sempat menurun sebesar 19,32 persen poin di tahun 2019. Adanya bantuan tunai terhadap peserta jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi pemicu peningkatan persentase peserta jamsostek di tahun 2020 seiring dengan berkurangnya jumlah tenaga kerja dikarenakan PHK dan dirumahkan sebagai dampak pandemi Covid 19.

Jumlah pencari kerja bisa menjadi salah satu indikator ketersediaan tenaga kerja dalam suatu wilayah kerja. Di Kota Magelang, jumlah pencari kerja terdaftar dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat hingga Tahun 2019, dan menurun di Tahun 2020 sebanyak 372 jiwa menjadi 636 pencari kerja. Jumlah pencari kerja laki-laki seimbang dibandingkan jumlah pencari kerja perempuan. Menurut tingkat pendidikannya, pencari kerja di Kota Magelang masih didominasi oleh lulusan SLTA dan jumlahnya bertambah dari tahun ke tahun.

Sejalan dengan kondisi ketersediaan tenaga kerja, permintaan akan tenaga kerja di Kota Magelang dominan peruntukannya bagi lulusan SLTA. Secara umum, jumlah kebutuhan tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan jumlah ketersediaan tenaga kerja. Namun demikian, tingginya permintaan belum bisa dipenuhi oleh ketersediaan tenaga kerja, dikarenakan adanya kesenjangan antara kualifikasi kebutuhan tenaga kerja dengan minat dan kompetensi tenaga kerja yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan perlunya perencanaan tenaga kerja (RTK) sebagai upaya mengoptimalkan ketersediaan tenaga kerja untuk memenuhi kualifikasi kebutuhan tenaga kerja. Perencanaan pelatihan tenaga kerja sesuai dengan klasternya sangat dibutuhkan untuk menentukan jenis pelatihan yang paling dibutuhkan dalam pembangunan local, regional dan nasional. Perencanaan ini tentunya disesuaikan dengan kondisi supply/ketersediaan tenaga kerja yang ada baik minat maupun kemampuannya.

Sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan niat/motivasi bekerja mandiri. Dalam kurun waktu 2016 - 2020, wirausaha baru yang muncul menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada Tahun 2016 tercatat 12,5 persen telah terbentuk wirausaha baru, meningkat 2,5 persen menjadi 15 persen di tahun 2017. Namun terjadi penurunan persentase wirausaha baru yang tercipta sebesar 5 persen menjadi 10 persen pada Tahun

2018, lalu meningkat cukup tinggi sebesar 16 persen di tahun 2019 dan menurun sebesar 9,3 persen menjadi 16,7 persen di tahun 2020.

Capaian kinerja persentase wirausaha baru dipengaruhi oleh belum adanya bantuan sarana dan prasarana usaha sebagai modal awal memulai kerja mandiri/ berwirausaha dan belum semua pelatihan memasukkan unsur softskill/ motivasi berwirausaha dari pengusaha yang telah berhasil/ success story. Dengan tingkat pengangguran terbuka yang meningkat tajam di tahun 2020, dan masih belum ada kepastian kestabilan ekonomi dunia, maka penciptaan wirausaha baru menjadi upaya yang harus diutamakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 5 persen.

Sementara kondisi hubungan industrial di Kota Magelang belum optimal dimana persentase perselisihan HI yang terselesaikan melalui perjanjian bersama mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Hal ini dikuatkan dengan kondisi tenaga kerja yang belum semuanya tercover oleh asuransi ketenagakerjaan. Masih ada 25 persen tenaga kerja yang belum optimal perlindungannya. Untuk itu perlu adanya perlindungan yang optimal dengan 4 macam program yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sejauh ini urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Magelang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP4KB), beserta suatu unit kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), namun dalam hal ini upaya terhadap pemberdayaan dan perlindungan anak juga sangat penting dilaksanakan pada level pertama yaitu masyarakat melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Melalui pembentukan Puspaga di tiap-tiap kelurahan diharap dapat dihasilkan kader-kader masyarakat yang nantinya akan terjun langsung ke masyarakat dalam membantu mengatasi masalah keluarga menuju terciptanya ketahanan keluarga yang hakiki, baik Ketahanan Fisik yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga yaitu kemampuan anggota keluarga dalam memperoleh sumber daya ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Ketahanan Sosial yang merupakan kekuatan keluarga dalam penerapan nilai agama, pemeliharaan ikatan dan komitmen, komunikasi efektif, pembagian dan penerimaan peran, penetapan tujuan serta dorongan untuk maju yang akan

menjadi kekuatan dalam menghadapi masalah keluarga serta memiliki hubungan sosial yang positif, maupun Ketahanan Psikologis yang merupakan kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga.

a. Pemberdayaan Perempuan

Jumlah angkatan kerja perempuan di Kota Magelang menunjukkan tren yang fluktuatif. Namun, terjadi peningkatan jumlah meskipun tidak cukup signifikan, dari 28.421 orang di tahun 2017 menjadi 29.999 orang di tahun 2020. Proporsi angkatan kerja perempuan sudah berada pada kisaran 45%, hampir sama dengan proporsi angkatan kerja laki-laki.

Jumlah kepala keluarga perempuan di Kota Magelang mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020). Pada tahun 2016, jumlah KK perempuan adalah 9.769 yang meningkat menjadi 10.166 di tahun 2020. Jika dibandingkan dengan keseluruhan KK yang ada di Kota Magelang, ada sekitar 20% KK perempuan.

Tabel 2.65
Kondisi terkait Keberdayaan Perempuan Kota Magelang Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Angkatan kerja perempuan	NA	28.421	30.287	28.621	29.999
	Persentase Angkatan Kerja Perempuan	NA	45,27%	45,57%	45,54%	45,24%
2.	Jumlah Kepala Keluarga (KK) Perempuan	9.769	9.920	10.127	10.216	10.166
	Persentase KK Perempuan	22,70%	23,07%	23,42%	23,42%	23,54%

Sumber: DP4KB, 2021

b. Perlindungan Perempuan

Terkait perlindungan perempuan, masih ada kasus KDRT yang terjadi di Kota Magelang. Dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan tren yang menurun. Kasus KDRT tertinggi terjadi pada tahun 2017 dibandingkan dengan yang lain selama periode tersebut. Kasus KDRT menurun setelah tahun 2017, menjadi 11 kasus kejadian KDRT pada tahun 2020. Kondisi ini juga berlaku untuk kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka kasus tertinggi terjadi di

tahun 2017 yang kemudian menurun pada tahun berikutnya. Pada tahun 2020 hanya terjadi satu kasus kekerasan terhadap perempuan.

Tabel 2.66
Jumlah Kasus KDRT dan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah KDRT	17	38	22	14	11
2.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	15	28	27	19	1

Sumber: DP4KB, 2021

c. Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi. Kondisi perlindungan terhadap anak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.67
Jumlah Kasus Kekerasan dan Perkawinan Anak Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	9	14	7	6	2
2.	Jumlah kasus perkawinan anak	619	339	336	NA	26
3.	Jumlah anak dengan kedisabilitas	116	95	100	100	86

Sumber: DP4KB dan Dinas Sosial, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, masih terdapat kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Magelang. Kondisi ini menunjukkan tren yang positif, dimana terjadi penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2016 sampai tahun 2020, meskipun terjadi peningkatan kasus pada tahun 2017. Sementara itu, kasus perkawinan anak juga masih terjadi di Kota Magelang. Disamping hal tersebut sebagai upaya optimalisasi terhadap urusan perlindungan anak, hal yang masih perlu mendapat perhatian adalah upaya terhadap penanganan anak dengan kedisabilitas, dimana saat ini anak dengan kedisabilitas hanya ditangani oleh Dinas Sosial sehingga kedepan diperlukan kolaborasi dari seluruh instansi terkait yang ada di Kota Magelang.

2.3.2.3. Ketahanan Pangan

Luas lahan pertanian di Kota Magelang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Data dari BPS Kota Magelang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.68
Luas Lahan Sawah menurut Jenis Pengairan di Kota Magelang (hektar) Tahun 2016-2020

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tanah Sawah	208,60	206,40	177,46	142,89	142,89
	1. Pengairan Teknis	208,60	206,40	177,46	142,89	142,89
	2. Pengairan 1/2 Teknis	-		-	-	-
	3. Tadah Hujan	-		-	-	-
	4. Lainnya	-		-	-	-
2	Tanah Kering	1.603,40	1.605,60	1.676,54	1.711,11	1.711,11
	1. Pekarangan/Lahan untuk Bangunan dan Halaman	1.328,63	1.330,28	1.401,22	1.234,85	1.234,85
	2. Tegal/Kebun/Ladang/Huma	13,13	13,68	13,68	19,52	19,52
	3. Tambak	-	-	-	-	-
	4. Kolam/Tebat/Empang	6,80	6,80	6,80	5,40	5,40
	5. Perkebunan/Hutan Rakyat	99,56	99,56	99,56	70,00	70,00
	6. Industri	51,90	51,90	51,90	53,44	53,44
	7. Lainnya	103,38	103,38	103,38	327,90	327,90
	TOTAL	1.812,00	1.812,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00

Sumber: BPS Kota Magelang, 2021

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Magelang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Selain itu, berdasarkan hasil perhitungan Daya Dukung Pangan Beras (DDPb) tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 0,093 (lebih kecil dari 1). Kondisi ini berarti hanya sekitar 0,093 kebutuhan penduduk akan beras di tahun 2020 yang bisa dipenuhi oleh Kota Magelang sendiri, atau terjadi defisit pangan (beras) sebesar -11.369,83ton.

a. Skor Pola Pangan Harapan

Data Skor Pola Pangan Harapan Kota Magelang dari tahun 2016-2020 menunjukkan sedikit peningkatan. Skor pola pangan harapan merupakan indikator yang menunjukkan kualitas konsumsi pangan yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH inilah yang digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah.

Tabel 2.69
Skor Pola Pangan Harapan Kota Magelang
Tahun 2016-2020

Tahun	Nilai Skor Pola Pangan Harapan
2016	85,00%
2017	87,90%
2018	88,30%

Tahun	Nilai Skor Pola Pangan Harapan
2019	88,70%
2020	89%

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2021

Dengan banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian menjadikan berkurangnya produksi pertanian di Kota Magelang. Sehingga untuk memenuhi ketersediaan energi dan protein penduduk, masih bergantung pada daerah lain. Beberapa daerah yang memasok komoditas pangan ke Kota Magelang adalah Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, serta daerah di Provinsi DIY. Sehingga bisa dikatakan bahwa terkait ketahanan pangan di Kota Magelang sampai saat ini belum terwujud.

Untuk membangun ketahanan pangan antara lain dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, salah satu opsi ditempuh dengan dengan pengembangan *urban farming* dengan memanfaatkan lahan sempit di lahan-lahan rumah tangga dengan berbasis budidaya organik. *Urban farming* di Kota Magelang perlu dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan budidaya pertanian, peternakan, maupun perikanan.

Pola konsumsi pangan penduduk di Kota Magelang belum sesuai dengan anjuran untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Pangan yang dikonsumsi penduduk belum mengacu pada kaidah B2SA (beragam, bergizi seimbang, dan aman). Pola konsumsi pangan masih didominasi oleh padi-padian dan umbi-umbian, sedangkan pangan hewani, dan kacang-kacangan masih harus ditingkatkan lagi konsumsinya. Selain itu, masih ditemukan adanya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) tidak aman yang beredar di masyarakat. Edukasi tentang kualitas maupun kuantitas konsumsi pangan dengan memperhatikan keseimbangan konsumsi pangan (beragam, bergizi seimbang dan aman) perlu terus dilakukan.

Tabel 2.70
Produksi hasil Pertanian Kota Magelang

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Padi (Ton)	3171,44	3.069,44	3.001.2	2.440.24	1.134.72
2.	Jagung / ton	9.4	9.6	10.2	23	7.2
3.	Ketela pohon	14,4	15	16	15.8	0
4.	Kacang Tanah	2.6	2.6	0.89	1.12	0
5.	Telur ayam ras	7.095	7.486	7.243	8.397	6.691
6.	Telur ayam buras	10.647	9.857	9.440	13.370	6.853
7.	Susu sapi	188.22	214.195	214.830	214.94	86.814

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2021

b. Penguatan Cadangan Pangan

Ketahanan pangan menjadi isu yang harus dipertimbangkan bagi keberlangsungan suatu kota, termasuk Kota Magelang. Wilayah perkotaan yang didominasi oleh fungsi non pertanian menjadi tantangan dalam penyediaan pangan bagi masyarakatnya. Poin utama yang perlu diperhatikan dalam mengupayakan ketahanan pangan adalah dari ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Pengamanan terhadap komponen ketahanan pangan tersebut harus didukung oleh strategi penguatan cadangan pangan yang tepat.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang untuk memperkuat cadangan pangan adalah dengan pembinaan dan pendampingan Kelompok Wanita Tani (KWT) melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Jumlah KWT yang terbentuk hingga tahun 2020 sebanyak 17 kelompok. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat, khususnya kaum wanita, dalam menggeluti dunia pertanian perkotaan sekaligus menjawab permasalahan krisis ruang terbuka hijau. KRPL mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan di lingkungan untuk melakukan budidaya tanaman sayuran, peternakan dan perikanan.

2.3.2.4. Pertanian

Pengelolaan pertanahan bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk pula dengan perbuatan hukum yang terkait dengan Sumber Daya Alam itu. Tujuan lain dari diselenggarakannya program pengelolaan pertanahan adalah untuk mewujudkan keteraturan terkait dengan penyelenggaraan dan administrasi yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesinambungan pembangunan di Indonesia.

Pensertifikatan tanah baik aset pemerintah maupun masyarakat (hak milik, HGB, HP, HPL, wakaf) sampai pada tahun 2020 sejumlah 41.283 sertifikat tanah dengan luas 18.048,550 m2. Kondisi administrasi pertanahan lainnya ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.71
Kondisi terkait Pertanahan Kota Magelang
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tertib administrasi pertanahan	15%	30%	50%	76,18%	77,91%
2	Ketersediaan sistem informasi geografis pertanahan	15%	32%	49%	70%	77%

Sumber: BPKAD Kota Magelang, 2021

Informasi pertanahan memiliki peran penting dalam Infrastruktur Data Spasial (IDS), karena menyediakan informasi mengenai kepemilikan, pemanfaatan sampai informasi nilai tanah. Selain itu perkembangan “paradigma baru” bahwa Sistem Informasi Pertanahan (SIP) harus berperan dalam *spatial based decision making* untuk terwujudnya *sustainable development* menjadikan tantangan tersendiri dalam menciptakan sistem yang terintegrasi ke dalam Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN), agar informasi spasial dapat dengan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam implementasinya, SIP belum dapat secara optimal terintegrasi dalam IDSN. Ketersediaan sistem informasi geografis pertanahan pada tahun 2020 sebesar 77%.

2.3.2.5. Lingkungan Hidup
a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kinerja pengelolaan lingkungan hidup dapat ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pembangunan urusan lingkungan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju *smart enviroment*. Sebagai indikator keberhasilan pembangunan berkelanjutan ditunjukkan dengan tolok ukur Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan suatu angka indeks yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup yang diperoleh dari perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Tabel 2.72
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Tahun 2016-2020

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	49,96	62,54	56,36	59,09	47,03
2	Indeks Kualitas Air	36,25	46,47	52,00	58,33	16,67
3	Indeks Kualitas Udara	58,24	85,69	84,91	87,69	83,67
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54,03	57,24	38,22	38,22	31,38

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2021

Dari data dalam tabel diatas terlihat bahwa capaian indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) pada tahun 2020 menurun, demikian juga dengan indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL), tetapi untuk indeks kualitas udara (IKU) mengalami kenaikan.

b. Ruang Terbuka Hijau

Persentase Ruang Terbuka Hijau hampir sama dengan tahun lalu, dimana Luasan total RTH Publik di Kota Magelang sampai dengan Tahun 2020, seluas 300,22 Ha atau 16% dari luas wilayah yang terdiri dari:

- Taman Kota seluas 10,58 Ha;
- Taman Kecamatan seluas 0,32 Ha;
- Taman Kelurahan seluas 6,26 Ha
- Pulau jalan dan median seluas 29,39 Ha;
- Lapangan dan Olahraga seluas 52,75 Ha;
- Kebun Raya Gunung Tidar seluas 68,22 Ha;
- Taman Wisata Kyai Langgeng seluas 17,02 Ha
- Jalur pejalan kaki seluas 77,07 Ha; dan
- Makam seluas 38,61 Ha.

Tabel 2.73
Ruang Terbuka Hijau Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Ruang Terbuka Hijau					
	- Privat	-	19,11%	19,10%	19,10%	19,10%
	- Publik	-	19,60%	19,62%	16,00%	16,00%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2021

c. Limbah B3

Limbah B3 berasal dari usaha/kegiatan/perusahaan dan berasal dari masyarakat. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup baru menangani limbah yang berasal dari perusahaan atau usaha saja sedangkan limbah B3 yang dari masyarakat belum ditangani. Dalam pengelolaan limbah B3, kewenangan Kabupaten/Kota adalah mengeluarkan izin sementara sedangkan untuk pengelolaan limbahnya dilaksanakan oleh pihak ketiga. Untuk tahun 2020 ada sebanyak 15 perusahaan yang mengajukan izin TPS limbah B3, yang sudah memenuhi izin/sudah keluar izinnya ada 12 perusahaan, sedangkan yang 3 belum.

d. Kerusakan Tanah/Lahan

Potensi kerusakan tanah di Kota Magelang diukur dari parameter dan derajat sebagai berikut :

- Ketebalan solum (<20 cm)

- Kebatuan permukaan (>40%)
- Derajat pelulusan air (<0,7 cm/jam; >8 cm/jam)
- pH (<4,5; >8,5)

Pengukuran potensi kerusakan lahan sudah dilakukan pada tahun 2020 di 5 titik sampel. Lokasi pengukuran tersebut adalah yaitu Kelurahan Kedungsari 3 titik (sebelah selatan DLH, RW X serta RT 02 RW 04), Kelurahan Wates (tuk pecah) dan Kelurahan Tidar Selatan (RT 03 RW 01). Dari hasil pengukuran kerusakan lahan, diperoleh hasil derajat kerusakan lahan yaitu ada parameter ketebalan solum sebesar 20% dan derajat perluasan air sebesar 80%.

e. Sampah

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2016 sampai dengan 2020 volume sampah yang dibuang ke TPSA mengalami fluktuasi, yaitu kenaikan di tahun 2018 dan setelah itu mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020. Untuk jumlah sampah yang tertangani dan jumlah sampah yang berkurang melalui 3R sudah mengalami kenaikan/ peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.74
Indeks Volume Sampah Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Volume sampah yang dibuang ke TPSA (m³)	-	289,32	328,32	320,24	199,39
2	Prosentase jumlah sampah yang tertangani	85,70	86,23	87,63	91,90	96,63
3	Prosentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	2,4	3,9	4,13	8,84	15,99

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2021

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KIA, dan Akte Kelahiran. Kepemilikan KTP, KIA, dan Akte Kelahiran menjadi salah satu cara dalam menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai identitas diri/administrasi kependudukan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kepemilikan administrasi kependudukan dengan fokus kepemilikan KTP, KIA, dan Akte Kelahiran selama kurun waktu 2016-2020.

Tabel 2.75
Jumlah Penduduk yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia 17 ke atas atau telah menikah memiliki KTP-el	89.443	93.153	95.094	95.812	97.017
2	Jumlah seluruh penduduk wajib KTP-el	101.636	98.737	98.869	99.015	97.221
3	Jumlah penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	8.584	18.070	23.804	30.219	29.032
4	Jumlah penduduk usia kurang dari 17 tahun dan/atau belum menikah	32.038	31.241	31.129	31.129	30.799
5	Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akte kelahiran	32.906	33.036	34.083	34.575	34.494
6	Jumlah penduduk usia 0-18 tahun	37.655	37.230	37.165	37.325	34.779
7	Jumlah kutipan akta kematian yang diterbitkan untuk kematian tahun berkenaan	1.762	3.698	2.001	7.495	1.837
8	Jumlah kematian yang terjadi pada tahun berkenaan	564	533	1.284	1.403	1.248

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2021

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan meningkat setiap tahun. Kondisi terakhir, pada tahun 2020, menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang memiliki KTP-el, KIA, dan akte kelahiran sudah hampir terpenuhi. Demikian pula untuk pemenuhan penerbitan akta kematian pada tahun 2020 sudah dapat terpenuhi. Kondisi-kondisi pemenuhan tertib administrasi tersebut didukung adanya sistem jemput bola yang dilakukan secara berkelanjutan. Dari segi persentase anak yang memiliki akta kelahiran di Kota Magelang saat ini juga telah mencapai 98% per tahun 2019. Hal ini telah mencapai target minimal dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menargetkan angka 85%.

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan dalam rangka untuk menumbuhkan keberdayaan masyarakat. Dengan meningkatnya keberdayaan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif berperan dalam pembangunan. Dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat tersebut, beberapa OPD telah menjalin mitra dengan forum warga.

Tabel 2.76
Kondisi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	13	15	17	19	25
2	Jumlah Pengurus LPM yang telah mengikuti pelatihan perencanaan pembangunan	226	97	174	259	344
3	Kelurahan kategori cepat berkembang	3	3	8	11	13

Sumber : DP4KB Kota Magelang, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Perangkat Daerah yang mempunyai mitra dengan forum warga semakin meningkat. Dari 29 Perangkat Daerah, pada tahun 2016 sebanyak 13 Perangkat Daerah telah menjalin kemitraan dengan forum warga, tahun 2017 ada 15 perangkat Daerah dan pada tahun 2018 sebanyak 17 Perangkat Daerah. Adapun di tahun 2019 dan 2020, jumlah perangkat daerah yang mempunyai mitra masing-masing sebanyak 19 dan 25 Perangkat Daerah. Forum warga tersebut mencakup RT, RW, LKM, LKK, PKK, UP2K, Posyandu, Karang Taruna, Posyandu Lansia, Lembaga sosial budaya tingkat kelurahan, KIM, PUSPAGA dan Posbindu.

Peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif dapat dilakukan melalui penguatan Lembaga Pemasyarakatan Masyarakat (LPM). Pada tahun 2020 cakupan Pengurus LPM yang telah mengikuti pelatihan perencanaan pembangunan desa adalah sebesar 80,94% yaitu dari total 425 orang anggota sebanyak 344 orang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Jumlah ini meningkat sebanyak 58,12% bila dibandingkan dengan tahun 2017.

Adapun dalam kaitannya dengan kelurahan kategori cepat berkembang, sampai dengan tahun 2020 Kota Magelang telah menetapkan 13 Kelurahan yang masuk kategori cepat berkembang sesuai dengan evaluasi dan penilaian instrumen-instrumen yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Kelurahan, baik meliputi evaluasi bidang pemerintahan, bidang kewilayahan, dan bidang kemasyarakatan, yang diaplikasikan melalui pembinaan dan penilaian lomba kelurahan tingkat Kota Magelang.

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Rata-rata jumlah anak dalam keluarga di Kota Magelang menunjukkan angka yang baik. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan angka pada kisaran 2. Kondisi ini mengalami penurunan angka rata-rata menjadi 1,53 pada tahun 2019 dan 0,81 di tahun 2020. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77
Kondisi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2	2	2	2	1

Sumber: DP4KB Kota Magelang, 2020

Hal lain yang masih perlu mendapatkan perhatian serius dari penyelenggaraan urusan ini adalah rendahnya partisipasi laki-laki dalam berKB dengan rata-rata capaian dari tahun 2016 sampai dengan 2019 adalah sebesar 9,49% atau sebesar 1.330 kepesertaan KB dari rata-rata jumlah PUS per tahun sebanyak 14.599 PUS.

Jumlah peserta KB yang putus pakai menunjukkan angka yang fluktuatif selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan angka yang mencapai seribuan peserta yang drop out. Kondisi ini menurun banyak pada tahun 2018 dan 2019, dimana menunjukkan angka 274. Namun, pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dimana peserta KB yang drop out mencapai angka 2.000-an.

Adapun terkait cakupan PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmet need) berada pada kisaran angka 5% dalam kurun waktu 2016 sampai 2020. Pada tahun 2019 terjadi lonjakan angka yang cukup besar yaitu sebesar 10,19%. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78
Partisipasi dalam Keluarga Berencana Kota Magelang
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Peserta KB aktif	12.078	13.107	13.153	12.429	10.948
2	Jumlah Peserta KB laki-laki	1.050	1.315	1.483	1.259	1.545
3	Peserta KB yang putus pakai (<i>drop out</i>)	1.195	1.178	274	274	2.163
4	Jumlah Pasangan Usia Subur	16.093	16.669	16.855	15.469	14.030
5	Unmeet need	5,54%	5,01%	4,09%	10,19%	5,79%
6	Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	1,75%	2,03%	1,75%	NA	4,72%

Sumber : DP4KB Kota Magelang, 2020

Selain beberapa hal tersebut, yaitu terkait dengan angka kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 tahun masih harus diperhatikan. Pada tahun 2016 terjadi sebanyak 282 kasus kehamilan, tahun 2017 sebanyak kasus 339

kehamilan, tahun 2018 sebanyak 9 kasus, tahun 2019 tidak terdata, dan tahun 2020 sebanyak 26 kasus.

2.3.2.9. Perhubungan

Urusan perhubungan terkait dengan transportasi yaitu upaya memindahkan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam proses pemindahan orang maupun barang tersebut, dalam konteks pelayanan transportasi umum, maka diperlukan terminal sebagai sarana tempat pemberhentian sementara kendaraan umum, untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan. Berikut akan dijelaskan terkait kondisi sarana prasarana perhubungan dan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) di Kota Magelang.

a. Sarana Prasarana Perhubungan

Jumlah terminal angkutan di Kota Magelang ada 3, yaitu terminal Tidar (Tipe A), terminal Magersari (Tipe C) dan 1 buah Terminal Barang. Terminal tipe A dan terminal barang sekarang ini bukan menjadi kewenangan kabupaten/kota sehingga terminal yang menjadi kewenangan Kota Magelang hanya terminal Magersari yang merupakan terminal tipe C. Terminal Tipe C ini idealnya ada 2, akan tetapi sampai saat ini Kota Magelang baru mampu menyediakan 1 Terminal karena keterbatasan Lahan.

Selain terminal, juga diperlukan halte sebagai tempat pemberhentian kendaraan sementara. Jumlah halte di Kota Magelang semakin meningkat, dari 17 buah pada tahun 2016 menjadi 21 buah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2.79
Kondisi Sarana Prasarana Perhubungan Kota Magelang
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah terminal Angkutan	3	3	3	3	3
A	Jumlah terminal Tipe A	1	1	1	1	1
B	1. Jumlah Terminal Tipe C	1	1	1	1	1
	2. Jumlah Ideal Terminal Tipe C	2	2	2	2	2
C	Barang	1	1	1	1	1
2	Jumlah halte	17	17	21	21	21
3	Jumlah prasarana parkir					
	b. Jumlah Titik Parkir yang dikelola	83	101	121	161	183
	c. Jumlah Potensi Titik Parkir	183	183	183	183	183
4	Jumlah ATCS					
	a. Jumlah APILL ATCS	1	8	8	11	15
	b. Jumlah kebutuhan APILL terintegrasi ATCS	15	15	15	15	15

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
5	Jumlah Rambu Terpasang	147	179	109	180	125

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2021

Disamping terminal dan halte, prasarana parkir juga memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran lalu lintas perkotaan. Jumlah titik parkir selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan telah memaksimalkan penyediaan fasilitas ini sesuai potensi titik parkir pada tahun 2020.

Demikian juga dengan penyediaan fasilitas APILL ATCS yang selalu mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 1 buah menjadi 15 buah pada tahun 2020 yang berarti bahwa pada tahun 2020 telah memenuhi target capaian sesuai kebutuhan.

Sementara itu jumlah rambu yang terpasang selalu mengalami fluktuasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, dimana pada tahun 2016 sebesar 147 kemudian mengalami peningkatan menjadi 179 pada tahun 2017 akan tetapi mengalami penurunan menjadi 109 pada tahun 2018. Kembali naik pada tahun 2019 menjadi 180 dan Kembali turun menjadi 125 pada tahun 2020.

b. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Magelang dalam periode 5 tahun semakin meningkat walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2017, yaitu dari 8,1% pada tahun 2016 turun menjadi 7,7% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 8,45%, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 8,72% dan meningkat kembali menjadi 8,83% pada tahun 2020.

Disamping dari pengendali lalu lintas, faktor kondisi kendaraan sendiri turut berperan dalam keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Namun demikian jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan justru mengalami penurunan dari 11.229 pada tahun 2016 menjadi 4.618 pada tahun 2020. Demikian juga dengan kepatuhan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) untuk melakukan uji juga berperan dalam keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Tabel 2.80
Kondisi Lalu Lintas Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas dan angkutan umum	7,4%	8,40%	8,49%	8,72%	8,83%
2	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan	11.229	8.216	7,021	7.244	4.618
3	Rasio Kendaraan	1,86%	4%	4%	7,89%	0%

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang tidak melakukan pengujian					
4	Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas	188	186	167	265	149
5	Jumlah korban kecelakaan lalu lintas	257	455	238	356	222
	- Meninggal dunia	38	33	32	25	22
	- Luka berat	12	1	1	1	0
	- Luka ringan	188	217	186	310	180
	- DRK	19	18	19	20	20
6	VC Ratio ruas jalan	0,41	0,41	0,43	0,43	0,43

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2021

Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas menunjukkan penurunan dari tahun 2016, dimana pada tahun 2016 sebesar 188 kejadian menjadi 149 pada tahun 2020. Kondisi ini hampir sama dengan jumlah korban kecelakaan lalu lintas.

Demikian juga dengan jumlah korban yang mengalami fluktuasi dan secara umum mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 257 menjadi 222 pada tahun 2020. Adapun Jumlah korban tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 455 korban.

Adapun Kinerja lalu lintas jalan Kota Magelang menunjukkan angka yang berada pada kisaran 0,41-0,43. Kondisi ini menunjukkan bahwa arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas.

Load factor angkutan umum yang mengalami kenaikan pada tahun 2020, setelah mengalami tren penurunan dalam periode tahun 2016 sampai 2019. Kondisi ini sejalan dengan jumlah arus penumpang angkutan umum. Jumlah arus penumpang angkutan umum dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang semakin menurun. Setelah sempat mengalami kenaikan dari 2.954.846 penumpang pada tahun 2016 menjadi 3.039.336 penumpang pada tahun 2017, jumlah arus penumpang angkutan umum dari tahun 2018 semakin menurun hingga menjadi 2.679.600 pada tahun 2020.

Kondisi ini dikuatkan dengan data persentase pengguna moda transportasi umum perkotaan dan jumlah penggunaanya. Persentase pengguna moda transportasi umum perkotaan menunjukkan tren penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan meskipun hanya sedikit. Sedangkan untuk jumlah pengguna moda transportasi umum dan non

umum menunjukkan tren yang terus menurun. Dari sekitar 12.038 orang pengguna di tahun 2016 menurun ke angka 7.500 di tahun 2020.

Tabel 2.81
Kondisi Angkutan Umum Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	<i>Load Factor</i>	27,29	27,09	26,71	26,16	31,88
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.954.846	3.039.336	2.805.438	2.614.881	2.679.600
3	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	10,46%	9,89%	8,73%	7,17%	7,39%
4	Jumlah pengguna moda transportasi (umum dan non umum)	12.038	11.000	10.000	8.500	7.500
5	Jumlah ijin trayek	350	350	350	350	350
6	Jumlah angkutan wisata	120	131	135	124	138
7	Jumlah bus	420	387	376	338	343
8	Jumlah mobil penumpang umum	890	868	861	812	831

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2021

Sementara itu, jumlah ijin trayek yang ada di Kota Magelang berjumlah 350. Kondisi ini tidak tidak terjadi perubahan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020). Sedangkan untuk jumlah angkutan wisata mengalami penambahan menjadi 138 di tahun 2020, jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 120 angkutan. Berbeda dengan kondisi tersebut, jumlah bus dan mobil penumpang umum mengalami penurunan. Jumlah bus pada tahun 2016 adalah 420 armada yang kemudian menurun menjadi 343 armada pada tahun 2020. Untuk mobil penumpang umum menurun menjadi 831 pada tahun 2020, dimana sebelumnya pada tahun 2016 berjumlah 890.

c. Dukungan Sarana Lalu lintas oleh pihak swasta

Kota Magelang merupakan Kota terkecil di Kota Magelang, dengan jangkauan layanan kendaraan umum sebesar 100% dan hampir 80% wilayah dijangkau oleh Angkutan Umum Kota sejak dahulu kala.

Tabel 2.82
Jumlah Perusahaan Angkutan dan Jumlah Armada di Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	JUMLAH Perusahaan Angkutan yang terdaftar					
	Jumlah Perusahaan Angkutan Kota					
	Jumlah Perusahaan PO BUS	4	4	4	4	4
	Jumlah Perusahaan TAXI	2	2	2	2	2
2	JUMLAH ARMADA					
	Jumlah Angkot	335	335	335	335	335

	Jumlah Angkutan Perbatasan	173	173	173	173	173
	Jumlah BUS AKDP	150	150	150	150	150
	Jumlah BUS AKAP	335	335	335	335	335
	Jumlah TAXI	50	50	50	50	50
	Jumlah BUS WISATA	15	15	15	15	15
	Jumlag Angkutan Travel	43	43	43	43	43

Sumber : DISHUB Kota Magelang

Jumlah perusahaan PO BUS dari tahun 2016 hingga 2020 tetap sebesar 4 sementara perusahaan TAXI sebesar 2. Demikian juga dengan jumlah armada yang tidak mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Dimana jumlah Angkot tetap sebesar 335, Jumlah Angkutan Perbatasan sebesar 173, Jumlah BUS AKDP sebesar 150, Jumlah BUS AKAP sebesar 335, Jumlah TAXI sebesar 50, Jumlah BUS WISATA sebesar 15 dan Jumlah Angkutan Travel sebesar 43. Disamping itu juga dukungan oleh OJOL dan Taksi Online juga cukup besar sehingga memberikan dukungan terhadap layanan kepada masyarakat.

d. **Sarana Penerangan Jalan**

Sebagai tuntutan sebuah Kota dalam rangka mendukung aktivitas di Perkotaan yang akomodatif, maka penerangan jalan umum menjadi cukup penting, akan tetapi implikasi yang ditimbulkan berupa aspek pembiayaan yang cukup besar.

Meskipun saat ini kebutuhan akan Penerangan Jalan Umum belum mencapai angka sesuai dengan standar kebutuhan, akan tetapi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel 2.83
Titik PJU Terpasang di Kota Magelang
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Titik PJU terpasang	4.143	4.231	4.319	4.407	4.511
2	Kebutuhan	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Persentase	82,86%	84,62%	86,38%	88,14%	90,22%

Sumber : DISHUB Kota Magelang

Pada tahun 2016, pemenuhan titik PJU terpasang adalah sebesar 82,86% atau sebesar 4.143 dari yang seharusnya terpasang yaitu 5000 tiang, Sementara itu pada tahun 2017 sebesar 84,62% dan pada tahun 2020 sebesar 90,22% atau 4.511 tiang.

2.3.2.10. **Komunikasi Dan Informatika**

Tuntutan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi komunikasi dan informasi yang ada . Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 seluruh OPD di Kota Magelang sudah menerapkan e-Gov dan pelayanan berbasis teknologi informasi dikuatkan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kota Magelang masih terus berusaha meningkatkan arsitektur dan peta rencana SPBE serta analisis kebutuhan TIK berbanding lurus dengan kenaikan indeks SPBE. Pada tahun 2017 indeks SPBE sebesar 2,41 kemudian naik menjadi 2,77 pada tahun 2019. Hal ini merupakan progres yang patut diapresiasi mengingat konsistensi kenaikan indeks SPBE dari tahun ke tahun. Di tahun 2020 wujud keseriusan digitalisai pemerintah Kota Magelang makin tampak yakni dengan berhasil memperoleh nilai indeks SPBE sebesar 3,21 dengan kategori baik.

Tabel 2.84
Kondisi Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks SPBE	NA	2,41	NA	2,77	3,21
2	Jumlah OPD yang memiliki dan mengupdate website	29	29	29	29	29
3	Jumlah OPD yang menerapkan pelayanan berbasis TI	29	29	29	29	29
4	Jumlah OPD yang menerapkan keamanan informasi (sesuai komponen indeks KAMI)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2021

Sedangkan terkait dengan jaringan intra pemerintah, saat ini telah menjangkau semua OPD dan lembaga pendidikan SMP tapi sebanyak 61 Sekolah Dasar belum bisa memanfaatkan jaringan intra tersebut. Satu hal lagi yang masih menjadi kendala yakni integrasi antar sistem layanan yang terbatas serta jaringan intra pemerintah yang belum merata serta belum terstandar sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 perlu mendapat perhatian. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang masih terbatas dikarenakan belum adanya aturan yang mengharuskan pengembangan aplikasi di lingkup Pemerintah Kota Magelang harus berdasarkan rekomendasi *Government Chief Information Officer* (GCIO) sehingga struktur dan format data masih sangat variatif.

Terkait keamanan informasi, dari tahun 2016 hingga tahun 2020 belum ada satupun OPD yang menerapkan. Pengamanan informasi menggunakan

indeks KAMI baru dilaksanakan pada 2021 ini, dimulai dari Diskominsta. Untuk OPD diluar Diskominsta baru akan dilaksanakan mulai tahun 2023.

2.3.2.11. Koperasi dan UMKM

Jumlah koperasi di Kota Magelang selama periode 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan dari 217 koperasi pada tahun 2016 meningkat menjadi 237 koperasi pada tahun 2020, atau meningkat 20 buah selama periode 5 tahun. Sedangkan jumlah koperasi tidak aktif relative tidak terdapat perubahan yang berarti, hanya terjadi penambahan 1 unit 2020 koperasi yang tidak aktif pada tahun, yaitu menjadi sebanyak 16 unit koperasi yang tidak aktif.

Tabel 2.85
Perkembangan Jumlah Koperasi di Kota Magelang

No	Jenis Koperasi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Koperasi Aktif	202	204	207	214	221
2	Koperasi Tidak Aktif	15	15	15	15	16
	Jumlah	217	219	222	229	237

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2021

Sedangkan untuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terjadi penambahan pelaku usaha dari data tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2017, pelaku UMKM Kota Magelang terdata sebanyak 6.940 pelaku usaha dan terus mengalami peningkatan sebesar 1.723 pelaku usaha hingga tahun 2020. Jumlah Pelaku UMKM yang mengakses layanan keuangan dari tahun 2017 sejumlah 1.278 pelaku usaha terus meningkat secara masif. Jumlah pelaku usaha pada tahun 2020 sejumlah 8.663 pelaku usaha, dari jumlah tersebut yang mengakses ke layanan keuangan mencapai 4.757 pelaku usaha, dengan kata lain 54,91 % pelaku usaha sudah berani dan dapat mengakses layanan keuangan. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi dan mendorong peningkatan akses UMKM terhadap layanan keuangan agar semua pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya lebih besar dan maju dan mempunyai daya saing di pasar.

Tabel 2.86
Jumlah UMKM di Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelaku UMKM	NA	6.940	7.557	7.851	8.663
2	Jumlah Pelaku UMKM yg mengakses ke layanan keuangan	NA	1.278	2.775	3.300	4.757

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2021

UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2020, dari total 8.663 pelaku usaha, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 13.395 tenaga

kerja. Pelaku UMKM di Kota Magelang pada tahun 2020 didominasi oleh Usaha Mikro. Dari total 8.663 pelaku usaha di Kota Magelang, 8.445 pelaku atau 97,48% merupakan pelaku usaha mikro, usaha kecil sebanyak 2208 pelaku (2,4%), sedangkan usaha menengah sebanyak 10 pelaku (0,11%). Penambahan pelaku UMKM yang cukup signifikan pada tahun 2020 disebabkan terjadinya Pandemi Covid 19. Namun demikian pelaku UMKM sebagai sektor informal yang rentan perlu adanya pemberdayaan melalui fasilitasi, peningkatan ketrampilan dan pendampingan secara terpadu dan kontinyu.

Berdasarkan kewilayahan, pelaku usaha terbanyak berada di Kecamatan Magelang Selatan, diikuti pelaku usaha di Kecamatan Magelang Tengah dan paling sedikit berusaha di wilayah Kecamatan Magelang Utara. Secara lebih lengkap jumlah UMKM Kota Magelang.

Tabel 2.87
Jumlah UMKM di Kota Magelang berdasarkan sebaran wilayah Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Mikro	Kecil	Menengah
1	Magelang Utara	1.933	2.977	1.913	20	-
2	Magelang Tengah	3.313	4.790	3.263	49	1
3	Magelang Selatan	3.417	5.628	3.269	139	9
	TOTAL	8.663	13.395	8.445	208	10

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2021

2.3.2.12. Penanaman Modal

Pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN di Kota Magelang selama kurun waktu 2016-2020 meningkat cukup signifikan. Pertumbuhan nilai investasi PMA meningkat cukup tajam dari 0,19% pada tahun 2017 menjadi 5,2% pada tahun 2018, kemudian meningkat kembali sebesar 10,47%, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 7,03%. Demikian pula dengan pertumbuhan nilai investasi PMDN yang mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 44,78%, namun pada tahun 2017 hanya tumbuh 16,32%, kemudian pada tahun 2018 tumbuh pesat sebesar 59,89%, pada tahun 2019 tumbuh 23,33% dan pada tahun 2020 tumbuh sebesar 24,36%. Pertumbuhan nilai investasi yang belum konstan dan optimal tersebut disebabkan belum adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dapat memberikan pelayanan terpadu satu pintu secara optimal sehingga dapat meningkatkan kemudahan, kecepatan dan kepastian perijinan.

Tabel 2.88
Pertumbuhan Penanaman Modal Magelang
Tahun 2016-2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan nilai investasi PMA	-	0,19%	5,7%	10,47%	3,03%
2	Nilai investasi PMA	193.82 1.000.0 00	194.19 6.000.0 00	205.25 6.134.6 40	226.75 6.134.6 40	233.62 4.000.0 00
3	Pertumbuhan nilai investasi PMDN	44,78	16,32%	59,89%	23,33%	24,36%
4	Nilai investasi PMDN	672.24 8.000.0 00	781.93 9.000.0 00	1.250.2 22.004. 012	1.541.8 78.122. 891	1.917.4 38.000. 000

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang, 2021

2.3.2.13. Kepemudaan Dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan menjadi salah satu hal yang penting dilakukan karena pemuda menjadi salah satu tumpuan pembangunan di masa depan. Kondisi kepemudaan di Kota Magelang menunjukkan masih adanya pengangguran pemuda yang berada pada kisaran angka 1.000. Meskipun jumlah pengangguran pemuda ini menunjukkan tren yang menurun dari tahun 2017 ke tahun 2019, penurunan ini masih harus terus dilakukan.

Selain itu, organisasi kepemudaan di Kota Magelang juga menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020). Meskipun jumlah organisasi kepemudaan mengalami kenaikan, tetapi masih terdapat organisasi kepemudaan yang tidak aktif. Prestasi pemuda menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2.89
Kondisi Kepemudaan di Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengangguran pemuda (15-24 tahun)	NA	2.399	1.802	1.226	NA
2	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	27	30	30	35	43
	Jumlah organisasi kepemudaan	27	30	34	40	44
3	Jumlah prestasi pemuda/organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional					
	- Regional	6	6	21	21	8
	- Nasional	0	0	0	0	47
	- Internasional	0	0	1	1	2

Sumber: Disporapar Kota Magelang, 2020

Untuk urusan keolahragaan, jumlah organisasi olahraga mengalami peningkatan selama tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2016 dan 2017, jumlah organisasi yang ada adalah 35 organisasi. Mulai tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah organisasi sebanyak 2, sehingga berjumlah 37 sampai dengan

tahun 2020. Jumlah prestasi pemuda dan olahraga di kancah regional, nasional dan internasional yang mengalami penurunan cukup signifikan. Kondisi ini diluar tahun 2020, dimana pada tahun tersebut even olahraga yang diselenggarakan terbatas karena adanya pandemi Covid-19. Prestasi olahraga sempat mengalami kenaikan pada tahun 2017, tetapi menurun lagi di tahun 2018 dan 2019. Kondisi tersebut disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.90
Kondisi Keolahragaan Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah organisasi olah raga	35	35	37	37	37
2	Jumlah prestasi Olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional					
	- Regional	10	125	37	37	0
	- Nasional	5	19	12	12	2
	- Internasional	2	19	1	1	2

Sumber: Disporapar Kota Magelang, 2020

2.3.2.14. Statistik

Buku publikasi Data Strategis Kota Magelang (DSKM), yang sebelumnya disebut Kota Magelang Dalam Angka/Daerah Dalam Angka (DDA), telah mulai dipublikasikan sejak tahun 2005. Sejak akhir tahun 2014, Pemerintah Kota Magelang telah mengembangkan portal DataGO sebagai sistem informasi Satu Data Informasi Pemerintah Daerah. Kondisi tersebut menjadikan semakin efektifnya pengelolaan data sektoral di Kota Magelang yang dapat dilihat dari peningkatan jumlah variabel publikasi pada Buku DSKM serta semakin cepatnya waktu publikasi buku DSKM. Meskipun jumlah variabel sebagai materi publikasi meningkat dari tahun ke tahun, namun waktu penerbitan/publikasi justru semakin cepat. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.91
Penerbitan buku Data Strategis Kota Magelang Tahun 2016-2020

Judul Buku	Tahun Data	Tanggal Publikasi	Jumlah Variabel Terpublikasi	Jeda Lama Publikasi (hari)
DDA 2016 Smt 1	2016	-	43	-
DSKM 2017	2016	09/05/2017	158	128
DSKM 2017 Smt 1	2017	14/09/2017	179	75
DSKM 2018	2017	12/04/2018	258	101
DSKM 2018 Smt 1	2018	01/09/2018	261	62
DSKM 2019	2018	18/04/2019	276	107
DSKM 2019 Smt 1	2019	17/09/2019	307	78
DSKM 2020	2019	09/03/2020	304	68
DSKM 2020 Smt 1	2020	18/08/2020	335	48

Judul Buku	Tahun Data	Tanggal Publikasi	Jumlah Variabel Terpublikasi	Jeda Lama Publikasi (hari)
DSKM 2021	2020	09/03/2021	324	67

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, 2021

Pemerintah Kota Magelang juga telah menerapkan Satu Data dalam penyelenggaraan statistik sektoral terutama yang tidak disediakan BPS. Hal ini menjadi *best practice* di Jawa Tengah. Kelembagaan forum data telah terbentuk dengan melibatkan Walidata, Koordinator Data, Pembina Data dan Produsen Data lintas OPD, instansi vertical, Lembaga swasta dan institusi Pendidikan. Landasan hukum terhadap pelaksanaan satu data juga telah dirumuskan secara rigid dalam Perda Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 58 Tahun 2020.

Tata kelola statistik sektoral masih menghadapi beberapa tantangan. Inkonsistensi data masih ditemui di beberapa sistem informasi maupun dokumen perencanaan pembangunan. Namun intensitas inkonsistensi ini jauh menurun setelah implementasi DataGO. Upaya meniadakan problematika inkonsistensi berfokus pada integrasi sistem pengelolaan data sektoral mulai dari aspek perencanaan sampai dengan evaluasi. Hal ini secara bertahap telah dirintis namun demikian belum seluruh aspek terkoneksi.

Kebutuhan data daerah yang sangat dinamis juga merupakan salah satu tantangan yang membutuhkan concern optimal khususnya dalam penyediaan data, tidak hanya dari sisi kuantitas namun juga validitas. Hal ini tentunya akan sangat dipengaruhi oleh kapabilitas Produsen Data di Kota Magelang dalam memahami metadata, sehingga pemenuhan data dapat diupayakan dengan tepat dan cepat. Saat ini rata-rata sekitar 80% pengelola data di setiap Produsen Data di Kota Magelang yang dapat dikategorikan cakap statistik. Pengembangan kapasitas Produsen Data khususnya pengelola DataGO terhadap konsep dasar data dan statistik menjadi penting karena peran kunci mereka dalam menyediakan basis data perencanaan pembangunan. Produsen Data yang cakap tentunya akan dapat diandalkan dalam mencukupi data dengan validitas tinggi, sehingga akan mendukung peningkatan kualitas perumusan kebijakan berbasis data di Kota Magelang. Upaya menumbuhkan kompetensi ini dilakukan secara rutin oleh Wali Data bekerjasama dengan BPS selaku Pembina Data melalui coaching clinic. Meski demikian belum 100% outout coaching tersebut berhasil mengingat terkendala faktor mutasi periodik yang menyebabkan tergantikannya beberapa pengelola data cakap statistik dengan pengelola data baru yang masih tendah pemahaman datanya. Keberadaan tenaga fungsional khusus pengelola data di setiap Produsen Data dapat menjadi solusi efektif atas hal tersebut.

Sementara itu pengayaan metadata akan mulai diagendakan pada kegiatan tahun anggaran 2022 melalui Dinas Kominfo dan Statistik sebagai Wali Data. Harapannya melalui eksistensi metadata yang terstruktur juga mampu meminimalisir misinterpretasi di kalangan pengguna data.

Pada akhirnya seluruh solusi atas permasalahan tata kelola statistik sektoral di Kota Magelang akan sangat bergantung komitmen dari masing-masing Produsen Data, baik dari pengelola DataGO dan khususnya pimpinan tertinggi Produsen Data. Dalam rangka mendukung komitmen ini, Wali Data Kota Magelang menginisiasi penandatanganan komitmen bersama Satu Data Kota Magelang yang merangkul tidak hanya OPD namun seluruh pemilik data strategis di Kota Magelang.

2.3.2.15. Persandian

Beberapa indikator kinerja dari urusan persandian di Kota Magelang diantaranya adalah ketersediaan SOP persandian, peningkatan kapasitas SDM persandian dan persentase OPD yang menerapkan SOP persandian. Sampai dengan akhir tahun 2020, Pemerintah Kota Magelang telah merumuskan beberapa dokumen SOP terkait persandian dan keamanan informasi yang terdiri dari SOP Pelayanan Pengiriman Berita dan Penerimaan Berita, SOP Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi, SOP Pengiriman dan Penerimaan Berita Sandi, SOP Penyelamatan Dokumen Bila Terjadi Kebakaran, SOP Backup dan Restore Data Server, SOP Keselamatan Kerja Pemeliharaan Jaringan/Komputer, SOP Pengelolaan Jaringan Internet Kota Magelang, SOP Pengelolaan Domain Name dan Hosting/Server serta SOP Pengelolaan Email. Sementara itu SOP terkait keamanan informasi skala kota yang berbasis SNI ISO/IEC27001:2013 belum dirumuskan. Hal tersebut menyebabkan rendahnya persentase implementasi SOP persandian di Kota Magelang, dimana di tahun 2020 hanya sebesar 3,45% dari target 100%.

Seiring dengan makin dinamisnya pergerakan informasi digital, peningkatan keamanan informasi menjadi hal yang mutlak. Pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Magelang bekerjasama dengan BSSN RI menggelar *self assesment* Sistem Manajemen Kemanan Informasi (SMKI) dengan lokus OPD di Diskominsta. Penilaian tingkat kematangan penerapan keamanan informasi diukur dengan indeks Keamanan Informasi (KAMI) versi 4.0.

Hasil evaluasi menempatkan kematangan informasi Kota Magelang (dengan *pilot project* Bidang Teknologi Informatika dan Bidang Statistik Persandian Diskominsta) pada tingkat I atau kategori “kondisi awal”. Rincian hasil evaluasi menempatkan aspek tata kelola keamanan informasi pada level I+, pengelolaan risiko pada level I, kerangka kerja keamanan informasi pada level I, pengelolaan asset informasi pada level I serta teknologi dan keamanan informasi pada level

I+. Hasil ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Magelang untuk berbenah diri khususnya dalam meningkatkan keamanan informasi.

2.3.2.16. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi, namun demikian harus tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga terwujud karya-karya seni budaya yang memiliki kepribadian. Disisi lain kesenian merupakan hasil karya yang mengacu pada nilai keindahan (estetika) dan mewujud dari proses pengendapan makna relasi antar manusia dan manusia dengan lingkungan hidupnya.

Tabel 2.92
Kondisi terkait Pelestarian Seni dan Budaya Kota Magelang Tahun 2016-2021

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok seni budaya yang difasilitasi / dibina dan dikembangkan	32	34	32	50	35
2	Jumlah seluruh kelompok seni budaya	224	224	224	224	224
3	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi / dibina dan dikembangkan	14,29%	15%	17,41%	22.32%	15,63%
4	Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	35	35	35	35	41
5	Jumlah pengunjung museum	5.050	10.769	6.118	1.557	982

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2021

Kelompok seni yang difasilitasi menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2019, namun menurun pada tahun 2020. Kondisi ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang mengharuskan untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak.

Fasilitasi kelompok seni budaya yang dilakukan lewat pementasan menjadi berkurang jumlah pementasannya pada tahun 2020. Jumlah kelompok seni yang dibina pada tahun 2020 sejumlah 35 kelompok seni dari 224 kelompok seni yang ada. Kondisi ini mengalami penurunan dari tahun 2019 dimana kelompok seni yang dibina sejumlah 50 dari 224 kelompok seni yang ada.

Selain itu, saat ini Kota Magelang belum memiliki gedung kesenian yang representatif. Gedung kesenian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk penyelenggaraan even-even seni budaya dan wahana apresiasi seni budaya. Dengan adanya gedung kesenian diharapkan kegiatan seni budaya dapat terfasilitasi dan dikembangkan dengan baik. Upaya yang dilakukan saat ini adalah dengan pembangunan rumah budaya.

Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya mengalami penambahan pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena terdapat 6 benda cagar budaya yang didaftarkan pada Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya. Namun demikian hal ini masih terbatas pada pencatatan sehingga masih diperlukan upaya yang lebih agar benda cagar budaya tersebut dapat ditetapkan sebagai benda cagar budaya supaya kelestariannya tetap terjaga.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah penurunan jumlah pengunjung museum yang disebabkan karena adanya penutupan museum (Museum Sudirman) selama 7 bulan. Hal ini dilakukan karena adanya pandemi Covid-19, sehingga terjadi penurunan jumlah pengunjung yang cukup signifikan. Meskipun demikian perlu ditingkatkan pula sarana dan prasarana pada museum agar masyarakat lebih tertarik untuk mengunjungi museum.

2.3.2.17. **Perpustakaan**

Jumlah perpustakaan yang ada di Kota Magelang pada tahun 2020 sebanyak 316 perpustakaan. Dari jumlah tersebut, sudah ada 30 perpustakaan yang terakreditasi. Untuk perpustakaan kota sendiri, sudah ada pustakawan untuk melaksanakan fungsi pelayanan sejumlah 13 orang. Namun, baru 2 orang pustakawan yang terakreditasi.

Tabel 2.93
Kondisi Perpustakaan Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perpustakaan	316	316	316	316	316
2	Jumlah perpustakaan terakreditasi	0	0	0	0	30
3	Jumlah SDM pustakawan (fungsi pelayanan)	4	4	4	13	13
4	Jumlah pustakawan yang sudah uji kompetensi	0	0	0	0	2
5	Jumlah judul dan jumlah koleksi					
	a. Judul	33.698	37.455	39.637	41.643	43.675
	b. Eksemplar	47.152	53.955	57.362	60.560	64.675
6	Jumlah pengunjung setiap kategori					

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	perpustakaan					
	a. Perpustakaan Umum	78.057	78.736	82.524	86.952	18.518
	b. Perpustakaan Keliling	28.617	28.524	28.645	29.015	7.501
	c. Perpustakaan Online (imagelang)	-	-	1.061	500	464

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Magelang, 2021

Jumlah koleksi buku yang ada di perpustakaan Kota Magelang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah judul buku maupun jumlah eksemplarnya. Jumlah judul buku yang ada pada tahun 2016 sebanyak 33.698 yang kemudian meningkat menjadi 43.675 judul buku di tahun 2020. Pengunjung perpustakaan umum dan perpustakaan keliling mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2019. Terdapat penurunan jumlah pengunjung pada tahun 2020 karena adanya pembatasan jumlah pengunjung terkait wabah pandemi Covid-19. Jumlah pengunjung perpustakaan online melalui aplikasi imagelang juga mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2020.

2.3.2.18. Kearsipan

Kearsipan memegang peranan sebagai bukti otentik kinerja pemerintah dan wahana pelestari serta sumber informasi. Di tahun 2020, Kearsipan Kota Magelang meraih posisi ke-9 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan penilaian hasil pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Namun Kearsipan Kota Magelang selaku LKD (Lembaga Kearsipan Daerah) belum bisa secara optimal melakukan audit keseluruhan OPD, hanya 10 OPD yang sudah bisa teraudit secara langsung.

Tabel 2.94
Kondisi Kearsipan Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PD yang sudah mengelola arsip sesuai standar/ secara baku	5	10	13	21	26
2	Jumlah OPD yang diaudit arsip	0	0	0	0	10 OPD
3	Jumlah arsip yang masuk/ akuisisi	900	1.058	1.200	1.356	1.508
4	Jumlah arsip yang diolah/ dilestarikan	900	1.057	1.200	1.358	1.518
5	Jumlah SDM kearsipan/ arsiparis	2	3	5	5	6
6	Jumlah pengunjung/ pengguna arsip	63	70	124	82	54

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
7	Jumlah arsip yang dialih media (foto, kaset rekaman suara, video, tekstual, kearsitekturan)	0	0	1.000	1.000	1.000
8	Perkembangan pemanfaatan aplikasi TI untuk kearsipan	0	0	SIKN/ JIKN & SIARDI NA	SIKN/ JIKN & SIARDI NA	SIKN/ JIKN & SIARDI NA

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Magelang, 2021

Sementara itu, jumlah arsip yang diakuisisi dan dilestarikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah arsiparis di Kota Magelang mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, arsiparis berjumlah 2 orang yang kemudian bertambah menjadi 6 di tahun 2020. Mulai tahun 2018, mulai dilakukan pengalihan media arsip yang ada. Proses alih media arsip dilakukan sejumlah 1.000 arsip sampai dengan tahun 2020. Untuk pemanfaatan aplikasi TI, sudah mulai menggunakan SIKN/JIKN dan SIARDINA. SIKN/JIKN merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip dinamis dan statis.

2.3.3. Fokus Urusan Pilihan

2.3.3.1. Kelautan Dan Perikanan

Meskipun Kota Magelang merupakan daerah dengan luas wilayah yang kecil serta dukungan sumber daya alam yang sangat terbatas, namun dalam pembangunan bidang perikanan masih bisa menjadi sektor potensial. Keberadaan sektor perikanan tersebut didukung dengan infrastruktur yang telah dimiliki oleh Kota Magelang yaitu balai benih ikan di Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara; balai benih ikan di Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan; sentra pemasaran ikan hias dan ikan konsumsi di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan; sentra pengolahan ikan di Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan. Sedangkan dalam hal budi daya ikan, perkembangan jumlah ikan yang ditebarkan di tahun 2016 sd 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.95
Jumlah dan Nilai Ikan yang Ditebarkan di Sawah dan Kolam per Jenisnya di Kota Magelang

No	Jenis Ikan	2016		2017		2018		2019		2020	
		Juml ah (ekor)	(Rp 000)	Juml ah (ekor)	(Rp 000)	Juml ah (ekor)	(Rp 000)	Jum lah (eko r)	(Rp 000)	Jum lah (eko r)	(Rp 000)
1	Karper /Mas	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Tawes	-	-	0	0	0	0	5.22 0,00	156. 600, 00	1.86 6,00	56.00 0,00
3	Nila	-	-	342.7 37,00	8.564. 820,2 0	906.5 70,00	126. 641, 00	61.9 00,0 0	854. 250, 00	40.2 04,0 0	1.025. 200,0 0
4	Lele	-	-	128.5 31,00	25.70 6,24	256.8 43,00	70.5 34,0 0	64.5 50,0 0	1.29 1,00	14.5 20,0 0	290.4 00,00
5	Grass Crab	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Udang	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gurame	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Bawal	-	-	385.5 82,00	96.39 5,60	451.7 21,00	127. 421, 00	18.1 30,0 0	543. 400, 00	5.70 0,00	171.0 00,00
9	Patin	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ikan Lainnya	-	-	0	0	0	0	8.90 0,00	178. 000, 00	0	0

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2021

Melihat jenis ikan yang ditebarkan dari Tahun 2016 sampai tahun 2020, ada beberapa jenis ikan yang mengalami penurunan baik jumlah maupun nilai ikan. Jenis ikan dengan nilai terbanyak pada tahun 2020 adalah ikan nila, dan diikuti oleh lele.

Jumlah produksi ikan di Kota Magelang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan walau terjadi alih fungsi lahan perikanan menjadi lahan permukiman dan terjadinya pengurangan lahan BBI tempat pembenihan ikan untuk akses jalan menuju TPST Biojong. Untuk tetap menjaga produktivitas dan produksi perikanan, berkurangnya lahan perikanan diatasi dengan pemanfaatan teknologi budidaya perikanan di lahan sempit dengan kolam terpal/ fiber. Adapun untuk produksi perikanan dan luas lahan di Kota Magelang pada saat ini berikut ini terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.96
Luas lahan perikanan dan produksi perikanan di Kota Magelang

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas lahan perikanan	-	6,8 H	6,8 H	5.40 H	5.40 H

2.	Jumlah produksi ikan	-	160,65 ton	164,17 ton	164,02 ton	165,86 ton

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2021

2.3.3.2. **Pariwisata**

Sebagai penunjang kegiatan pariwisata, jumlah hotel di Kota Magelang mengalami perkembangan selama periode 5 tahun terakhir. Perkembangan secara jumlah, yaitu sebanyak 18 buah pada tahun 2016 menjadi 19 buah pada tahun 2020. Disamping berkembang secara jumlah, hotel juga mengalami perkembangan kualitas. Jumlah hotel berbintang yang sebelumnya berjumlah 6 buah pada tahun 2016 menjadi 9 buah di tahun 2020.

Tabel 2.92
Banyaknya Sarana Penunjang Sektor Pariwisata di Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	RINCIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya hotel (unit)	18	18	18	20	19
	- Hotel Bintang	6	8	8	8	9
	- Hotel Melati	12	10	10	12	10

Sumber : dataGo Kota Magelang (Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata)

Keterbatasan wilayah berakibat pada terbatasnya wilayah yang bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata baru, terutama obyek wisata yang berbentuk taman rekreasi. Kondisi tersebut berakibat kurang berkembangnya jumlah obyek wisata selama 5 tahun terakhir. Event-event pariwisata tahunan seperti Grebeg Gethuk, Kirab Budaya *Ndalu*, Reli Mobil Kuno, Magelang Fair dan event pariwisata lainnya juga dikembangkan. Namun, ragam wisata dan dukungan terhadap wisata yang ada masih perlu dikembangkan melihat potensi kuliner dan produk UMKM yang ada di Kota Magelang

Selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, jumlah kunjungan ke 11 obyek wisata yang ada di Kota Magelang selalu mengalami kenaikan. Penurunan yang terjadi di tahun 2020 lebih disebabkan berkurangnya kunjungan karena pandemi, juga berkurang dikarenakan obyek wisata tersebut ditutup selama pandemi melanda Kota Magelang.

Tabel 2.93
Banyaknya Pengunjung di 11 Destinasi Wisata di Kota Magelang Tahun 2016-2020

Destinasi Wisata	2016	2017	2018	2019	2020
Taman Kyai Langgeng	561.394	538.677	608.380	593.133	170.455
Museum Sudirman	5.983	5.946	4.958	4.104	905
Museum BPK	1.251	44.675	46.437	62.784	4.697
Museum Diponegoro	6.567	3.848	0	10.719	886
Museum OHD	4.947	4.965	3.976	3.898	634
Museum Abdul Jalil	26.318	26.063	29.747	30.539	10.653

Destinasi Wisata	2016	2017	2018	2019	2020
Museum Bumi Putera	879	1.441	2.053	495	252
Gunung Tidar	134.195	148.391	96.992	120.679	89.644
Borobudur Golf	13.871	16.060	14.706	17.753	17.002
Kebun Bibit Senopati	*	*	*	*	22.475
Mantyasih	*	*	*	*	1.379
Jumlah	755.405	790.066	807.249	844.104	318.982

*) Data belum tersedia di tahun tersebut

Sumber : dataGo Kota Magelang (Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata)

Pertumbuhan jumlah wisatawan baik nusantara maupun mancanegara sudah menunjukkan tren yang baik sampai dengan tahun 2019. Jumlah wisatawan ini merupakan akumulasi dari jumlah pengunjung destinasi wisata dan tamu hotel. Penurunan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara secara signifikan terjadi pada tahun 2020 yaitu hanya sebesar 528.175 orang atau terjadi penurunan sebesar 66,34% kunjungan wisatawan dibandingkan pada tahun 2019, hal tersebut sebagai imbas dari banyaknya even-even pariwisata yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan nasional terkait pembatasan sosial berskala besar dimasa untuk mengatasi pandemi Covid-19. Sedangkan untuk rata-rata lama tinggal wisatawan tidak menunjukkan peningkatan ataupun penurunan yang berarti. Lama tinggal wisatawan di Kota Magelang masih berada pada kisaran 1-2 hari.

Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata juga semakin meningkat dari tahun ke tahun, yaitu sebanyak 9 lembaga pada tahun 2016 dan 2017, 10 lembaga pada tahun 2018, 11 lembaga pada tahun 2019 dan 12 lembaga pada tahun 2020. Namun demikian, aksi nyata bentuk Kerjasama dalam upaya mempromosikan produk pariwisata masih sangat minim. Hal ini ditandai dengan belum adanya penawaran paket-paket wisata Kota Magelang.

Tabel 2.94
Kondisi Kepariwisataan Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Kinerja Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Wisatawan					
	- Nusantara (orang)	NA	1.269.949	1.215.978	1.560.199	524.052
	- Mancanegara (orang)	NA	6.341	6.343	8.784	4.123
2	Rata-rata lama tinggal wisatawan	1-2 HARI	2-3 HARI	1-2 HARI	1-2 HARI	1-2 HARI
3	Kerjasama / promosi yang dilakukan	NA	9	10	11	12
4	Even wisata yang diselenggarakan (skala kota ke	NA	4	3	4	1

No	Kinerja Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
	atas)					

Sumber : Disporapar Kota Magelang, 2020

2.3.3.3. Pertanian

a. Kontribusi Sektor Pertanian

Pada tahun 2020, PDRB Kota Magelang mencapai 8,7 trilyun rupiah, sementara NTB sektor pertanian hanya 162,5 milyar rupiah. Dengan demikian sektor pertanian hanya menyumbang sekitar 1,86% terhadap total PDRB Kota Magelang. Kontribusi sektor pertanian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 cenderung menurun, namun pada tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan. Naiknya kembali kontribusi sektor pertanian pada tahun 2020 disebabkan sektor ini paling tahan terhadap kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid19 dan menurunnya kontribusi sektor lainnya yang terdampak langsung pandemi seperti sektor transportasi.

Meskipun cukup kecil tingkat pertumbuhannya, sektor pertanian juga merupakan sektor yang mampu tumbuh positif di saat sektor lainnya mengalami kontraksi. Pertumbuhan sektor pertanian selama lima tahun terakhir selalu tumbuh positif dengan tingkat pertumbuhan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2016 sektor pertanian tumbuh 1,87%. Tahun 2017 tingkat pertumbuhannya lebih tinggi daripada tahun sebelumnya dengan tingkat pertumbuhan 2%. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2018 tingkat pertumbuhannya sangat kecil, yaitu hanya 0,81%, namun di tahun 2019 tumbuh cukup tinggi dengan tingkat pertumbuhan yang mencapai 5,17%.

Tabel 2.95
PDRB dan NTB sektor Pertanian di Kota Magelang
Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB atas dasar harga berlaku	7,023,900 .08	7,606,070 .53	8,201,328 .71	8,809,785 .60	8,721,968 .47
PDRB atas dasar harga Konstan	5,521,525 .54	5,820,532 .00	6,138,622 .75	6,472,539 .51	6,314,047 .34
NTB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan atas harga berlaku	136,091.1 3	141,283.1 9	147,452.8 6	159,013.9 1	162,529.5 1

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
NTB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan atas harga konstan	106,735.7 3	108,869.6 0	109,809.0 2	115,481.5 5	115,906.6 7
Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	1.87	2.00	0.86	5.17	0.37
Distribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	1.94	1.86	1.80	1.80	1.86

Sumber : BPS Kota Magelang 2020

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di dalam analisa ini menggunakan pendekatan distribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Magelang. Kontribusi sektor pertanian di Kota Magelang hanya 1,86%. Angka tersebut cukup kecil bila dibandingkan dengan angka provinsi Jawa Tengah yang mencapai 13,08%. Fenomena kecilnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB terjadi semua Kota yang ada di Jawa Tengah. Bahkan Kota Surakarta dan Kota Semarang kontribusi sektor pertanian kurang dari satu persen. Kontribusi sektor pertanian yang paling besar di kota-kota se-Jawa Tengah secara berurutan terjadi di Kota Tegal (5,15%), Kota Pekalongan (5,10%), Kota Salatiga (4,57%), Kota Magelang (1,86%), Kota Semarang (0,86%), dan yang terakhir Kota Surakarta (0,51%).

Tabel 2.96
PDRB dan NTB sektor Pertanian Di Jawa Tengah dan Kota-kota se-Jawa Tengah Tahun 2020

Provinsi/ Kota	PDRB (juta Rupiah)	Pertanian (Juta Rupiah)	Distribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
Magelang	8,721,968.47	162,529.51	1.86
Surakarta	47644563.66	243528.144	0.51
Salatiga	13,269,938.91	606,143.99	4.57
Semarang	189256241.8	1618514.83	0.86
Pekalongan	10,818,530.64	552,077.32	5.10
Tegal	15239218.2	785169.54	5.15
Jawa Tengah	965,629,085.07	126,256,481.72	13.08

Sumber : BPS Kota Magelang 2020

b. **Produksi Pertanian**

Upaya meningkatkan produksi sektor pertanian di Kota Magelang salah satunya dilakukan dengan fokus memanfaatkan pekarangan di perkotaan untuk *urban farming* utamanya untuk menanam sayuran. Hal ini didasarkan kondisi terbatasnya lahan pertanian berupa sawah dan tegalan. Untuk saat ini, luas lahan pertanian produktif di Kota Magelang tinggal menyisakan 142,83 ha sawah dan 18,51 ha tegalan saja, sedangkan luas lahan pekarangan (menurut data BPS tahun 2019) mencapai 1.234 ha. Artinya ada potensi yang lebih besar untuk mengoptimalkan lahan pekarangan, mengingat luasannya yang mencapai hampir 8 kali lebih luas dibandingkan sawah dan tegalan.

Tabel 2.97
Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi dan Ketela Pohon Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Tahun	Satuan	Padi			Ketela Pohon		
			Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-rata	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-rata
1	2016	Unit						
2	2017	Unit	520	3.069,44	5,89	2	15	7,5
3	2018	Unit	498	3.001,20	6,03	2	16	8
4	2019	Unit	400	2.440,24	6,1	2	15,8	7,9
5	2020	Unit	364	2.230,40	6,13	1	13	13

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2021

Tabel 2.98
Luas Tanam, Panen, Produksi, dan Rata-Rata Produksi Tanaman Pangan di Kota Magelang

No	Jenis Tanaman	2017				2018				2019				2020			
		Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata (Ton / Ha)	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata (Ton / Ha)	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata (Ton / Ha)	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata (Ton / Ha)
1	Padi Sawah	508	520	3.069,44	5,9	494	498	3.001,20	6,03	370	400	2.440,24	6,1	349	364	2.230,40	6,13
2	Jagung	2	2	12,6	6,3	2	2	14	7	3	4	23	5,75	1	1	7,2	7,2
3	Ketela Rambat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ketela Pohon	2	2	15	7,5	2	2	16	8	3	2	15,8	7,9	1	1	13	13
5	Kedelai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,14	0,14
6	Kacang Hijau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kacang Tanah	1	2	2,6	1,3	1	1	0,89	0,89	1	1	1,12	1,12	1	1	0,85	0,85

Sumber: Datago, 2021

c. **Peternakan**

Kota Magelang dengan keterbatasan lahan, tetap mampu menghasilkan produksi peternakan, seperti sapi potong, kerbau, kambing, domba dan babi. Jumlah sapi potong mengalami fluktuasi, setelah mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2019, pada tahun 2020 mengalami penurunan. Demikian pula dengan jumlah kambing dan domba juga mengalami penurunan pada tahun 2020.

Tabel 2.99
Data Produksi peternakan di Kota Magelang

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sapi potong / kg	0	986.442,00	998.210,00	1.124.130,00	880.320,00
2.	Kerbau / kg	0	0	0	630,00	14.214,00
3.	Kambing / kg	0	15.447,00	15.655,00	14.214,00	10.847,00
4.	Domba / kg	0	57.529,00	57.309,00	57.021,00	41.977,00
5	Babi / kg	0	10.793,00	11.582,00	11.582,00	12.494,00

Sumber: Datago, 2021

Untuk mencegah masuk dan beredarnya penyakit hewan menular strategis (PHMS) atau tidak layak konsumsi lainnya, dilakukan pemeriksaan di sejumlah depo penjualan hewan di Kota Magelang secara intensif. Selama penyelenggaraan pematangan hewan tahun ini Disperpa ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus memastikan hewan yang dijual dalam keadaan layak, sehat dan aman untuk dikonsumsi. Penyakit prioritas hewan tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.100
Penyakit Prioritas Hewan Menular Strategis Kota Magelang Tahun 2016-2020

NO	JENIS PENYAKIT	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rabies	-	-	-	-	-
2.	Anthax	-	-	-	-	-
3.	Brucellosis	-	-	-	-	-
4.	Avian Influenza (AI)	100	92	7	8	8
5.	Hog cholera (Classical Swine Fever)	-	-	-	-	-
6.	Scabies	158	141	146	137	121
7	Toxoplasmosis	8	6	4	5	2
	JUMLAH	266	239	157	150	131

2.3.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rasio elektrifikasi di Kota Magelang sudah hampir mencapai 100%. Berdasarkan data tahun 2019, rasio elektrifikasi sebesar 97,88%, dimana

sumber distribusi utama adalah dari PLN. Dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, Pemerintah Kota Magelang mulai menggunakan panel surya di beberapa instansi pemerintah dan PJU. Penggunaan panel surya pada PJU hingga tahun 2020 sudah terpasang di 142 titik PJU. Kapasitas dari panel surya yang digunakan sangat beragam, mulai dari 5 watt sampai 90 watt. Kelemahan dari penggunaan panel surya ini adalah daya listrik yang tersimpan dalam baterai sering kali tidak bisa penuh, khususnya pada musim hujan, yang menyebabkan sel baterainya mudah rusak. Kondisi ini mengakibatkan biaya pemeliharaan yang besar.

2.3.3.5. Perdagangan

a. Sarana Perdagangan

Kota Magelang memiliki 5 pasar tradisional, yaitu Pasar Rejowinangun, Pasar Gotong Royong, Pasar Kebonpolo, Pasar Cacaban, dan Pasar Sidomukti. Sarana perdagangan harus bisa diakses oleh semua warga tak terkecuali, baik anak-anak, wanita hamil, orang lanjut usia (lansia), orang normal maupun orang dengan kebutuhan khusus (difabel). Berdasarkan kondisi tersebut, Kota Magelang telah mencoba menerapkan standar inklusivitas melalui *universal design* di pasar-pasar tersebut. Pada tahun 2019, Pasar Rejowinangun Kota Magelang memperoleh sertifikat SNI 8152:2015 dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) sebagai pasar rakyat dengan kategori mutu 2 untuk pasar tipe 1. Kategori yang dipersyaratkan antara lain infrastruktur, toilet, bersih, pengelolaan sampah hingga tersedianya penitipan anak dan ruang ibu menyusui sudah mampu dipenuhi.

Tabel 2.101
Sarana Perdagangan Kota Magelang

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang	5	5	5	5	5
2	Persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar inklusivitas (<i>universal design</i>)	20%	20%	40%	40%	40%
3	Jumlah Selter PKL (kuliner)	16	19	19	19	19
4	Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	75%	75%	80%	80%	80%
5	Alat UTTP yang ditera	2.113	3.712	9.084	9.921	1.920
6	Pusat informasi harga	0	0	3	3	3

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	kebutuhan pokok					

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2021

Selain pasar, Pemerintah Kota Magelang juga membangun shelter untuk penataan PKL yang ada. Pada tahun 2016 sudah dibangun 16 shelter, dan meningkat menjadi 19 shelter pada tahun 2017. Jumlah ini terus bertahan hingga tahun 2020. Kondisi sarana perekonomian, termasuk didalamnya adalah shelter PKL, terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Magelang.

Kota Magelang terus berbenah terkait dengan pelayanan konsumen. Salah satu yang dilakukan adalah dengan melakukan tera alat UTTP. Alat UTTP yang ditera dari tahun 2016 sudah dilakukan tera sebanyak 2.113 alat dan terus meningkat pada tahun 2019 sebanyak 7.861 alat. Tera alat UTTP mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi hanya sebanyak 1.874 alat.

b. Pedagang Pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner

Pelaku perdagangan, dalam hal ini pedagang pasar dan PKL kuliner, menjadi salah satu poin penting dalam penyelenggaraan perdagangan. Jumlah pedagang pasar dan PKL kuliner yang ada di Kota Magelang selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.102
Jumlah Pedagang dan PKL Kota Magelang 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pedagang Pasar	-	5.029	5.029	5.029	5.250
2	Jumlah PKL (kuliner)	-	587	587	625	1.048

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2021

Jumlah pedagang pasar menunjukkan jumlah yang stagnan. Sejak tahun 2017, pedagang pasar di Kota Magelang berjumlah 5.029 pedagang dan bertahan sampai dengan tahun 2020. Sedangkan untuk jumlah PKL kuliner menunjukkan angka yang stagnan juga pada tahun 2017 hingga tahun 2018. Jumlah PKL kuliner mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 625 dan terus meningkat di tahun 2020 menjadi 1.048.

c. Nilai Ekspor

Nilai ekspor Kota Magelang selama tahun 2016-2020 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2017, nilai ekspor sebesar US \$ 630.500. Kondisi ini mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebesar US \$ 1.993.648. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar US \$ 1.488.871.

Tabel 2.103

Nilai Ekspor Kota Magelang Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai ekspor	US \$	NA	630.500	NA	2.308.905	2.432.087

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2021

2.3.3.6. Perindustrian

a. Industri Kecil

Industri kecil dan menengah berkembang di Kota Magelang. Untuk industri kecil, perkembangannya selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan angka yang fluktuatif. Jumlah industri kecil mengalami penambahan sebanyak 1 industri pada tahun 2017 dan bertahan sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2019, terjadi penurunan jumlah industri kecil menjadi sejumlah 517 industri dan meningkat lagi pada tahun 2020 menjadi 551 industri. Sedangkan untuk serapan tenaga kerja dari sektor ini menunjukkan tren yang menurun. Tenaga kerja yang terserap pada tahun 2016 sekitar 3.000-an menjadi hanya sekitar 1.000-an tenaga kerja pada tahun 2020.

Tabel 2.104

Perkembangan Industri Kecil Formal Kota Magelang

No	Kecamatan	2016		2017		2018		2019		2020	
		Industri	Tenaga Kerja	Industri	Tenaga Kerja	Industri	Tenaga Kerja	Industri	Tenaga Kerja	Industri	Tenaga Kerja
1	Magelang Selatan	274	1.925	261	1.925	274	1.925	211	453	215	367
2	Magelang Utara	140	759	142	734	139	734	100	185	122	238
3	Magelang Tengah	185	1.022	197	1.044	187	1.044	206	392	214	425
	Total	599	3.706	600	3.703	600	3.703	517	1.030	551	918

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2021

b. Industri Menengah

Senada dengan seperti industri kecil, perkembangan industri menengah di Kota Magelang juga menunjukkan angka yang fluktuatif. Dari tahun 2016 ke tahun 2017, jumlah industri menengah mengalami penurunan sekitar 28 industri. Namun, pada tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sejumlah 1.557 dan 1.601 indikator. Tren peningkatan ini tidak berlanjut di tahun 2020, jumlah industri menengah mengalami penurunan menjadi 1.335 industri. Kondisi ini berkolerasi dengan serapan tenaga kerja,

dimana terjadi penurunan dari tahun 2016 ke 2017. Kemudian naik pada tahun 2018 dan 2019, namun kembali menurun pada tahun 2020.

Dalam upaya menerapkan kebijakan pengembangan industri yang baik dan efektif diperlukan dukungan data yang valid dan up to date. Kementerian Perindustrian membangun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dimana masing-masing industri wajib meng-up date data industrinya. Pemerintah Kota Magelang mulai tahun 2020 telah ikut berperan aktif mendorong industri di Kota Magelang untuk melakukan registrasi dalam sistem tersebut, dan telah teregistrasi sebanyak 8 industri yang terdaftar dalam sistem tersebut. Jumlah industri di Kota Magelang yang teregistrasi diupayakan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.105
Perkembangan Industri Menengah Formal Kota Magelang

No	Kecamatan	2016		2017		2018		2019		2020	
		Industri	Tenaga Kerja	Industri	Tenaga Kerja	Industri	Tenaga Kerja	Industri	Tenaga Kerja	Industri	Tenaga Kerja
1	Magelang Selatan	9	1.108	9	1.108	10	1.117	11	1.161	4	1.161
2	Magelang Utara	5	150	6	178	6	178	6	178	2	46
3	Magelang Tengah	5	262	5	262	5	262	5	262	6	128
	Total	20	1.548	19	1.520	21	1.557	22	1.601	12	1.335

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2020

c. Nilai Produksi

Meskipun jumlah industri kecil dan menengah yang berfluktuasi, perkembangan nilai produksi menunjukkan nilai yang terus meningkat. Pada tahun 2016, total produksi sebesar Rp 119.112.700.000,- mengalami peningkatan sebesar 5,78% pada tahun 2017. Nilai produksi ini terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2019, menjadi sebesar Rp 49.036.888.150,-. Namun pada tahun 2020, jumlah produksi mengalami penurunan jumlah produksi yang sangat tajam, lebih dari 100% total produksi jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan terjadinya pandemi Covid 19 yang telah menghantam semua sendi perekonomian masyarakat, termasuk sektor industri kecil Kota Magelang.

Tabel 2.106
Perkembangan Nilai Produksi Industri Kota Magelang

	2016	2017	2018	2019	2020
Total Jumlah Produksi (Rupiah)	19.112.700.000	20.217.564.000	20.856.439.100	49.036.888.150	20.346.428.920

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2020

2.3.3.7. Transmigrasi

Jumlah keluarga yang mengikuti transmigrasi mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan juga karena keterbatasan kuota dari pusat, dimana kuota yang ada juga menurun dari tahun ke tahun. Kuota yang awalnya sejumlah 5 menurun menjadi 1 pada tahun 2019. Untuk tahun 2020, tidak ada kuota karena adanya pandemi Covid-19.

Tabel 2.107
Banyaknya Transmigran Kota Magelang dan Lokasi Penempatan

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Animo / Pendaftar	6	5	3	2	0
2	Jumlah Kuota Pusat	5	3	3	1	0
3	Jumlah Penempatan	5	3	3	1	0
4	Jumlah Calon Transmigran yang mendapat PDU	5	3	3	1	0
5	Lokasi Penempatan	UPT Simpan g Lima Kabupa ten Kayong Utara Provins i Kalima ntan Barat	UPT Sepung gur Kabupa ten Bulung an Provins i Kalima ntan Utara	UPT Padang Tarok Kabupa ten Sijunju ng Provins i Sumate ra Barat	UPT Kahing ai Kabup aten Laman dau Provins i Kalima ntan Tengah	-

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2020

Jumlah keluarga transmigran Kota Magelang yang ditempatkan dari tahun ke tahun sudah sesuai dengan kuota yang ada. Animo masyarakat untuk melakukan transmigrasi juga menunjukkan angka yang hampir sama dengan kuota yang ada.

2.3.4. Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.4.1. Fungsi Lain

a. Capaian SPM Kota Magelang

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan menjadi kewajiban mutlak untuk dilaksanakan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Standar pelayanan minimal (SPM) Kota Magelang memuat standar 6 (enam) urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar di Kota Magelang. Capaian SPM beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, hal itu dikarenakan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pemberlakuan SPM yang baru mengakibatkan berubahnya penilaian pada beberapa indikator SPM yang mengakibatkan menurunnya capaian SPM. Data capaian SPM Kota Magelang Tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.108
Capaian SPM Kota Magelang Tahun 2017-2020

No	Bidang	OPD	2017			2018			2019			2020		
			Jumlah Indikator	Target Nasional		Jumlah Indikator	Target Nasional		Jumlah Indikator	Target Nasional		Jumlah Indikator	Target Nasional	
				Tercapai	Belum Tercapai		Tercapai	Belum Tercapai		Tercapai	Belum Tercapai		Tercapai	Belum Tercapai
1	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30	27	3	30	29	1	3	3	0	3	2	1
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	22	21	1	12	3	9	12	7	5	12	7	5
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	18	16	2	12	11	1	2	0	2	2	2	0
4	Perumahan	Dinas	3	0	3	6	3	3	2	2	0	2	2	0

No	Bidang	OPD	2017			2018			2019			2020		
			Jumlah Indikator	Target Nasional		Jumlah Indikator	Target Nasional		Jumlah Indikator	Target Nasional		Jumlah Indikator	Target Nasional	
				Tercapai	Belum Tercapai		Tercapai	Belum Tercapai		Tercapai	Belum Tercapai		Tercapai	Belum Tercapai
	n Rakyat	Perumahan dan Kawasan Permukiman												
5	Keterampilan, Ketertarikan Umum, dan Perlingungan Masyarakat	Satpol PP	4	3	1	5	5	0	5	5	0	5	5	0
6	Sosial	Dinas Sosial	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0
	Jumlah		82	72	10	70	56	14	29	22	7	29	21	8
	Persentase			87,80 %	12,20 %		80,00 %	20,00 %		75,86 %	24,14 %		72,41 %	27,59 %

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang, 2021

Dari tabel di atas terutama pada akhir tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa bidang yang belum mencapai standar pelayanan minimal yaitu bidang pendidikan dasar, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

b. Indeks EKPPD

Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah

daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 2.109
Indeks EKPPD Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks EKPPD	3,056	3,215	3,20	3,36	3,36

Nilai Indeks EKPPD selama lima tahun menunjukkan nilai yang semakin baik. Nilai Indeks EKPPD Tahun 2019 sebesar 3,36 diperoleh berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018. Sedangkan tahun 2020 belum dirilis hasil penilaiannya, sehingga masih menggunakan angka tahun sebelumnya.

c. Hasil Implementasi SAKIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Magelang. Hasil evaluasi menunjukkan tren positif. Untuk penilaian tahun 2019 menunjukkan nilai 66,47 atau tingkat akuntabilitas kinerja B. Hasil evaluasi juga menunjukkan peningkatan di Tahun 2020, dimana menunjukkan angka 67,26. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Magelang sudah menunjukkan hasil yang baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.110
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Perencanaan Kinerja	30	20,47	20,24	22,08	22,31	22,49
2	Pengukuran Kinerja	25	11,98	14,96	15,85	16,04	16,45
3	Pelaporan Kinerja	15	8,14	9,64	10,33	10,75	10,79

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai				
			2016	2017	2018	2019	2020
4	Evaluasi Internal	10	5,44	4,95	6,09	6,14	6,29
5	Capaian Kinerja	20	9,75	10,26	10,75	11,23	11,24
	Nilai Hasil Evaluasi	100	55,78	60,05	65,10	66,47	67,26
	Predikat / Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	B	B	B	B

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, 2020.

d. Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan

Kebijakan mengenai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Ruang lingkup PATEN meliputi pelayanan bidang perizinan dan pelayanan bidang non perizinan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi unit pelayanan terpadu di daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau menyederhanakan birokrasi.

Tabel 2.111
Pelaksanaan PATEN Kota Magelang Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pelaksanaan PATEN di Kecamatan	30%	65,08%	63,97%	68,14%	79,12%

Sejauh ini pelaksanaan PATEN di kecamatan menunjukkan tren kinerja positif, yaitu terdapat peningkatan sebesar 49,12% dari tahun awal (2016) sampai dengan tahun 2020. Artinya sejauh ini Pelayanan Administrasi yang diberikan oleh kecamatan baik terkait dengan pengantar layanan administrasi kependudukan, perizinan / non perizinan dan layanan lainnya mengalami peningkatan secara optimal.

e. Persentase perkembangan kerjasama daerah

Kerjasama daerah dilaksanakan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan,

teknologi, dan kapasitas fiskal. Kerjasama daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Tabel 2.112
Perkembangan Kerjasama Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase perkembangan kerjasama daerah	15,63%	8,82%	35,14%	22,00%	17,21%

Persentase perkembangan kerjasama daerah Kota Magelang dari tahun ke tahun berfluktuatif. Tahun 2019 sebanyak 122 kerjasama, sedangkan tahun 2020 sebanyak 143 kerjasama.

f. Persentase PD dengan nilai pelayanan baik

Survei kepuasan masyarakat merupakan wujud evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Melalui kegiatan survei dapat diketahui sejauh mana kualitas pelayanan pada unit pelayanan publik, sehingga hasil survei dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.113
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kota Magelang Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Unit Pelayanan Publik	Nilai	Predikat
2016	NA	NA	NA
2017	34	78,19	B
2018	40	79,66	B
2019	44	80,82	B
2020	20	82,91	B

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang, 2021

Berdasarkan data pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa nilai SKM menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan publik di Kota Magelang menunjukkan tren yang positif, sehingga perlu untuk dijaga dan ditingkatkan. Nilai SKM didapat dari nilai rata-rata kota. Pada tahun 2020 pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilaksanakan di tengah-tengah pandemi Covid 19, jika tahun 2019 survei masih bisa dilakukan secara langsung dengan metode wawancara dan bertatap muka antara responden dan surveyor, maka di tahun 2020 ini dilakukan terobosan

dilakukan secara online. Kuesioner Survei dirancang dengan alat bantu *google form*, dan responden diberikan akses tautan/*link* kuesioner, untuk dapat diisi menggunakan gawai yang dimiliki. Adapun respon baru didapatkan dari responden pada 20 UPP, sehingga untuk tahun 2021 perlu ditingkatkan cakupannya.

g. Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi

Capaian kinerja indikator penyusunan produk hukum yang difasilitasi sejauh ini telah mencapai hasil yang baik, hal tersebut terlihat dari pencapaian selama lima tahun (2016-2020). Artinya sejauh ini fungsi fasilitasi produk hukum daerah baik terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan telah dilaksanakan secara optimal.

2.3.4.2. Keuangan

a. Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini BPK menjadi salah satu tolak ukur atas kinerja keuangan daerah. Pemerintah Kota Magelang telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sejak tahun 2017 dan opini WTP ini bertahan sampai dengan tahun 2021 (atas LKPD Tahun Anggaran 2020). Hal ini menunjukkan kinerja keuangan daerah yang mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Walaupun demikian, masih terdapat tantangan ke depan untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan pengelolaan aset yang akuntabel sehingga opini WTP akan terus dapat dipertahankan pada masa mendatang.

Kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah. Adapun realisasi Pendapatan Daerah Kota Magelang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.114
Realisasi Pendapatan Kota Magelang Tahun 2016-2020

Kode Rek	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Pendapatan	840.042.626.525	909.525.862.920	908.089.485.909	967.785.834.243	946.115.053.305
4.1	Pendapatan Asli Daerah	220.315.848.702	233.557.714.356	249.877.424.347	273.582.932.151	290.753.133.278
4.1.1	Pajak Daerah	25.974.837.133	31.206.960.485	34.283.039.991	40.432.696.639	35.958.686.531
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.663.308.913	6.243.021.736	5.642.331.979	6.942.060.743	5.318.140.927

Kode Rek	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.182.279.953	7.711.404.121	8.693.813.515	9.098.845.504	9.217.035.218
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	181.495.422.703	188.396.328.014	201.258.238.862	217.109.329.265	240.259.270.602
4.2	Dana Perimbangan	567.636.707.545	553.115.007.612	570.455.641.253	574.099.278.956	525.575.219.057
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.333.059.082	26.685.769.289	24.423.094.444	19.159.017.863	28.425.592.273
4.2.2	Dana Alokasi Umum	447.909.575.000	440.041.244.000	440.041.244.000	455.177.029.000	416.722.396.000
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	89.394.073.463	86.387.994.323	105.991.302.809	99.763.232.093	80.427.230.784
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	52.090.070.278	122.853.140.952	87.756.420.309	120.103.623.136	129.786.700.970
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	24.050.844.059	18.087.872.725	18.556.798.966	19.493.678.991
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	37.179.177.579	41.855.667.000	46.788.343.659	49.597.892.921	47.989.055.670
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	47.039.466.000	18.250.000.000	42.396.139.000	57.423.984.000
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	14.146.495.000	9.701.162.500	3.916.290.000	8.665.271.000	4.312.568.000
4.3.6	Pendapatan Lainnya	764.397.699	206.001.393	713.913.925	887.521.249	567.414.309

Sumber: BPKAD Kota Magelang, Tahun 2020

Selama kurun waktu tahun 2016-2020, realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan cenderung mengalami peningkatan. Hanya saja pada tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan daerah dari komponen dana perimbangan. Hal ini disebabkan adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada Tahun 2020 dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi sehingga DAU dan DAK yang diterima oleh Pemerintah Kota Magelang berkurang dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.115
Proporsi Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2020

Kode Rekening	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
4.1	Pendapatan Asli Daerah	26,23%	25,68%	27,52%	28,27%	30,73%
4.2	Dana Perimbangan	67,57%	60,81%	62,82%	59,32%	55,55%
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6,20%	13,51%	9,66%	12,41%	13,72%
	Jumlah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPKAD Kota Magelang, Tahun 2020

Apabila melihat tabel di atas, maka akan terlihat komposisi setiap komponen pendapatan daerah dan terlihat bahwa kontributor terbesar adalah Dana Perimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kota Magelang masih tergolong rendah. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja pendapatan dengan menggali potensi pendapatan. Tingkat Kemandirian Kota Magelang ditunjukkan dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Otonomi Fiskal dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat. Tinggi rendahnya tingkat kemandirian daerah akan menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tingkat kemandirian dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.116
Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Magelang

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	27.83	30.70	32.76	35.22	36.17
2	Derajat Otonomi Fiskal	21.77	23.49	37.96	25.29	26.56
3	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat	75.00	66.29	62.82	66.04	67.01

Sumber: BPKAD Kota Magelang, Tahun 2020

Salah satu sumber PAD adalah dari bagi hasil dari BUMD. Pengelolaan BUMD secara profesional akan meningkatkan PAD Pemerintah Kota Magelang. Tren PAD yang berasal dari pengelolaan BUMD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena PD Taman Kyai Langgeng tidak bisa memberikan kontribusi atas bagian laba atas penyertaan modal yang masuk ke komponen PAD. Ketiadaan kontribusi PAD dari PD Taman Kyai Langgeng dikarenakan adanya pengurangan pengunjung untuk menghindari kerumunan dikarenakan masa pandemi Covid-19. Namun secara umum kontribusi BUMD terhadap PAD belum optimal seperti PD Percetakan yang belum dapat memberikan kontribusi PAD. Perkembangan bagian laba atas penyertaan modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.117
Perkembangan Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada BUMD dan Perusahaan Milik Daerah pada
Tahun 2016-2020

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
1	PDAM	741.590.000	1.172.684.300	1.805.182.100	1.954.707.220	2.047.375.408
2	PDOW TKL	1.262.731.250	1.408.272.250	1.385.255.500	1.528.439.114	-
3	PD PERCETAKAN	-	-	21.725.331	-	-
4	PD PERBENGKE LAN	24.864.400	43.662.300	57.243.000	71.037.461	85.812.500
5	PD BPR BANK MGL	1.642.152.600	1.774.402.300	2.005.786.372	1.779.845.791	1.842.800.926
6	PD BPR BKK KOTA MGL	49.187.850	135.221.742	171.208.195	187.600.899	230.196.070
	JUMLAH	3.720.526.100	4.534242.892	5.446.400.498	5.521.630.485	4.206.184.904

Sumber : Bagian Perekonomian, Setda Kota Magelang

b. Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Pengelolaan aset daerah yang akuntabel akan meningkatkan kinerja keuangan daerah secara signifikan. Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilakukan dengan melakukan perencanaan yang tepat, pelaksanaan atau pemanfaatan secara efektif dan efisien serta adanya monitoring dan evaluasi.

Tabel 2.118
Jumlah Temuan BPK terkait Aset Daerah

No	Tahun	Jumlah	Jumlah Rekomendasi
1	2016	1	11
2	2017	1	5
3	2018	2	6
4	2019	1	9
5	2020	4	10

Sumber: BPKAD Kota Magelang, Tahun 2021

Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Magelang dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan, seperti dari yang sebelumnya masih manual kemudian pada beberapa tahun terakhir ini sudah menggunakan sistem yang mempermudah pengelolaan asset di Kota Magelang. Pengelolaan asset di Pemerintah Kota Magelang yang semakin baik, maka semakin mendalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan yang lebih mendetail dan mendalam menyebabkan tren temuan terkait sistem pengendalian internal terhadap asset Pemerintah Kota Magelang semakin naik dengan tren

rekomendasi yang diberikan oleh BPK semakin menurun. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan asset Pemerintah Kota Magelang dari tahun ke tahun ke arah yang lebih baik lagi. Maka merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Magelang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan di dalam manajemen aset. Pengelolaan aset yang baik akan memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Magelang perlu menyiapkan instrument dan strategi yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

2.3.4.3. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah akan menentukan arah pembangunan dengan mempertimbangkan potensi serta sumber daya yang dimiliki. Pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik ketika perencanaan pembangunan dirumuskan secara transparan, responsif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan serta berkelanjutan.

Kinerja perencanaan pembangunan di Kota Magelang pada periode 2016-2021 yang dilihat dari sasaran pembangunan yang terdapat di dalam dokumen perencanaan yang berhasil dicapai, usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD serta cakupan perangkat daerah (PD) yang mempunyai mitra dengan forum warga. Capaian dari ketiga indikator ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.119
Gambaran terkait Perencanaan Kota Magelang
Tahun 2016-2020

NO	KETERANGAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Prosentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	89.16	93.98	74.70	72.29	59.04
2	Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir	60.00	70,19	80.00	81.48	80.34
3	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	51.72	58.62	65.52	65.52	86.21

Sumber: Bappeda Kota Magelang, 2021

Persentase capaian sasaran pembangunan yang terdapat dalam dokumen perencanaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan belum semua sasaran yang ada di dokumen perencanaan jangka menengah dapat mencapai target pada saat pelaksanaannya. Apabila dilihat dari sisi perencanaan, penurunan capaian sasaran pembangunan disebabkan kurang optimalnya pemantauan, pengevaluasian serta pengendalian pembangunan

daerah. Koordinasi, monitoring dan evaluasi selama ini telah dilaksanakan namun rekomendasi hasil evaluasi masih perlu ditingkatkan sehingga ada *feed back* dan perbaikan dalam perencanaan pembangunan demi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dengan melalui partisipatif. Persentase usulan masyarakat yang diakomodir, menunjukkan bahwa masyarakat turut berpartisipasi secara aktif dan perannya meningkat dari tahun ke tahun. Peran serta masyarakat dan *stakeholders* sangat penting dalam proses perencanaan. Hal ini dapat dilihat dengan menjadikan proses musrenbang yang melibatkan masyarakat dan *stakeholders* sebagai salah satu proses di dalam perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Magelang memiliki tantangan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dan *stakeholders* dalam proses perencanaan, khususnya pada saat proses musrenbang, serta menghilangkan stigma bahwa peran serta masyarakat dan *stakeholders* dalam proses musrenbang hanya formalitas belaka.

Salah satu faktor pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal adalah ketika dokumen perencanaan yang berkualitas tersedia. Dokumen perencanaan ini lah yang menjadi dasar dalam proses selanjutnya yaitu proses penganggaran. Melihat hal tersebut, maka proses perencanaan memiliki peran yang sangat strategis untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Perencanaan daerah perlu mendapatkan dukungan data dan informasi yang lengkap, komprehensif, akurat, *update* dan akuntabel serta analisis pembangunan daerah yang dapat menggambarkan kondisi Kota Magelang secara utuh. Dalam proses perencanaan, ketersediaan data dan informasi serta analisis pembangunan daerah yang berkualitas, sangat menentukan tingkat kualitas dari perumusan kebijakan dan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.

2.3.4.4. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif, salah satu aspek yang semestinya perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang adalah dengan penerapan Sistem Merit dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Hal itu dibutuhkan sebab sudah menjadi amanat dari Permenpan RB No. 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Dimana nanti Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN fokus pada beberapa

aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan ASN, Pengembangan Karir, Promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi. Tujuan dari penerapan sistem Merit adalah untuk ikut mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan inovatif. Karena belum menyelenggarakan Sistem Merit secara maksimal Pemerintah Kota Magelang sampai saat ini belum dapat mengetahui atau memiliki data Indeks Sistem Merit. Indeks tersebut dapat dijadikan indikator untuk mengetahui tingkat efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumberdaya aparatur.

Ada beberapa data yang sebenarnya perlu diketahui untuk mendukung komitmen di atas, antara lain: data Indeks Sistem Merit, data ASN yang di jatuhi hukuman disiplin, data penempatan ASN yang belum sesuai dengan kualifikasinya, data kompetensi pegawai, data analisa beban kerja, serta data ekinerja dan data penilaian SKP. Beberapa data tersebut belum tersedia mengingat Pemerintah Kota Magelang belum memiliki *Assesment Center*. Adapun beberapa data yang sudah tersedia antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.120
Jumlah ASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN dengan kualifikasi S1	Orang	1.955	1.383	1.327	1.367	1.293
2	Jumlah ASN dengan kualifikasi S2	Orang	356	267	277	268	266
3	Jumlah ASN dengan kualifikasi S3	Orang	0	0	0	2	2
4	Jumlah ASN	Orang	3.933	3.066	2.886	2.846	2.656

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2021

Kualifikasi Pendidikan ASN dapat mempengaruhi kinerja organisasi, semakin tinggi tingkat kualifikasi pendidikan seseorang maka diharapkan semakin tinggi kontribusinya bagi kinerja organisasi. Ke depannya, Pemerintah Kota Magelang perlu terus mendorong dan mendukung upaya peningkatan kualifikasi pendidikan bagi pegawainya, agar dapat mendukung dan menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.121
Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN yang melanggar disiplin	Orang	0	0	8	8	5
2	Jumlah ASN	Orang	3.933	3.066	2.885	2.885	2.656

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2021

Pelanggaran disiplin yang dilakukan ASN di Kota Magelang masih tergolong rendah. Namun demikian mengingat pentingnya citra dan peran aparatur negara sebagai figur yang harus memberikan keteladanan kepada masyarakat, Pemerintah tetap perlu melakukan upaya-upaya penegakan disiplin kepada ASN, baik yang sifatnya kedisiplinan terhadap aturan dan norma yang berlaku di internal pemerintah, maupun dalam kedisiplinan terhadap aturan dan norma yang berlaku di masyarakat umum.

Tabel 2.122
Jumlah Penempatan ASN sesuai kompetensi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN yg ditempatkan sesuai kompetensi	Orang	0.9*	0.78*	444	487	460
2	Jumlah Jabatan Struktural	Jabatan	534	492	765	510	474
3	Jumlah ASN	Orang	3.933	3.066	2.885	2.885	2.656

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2021

Dari data yang ada di atas kita baru dapat mengetahui jumlah ASN yang menempati jabatannya sesuai kompetensi berdasarkan jumlah jabatan yang tersedia. Namun belum dapat menggambarkan apakah masing-masing jabatan itu sudah ditempati oleh personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai latar belakang pendidikan dan kriteria pendukung tertentu yang memang spesifik dibutuhkan untuk mendukung kinerja pada jabatan tersebut.

Sementara itu, Pemerintah Kota Magelang juga telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepegawaian. Namun, jenis layanan tersebut belum seratus persen online. Dari 22 layanan kepegawaian, baru 13 jenis layananan yang sudah berbasis IT contohnya aplikasi e-Lakone untuk presensi ASN dan eKinerja untuk menilai kinerja ASN secara harian.

Langkah yang perlu diambil Pemerintah Kota Magelang ke depan adalah dengan membuat *Assesment Centre*, dari hal itu dapat disusun *talent pool* yang dapat menjalankan **manajemen talent** yang merupakan inti dari Sistem Merit. Sistem manajemen ASN di Kota Magelang harus berbasis Sistem Merit, dengan sistem tersebut diharapkan dapat mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan inovatif, sehingga pemerintah dapat meningkatkan kepuasan masyarakat karena kualitas pelayanan yang semakin meningkat.

2.3.4.5. Penelitian Dan Pengembangan

Kegiatan penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pembangunan dan sebagai dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan. Selain itu, juga berperan dalam meningkatkan minat masyarakat

dalam melakukan riset di tingkat lingkungan terkecil. Hasil riset dan pengembangan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga. Untuk melindungi hasil riset warga, maka perlu meningkatkan kesadaran untuk mendaftarkan hasil temuan orisinil ke Dirjen Hukum dan HAM. Realisasi di tahun 2020 menurun dikarenakan adanya refocusing fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam usaha mendapatkan usulan, saran, dan evaluasi hasil riset / pengembangan, Pemerintah Kota Magelang menjalin kemitraan dengan Jaringan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK (JARLITBANGRAP IPTEK) dan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang. Walau secara kelembagaan DRD tidak ada lagi, akan tetapi secara fungsi akan tetap dipertahankan dikarenakan pentingnya fungsinya.

Untuk menguatkan inovasi di daerah, Pemerintah Kota Magelang juga berupaya menjaring aneka inovasi baik dari masyarakat maupun dari OPD / BUMD, dengan hasil yang cukup memuaskan. Selain itu, dengan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga telah dilakukan pembinaan klaster kawasan Tidar Campur.

Untuk meningkatkan produktifitas ASN dalam menulis karya ilmiah, juga menampung jurnal ilmiah para peneliti secara umum, juga telah dibuka *Open Journal System* dengan nama “Jendela Inovasi Daerah”. Saat ini statusnya belum terakreditasi, karena usianya baru 2 tahun. Dengan berkolaborasi dengan Mitra Bestari (*peer reviewer*) yang kredibel, jumlah publikasi ilmiah selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2.123
Data Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang

No	Data	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah JF Peneliti	1	1	2	2	2
2	Jumlah JF Perekayasa	0	0	0	0	0
3	Jumlah Proposal KI yang disetujui	18	6	10	10	2
4	Jumlah Peserta Krenova yang Mendapat Predikat di Tingkat Provinsi	1	1	1	0	2
5	Jumlah mitra terkait Kelitbangan	2	2	2	2	2
6	Jumlah Publikasi hasil Penelitian	0	0	8	11	15
7	Cakupan penguatan SIDA	30.00%	45.00%	53.33%	56.67%	63.33%
8	Cakupan Peningkatan	30.00%	46.93%	57.86%	61.65%	70.87%

No	Data	2016	2017	2018	2019	2020
	Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan					
9	Cakupan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi	0.00%	0.00%	5.00%	10.00%	15.00%
10	Cakupan Monev dan/atau Pengendalian Riset dan/atau Kebijakan	7.00%	37.60%	33.85%	48.15%	55.23%
11	Cakupan Pengembangan dan Penerapan IPTEK	7.50%	80.00%	14.45%	15.16%	12.59%
12	Presentase Krenova OPD yang berkualitas	2.17%	25.58%	8.57%	12.86%	14.29%

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang, 2021

2.3.4.6. Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sesuai dengan regulasi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada tercapainya terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan terwujudnya peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka mencegah penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara responsif (*quick response*). Hasil evaluasi kinerja bidang pengawasan Kota Magelang selama kurun waktu tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.124
Gambaran Pengawasan Kota Magelang Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai 1,163	Nilai 3,08	Nilai 3.08	Nilai 3.08	Nilai 3.08
2	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 1	Level 3 (dengan catatan)	Level 3 (dengan catatan)	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat Kota Magelang 2021

Kinerja penyelenggaraan SPIP dapat diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu jumlah OPD yang menerapkan SPIP dan tingkat maturitas SPIP. Mulai tahun 2016 seluruh OPD di wilayah Pemerintah Kota Magelang (29 OPD)

telah menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP setiap tahunnya termasuk penyusunan RTP SPIP tingkat Kota Magelang.

Tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kota Magelang sesuai hasil penilaian yang dilakukan Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016-2018 memperoleh nilai di atas 3 yang berarti kebijakan pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan nilai pada tahun 2018-2020 belum diketahui karena belum dilakukan *quality assurance* oleh BPKP sehingga penilaian maturitas SPIP tahun 2018-2020 menggunakan hasil penilaian 2017 yang telah dilakukan BPKP. Sesuai hasil reviu atas *quality assurance* Perwakilan BPKP Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penilaian mandiri kapabilitas APIP, Pemerintah Kota Magelang dinyatakan telah mencapai level 3 Dengan Catatan (DC) pada tahun 2017 dan 2018 dan mencapai Level 3 penuh pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini berarti bahwa APIP sudah berperan efektif baik dari sisi *quality assurance* maupun *consulting partner*. Guna menunjang optimalisasi pelaksanaan pengawasan, ke depan perlu didukung teknologi informasi yang mempermudah kinerja pengawasan melalui perwujudan e-audit dalam proses pengawasan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah secara kontekstual adalah bahwa kemampuan ekonomi daerah harus mempunyai daya tarik bagi pelaku ekonomi yang ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan peningkatan daya saing daerah. Terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Analisis Kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan dan pengeluaran konsumsi pangan.

Tabel 2.125
Perbandingan Persentase Konsumsi Makanan, Konsumsi Non Makanan, dan Rata-rata Pengeluaran Per Kapita
Kota Magelang Tahun 2016-2020

Tahun	Persentase Konsumsi Non Makanan	Persentase Konsumsi Makanan	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rp)
2016	58.22	41.78	1.125.811
2017	55.46	44.54	1.067.340
2018	55.85	44.15	1.129.817
2019	60.24	39.76	1.373.329
2020	59.57	40.43	1.317.746

Sumber : BPS Kota Magelang 2020

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat konsumsi non pangannya, apabila lebih dari 50% menunjukkan kondisi rumah tangga yang baik, apabila 20-49% menunjukkan kondisi sedang dan kurang dari 20% menunjukkan kondisi yang buruk. Tingkat konsumsi non pangan masyarakat Kota Magelang sejak tahun 2016 menunjukkan tren diatas 50% sehingga digolongkan dalam kondisi rumah tangga yang baik. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam lima tahun terakhir terlihat bahwa proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan lebih sedikit dibandingkan pengeluaran untuk non makanan. Proporsi untuk pengeluaran non makanan lebih dari 50%. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang.

Pengeluaran perkapita merupakan proksi yang digunakan untuk menggambarkan pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka semakin banyak konsumsi yang dilakukan. Artinya, besarnya nilai pengeluaran menggambarkan daya beli penduduk Kota Magelang terhadap harga-harga sejumlah komoditas pangan maupun bukan pangan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pola pengeluaran penduduk Kota Magelang lebih banyak pada konsumsi bukan makanan. Meskipun demikian, pada tahun 2020 terjadi penurunan daya beli dibanding kondisi tahun 2019. Hal ini dimungkinkan terjadi karena turunnya pendapatan masyarakat, yang salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Pada tahun 2020 proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan relatif lebih tinggi dibanding tahun 2019. Artinya terjadi kenaikan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan pada tahun 2020. Meningkatnya proporsi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi makanan diduga sejalan dengan dugaan adanya pembelian makanan yang dinilai mampu mencegah Covid-19 dan kebutuhan pokok lainnya sebagai persediaan untuk beberapa waktu mendatang.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Prasarana Jalan Dan Transportasi

Secara umum kondisi jalan di Kota Magelang dalam kondisi baik, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.126
Kondisi Jalan Kota Magelang

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
1.	Jalan baik	70,08	59,28	70,08	58,94	73,12	61,49	81,39	68,45	76,05	63.95
2.	Jalan sedang	38,98	32,98	36,94	31,07	38,27	32,18	29,59	24,88	35,78	30.09
3.	Jalan rusak (minor)	9,15	7,74	11,19	9,41	7,53	6,33	7,93	6,67	7,09	6.67
4.	Jalan rusak berat / tidak sesuai spesifikasi minimal	-	0,00	0,7	0,59	-	0,00	-	0,00	-	0,00
		118,92	100	118,92	100	118,92	100	118,92	100	118,92	100

Sumber : DPUPR Kota Magelang, 2020 dan Profil Daerah Kota Magelang dan Data Strategis Kota Magelang, 2018-2020

Kota Magelang dilewati jaringan Jalan Arteri Primer sepanjang 13,512 km dalam kondisi baik, yaitu Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Urip Sumoharjo yang menjadi jalan penghubung utama antara 2 (dua) Kota yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasioal (PKN), yaitu Semarang dan Yogyakarta. Jalur ini memiliki tingkat intensitas pergerakan yang cukup tinggi, khususnya untuk angkutan bus dan angkutan barang. Sementara itu, untuk jaringan jalan kewenangan Provinsi Kolektor Primer yang melintas / di dalam hanya sebagian Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo dengan panjang jalan 0,471 km, sedangkan jalan kota sebagai Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder yang memiliki intensitas tinggi antara lain adalah Sebagian Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Pemuda, Jalan Sudirman, Jalan Ikhlas, Jalan Tidar, Jalan Tentara Pelajar dan Jalan Pahlawan. Penyebab adanya intensitas tinggi di kawasan ini karena adanya pusat pelayanan kegiatan masyarakat yang memiliki daya tarik tinggi seperti sarana perdagangan jasa dan pendidikan serta adanya titik parkir *on street*.

Struktur dan kondisi fisik jaringan jalan Kota Magelang secara umum hampir dalam kondisi baik dan terawat, baik jalan kota maupun jalan lingkungan. Struktur jalan di Kota Magelang sebagian besar berupa jalan aspal dengan perkerasan aspal/hotmix terutama untuk jalan utama kota dan lingkungan serta sebagian dengan perkerasan rigid pavement atau betonisasi untuk jalan-jalan lingkungan. Secara fisik ruas jalan di Kota Magelang sudah

dalam keadaan yang baik oleh karena itu untuk menjaga kondisi tersebut perlu adanya pemeliharaan dan peningkatan baik secara rutin dan berkala.

Pelayanan transportasi darat di Kota Magelang ditopang oleh keberadaan satu buah terminal penumpang induk, yaitu Terminal Tipe A dan sub Terminal atau Tipe C (kewenangan Daerah). Sesuai Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan terminal tipe A berada di provinsi, sehingga mulai tahun 2016 Terminal Tidar dikelola oleh Provinsi Jawa Tengah. Kota Magelang hanya mengelola Terminal Tipe C, yaitu Terminal Magersari dan Kebonpolo. Saat ini masih diperlukan penambahan terminal Tipe C lain pada kawasan-kawasan perbatasan untuk perpindahan moda transportasi angkutan pedesaan ke perkotaan, yaitu Terminal Sambung, Jl. Kalimas, Jl. Alibasa Sentot, dan Canguk yang merupakan simpul moda transportasi.

Fungsi utama Terminal Tidar, sebagai terminal induk Kota Magelang adalah sebagai tempat transit angkutan umum; sebagai salah satu pembangkit kegiatan ekonomi dan sebagai salah satu strategi pemerataan pembangunan perkotaan. Terminal tersebut melayani kendaraan angkutan umum Bus Antar Kota Antar Provinsi, Antar Kota Dalam Provinsi, Angkutan Kota, dan Angkutan Pedesaan. Terminal Tipe A menjadi salah satu arahan percepatan pembangunan untuk di rehab dalam Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019, kedepan di lokasi yang sama juga diusulkan menjadi *integrated station* dengan stasiun penumpang Kereta Api.

Sarana transportasi jalan lain yang perlu ada untuk keperluan bongkar-muat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi pengangkut barang, yaitu Terminal Angkutan Barang berada yang diarahkan tetap di sepanjang jalur arteri primer (Kelas Jalan A) yaitu di Jalan Sukarno-Hatta Kelurahan Tidar Utara. Kedepan perlu ada pengembangan Terminal Barang yang melayani bongkar muat dan pergudangan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Sedangkan prasarana penunjang transportasi jalan sampai dengan Tahun 2020 berupa pemasangan rambu jalan pada jalan kota sudah mencapai 1.388 buah, dengan simpang yang memiliki Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebanyak 15 simpang yang terintegrasi dengan *Auto Traffic Control System (ATCS) with announcer*, dengan fasilitas parkir *onstreet* kondisi baik 110 titik dari 183 titik terkelola, dengan ditunjang oleh penerangan jalan umum yang sudah mencapai 5.685 titik.

Angkutan kota di Kota Magelang sejumlah 335 unit dengan armada yang beroperasi sebanyak 220 unit (58%) yang melayani 12 (dua belas) jalur dan

panjang trayek 165 km. Sementara fasilitas halte di Kota Magelang sebanyak 21 (dua puluh satu) unit yang tersebar di beberapa titik lokasi strategis.

Dalam pelayanan angkutan darat terhadap masyarakat dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016 penumpang angkutan umum sebanyak 2.954.846 penumpang dan turun secara bertahap menjadi 2.679.600 penumpang pada tahun 2020. Penurunan penumpang angkutan umum semakin terlihat dengan semakin banyaknya angkutan online di Kota Magelang. Namun bila dirinci secara tahunan jumlah penumpang tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Persentase pengguna transportasi umum di Kota Magelang tahun 2020 masih relatif kecil yaitu sebesar 7,39% . Berdasarkan nilai *load factor* angkutan umum pada tahun 2020 sebesar 31,88 dan memiliki nilai tertinggi dibandingkan tahun tahun sebelumnya.

Tabel 2.127
Jumlah Penumpang Angkutan Umum

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.954.846	3.039.336	2.805.438	2.614.881	2.679.600
Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	10,46%	9,89%	8,73%	7,17%	7,39%
Load Factor	27,29	27,09	26,71	26,16	31,88

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2020

Jumlah halte di Kota Magelang semakin meningkat, dari 17 buah pada tahun 2016 menjadi 21 buah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan sudah menjangkau seluruh wilayah kota. Sedangkan prasarana penunjang transportasi jalan sampai dengan Tahun 2020 berupa pemasangan rambu jalan pada jalan kota total sebanyak 1.354 buah. Kemudian simpang yang memiliki Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebanyak 15 simpang yang terintegrasi dengan *Auto Traffic Control System (ATCS) with announcer* serta 3 simpang APIIL non ATCS.

Jalur sepeda yang terealisasi pada tahun 2020 berada pada 7 (tujuh) ruas jalan yaitu Jalan Tidar, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Yos Sudarso, Jalan Pahlawan, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pemuda, dan Jalan Jenderal Sudirman sisi utara. Penambahan jalur sepeda yang direncanakan kedepan yaitu Jalan Jenderal Sudirman sisi selatan, Jalan Ikhlas, dan Jalan Gatot Subroto. Untuk jalur pejalan kaki/ trotoar di Kota Magelang pada tahun 2020 tercatat sepanjang 237,83 km.

2.4.2.2. Ketaatan Terhadap RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 sebagaimana diubah dengan Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031. Ketaatan dalam RTRW merupakan kinerja dari Pemanfaatan Ruang didasarkan pada monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang tahunan.

Tabel 2.128
Realisasi Pemanfaatan Ruang Kota Magelang

No	Rencana/ Program	Realisasi Rencana (Ha)		Prosentasi Realisasi Pemanfaatan Ruang
		Realisasi	Belum Terealisasi / Selisih	
I	Kawasan Lindung			
	1 Kawasan Sempadan Sungai	32,85	5,8	85%
	2 Kawasan Sempadan Irigasi	7,19	0,63	92%
	3 Kawasan Taman	73,93	0,13	100%
	4 Kawasan Pemakaman	34,98	1,91	95%
	5 Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor	6,25	0,93	87%
II	Kawasan Budidaya			
	1 Kawasan Permukiman/Perumahan	602,94	176,6	77%
	2 Kawasan Perdagangan dan Jasa	138,43	89,71	61%
	3 Kawasan Perkantoran	53,54	0	100%
	4 Kawasan Pariwisata	20	7,7	72%
	5 Kawasan Pertanian	206,2	0	100%
	6 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	0	34,48	0%
	7 Kawasan Pelayanan Pendidikan	63,09	7,64	89%
	8 Kawasan Pelayanan Kesehatan	47,06	0,21	100%
	9 Kawasan Pelayanan Peribadatan	9,37	0	100%
	10 Kawasan Olahraga	50,99	0	100%
	11 Kawasan Pelayanan Transportasi	2,96	2,83	51%
	12 Kawasan Pertahanan dan Keamanan	124,6	48,69	72%
	13 Kawasan Khusus (Gardu Induk)	2,64	0	100%
	14 Kawasan Khusus (IPAL)	0,51	0,21	71%
Total		1.477,53	377,47	
Rasio ketaatan RTRW		79,65%		

Sumber: Materi Teknis Evaluasi RTRW Kota Magelang, DPUPR, 2018

A. Luas wilayah produktif

1. Wilayah Produktif berdasarkan Neraca Guna Lahan BPN

Kondisi penggunaan lahan Kota Magelang tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.129
Penggunaan Lahan Kota Magelang

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Budidaya Non Pertanian	1.216,31
Hutan dan Semak (Gunung Tidar)	71,03
Jalan	140,00
Perairan Darat (Sungai, Saluran, Perikanan air tawar)	61,21
Persawahan	176,15
Pertanian Tanah Kering	158,01
Rel Kereta Api	1,66
Tanah Terbuka (IPLT dan TPS)	30,30
Grand Total	1.854,67

Sumber Neraca BPN 2019

Berdasarkan tabel di atas wilayah produktif pertanian di Kota Magelang yang berupa lahan persawahan adalah seluas 176,15 Ha dan pertanian tanah kering seluas 158,01 Ha serta perikanan air tawar seluas 5,87 Ha. Adapun wilayah produktif perkotaan (kegiatan non pertanian) berupa kegiatan budidaya perkotaan dan tanah terbuka (IPLT dan TPS) adalah seluas 1.246,61 Ha dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.130
Luas Wilayah Produktif Perkotaan (Kegiatan Non Pertanian)

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
A. Budidaya Non Pertanian	1.216,31		
1. Balai Pengobatan/Klinik	0,72	2. Pergudangan Lainnya (Gudang Rokok)	4,96
3. Bengkel Angkutan Darat	4,08	4. Pergudangan Lainnya (Alat Listrik)	0,03
5. Bioskop	0,47	6. Pergudangan Lainnya (Rongsok)	0,60
7. Garasi Bus	6,00	8. Pergudangan Peralatan Umum	1,63
9. Gedung Olah Raga	10,82	10. Pertokoan	3,07
11. Gereja	2,85	12. Perumahan Jarang	73,70
13. Hotel/Motel/Penginapan/Cottag e	16,45	14. Perumahan Padat	45,13
15. Industri Aneka Makanan	2,57	16. Pusat Pertokoan/Mall/Super market	1,80
17. Industri Aneka Minuman	0,33	18. Puskesmas	1,20

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
19. Industri Bahan Bangunan	0,62	20. Rumah Kantor	0,19
21. Industri Bahan Bangunan lainnya	0,08	22. Rumah Makan/Restoran	2,93
23. Industri Kendaraan Bermotor	11,76	24. Rumah Sakit Umum	43,31
25. Industri Kimia Lainnya (Plastik)	3,56	26. Rumah Susun	1,43
27. Industri Kimia Lainnya (Sabun)	2,10	28. Rumah Toko	62,74
29. Industri Rokok	0,86	30. SPBU	1,47
31. Instalasi Air Bersih	0,04	32. Stasiun Radio	0,11
33. Instalasi Komunikasi/Telekomunikasi	0,24	34. Taman Kota	13,53
35. Instalasi Lainnya (Bengkel Las)	0,42	36. Tempat Parkir	3,44
37. Instalasi Listrik	3,00	38. Tempat Rekreasi	15,55
39. Intalasi Lainnya (SPBE)	0,90	40. Terminal Bus	2,24
41. Jasa Keuangan Bank	2,80	42. Terminal Khusus	0,04
43. Jasa Keuangan Non Bank	0,12	44. Vihara/ Kuil	0,45
45. Jasa Lainnya, jenis Penggilingan Padi	0,50	46. Warung/Kios	8,36
47. Jasa Perkantoran Swasta	4,64	B. Hutan dan Semak	71,03
48. Kampung Padat Teratur	9,56	1. Hutan Sejenis Buatan	71,03
49. Kampung Padat Tidak Teratur	529,54	C. Jalan	140,00
50. Kantor Instansi Pemerintahan	37,95	1. Jalan	140,00
51. Kantor/Bangunan Militer	108,86	D. Perairan Darat	61,21
52. Kuburan/Pemakaman Umum	36,09	1. Kolam Air Tawar	5,87
53. Lapangan (campuran)	4,20	2. Saluran	0,45
54. Lapangan Bulutangkis	0,74	3. Sungai	54,88
55. Lapangan Golf	36,54	E. Persawahan	176,15
56. Lapangan Sepak Bola	7,25	1. Sawah Irigasi Teknis	176,15
57. Lapangan Tennis	1,27	F. Pertanian Tanah Kering	158,01
58. Makam Khusus	0,10	1. Kebun Bunga	0,40
59. Makam Pahlawan	2,97	2. Tegalan/Ladang	157,61
60. Masjid/Mushola	4,37	G. Rel Kereta Api	1,66
61. Museum	0,69	1. Rel Kereta Api	1,66
62. Pasar Khusus	0,51	H. Tanah Terbuka	30,30
63. Pasar Tradisional	5,83	1. Semak	9,47
64. Pendidikan Dasar Pusat	17,69	2. Tanah Terbuka Sementara (<i>Land Clearing</i>)	20,22
65. Pendidikan Menengah	28,12	3. Tempat Pembuangan Akhir	0,50
66. Pendidikan Tinggi	12,48	4. Tempat Pembuangan Sampah Sementara	0,06
67. Pergudangan Bahan Bangunan	3,49	5. Tempat Pengolahan Sampah	0,04
68. Pergudangan Bahan Makanan	4,20		
		Grand Total	1.854,67

2. Wilayah Produktif berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW

Rencana Pola Ruang RTRW Kota Magelang terbagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagai berikut:

Tabel 2.131
Luasan Rencana Pola Ruang RTRW Kota Magelang

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Kawasan Budidaya	
Kawasan Hutan Rakyat	35,96
Kawasan Kesehatan	51,09
Kawasan Olahraga	61,06
Kawasan Pariwisata	17,02
Kawasan Pendidikan	68,88
Kawasan Perdagangan dan Jasa	264,61
Kawasan Peribadatan	9,18
Kawasan Perikanan Budidaya	3,44
Kawasan Perkantoran	42,20
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	147,54
Kawasan Perumahan	881,70
Kawasan Tanaman Pangan	63,34
Kawasan Transportasi	4,01
Kawasan Lindung	
Pemukaman	38,61
RTH Publik Kebun Raya	68,22
Sempadan Mata Air	1,12
Sempadan Sungai	24,81
Taman Kecamatan	1,06
Taman Kelurahan	6,26
Taman Kota	13,53
Jalan	28,64
Sungai	22,39
Total	1.854,68

(Sumber : DPUPR Kota Magelang 2020)

Berdasarkan tabel tersebut wilayah produktif Kota Magelang yang direncanakan meliputi:

1. Wilayah produktif pertanian yang berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 63,34 Ha dan hutan rakyat seluas 35,96 Ha serta perikanan budidaya seluas 3,44 Ha.
2. Wilayah produktif perkotaan (kegiatan non pertanian) berupa kegiatan pada kawasan budidaya (di luar tanaman pangan, hutan rakyat, perikanan budidaya) seluas 1.547,29 Ha.

Mayoritas wilayah di Kota Magelang merupakan wilayah produktif. Hal ini menjadi potensi pendukung pengembangan aktifitas pembangunan yang akan

dilakukan. Secara umum perbandingan wilayah produktif di Kota Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.132
Perbandingan Wilayah Produktif antara Penggunaan Lahan dan Rencana Pola Ruang

	Wilayah Produktif pertanian pangan / sawah	Wilayah Produktif Pertanian	Wilayah Produktif Perkotaan	Wilayah produktif budidaya (pertanian dan perkotaan)
Penggunaan Lahan	176,15	340,03	1.246,61	1.586,64
Rencana Pola Ruang	63,34	102,74	1.547,29	1.650,03
Perbandingan	2,78	3,31	0,81	0,96

B. Luas wilayah industri

1. Kawasan Industri Berdasarkan Penggunaan Lahan BPN

Kondisi penggunaan lahan industri Kota Magelang tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.133
Penggunaan Lahan Industri

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Industri Aneka Makanan	2,57
Industri Aneka Minuman	0,33
Industri Bahan Bangunan	0,62
Industri Bahan Bangunan lainnya	0,08
Industri Kendaraan Bermotor	11,76
Industri Kimia Lainnya (Plastik)	3,56
Industri Kimia Lainnya (Sabun)	2,10
Industri Rokok	0,86
Total	21,88

Kegiatan industri tersebut juga didukung oleh kawasan pergudangan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.134
Penggunaan Lahan Pergudangan

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Pergudangan Bahan Bangunan	3,49
Pergudangan Bahan Makanan	4,20
Pergudangan Lainnya (Gudang Rokok)	4,96
Pergudangan Lainnya (Alat Listrik)	0,03
Pergudangan Lainnya (Rongsok)	0,60
Pergudangan Peralatan Umum	1,63
Total	14,91

2. Kawasan Industri Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW Kota Magelang

Kawasan industri secara luas tidak tertuang dalam RTRW. Akan tetapi, kegiatan industri eksisting tetap diperbolehkan dan penambahan kegiatan industri hanya boleh berupa industri kecil dan industri rumah tangga non polutan.

2.4.2.3. Jenis Dan Jumlah Bank

Salah satu faktor pendukung perekonomian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah kemudahan dalam mengakses perbankan. Dengan tersedianya berbagai perbankan, diharapkan akan mampu mencukupi kebutuhan pembiayaan masyarakat terutama dalam hal permodalan untuk kegiatan produktif sehingga akan berkontribusi terhadap Kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan tahun 2020, Kota Magelang mempunyai 54 lembaga keuangan perbankan (cabang dan unit lembaga perbankan) yang terdiri dari lembaga bank milik pemerintah, lembaga perbankan milik daerah, serta bank swasta.

2.4.2.4. Jenis Dan Jumlah Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi berperan dalam penjaminan. Di Kota Magelang terdapat 15 perusahaan asuransi yang terdiri dari 14 perusahaan asuransi jiwa dan 1 perusahaan asuransi kerugian.

2.4.2.5. Restoran Dan Pusat Kuliner

Keberadaan restoran dan pusat kuliner sangat berperan dalam pengembangan pariwisata di Kota Magelang. Jumlah restoran yang tersebar di Kota Magelang pada Tahun 2020 yaitu sebanyak 145 buah yang memiliki keragaman dan keunikan. Pemerintah Kota Magelang juga mengembangkan pusat-pusat kuliner untuk Pedagang kaki lima (PKL) sehingga lebih tertata dan rapi yang pada muaranya akan mendukung pariwisata di Kota Magelang. Pada tahun 2020, Kota Magelang terdapat 20 Pusat Kuliner yang menampung 601 PKL dan tersebar di seluruh penjuru Kota Magelang.

2.4.2.6. Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel

Kota Magelang sebagai Kota Jasa dan Perdagangan, Keberadaan Penginapan / Hotel merupakan fasilitas utama untuk menyediakan akomodasi. Pada tahun 2020 Kota Magelang memiliki fasilitas hotel sebanyak 19 hotel yang beragam mulai dari Hotel Melati hingga Hotel Bintang 5.

Tabel 2.135
Jumlah dan Jenis Hotel di Kota Magelang Tahun 2020

No	Jenis	Jumlah
1	Hotel Bintang 5	1
2	Hotel Bintang 4	1
3	Hotel Bintang 3	3
4	Hotel Bintang 2	4

No	Jenis	Jumlah
5	Hotel Melati	10
	Jumlah	19

2.4.2.7. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Sumber air bersih bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Magelang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu sumber air bersih dari air tanah (sumur) dan air bersih perpipaan yang dikelola oleh PDAM Kota Magelang. Sebagian besar kebutuhan air bersih penduduk sudah dapat dilayani melalui jaringan perpipaan yang telah menjangkau hampir di seluruh wilayah Kota Magelang.

Sistem jaringan air bersih di Kota Magelang terbagi menjadi sistem perpipaan dan sumur air dalam. Sistem perpipaan dikelola oleh PDAM dengan jumlah pelanggan pada semester I akhir tahun tahun 2020 sebanyak 27.694 dengan total pemakaian air bersih sebesar 3.794.958,00. Berdasarkan data strategis Kota Magelang Tahun 2020, pemakaian terbanyak oleh golongan II yaitu sebanyak 86.315 pelanggan.

Tabel 2.136
Jumlah Pelanggan Air Minum, Total Pemakaian Air Minum, Jumlah Rumah Tangga dan Prosentase RT yang Menggunakan Air Bersih di Kota Magelang Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pelanggan Air Minum	25.103	26.252	27.300	27.661	27.694
Total Pemakaian Air (m ³)	7.606.319	7.633.558	7.851.440	7.700.534	3.794.958
Jumlah Rumah tangga	43.026	42.997	43.247	43.720	43.610
Prosentase rumah tangga menggunakan air bersih (Pelanggan PDAM Kota Magelang)	58,34%	61,06%	63,13%	63.26%	64%

Sumber : Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang

Tabel 2.137
Jumlah Pelanggan Air Minum PDAM Kota Magelang per Kelurahan Berdasarkan Kelompok Pelanggan Tahun 2020

No	Kecamatan / Kelurahan	Satuan	Kelompok Pelanggan				Jumlah
			I	II	III	IV	
1	Magelang Selatan	Unit	146,00	8.850,00	725,00	11,00	9.732,00
2	Rejowinangun Selatan	Unit	24,00	1.361,00	181,00	2,00	1.568,00
3	Magersari	Unit	32,00	1.789,00	146,00	0,00	1.967,00
4	Jurangombo Utara	Unit	12,00	1.070,00	54,00	3,00	1.139,00
5	Jurangombo Selatan	Unit	25,00	1.695,00	90,00	0,00	1.810,00
6	Tidar Utara	Unit	28,00	1.677,00	69,00	3,00	1.777,00
7	Tidar Selatan	Unit	25,00	1.258,00	185,00	3,00	1.471,00
8	Magelang Utara	Unit	127,00	7.193,00	292,00	2,00	7.614,00

No	Kecamatan / Kelurahan	Satuan	Kelompok Pelanggan				Jumlah
			I	II	III	IV	
9	Wates	Unit	27,00	1.596,00	52,00	1,00	1.676,00
10	Potrobangsana	Unit	33,00	1.677,00	97,00	1,00	1.808,00
11	Kedungsari	Unit	18,00	1.048,00	58,00	0,00	1.124,00
12	Kramat Utara	Unit	15,00	1.041,00	21,00	0,00	1.077,00
13	Kramat Selatan	Unit	34,00	1.831,00	64,00	0,00	1.929,00
14	Magelang Tengah	Unit	166,00	9.304,00	872,00	6,00	10.348,00
15	Kemirirejo	Unit	30,00	1.121,00	292,00	1,00	1.444,00
16	Cacaban	Unit	31,00	1.735,00	101,00	3,00	1.870,00
17	Rejowinangun Utara	Unit	37,00	2.048,00	278,00	2,00	2.365,00
18	Magelang	Unit	40,00	1.831,00	70,00	0,00	1.941,00
19	Panjang	Unit	9,00	1.023,00	84,00	0,00	1.116,00
20	Gelangan	Unit	19,00	1.546,00	47,00	0,00	1.612,00
	Total	Unit	439,00	25.347,00	1.889,00	19,00	27.694,00

Sumber data : datago, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Tabel 2.138
Jumlah Pemakaian Air Minum PDAM Kota Magelang per Kelurahan Berdasarkan Kelompok Pelanggan Tahun 2020

No	Kecamatan / Kelurahan	Satuan	Kelompok Pelanggan				Jumlah
			I	II	III	IV	
1	Magelang Selatan	m ³	33.206,00	1.034.962,00	105.047,00	1.170,00	1.174.385,00
2	Rejowinangun Selatan	m ³	7.079,00	128.610,00	14.831,00	7,00	150.527,00
3	Magersari	m ³	7.269,00	236.865,00	17.268,00	0,00	261.402,00
4	Jurangombo Utara	m ³	2.926,00	103.565,00	6.834,00	366,00	113.691,00
5	Jurangombo Selatan	m ³	5.309,00	233.338,00	14.534,00	0,00	253.181,00
6	Tidar Utara	m ³	4.798,00	178.523,00	10.681,00	575,00	194.577,00
7	Tidar Selatan	m ³	5.825,00	154.061,00	40.899,00	222,00	201.007,00
8	Magelang Utara	m ³	24.759,00	695.502,00	27.656,00	100,00	748.017,00
9	Wates	m ³	12.455,00	165.084,00	4.142,00	100,00	181.781,00
10	Potrobangsana	m ³	4.549,00	171.997,00	8.841,00	0,00	185.387,00
11	Kedungsari	m ³	1.744,00	91.025,00	5.462,00	0,00	98.231,00
12	Kramat Utara	m ³	1.016,00	87.010,00	1.260,00	0,00	89.286,00
13	Kramat Selatan	m ³	4.995,00	180.386,00	7.951,00	0,00	193.332,00
14	Magelang Tengah	m ³	63.127,00	1.716.433,00	92.197,00	799,00	1.872.556,00
15	Kemirirejo	m ³	41.758,00	139.942,00	32.973,00	54,00	214.727,00
16	Cacaban	m ³	5.328,00	181.668,00	11.436,00	568,00	199.000,00

No	Kecamatan / Kelurahan	Satuan	Kelompok Pelanggan				Jumlah
			I	II	III	IV	
17	Rejowinangun Utara	m ³	6.435,00	186.857,00	20.292,00	177,00	213.761,00
18	Magelang	m ³	6.378,00	920.713,00	13.429,00	0,00	940.520,00
19	Panjang	m ³	947,00	86315,00	9.230,00	0,00	96.492,00
20	Gelangan	m ³	2.281,00	200.938,00	4.837,00	0,00	208.056,00
	Total	m³	121.092,00	3.446.897,00	224.900,00	2.069,00	3.794.978,00

Sumber data : datago Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Selain penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan, di Kota Magelang juga masih terdapat masyarakat yang menggunakan sistem penyediaan air bersih melalui sumur air tanah. Persentase rumah tangga yang menjadi Pelanggan PDAM pada akhir tahun 2020 sebesar 64%, sedangkan sisanya mendapatkan air bersih dari beberapa hidran umum air bersih yang disediakan Pemerintah Kota Magelang. Sebagian lainnya dengan memanfaatkan mata air baik yang diambil dari sumur maupun dari sumber-sumber mata air lainnya. Beberapa upaya pengembangan sistem jaringan air bersih antara lain adalah sebagai berikut: pengoptimalan sumber mata air yang sudah ada, revitalisasi jaringan air bersih perpipaan dan penyediaan sumber pengaliran air bersih komunal seperti *hydrant* pada pusat pusat kegiatan dan permukiman.

Akses air minum non perpipaan di Kota Magelang berdasarkan data yang ada dari Dinas Kesehatan Kota Magelang berasal dari sumur. Sumur merupakan sumber air minum yang paling dikenal karena paling lazim digunakan oleh masyarakat di Kota Magelang sangat mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Sumur sebagai salah satu sumber air non perpipaan atau setempat saat ini masih menjadi salah satu sumber utama masyarakat untuk memperoleh sumber air minum terutama sumur gali. Sumur gali merupakan satu konstruksi sumur yang paling umum dan meluas dipergunakan untuk mengambil air tanah bagi masyarakat kecil dan rumah-rumah perorangan sebagai air minum dengan kedalaman 7-10 meter dari permukaan tanah. Sumur gali menyediakan air yang berasal dari lapisan tanah yang relatif dekat dari permukaan tanah, oleh karena itu dengan mudah terkena kontaminasi melalui rembesan. Umumnya rembesan berasal dari tempat buangan kotoran manusia kakus/jamban dan hewan, juga dari limbah sumur itu sendiri, baik karena lantainya maupun saluran air limbahnya yang tidak kedap air. Keadaan konstruksi dan cara pengambilan air sumur pun dapat merupakan sumber kontaminasi, misalnya sumur dengan konstruksi terbuka dan pengambilan air dengan timba. Sumur dianggap mempunyai tingkat perlindungan sanitasi yang baik, bila tidak terdapat kontak langsung antara manusia dengan air di dalam sumur.

Dari segi kesehatan penggunaan sumur gali ini kurang baik bila cara pembuatannya tidak benar-benar diperhatikan, tetapi untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pencemaran dapat diupayakan pencegahannya. Pencegahan-pencegahan ini dapat dipenuhi dengan memperhatikan syarat-syarat fisik dari sumur tersebut yang didasarkan atas kesimpulan dari pendapat beberapa pakar di bidang ini, diantaranya lokasi sumur tidak kurang dari 10 meter dari sumber pencemar, lantai sumur sekurang-kurang berdiameter 1 meter jaraknya dari dinding sumur dan kedap air, saluran pembuangan air limbah minimal 10 meter dan permanen, tinggi bibir sumur 0,8 meter, memiliki cincin (dinding) sumur minimal 3 meter dan memiliki tutup sumur yang kuat dan rapat.

2.4.2.8. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Hampir seluruh kebutuhan listrik penduduk sudah dapat dilayani melalui jaringan listrik yang telah mencakupi (coverage area) hampir di seluruh bagian wilayah Kota Magelang, khususnya kawasan permukiman. Kebutuhan listrik di Kota Magelang telah dipenuhi dengan baik oleh PLN. Kebutuhan ini juga dipermudah dengan keberadaan APJ (Asosiasi Pelayanan Jaringan) Listrik Magelang dengan skala pelayanan UPJ Tegalrejo, UPJ Kota Magelang, UPJ Purworejo, UPJ Temanggung. Pusat pelayanan listrik bagi kabupaten di sekitar Kota Magelang. Pemenuhan kebutuhan listrik penduduk Kota Magelang dipenuhi melalui layanan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Jumlah pelanggan yang menggunakan jasa layanan listrik negara di Kota Magelang terus mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan pelayanan terkait dengan adanya peningkatan jumlah pelanggan listrik dari tahun per tahun maka PLN terus berupaya untuk memperluas jaringan listrik di wilayah Kota Magelang. Untuk pelayanan di wilayah Kota Magelang dan sekitarnya, sumber energi listrik ditransmisikan melalui SUTET dari wilayah Kabupaten Semarang dan masuk ke gardu listrik PLN yang terdapat di Jl. Urip Sumoharjo tepatnya di Kelurahan Wates.

Dalam bidang pelayanan listrik kepada masyarakat akan kebutuhan listrik pada semester 1 Tahun 2020 mengalami peningkatan, tercatat sebanyak 40.022 pelanggan listrik dengan pemakaian pada semester 1 Tahun 2020 sebanyak 14.791.941 Kwh. Pemakaian terbanyak dikonsumsi oleh pelanggan rumah tangga yaitu sebanyak 33.831 pelanggan dengan pemakaian listrik sebesar 4.544.671Kwh. Sedangkan pemakaian listrik terendah oleh kelompok sosial, yaitu sebanyak 1.085 pelanggan dengan pemakaian listrik selama semester 1 tahun 2020 sebesar 1.227.978Kwh. Hampir 90% pelanggan listrik di Kota

Magelang merupakan rumah tangga sementara sisanya merupakan pelanggan dari kelompok usaha, kelompok industri dan umum.

Tabel 2.139
Jumlah Pelanggan Listrik Pasca Bayar PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) per Kelurahan di Kota Magelang Berdasarkan Kelompok Pelanggan Tahun 2020

No	Kecamatan / Kelurahan	Kelompok Pelanggan					
		Sosial	Rumah Tangga	Usaha	Industri	Umum	Jumlah
1	Magelang Selatan	329,00	9.997,00	1.370,00	21,00	142,00	11.859,00
2	Rejowinangun Selatan	87,00	2.239,00	295,00	3,00	24,00	2.648,00
3	Magersari	51,00	1.642,00	216,00	3,00	26,00	1.938,00
4	Jurangombo Utara	48,00	1.744,00	237,00	7,00	33,00	2.069,00
5	Jurangombo Selatan	42,00	1.213,00	197,00	3,00	20,00	1.475,00
6	Tidar Utara	48,00	1.696,00	222,00	3,00	25,00	1.994,00
7	Tidar Selatan	53,00	1.463,00	203,00	2,00	14,00	1.735,00
8	Magelang Utara	399,00	12.161,00	1.622,00	37,00	197,00	14.416,00
9	Wates	67,00	1.870,00	249,00	8,00	32,00	2.226,00
10	Potrobangsari	74,00	2.441,00	273,00	2,00	33,00	2.823,00
11	Kedungsari	67,00	2.403,00	309,00	5,00	40,00	2.824,00
12	Kramat Utara	132,00	3.587,00	493,00	13,00	54,00	4.279,00
13	Kramat Selatan	59,00	1.860,00	298,00	9,00	38,00	2.264,00
14	Magelang Tengah	357,00	11.673,00	1.485,00	36,00	196,00	13.747,00
15	Kemirirejo	54,00	1.945,00	240,00	6,00	25,00	2.270,00
16	Cacaban	64,00	2.270,00	281,00	8,00	28,00	2.651,00
17	Rejowinangun Utara	65,00	2.061,00	281,00	5,00	39,00	2.451,00
18	Magelang	47,00	1.601,00	211,00	2,00	32,00	1.893,00
19	Panjang	52,00	1.691,00	234,00	9,00	28,00	2.014,00
20	Gelangan	75,00	2.105,00	238,00	6,00	44,00	2.468,00
	Total	1.085,000	33.831,000	4.477,00	94,000	535,00	40.022,000

Sumber data : datago Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Tabel 2.140
Jumlah Pemakaian KWH Listrik Pasca Bayar per Kelurahan di Kota Magelang Berdasarkan Kelompok Pelanggan Tahun 2020

No	Kecamatan / Kelurahan	Kelompok Pelanggan					
		Sosial	Rumah Tangga	Usaha	Industri	Umum	Jumlah
1	Magelang Selatan	381.035,00	1.393.589,00	1.033.023,00	1.287.662,00	561.611,00	4.656.920,00
2	Rejowinangun Selatan	59.728,00	295.528,00	134.615,00	167.129,00	70.748,00	727.748,00

No	Kecamatan / Kelurahan	Kelompok Pelanggan					
		Sosial	Rumah Tangga	Usaha	Industri	Umum	Jumlah
3	Magersari	66.988,00	231.619,00	399.078,00	188.004,00	216.891,00	1.102.580,00
4	Jurangombo Utara	59.319,00	257.080,00	175.184,00	161.507,00	69.570,00	722.660,00
5	Jurangombo Selatan	46.227,00	174.523,00	96.693,00	158.015,00	90.112,00	565.570,00
6	Tidar Utara	55.745,00	237.015,00	133.684,00	322.803,00	61.719,00	810.966,00
7	Tidar Selatan	93.028,00	197.824,00	93.769,00	290.204,00	52.571,00	727.396,00
8	Magelang Utara	370.051,00	1.509.473,00	1.194.200,00	1.669.761,00	399.568,00	5.143.053,00
9	Wates	52.318,00	252.030,00	85.258,00	652.163,00	87.845,00	1.129.614,00
10	Potrobangsari	76.608,00	312.280,00	118.162,00	159.911,00	65.452,00	732.413,00
11	Kedungsari	104.013,00	308.967,00	431.136,00	161.904,00	75.941,00	1.081.961,00
12	Kramat Utara	79.802,00	422.098,00	289.781,00	178.604,00	109.943,00	1.080.228,00
13	Kramat Selatan	57.310,00	214.098,00	269.863,00	517.179,00	60.387,00	1.118.837,00
14	Magelang Tengah	476.892,00	1.641.609,00	958.893,00	1.350.976,00	563.596,00	4.991.968,00
15	Kemirirejo	65.776,00	264.763,00	116.059,00	167.362,00	63.915,00	677.875,00
16	Cacaban	112.944,00	314.465,00	266.332,00	197.666,00	93.630,00	985.037,00
17	Rejowinangun Utara	94.243,00	288.721,00	193.915,00	169.783,00	85.702,00	832.364,00
18	Magelang	45.373,00	224.935,00	171.281,00	164.131,00	91.574,00	697.294,00
19	Panjang	50.575,00	268.513,00	93.520,00	478.695,00	100.842,00	992.145,00
20	Gelangan	107.981,00	280.212,00	117.786,00	173.339,00	127.935,00	807.253,00
	Total	1.227.978,000	4.544.671,000	3.186.116,00	4.308.399,000	1.524.777,00	14.791.941,000

Sumber data : datago Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat berbanding lurus terhadap iklim investasi. Artinya, semakin tinggi tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat, maka iklim investasi semakin kondusif. Terkait keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satu indikatornya adalah angka kriminalitas. Angka kriminalitas berkaitan erat dengan iklim investasi di Kota Magelang, dimana semakin rendah angka kriminalitas berpengaruh positif terhadap peluang investor untuk menanamkan investasinya di Kota Magelang. Data kriminalitas berdasarkan laporan dari Badan Kesbangpol Kota Magelang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.141
Angka Kriminalitas di Kota Magelang

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kejahatan yang terjadi di Kota Magelang	170	162	153	142	134
Proyeksi Jumlah penduduk (data BPS)	121.293	121.673	121.992	122.243	122.532
Angka kriminalitas	14.02	13.31	11.77	10.90	10.47

Sumber : Kesbangpol, 2021

Berdasarkan data yang ada, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, angka kriminalitas cenderung menurun yang artinya Kota Magelang semakin kondusif dalam hal iklim investasi.

Tabel 2.142
Data Kriminalitas yang Tertangani di Kota Magelang

Tahun	Jumlah Kriminalitas		Rasio (%)	Angka Kriminalitas yang Tertangani
	Lapor	Selesai		
2016	170	120	70.59	11.08
2017	162	118	72.84	9.89
2018	153	115	75.16	8.88
2019	142	107	75.35	8.21
2020	134	99	73.88	7.6

Sumber : Polres Magelang Kota, 2016-2020

Dari data kriminalitas yang tertangani di Kota Magelang, terlihat rasio penyelesaian kriminalitas yang tertangani berfluktuatif di kisaran 70.59% hingga 75%. Meskipun demikian, Kota Magelang masih sangat kondusif sebagai tempat berinvestasi.

2.4.3.2. Kemudahan Perijinan

Kemudahan perijinan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam menarik minat investor. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diantaranya mengatur kemudahan izin usaha; penyederhanaan persyaratan dasar perijinan usaha, pengadaan lahan, pemanfaatan lahan, dan penyederhanaan persyaratan investasi. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan iklim investasi semakin baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun upaya Pemerintah Kota Magelang dalam memberikan kemudahan berinvestasi di Kota Magelang, telah ada beberapa peraturan daerah dalam yang mendukung investasi yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal
2. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031.

2.4.3.3. Pajak Dan Retribusi Daerah

Salah satu instrumen dalam desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pajak (*Taxing Power*). Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah mempunyai peranan yang sangat strategis, dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Diantara sumber pendapatan daerah adalah pajak dan retribusi daerah.

Jenis pajak daerah di Kota Magelang terdapat 10 jenis, meliputi: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Parkir; (7) Pajak Air Tanah; (8) Pajak Sarang Burung Walet; (9) Pajak Bumi dan Bangunan; dan (10) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi daerah yang menjadi sumber penerimaan di Kota Magelang meliputi: Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda; Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan; Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/ Pengabuan Mayat; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran; Retribusi Pelayanan Pasar-Los; dan Retribusi Pelayanan Pasar-Kios.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Apabila dilihat dari jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2020 diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65+ tahun), dengan komposisi 86.483 penduduk usia produktif (86,42%) dan 11.323 jiwa penduduk usia non produktif (13,58%). Dengan demikian, angka rasio ketergantungan di Kota Magelang tahun 2020 sebesar 41,68 yang artinya bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 41 orang penduduk usia tidak produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kota Magelang telah mengalami bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif. Kondisi Rasio Ketergantungan di Kota Magelang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.143
Angka Beban Tanggungan Penduduk
Kota Magelang Tahun 2016-2020

Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Rasio Ketergantungan	
	0-14 th	15-64 th	≥ 65 th	Kota Magelang	Jawa Tengah
2016	25.897	85.534	9.862	41.81	46,82
2017	25.650	85.851	10.171	41.72	46,57
2018	25.450	86.032	10.512	41.80	46,35
2019	25.190	86.171	10.885	41.86	46,18
2020	24.727	86.483	11.323	41.68	46,06

Sumber : Proyeksi Penduduk Kota Magelang, BPS Kota Magelang, 2020, data diolah

Berdasarkan data kependudukan yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2020 dengan proyeksi penduduk sebanyak 122.532 jiwa laju pertumbuhan penduduk mencapai 0.23%. Apabila data ini dikaitkan dengan bonus demografi yang sudah di nikmati penduduk Kota Magelang sejak tahun 2010, di mana rasio penduduk usia produktif rata-rata mencapai dua kali lipat di bandingkan penduduk kelompok usia non produktif maka hal ini menunjukkan bahwa angka ketergantungan penduduk di Kota Magelang yang cenderung semakin kecil dari tahun ke tahun atau memperlihatkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk produktif semakin kecil.

Menurut data BPS pada Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang, rasio ketergantungan yang cenderung menurun diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja namun di satu sisi mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika di antara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka ini yang di katakana usia produktif namun tidak dapat termanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Data di atas juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar adalah penduduk usia produktif, sekitar 86 persen. Hal ini menunjukkan potensial sebagai modal dasar untuk pembangunan. Potensi yang besar harus di imbangi dengan ekonomi yang cukup dan kemampuan yang baik serta fasilitas yang mendukung seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan sehingga nantinya akan menghasilkan penduduk yang berkualitas dan membawa manfaat bagi pembangunan.

2.4.4.2. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan struktur demografi menurut tingkat Pendidikan, menunjukkan bahwa lulusan SMA menunjukkan proporsi yang cukup besar (43,85%) diantara yang lain. Diikuti oleh tamat SD dan SMP yang menunjukkan persentase sebesar 17,62% dan 15,96%. Di sisi lain, penduduk yang tidak/belum tamat SD menunjukkan angka yang relatif kecil, yaitu sebesar 1,71%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kota Magelang sudah cukup baik.

Tabel 2.144
Jumlah Penduduk Usia 25 Tahun ke atas berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Magelang Tahun 2016-2020

Kelompok Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
Tidak/ Belum Tamat	1.871	1.794	1.662	1.559	1.393

Kelompok Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
SD					
Tamat SD	16.886	16.270	15.637	15.223	14.353
SLTP	13.937	13.633	13.418	13.371	13.003
SLTA	35.526	35.334	35.488	35.919	35.713
D1, D2	429	428	427	421	427
D3, D4	4.013	3.956	3.950	4.029	4.020
S1, S2, S3	12.162	12.045	12.188	12.545	12.520
Jumlah	84.824	83.460	82.770	83.067	81.429

Sumber: Data Strategis Kota Magelang Tahun 2021, Diskominsta Kota Magelang, DispendukCapil

2.4.5. Fokus Penyelenggaraan Pemerintah

a. Reformasi Birokrasi

Untuk menilai pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik semakin membaik, telah dilakukan evaluasi reformasi birokrasi oleh kemenpan RB, hasil evaluasi ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Magelang. Berikut ini adalah tabel simpulan hasil evaluasi

Tabel 2.145
Hasil Evaluasi Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Magelang tahun 2018-2019

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2019
I	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5	2.43	2.56
2	Penataan peraturan perundang undangan	5	2.09	2.15
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	2.68	2.83
4	Penataan Tatalaksana	5	3.37	3.45
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	11.26	11.42
6	Penguatan Akuntabilitas	6	3.62	3.71
7	Penguatan Pengawasan	12	4.64	4.93
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	3.79	3.81
	Total Komponen Pengungkit (A)	60	33.88	34.86
II	Komponen Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	8.41	9.11
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6	4.79	4.99
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7	6.07	5.92
4	Opini BPK	3	3	3
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10	8.60	8.45
	Total Komponen Hasil (B)	40	30.87	31.47
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100	64.75	66.33

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Magelang

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Magelang Pada tahun 2019 adalah 66,33 atau masuk dalam kategori B. Untuk penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 menunjukkan angka 66,50 (kategori B). Namun, terdapat perbedaan komponen penilaian dari tahun sebelumnya. Detil dari masing-

masing komponen penilaian reformasi birokrasi tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.146
Hasil Evaluasi Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Magelang Tahun 2020

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A	Komponen Pengungkit		
1	Pemenuhan	20,00	13,93
2	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,61
3	Reform	30,00	15,57
	Total Komponen Pengungkit	60,00	35,11
B	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja Keuangan	10,00	7,65
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,45
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,45
4	Kinerja Organisasi	10,00	6,84
	Total Komponen Hasil	40,00	31,39
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)	100,00	66,50

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Magelang

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Era keterbukaan informasi merupakan tantangan bagi instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Laju informasi begitu derasnya mengalir dari berbagai media, dan hampir sudah tidak ada hambatan dalam memperoleh informasi. Kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan publik, menuntut penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamantkan bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya, membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itu kualitas pelayanan publik perlu dilakukan pemantauan dan penilaian, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pada pasal 38 dinyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan secara berkala sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan serta mengakomodir harapan dari masyarakat penerima/pengguna layanan.

Salah satu metode penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan dengan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

Survei kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik terhadap unit penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kota Magelang. Sedangkan manfaat yang diperoleh dengan dilakukan survei kepuasan masyarakat antara lain sebagai berikut:

- 1.Untuk mengetahui kelemahan/kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- 2.Untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit penyelenggara pelayanan publik secara periodik;
- 3.Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei kepuasan masyarakat;
- 4.Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kota Magelang;
- 5.Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
- 6.Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin telah dilakukan pada unit pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kota Magelang, Hasil survey kepuasan masyarakat periode RPJMD 2016-2021 menunjukkan tren yang cukup baik, hal ini ditandai dengan angka indeks yang berada pada kisaran angka 76,61-88,30 dengan mutu pelayanan baik.

Tabel 2.147
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit penyelenggara pelayanan (y)
1.	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2.	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3.	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4.	3,5324-4,00	88,31-	A	Sangat Baik

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit penyelenggara pelayanan (y)
		100,00		

Sumber : PermenPANRB No. 14 Tahun 2017

Tabel 2.148
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Magelang
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
1.	2016	NA	NA
2.	2017	78.19	Baik
3.	2018	79.66	Baik
4.	2019	80.82	Baik
5.	2020	82,91	Baik

Sumber : Buku Laporan IKM 2017 s.d 2020 data diolah

Perolehan nilai indeks IKM Kota Magelang didapat dari hasil pengukuran hasil survey Kepuasan Masyarakat pada unit penyelenggaran pelayanan publik sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.149
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik Kota Magelang Tahun 2017-2020

No.	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai IKM 2017	Nilai IKM 2018	Nilai IKM 2019	Nilai IKM 2020
1	Dinas Tenaga Kerja	79,396	89,181	79,150	---
2	Dinas Perhubungan	80,636	77,916	77,260	84,987
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79,058	81,536	78,600	80,811
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	77,485	76,965	78,460	82,274
5	DPMPTSP	83,938	82,288	81,270	---
6	RSUD Tidar Magelang	75.836	78,363	80,450	81,965
7	Puskesmas Magelang Utara	75.413	78,366	73,010	80,000
8	Puskesmas Magelang Selatan	74,989	77,106	81,280	---
9	Puskesmas Magelang Tengah	77,636	78,592	77,020	100,000
10	Puskesmas Kerkopan	79,777	79,240	72,800	---
11	Puskesmas Jurangombo	72,937	79,019	79,350	97,923
12	UPT Klinik Hewan dab Lab Keswan Disperpa	80,389	74,580	82,740	---
13	UPT RPH dan Lab Kesmavet Disperpa	---	---	75,010	---

No.	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai IKM 2017	Nilai IKM 2018	Nilai IKM 2019	Nilai IKM 2020
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	---	81,331	68,740	---
15	Dinas Perumahan dan Pemukiman (UPT Rusunawa)	---	82,484	77,750	75,713
16	Dinas Lingkungan Hidup	---	77,055	77,780	---
17	DPUPR	---	---	80,260	86,079
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	---	---	80,310	---
19	BKPP	---	---	77,900	79,028
20	Bappeda	---	---	79,550	81,25
21	Bagian Kesra (Setda)	---	83,692	88,750	---
22	BPKAD (Pelayanan Masyarakat)	85,495	78,464	80,060	80,556
23	BPKAD (Administrasi Pemerintahan)	---	---	80,660	---
24	Kecamatan Magelang Utara	82,579	77,715	84,130	82,056
25	Kecamatan Magelang Tengah	76,55	83,146	82,890	---
26	Kecamatan Magelang Selatan	85,505	80,201	83,550	---
27	Kelurahan Tidar Selatan	81,71	77,407	83,290	---
28	Kelurahan Tidar Utara	78,088	79,173	81,290	91,204
29	Kelurahan Rejowinangun selatan	78,83	81,168	83,550	---
30	Kelurahan Magersari	76,591	84,962	82,190	---
31	Kelurahan Rejowinangun Utara	78,415	80,435	85,950	---
32	Kelurahan Jurangombo Selatan	78,961	76,688	84,990	80,556
33	Kelurahan Jurangombo Utara	81,7	77,200	81,960	---
34	Kelurahan Pajang	75,525	81,521	85,280	---
35	Kelurahan Gelangan	81,212	80,585	87,530	89,744
36	Kelurahan Magelang	78,922	80,322	83,420	---
37	Kelurahan Cacaban	80,891	82,374	82,860	---
38	Kelurahan Potrobangsari	81,728	78,770	83,080	77,523
39	Kelurahan Wates	78,559	76,928	79,720	---
40	Kelurahan Kedungsari	78,423	79,643	80,810	---
41	Kelurahan Kramat Utara	78,288	83,135	83,040	80,556
42	Kelurahan Kramat Selatan	75,308	82,165	80,570	82,677
43	Kelurahan Kemirirejo	79,454	82,440	87,060	
44	PDAM	78,173	74,974	80,680	
44	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	---	---	B	83,333

No.	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai IKM 2017	Nilai IKM 2018	Nilai IKM 2019	Nilai IKM 2020
45	SMP Negeri 1	---	73,437	---	---
46	SMP Negeri 2	---	75,649	---	---
47	SMP Negeri 3	73,852	---	---	---
48	SMP Negeri 5	73,546	---	---	---
49	SMP Negeri 9	76,977	---	---	---
50	SMP Negeri 10	69,300	---	---	---
51	SMP Negeri 11	74,059	---	---	---
52	SMP Negeri 12	72,677	---	---	---
53	SMP Negeri 13	76,832	---	---	---
Nilai IKM Kota Magelang		78,186	79,66	80,82	82,912
Mutu Pelayanan		B	B	B	B
Kinerja Pelayanan		Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber : Buku Laporan IKM 2017 s.d 2020 data diolah

Nilai indeks kepuasan masyarakat tingkat kota menunjukkan tren yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Nilai IKM tingkat kota merupakan rata-rata capaian nilai IKM dari unit penyelenggara pelayanan publik yang disurvei. Jika diperhatikan capaian nilai IKM pada masing-masing UPP acap kali mengalami dinamika naik dan turun, hal ini wajar karena IKM diukur berdasarkan pada persepsi pengguna layanan yang sangat terpengaruh oleh kesan dari pengguna pelayanan terhadap kualitas layanan penyelenggara pada saat dilakukan survei.

Guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan maka unit penyelenggara pelayanan publik harus konsisten dalam penerapan asas-asas pelayanan publik diantaranya : a) berorientasi pada kepentingan umum; b) kepastian hukum; c) kesamaan hak; d) keseimbangan hak dan kewajiban; e) keprofesionalan; f) partisipatif; g) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h) keterbukaan; i) akuntabilitas; j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k) ketepatan waktu; dan l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Dengan senantiasa konsisten menerapkan asas-asas tersebut niscaya IKM unit pelayanan publik akan mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat.

Disamping itu perlu diupayakan menciptakan ekosistem pelayanan prima pada masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Magelang, hal ini dapat dilakukan melalui internalisasi penerapan nilai-nilai pelayanan publik yang baik, mengoptimalkan strategi mengenali kebutuhan pengguna layanan, dan meningkatkan kesadaran warga yang terlibat dalam pelayanan publik. Selanjutnya hal yang sangat penting untuk diterapkan adalah aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi:

a. Penerapan Standar Pelayanan Publik

Standar Pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Komponen Standar Pelayanan meliputi:

- *Service Delivery*, adalah Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan, terdiri dari 6 (enam) aspek yaitu: 1) Persyaratan; 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur; 3) Jangka Waktu Pelayanan; 4) Biaya/Tarif; 5) Produk Pelayanan; 6) Aduan, Saran, Masukan.
- *Manufacturing*, adalah Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal unit kerja, terdiri dari 8 (delapan) aspek yaitu: 1) Dasar Hukum; 2) Sarana Prasarana / Fasilitas; 3) Kompetensi Pelaksana; 4) Pengawasan Internal; 5) Jumlah Pelaksana; 6) Jaminan Pelayanan; 7) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; 8) Evaluasi Kinerja Pelayanan;

b. Maklumat Layanan

Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Muatan Maklumat Pelayanan .

c. Sistem Informasi Pelayanan

Sistem Informasi Pelayanan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

d. Sarana dan Prasarana, Fasilitas Pelayanan

Penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai. Hal tersebut dapat berupa ketersediaan ruang khusus pelayanan berupa *front office*, ruang tunggu, sarana parkir kendaraan, toilet, fasilitas TV, media informasi, fasilitas air conditioner, fasilitas wifi, ruang ibadah, sistem antrian.

e. Penyelenggaraan Pelayanan Khusus

Penyelenggaraan pelayanan maupun penyediaan sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, ibu menyusui dan wanita hamil).

f. Pengelolaan Pengaduan

Tersedianya media pengaduan layanan publik yang dikelola dengan baik. Adanya petugas khusus yang ditunjuk untuk mengelola aduan dan ketersediaan SOP pengaduan layanan.

g. Penilaian Kinerja (pengukuran kepuasan masyarakat)

Survey kepuasan masyarakat merupakan bentuk kerjasama antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat dalam rangka melakukan penilaian kinerja pelayanan, agar penyelenggara layanan dapat meningkatkan kualitas layanannya.

2.5. Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021

Secara umum, capaian indikator sasaran pembangunan dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 belum sepenuhnya tercapai. Hingga akhir tahun 2020, dari total 83 sasaran baru tercapai 46 indikator sasaran. Beberapa indikator yang belum tercapai antara lain Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Prevalensi Balita Gizi Buruk, Indeks Pencemaran Air, persentase RTH Publik, Pelayanan air minum, dan pengurangan luas Kawasan kumuh. Kondisi pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.150
Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

No	Indikator	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
Misi 1	Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat							
Tujuan	Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur professional dan berintegritas							
Sasaran 1	Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur							
1	Persentase pegawai berkinerja baik	98,06%	82,63%	83,52%	84,52%	99,92%	97,90%	HIJAU
2	Capaian SPM Kota Magelang	66,67%	86,09%	80,00%	75,86%	72,41%	80,00%	HIJAU
3	Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	45,00%	47,00%	53,29%	53,29%	67,24%	67,00%	HIJAU
Sasaran 2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi							
1	Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	HIJAU
2	Indeks EKPPD	3,056	3,215	3,20	3,36	3,36	3,13	HIJAU
3	Hasil implementasi SAKIP	55,78	55,78	60,05	65,1	66,47	59,00	HIJAU
4	Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan	30,00%	65,08%	63,97%	68,14%	79,12%	75,00%	HIJAU
5	Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	139,00%	100,00%	HIJAU
Tujuan 2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi tehnologi informasi							
Sasaran 1	Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsive							
1	Persentase PD dengan nilai pelayanan baik	97,50%	48,28%	62,07%	82,00%	82,81%	84,84%	HIJAU
Sasaran 2	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik							
1	Persentase PD menerapkan e-Gov	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	HIJAU
2	Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	71,74%	100,00%	100,00%	80,56%	100,00%	90,00%	HIJAU
Sasaran 3	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel							

No	Indikator	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	89,16%	93,98%	74,70%	72,29%	59,04%	98,00%	MERAH
2	Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	100,00%	90,99%	97,81%	99,71%	96,25%	90%	HIJAU
Tujuan 3	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara patisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan							
Sasaran	Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan asset daerah							
1	Derajat Otonomi Fiskal	35,55%	34,80%	37,96%	39,40%	26,56%	33,88%	KUNING
2	Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	67,57%	61,18%	62,82%	59,32%	67,01%	65,79%	HIJAU
Tujuan 4	Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat							
Sasaran 1	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan							
1	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	60,00%	70,19%	80,00%	81,48%	80,34%	68,00%	HIJAU
2	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	51,72%	58,62%	65,52%	65,52%	86,21%	82,76%	HIJAU
3	Persentase perkembangan kerjasama daerah	15,63%	8,82%	35,14%	22,00%	17,21%	5,45%	HIJAU
Sasaran 2	Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan							
1	Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	45,04%	87,24%	74,06%	74,06%	74,06%	49%	HIJAU
Sasaran 3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional							
1	Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional	6	6	21	21	8	6	HIJAU
2	Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah nasional	-	-	-	-	47	2	HIJAU
3	Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah internasional	-	-	1	1	2	-	HIJAU

No	Indikator	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
4	Jumlah prestasi Olahraga di tingkat regional	10	125	37	37	-	10	MERAH
5	Jumlah prestasi Olahraga di tingkat nasional	5	19	12	12	2	5	MERAH
6	Jumlah prestasi Olahraga di tingkat internasional	2	19	1	1	2	2	HIJAU
Misi 2	Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan							
Tujuan 1	Meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia							
Sasaran 1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing							
1	Rata-rata lama sekolah	10,29	9,14	10,29	10,29	10,39	10,55	HIJAU
2	Persentase sekolah berstandar nasional (SD)	98,66%	41,33%	54,14%	57,14%	57,33%	55,66%	HIJAU
3	Persentase sekolah berstandar nasional (SMP)	90,00%	72,73%	78,26%	78,26%	82,61%	85%	HIJAU
4	Angka Melek Huruf	97,35%	98,57%	98,77%	98,77%	98,77%	98,63%	HIJAU
5	Persentase kunjungan perpustakaan	80,65%	81,10%	84,85%	88,06%	20,02%	77,07%	MERAH
6	Jumlah kunjungan perpustakaan	106.674	107.260	112.230	116.467	26.483	102.230	MERAH
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat							
1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	15,38%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	HIJAU
2	Angka Harapan Hidup	76,62	76,66	76,72	76,75	76,85	76,85	HIJAU
3	AKI/ 100.000 KH	0	192,43	130,98	130,55	138,79	95,00	MERAH
4	AKB/ 1.000 KH	10,66	12,19	13,10	10,44	13,88	13,00	HIJAU
5	AKABA	0,127	0,141	0,151	0,1175	0,1666	0,140	KUNING
6	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,22	0,308	0,24	0,19	0,69	0,31	MERAH
7	Angka Kesakitan DBD	72,03	49,66	40,00	58,33	17,97	50,00	HIJAU
8	Angka Prevalensi Kasus TB	122,54	153,49	154,61	174,23	195,28	102,00	MERAH
9	Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,02%	0,03%	0,02%	0,01%	0,03%	0,05%	HIJAU

[illegible]

No	Indikator	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	13.501	13.637	13.820	13.952	14.158	12.985	HIJAU
Tujuan 3	Menurunkan pengangguran dan kemiskinan							
Sasaran 1	Meningkatnya lapangan kerja							
1	Persentase penyerapan tenaga kerja	93,21%	65,00%	65,00%	65,00%	51,41%	70,00%	HIJAU
Sasaran 2	Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS							
1	Persentase Penurunan PMKS	2,00%	9,61%	5,07%	13,24%	-41,31%	18,00%	MERAH
Tujuan 4	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat							
Sasaran	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan							
1	Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2,00	2,03	2,03	2,03	2,00	2	HIJAU
Tujuan 5	Meningkatkan kesetaraan gender							
Sasaran	Menurunnya kesenjangan gender							
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	11,05%	6,37%	20,00%	5,07%	7,50%	26,00%	MERAH
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	13,93%	14,06%	23,00%	11,37%	16,80%	30,00%	MERAH
3	Rasio KDRT	0,066%	0,035%	0,110%	0,006%	0,002%	0,040%	HIJAU
Misi 4	Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang							
Tujuan 1	Mewujudkan pelestarian budaya dan kesenian daerah							
Sasaran	Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan							
1	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,00%	15,00%	17,41%	17,41%	15,63%	15,50%	HIJAU
2	Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	0	35	35	35	35	20	HIJAU
Tujuan 2	Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata							
Sasaran	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial							
1	Jumlah Wisatawan Nusantara (orang)	1.139.585	3.447.841	827.631	1.560.199	524.052	1.141.899	MERAH

No	Indikator	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
2	Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)	6.793	17.162	3.559	3.559	4.123	5.210	KUNING
Misi 5	Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani							
Tujuan 1	Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religius							
Sasaran 1	Terbentuknya karakter religius dalam kehidupan bermasyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan							
1	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	3,00%	1,06%	3,18%	4,74%	31,03%	3,00%	HIJAU
Sasaran 2	Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat							
1	Angka kriminalitas	14,02%	13,31%	11,77%	10,90%	10,47%	11,64%	HIJAU
2	Prosentase penurunan kasus narkoba	3,00%	6,00%	3,00%	3,00%	28,57%	3,00%	MERAH
3	Angka kriminalitas yang tertangani	9,89	9,70	8,85	8,21	7,73	12,50	MERAH
4	Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	HIJAU
Tujuan 2	Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman							
Sasaran	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan							
1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,54%	3,22%	3,31%	3,31%	3,35%	3,00%	HIJAU
2	Ketersediaan kelembagaan pusat-pusat keagamaan (religious centre)	0	0	1	0	0	1	MERAH

Sumber: hasil analisis Bappeda tahun 2021

Keterangan:

HIJAU	Kinerja ST (lebih dari 90%)
KUNING	Kinerja T ($\leq 90\%$ dan $> 75\%$) dan S ($\leq 75\%$ dan $> 65\%$)
MERAH	Kinerja R ($\leq 65\%$ dan $> 50\%$) dan SR ($\leq 50\%$)

Terdapat 82 indikator terkait sasaran RPJMD 2016-2021. Dari total indikator tersebut, terdapat 56 indikator dengan kinerja hijau, 5 indikator dengan kinerja kuning, dan 21 indikator dengan kinerja merah. Secara umum pandemi covid 19 berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada beberapa hal yaitu:

- Refocusing anggaran pemerintah daerah untuk penanganan dampak pandemi menyebabkan program-program pada urusan-urusan yang tidak terkait dengan pemulihan ekonomi, reformasi kesehatan, dan perlindungan sosial tidak menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Contohnya pada upaya pencapaian persentase sarana perdagangan milik Pemerintah Kota Magelang menuju standar inklusivitas (universal design) dan upaya peningkatan persentase masyarakat yang paham mitigasi bencana
- Pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial saat pandemi menyebabkan penurunan permintaan pada berbagai sektor dan layanan publik. Hal ini dapat dilihat pada penurunan kunjungan ke perpustakaan dan penurunan aktivitas produksi dan perdagangan.
- Pada aspek lingkungan hidup, peningkatan penggunaan kemasan makanan saat pandemi menjadi salah satu faktor penyebab naiknya volume sampah yang dibuang ke TPSA.

Terlepas dari dampak pandemi covid 19, terdapat beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target indikator kinerja tersebut, yaitu:

- Prioritas program dan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja.
- Belum semua data dukung yang menjadi base line perencanaan tersedia

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Magelang dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.151
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Magelang Tahun 2016-2020

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,23	5,42	5,46	5,44	-2,45	5.08 - 5.58	BELUM
1.1.1.2	Laju Inflasi	%	2,25	3,9	2,65	2,19	1,84 -3,84*	2.51 - 4.09	MELAMPAU I
1.2	Kesejahteraan Sosial								
1.2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	77,16	77,34	78,31	78,8	78,99	78.37	MELAMPAU I
1.2.2	Tingkat Kemiskinan/ Angka Kemiskinan	%	8.79	8.75	7.87	7.46	7.58	6.12 - 6.40	BELUM
1.2.3	Pengeluaran per Kapita	Rp	11,090,000	11,525,000	11,994,000	12,514,000	12,210,000	11,873,860	MELAMPAU I
1.2.1.1	Pendidikan								
1.2.1.1.1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,29	10,30	10,31	10,33	10,39	10.59	BELUM
1.2.1.1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,55	13,29	13,8	13,81	14,14	14.19	BELUM
1.2.1.2	Kesehatan								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.2.1.2.1	Angka Usia Harapan hidup	Tahun	76,62	76,66	76,72	76,75	76,85	76.90	BELUM
1.2.1.2.2	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	Angka	1,49	11,20	6,90	19,10	73,33	12.50	BELUM
1.2.1.2.3	Angka Kematian Ibu per 100.000 Penduduk	Angka	368	74,96	306,51	501,7	60,00	70.00	MELAMPAU I
1.2.1.3	Tenaga Kerja								
1.2.1.3.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	N/A	6,68	4,78	4,37	8,59	4.50 - 5.00	BELUM
1.2.1.4	Pangan								
1.2.1.4.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	85.00	87.90	88.30	88.70	89.00	90.20	BELUM
1.2.1.4.2	Jumlah regulasi ketahanan pangan	Regulasi	1	1	1	2	2	2	SESUAI
1.2.1.4.3	Ketersediaan Informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah	%	70,02	80,56	92,56	92,56	93,65	95.00	BELUM
2	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
2.1	Pendidikan								
2.1.1.1	APK PAUD		67,12%	91,61%	95,46%	52,40%	89,69%	69,00%	MELAMPAU I
2.1.1.2	Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi		45,26%	51,05%	51,05%	52,11%	69,63%	56,00%	MELAMPAU I

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.1.3	APM SD/SDLB/MI/Paket A		120,76%	82,48%	92,74%	109,18%	98,09%	100,00%	BELUM
2.1.1.4	APK SD/SDLB/MI/Paket A		133,41%	94,45%	101,54%	133,21%	119,68%	120,00%	BELUM
2.1.1.5	APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B		115,73%	74,94%	77,70%	136,92%	123,44%	84,00%	MELAMPAU I
2.1.1.6	APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B		145,76%	94,11%	94,74%	176,09%	158,58%	100,00%	MELAMPAU I
2.1.1.7	Rasio SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12		152,70	150,34	131,91	151,45	148,87	136	BELUM
2.1.1.8	Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15		275,61	268,04	237,91	309,30	307,00	290	BELUM
2.1.1.9	Rasio guru SD terhadap murid SD		16,39	16,76	16,52	16,01	15,86	16	MELAMPAU I
2.1.1.10	Rasio guru SMP terhadap murid SMP		12,35	14,27	17,44	14,50	15,01	14	MELAMPAU I
2.1.1.11	Angka Putus Sekolah SD/MI		1,00%	0,01%	0,02%	0,01%	0,00%	0,01%	MELAMPAU I
2.1.1.12	Angka Putus Sekolah SMP/MTs		38,00%	0,09%	0,10%	0,16%	0,00%	0,04%	MELAMPAU I
2.1.1.13	Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikmen 9 Tahun		0,09%	0,05%	0,05%	#N/A	0,00%	0,001%	MELAMPAU I

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.1.14	Angka Melanjutkan SD ke SMP		149,50%	149,67%	146,26%	135,90%	123,03%	150,00%	MELAMPAU I
2.1.1.15	Angka Melanjutkan SMP ke SMA		152,99%	144,31%	0,00%	106,30%	135,00%	165,00%	BELUM
2.1.1.16	Persentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa		55,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	MELAMPAU I
2.1.1.17	Penurunan jumlah angka kenakalan pelajar		50,00	44,00	42,00	47,00	0,00	24	MELAMPAU I
2.1.1.18	Cakupan kebijakan muatan lokal pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1,0	SESUAI
2.1.1.19	Persentase sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.1.20	Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah		80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	MELAMPAU I
2.1.1.21	Persentase sarana prasarana pendidikan memenuhi universal design		8,00%	50,00%	60,00%	72,00%	60,00%	60,00%	SESUAI
2.1.1.22	Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun		98,00%	98,57%	98,68%	89,74%	97,63%	97,95%	BELUM
2.1.1.23	Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A		100,00%	100,00%	100,00%	61,84%	109,09%	100,00%	MELAMPAU I
2.1.1.24	Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B		98,39%	100,00%	100,00%	31,38%	100,00%	100,00%	SESUAI
2.1.1.25	Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C		97,89%	100,00%	100,00%	26,09%	100,00%	100,00%	SESUAI
2.1.1.26	Persentase lembaga PNF yang terakreditasi		2,50%	30,00%	15,00%	28,75%	30,00%	30,00%	SESUAI
2.1.1.27	Jumlah Juara FASI		4	2	0	7	0	0	SESUAI
2.1.1.28	Jumlah Juara MTQ		0	0	1	2	0	2	BELUM
2.1.1.29	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		96,20%	72,62%	75,27%	80,92%	64,18%	36,25%	MELAMPAU I
2.1.1.30	Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik		14,07%	45,25%	52,65%	45,42%	24,91%	14,53%	MELAMPAU I

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.1.31	Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		83,56%	84,00%	89,66%	94,78%	95,30%	88,00%	MELAMPAU I
2.1.1.32	Persentase Guru SD bersertifikat pendidik		60,07%	47,54%	45,52%	44,32%	45,12%	55,15%	BELUM
2.1.1.33	Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		83,80%	94,58%	94,18%	96,09%	95,71%	95,40%	MELAMPAU I
2.1.1.34	Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik		57,30%	61,61%	76,71%	67,61%	68,20%	68,67%	BELUM
2.1.1.35	Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam pelatihan peningkatan kompetensi dan kualitas guru pendidikan agama		60,10%	65,02%	68,97%	87,34%	87,34%	80,00%	MELAMPAU I
2.1.1.36	Persentase PAUD yang telah menerapkan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa		55,26%	64,74%	68,42%	100,00%	100,00%	80,00%	MELAMPAU I
2.1.1.37	Jumlah kunjungan ke Desa Buku		1.500,00	913,00	2.476,00	2.476,00	0,00 (tutup)	2.000,00	BELUM
2.1.1.38	Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar		72,00%	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.2.2.1	Persentase alat laboratorium terkalibrasi		98,82%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
1.2.2.2	Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan		67,81%	1,59%	1,80%	2,40%	4,76%	20,00%	MELAMPAU I
1.2.2.3	Proporsi Kasus Diabetes Mellitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		11,88%	#N/A	0,45%	0,71%	1,47%	45,00%	MELAMPAU I
1.2.2.4	Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun		0,16%	0,20%	0,15%	0,15%	0,89%	15,40%	MELAMPAU I
1.2.3.1	Cakupan pengawasan obat dan makanan		79,80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	MELAMPAU I
1.2.4.1	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		70,25%	67,74%	97,99%	64,89%	72,90%	98,00%	BELUM
1.2.5.1	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin		100,00%	#N/A	#N/A	0,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
1.2.5.2	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
1.2.5.3	Prevalensi Balita Gizi Buruk		0,33%	0,42%	0,25%	0,19%	0,69%	0,31%	BELUM
1.2.6.1	Persentase rumah sehat		86,34%	72,29%	85,21%	86,30%	87,01%	86,10%	MELAMPAU I

[illegible]

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.2.8.4	Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
1.2.8.5	Persentase kecamatan yg memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
1.2.8.6	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	MELAMPAU I
1.2.9.1	Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan		100,00%	#N/A	100,00%	79,12%	100,00%	100,00%	SESUAI
1.2.9.2	Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas (sarkes strata 1) untuk pasien masyarakat miskin		148,69%	#N/A	#N/A	0,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
1.2.9.3	Cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit (sarana kesehatan strata 2 dan 3) untuk pasien masyarakat miskin		32,23%	#N/A	15,00%	25,03%	0,00% (data tidak lagi dipilah)	15,00%	BELUM

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.2.10.1	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi universal design		39,68%	38,46%	43,75%	98,65%	50,00%	50,00%	SESUAI
1.2.11.1	Persentase kelurahan siaga aktif tingkat mandiri		52,94%	52,94%	47,06%	64,71%	76,47%	76,47%	SESUAI
1.2.12.1	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	85,00%	MELAMPAU I
1.2.12.2	Cakupan Kunjungan Bayi		96,76%	97,05%	98,49%	96,54%	98,68%	96,00%	MELAMPAU I
1.2.12.3	Cakupan Pelayanan Anak Balita		82,94%	90,75%	94,62%	95,17%	64,54%	90,00%	BELUM
1.2.12.4	Cakupan Puskesmas Ramah Anak		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	35,29%	MELAMPAU I
1.2.13.1	Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya		43,98%	64,60%	74,47%	78,60%	75,92%	80,00%	BELUM
1.2.13.2	Cakupan Puskesmas Ramah Lansia		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	35,29%	MELAMPAU I

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.2.14.1	Persentase Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan		94,44%	99,45%	99,45%	91,23%	94,96%	90,00%	MELAMPAUI
1.2.15.1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4		100,00%	100,00%	100,00%	96,24%	100,00%	95,00%	MELAMPAUI
1.2.15.2	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
1.2.15.3	Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	MELAMPAUI
1.2.15.4	Cakupan Pelayanan Nifas		99,93%	99,94%	100,00%	99,87%	99,86%	100,00%	BELUM
1.2.16.1	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan		A	A	A	A	A	AA	BELUM
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1.3.1	Program Pemanfaatan Ruang								
1.3.1.1	Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan		21,47%	23,33%	24,14%	25,48%	26,12%	33,00%	BELUM
1.3.1.2	Rasio reklame ber IMB persatuan per jumlah reklame yang berdiri		0,00%	#N/A	#N/A	0,00%	0,00%	12,00%	BELUM

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.3.2	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang								
1.3.2.1	Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber-IMB		27,33%	30,54%	16,67%	223,21%	161,31%	40,00%	MELAMPAU I
1.3.3	Program Perencanaan Tata Ruang								
1.3.3.1	Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang (RTRW, RDTRK, dan RTBL)		8,00%	7,69%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	BELUM
1.3.3.2	Persentase perijinan yang sesuai Tata Ruang		100,00%	100,00%	#N/A	100,00%	52,36%	100,00%	BELUM
1.3.3.3	Rasio ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital		15,00%	16,67%	100,00%	100,00%	16,67%	100,00%	BELUM
1.3.4	Program pembangunan infrastruktur								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.3.4.1	Rasio infrastruktur lingkungan permukiman dengan kondisi baik		93,00%	96,28%	98,14%	100,00%	98,00%	100,00%	BELUM
1.3.5	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban								
1.3.5.1	Luas kawasan kumuh (ha)		1,20	1,04	0,42	0,00	0,00	0,00	SESUAI
1.3.6	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan								
1.3.6.1	Luas kawasan kumuh (ha)		1,00	7,13	5,52	3,36	3,36	0,00	BELUM
1.3.7	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan								
1.3.7.1	Luas kawasan kumuh (ha)		0,50	1,40	1,10	0,00	0,00	0,00	SESUAI
1.3.8	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara								
1.3.8.1	Luas kawasan kumuh (ha)		1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SESUAI
1.3.9	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.3.9.1	Luas kawasan kumuh (ha)		1,50	7,90	7,90	7,90	0,00	0,00	SESUAI
1.3.10	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo								
1.3.10.1	Luas kawasan kumuh (ha)		1,00	1,85	1,85	0,80	0,80	0,00	BELUM
1.3.11	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan								
1.3.11.1	Luas kawasan kumuh (ha)		2,00	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	SESUAI
1.3.12	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara								
1.3.12.1	Luas kawasan kumuh (ha)		1,50	4,09	1,70	0,00	0,00	0,00	SESUAI
1.3.13	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang								
1.3.13.1	Luas kawasan kumuh (ha)		1,50	4,09	1,70	0,40	0,40	0,00	BELUM
1.3.14	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari								
1.3.14.1	Luas kawasan kumuh (ha)		2,00	5,28	1,06	0,92	1,06	0,00	BELUM

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.3.15	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang								
1.3.15.1	Luas kawasan kumuh (ha)		1,00	3,77	2,16	0,80	0,80	0,00	BELUM
1.3.16	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari								
1.3.16.1	Luas kawasan kumuh (ha)		1,00	4,11	0,28	0,00	0,28	0,00	BELUM
1.3.17	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan								
1.3.17.1	Luas kawasan kumuh (ha)		1,10	2,81	1,34	1,12	1,12	0,00	BELUM
1.3.18	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara								
1.3.18.1	Luas kawasan kumuh (ha)		1,50	10,90	4,79	1,30	1,30	0,00	BELUM
1.3.19	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan								
1.3.19.1	Luas kawasan kumuh (ha)		2,00	0,40	0,40	0,38	0,38	0,00	BELUM

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.3.20	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara								
1.3.20.1	Luas kawasan kumuh (ha)		2,00	4,46	4,12	1,33	1,33	0,00	BELUM
1.3.21	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates								
1.3.21.1	Luas kawasan kumuh (ha)		2,00	4,37	4,37	0,37	0,37	0,00	BELUM
1.3.22	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan								
1.3.22.1	Panjang jalan penghubung baru yang dibangun (meter)		0,00	1.192,00	1.712,00	2.055,00	2.055,00	2.242,00	BELUM
1.3.22.2	Persentase panjang trotoar dalam kondisi baik		63,82%	65,12%	71,09%	74,83%	74,95%	71,89%	MELAMPAU I
1.3.23	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong								
1.3.23.1	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik		84,00%	85,00%	87,26%	87,94%	92,44%	89,00%	MELAMPAU I
1.3.23.2	Jumlah shipon yang dibangun		6,00	7,00	7,00	9,00	9,00	10,00	BELUM

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.3.24	Program Pengaturan Jasa Konstruksi								
1.3.24.1	Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan		70,00%	75,00%	96,00%	65,10%	79,10%	80,00%	BELUM
1.3.25	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya								
1.3.25.1	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik		79,00%	81,00%	81,00%	81,00%	81,00%	100,00%	BELUM
1.3.26	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah								
1.3.26.1	Persentase penduduk berakses air minum		81,07%	87,88%	258,42%	71,45%	71,82%	100,00%	BELUM
1.3.26.2	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai		87,55%	65,19%	281,18%	73,85%	66,34%	90,00%	BELUM
1.3.26.3	Tersedianya Sistem Air Limbah Skala kawasan		6,41%	19,13%	6,67%	4,34%	6,14%	12,00%	BELUM
1.3.27	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.3.27.1	Persentase kawasan strategis yang terbangun		2,00	3,00	#N/A	2,00	4,00	4	SESUAI
1.3.28	Program pengembangan wilayah perbatasan								
1.3.28.1	Persentase sarana prasarana wilayah perbatasan dalam kondisi baik		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,25%	100,00%	BELUM
1.3.29	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya								
1.3.29.1	Prosentase sungai dan sumber daya air dalam keadaan baik		91,00%	81,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%	BELUM
1.3.30	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan								
1.3.30.1	Prosentase ketersediaan sarana prasarana kebinamargaan		88,24%	89,47%	89,47%	89,47%	94,74%	100,00%	BELUM
1.3.31	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan								
1.3.31.1	Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik		90,54%	93,24%	93,24%	94,59%	96,20%	96,00%	MELAMPAUI

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.3.31.2	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik		88,50%	90,00%	93,67%	94,00%	94,63%	95,00%	BELUM
1.3.32	Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan								
1.3.32.1	Rasio ketercukupan PJU		85,00%	63,65%	1297,04%	323,03%	332,60%	71,89%	MELAMPAU I
1.3.33	Program pembinaan dan pengembangan bangunan gedung								
1.3.33.1	Prosentase perencanaan bangunan gedung yang layak fungsi		100,00%	75,00%	100,00%	100,00%	40,00%	100,00%	BELUM
1.3.33.2	Prosentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas		20,00%	40,00%	42,94%	43,78%	74,95%	100,00%	BELUM
1.3.34	Program Pengawasan Jasa Konstruksi								
1.3.34.1	Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu, efisien)		20,00%	85,71%	100,00%	100,00%	100,00%	25,00%	MELAMPAU I
1.4	Perumahan dan Permukiman Rakyat								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.4.1	Program pengelolaan areal pemakaman								
1.4.1.1	Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk		35,40%	11,17%	10,75%	10,34%	9,98%	19,40%	BELUM
1.4.2	Program Pengembangan Perumahan								
1.4.2.1	Jumlah Rusunawa dan Rusunami yang layak huni		2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	5,00	BELUM
1.4.3	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran								
1.4.3.1	Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran		120,61%	122,27%	107,69%	107,46%	109,36%	100,00%	MELAMPAU I
1.4.3.2	Persentase tingkat waktu tanggap response		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1.5.1	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.5.1.1	Terfasilitasinya Dialog FKUB, FPBI Dengan Elemen Masyarakat		4,00	6,00	10,00	10,00	8,00	10,00	BELUM
1.5.1.2	Terpublikasikannya dialog antar agama		4,00	6,00	6,00	8,00	8,00	12,00	BELUM
1.5.1.3	Cakupan fasilitasi pembinaan tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan		0,00	1,00	2,00	2,00	4,00	4,00	SESUAI
1.5.1.4	Tingkat kerukunan antar umat beragama		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	SESUAI
1.5.1.5	Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin		6,00	6,00	3,00	6,00	6,00	3,00	MELAMPAUI
1.5.2	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan								
1.5.2.1	Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini		0,00%	18,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
1.5.2.2	Persentase ormas yang difasilitasi		6,62%	7,82%	9,50%	8,16%	0,00% (tidak ada acara)	9,84%	BELUM
1.5.3	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.5.3.1	Persentase kriminalitas yang tertangani		70,59%	72,84%	75,16%	75,35%	73,88%	80,00%	BELUM
1.5.3.2	Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai-nilai luhur Pancasila		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SESUAI
1.5.3.3	Perda pelarangan peredaran narkoba		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	SESUAI
1.5.3.4	Jumlah Kampung Bebas Narkoba		1,00	2,00	3,00	4,00	4,00	6,00	BELUM
1.5.3.5	Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba)		0,74%	1,30%	2,69%	1,30%	0,23% (pengurangan kegiatan)	2,57%	BELUM
1.5.3.6	Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS		0,00%	2,44%	6,47%	9,71%	0,00% (tidak ada acara)	15,19%	BELUM
1.5.3.7	Rasio jumlah siskamling aktif		68,46%	68,68%	72,08%	95,09%	48,21%	100,00%	BELUM

[illegible]

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.5.4.6	Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana		0,00%	5,88%	11,76%	23,53%	23,53%	35,29%	BELUM
1.5.4.7	Kebijakan terkait penanggulangan bencana		ada	ada	ada	ada	ada	ada	SESUAI
1.5.5	Program pendidikan politik masyarakat								
1.5.5.1	Terfasilitasinya dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00 (tidak ada acara)	1,00	BELUM
1.5.5.2	Tingkat partisipasi politik		0,00%	0,00%	76,10%	86,90%	77,41%	0,00%	MELAMPAU I
1.5.6	Program pengembangan wawasan kebangsaan								
1.5.6.1	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan		60,00%	27,25%	28,75%	1,94%	14,29%	80,00%	BELUM
1.5.6.2	Database ormas yang akurat		62,25%	69,55%	72,73%	80,41%	80,49%	77,00%	MELAMPAU I
1.5.6.3	Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT		22,52%	0,82%	36,36%	45,71%	45,93%	57,39%	BELUM
1.5.7	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.5.7.1	Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota (per hari).		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	SESUAI
1.5.7.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran perda		90,48%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	HIJAU
1.5.7.3	Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat		6,67%	18,46%	12,87%	6,42%	31,82%	16,67%	MELAMPAU I
1.5.7.4	Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (K3)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,00%	MELAMPAU I
1.5.7.5	Cakupan Linmas per 10.000 penduduk		51,26	56,02	61,77	78,83	80,22	77,27	MELAMPAU I
1.5.7.6	Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas		8,53%	17,05%	31,76%	35,15%	35,15%	23,97%	MELAMPAU I
1.5.7.7	Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas		6,00	9,00	6,00	6,00	6,00	21,00	BELUM

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.5.8	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)								
1.5.8.1	Persentase penanganan penyakit masyarakat		90,11%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	MELAMPAU I
1.5.8.2	Perda Ketersediaan kebijakan yang mengatur kontrol tempat hiburan		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SESUAI
1.5.8.3	Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras, narkoba dan tindak prostitusi		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	SESUAI
1.5.8.4	Jumlah kampung bebas narkoba		1,00	#N/A	#N/A	4,00	0,00	0,00	SESUAI
1.5.8.5	Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN		0,68%	1,30%	2,69%	1,30%	0,23%	0,00%	MELAMPAU I
1.5.9	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.5.9.1	Rasio SKPD yang menerapkan bina suasana dan kegiatan-kegiatan kerohanian sesuai dengan agama masing-masing di tiap SKPD		0,00%	37,93%	41,38%	41,38%	79,31%	75,00%	MELAMPAU I
1.5.9.2	Persentase peningkatan jumlah ZIS dari aparat		0,00%	6,32%	12,22%	12,22%	-13,55%	5,00%	BELUM
1.5.9.3	Cakupan kegiatan perayaan hari besar keagamaan tingkat kota		0,00%	0,00%	66,67%	60,00%	26,67% (pengurangan kegiatan)	66,67%	BELUM
1.5.9.4	Frekuensi terselenggaranya kajian rutin keagamaan di masyarakat		0,00	5,00	6,00	6,00	39,00	5,00	MELAMPAU I
1.5.9.5	Persentase tempat ibadah yang memenuhi standar Kemenag		0,00%	4,90%	4,90%	4,90%	31,70%	20,00%	MELAMPAU I
1.5.9.6	Ketersediaan kebijakan daerah tentang standar tempat ibadah sesuai peraturan Kemenag		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	BELUM
1.5.9.7	Cakupan ketersediaan pusat-pusat keagamaan		0,00%	#N/A	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	BELUM

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.5.9.8	Jumlah Ketersediaan regulasi daerah terkait pembiasaan pelaksanaan ibadah secara rutin di lingkungan masyarakat masyarakat		1,00	0,00	#N/A	0,00	3,00	2,00	MELAMPAU I
1.5.10	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu								
1.5.10.1	Persentase kelancaran penyelenggaraan pemilu		0,00%	0,00%	76,10%	86,90%	77,41%	0,00%	MELAMPAU I
1.6	Sosial								
1.6.1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
1.6.1.1	Cakupan pendistribusian proposal hibah dan bansos		100,00%	98,30%	96,78%	63,99%	100,00%	100,00%	SESUAI
1.6.1.2	Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		21,80%	11,82%	15,25%	43,42%	19,35%	40,00%	BELUM

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.6.2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya								
1.6.2.1	Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,19%	100,00%	BELUM
1.6.2.2	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya		8,31%	15,31%	13,44%	10,27%	66,81%	16,74%	MELAMPAU I
1.6.3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								
1.6.3.1	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
1.6.3.2	Partisipasi dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial		2,00	6,00	4,00	7,00	14,00	7,00	MELAMPAU I

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.6.3.3	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	60,00%	MELAMPAU I
1.6.4	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)								
1.6.4.1	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA		85,24%	94,25%	68,46%	100,00%	100,00%	90,00%	MELAMPAU I
1.6.5	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo								
1.6.5.1	Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo, santri dan lansia		41,67%	61,53%	76,92%	0,00%	0,00%	83,33%	BELUM
1.6.6	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.6.6.1	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial		5,71%	19,53%	30,89%	40,74%	53,91%	40,00%	MELAMPAU I
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
2.1	Tenaga Kerja								
2.1.1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja								
2.1.1.1	Persentase wirausaha baru		12,50%	15,00%	20,00%	20,00%	155,56%	10,00%	MELAMPAU I
2.1.1.2	Persentase pencari kerja yang ditempatkan		93,77%	88,91%	68,43%	68,43%	51,42%	80,00%	BELUM
2.1.1.3	Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan		90,91%	70,18%	1,65%	1,65%	38,99%	80,00%	BELUM
2.1.2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja								
2.1.2.1	Persentase peserta pelatihan tersertifikasi		0,00%	5,00%	97,96%	97,96%	91,94%	7,50%	MELAMPAU I
2.1.2.2	Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kompetensi		66,55%	69,23%	24,30%	24,30%	21,70%	80,00%	BELUM

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.2.3	Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP		0,00%	90,00%	6,80%	0,08%	0,00%	7,50%	BELUM
2.1.3	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan								
2.1.3.1	Coverage asuransi tenaga kerja		71,85%	71,86%	71,92%	71,92%	0,00%	75,00%	BELUM
2.1.3.2	Persentase Perselisihan Hub Industrial terselesaikan melalui perjanjian bersama (PB)		92,86%	83,33%	100,00%	100,00%	63,64%	50,00%	MELAMPAU I
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.2.1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan								
2.2.1.1	Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan		Ada	Ada	Ada	ada	Ada	Ada	SESUAI
2.2.2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.2.1	Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga		53,66%	58,54%	63,41%	63,41%	63,41%	55,79%	MELAMPAU I
2.2.3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan								
2.2.3.1	Rasio KDRT		0,350%	0,147%	0,195%	0,007%	0,002%	0,040%	MELAMPAU I
2.2.3.2	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		12,00	12,00	48,00	17,00	16,00	15,00	BELUM
2.2.3.3	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
2.2.3.4	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	106,25%	100,00%	MELAMPAU I

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.3.5	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
2.2.3.6	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
2.2.3.7	Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	106,25%	100,00%	MELAMPAU I

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.3.8	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak		100,00%	8,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
2.2.3.9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	106,25%	100,00%	MELAMPAU I
2.2.3.10	Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas		1,07%	1,07%	8,11%	19,96%	45,14%	8,00%	MELAMPAU I
2.2.4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan								
2.2.4.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		11,05%	6,37%	#N/A	0,00%	7,50%	30,00%	BELUM
2.2.4.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta		13,93%	14,06%	#N/A	0,00%	16,82%	35,00%	BELUM
2.2.4.3	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan		0,30%	59,18%	78,50%	0,00%	95,74%	80,00%	MELAMPAU I

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.3	Ketahanan Pangan								
2.3.1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian / perkebunan								
2.3.1.1	Jumlah regulasi ketahanan pangan		1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	SESUAI
2.3.1.2	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan (%)		92,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	MELAMPAU I
2.3.1.3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		85,00%	87,90%	88,30%	88,70%	89,00%	90,20%	BELUM
2.3.1.4	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)		80,00%	100,00%	83,33%	100,00%	88,89%	80,00%	MELAMPAU I
2.4	Lingkungan Hidup								
2.4.1	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)								
2.4.1.1	Luas RTH Kota		19,60%	19,17%	19,17%	19,15%	16,24%	18,37%	BELUM
2.4.2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
2.4.2.1	Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya		2,40%	3,97%	4,13%	8,84%	15,99%	7,30%	MELAMPAU I

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.4.2.2	Persentase sampah perkotaan yang ditangani		85,70%	86,23%	87,63%	91,90%	26,63%	100,00%	BELUM
2.4.3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup								
2.4.3.1	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati		15,00%	100,00%	100,00%	53,33%	100,00%	100,00%	SESUAI
2.4.4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup								
2.4.4.1	Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia		6,00	6,00	6,00	6,00	3,00	6,00	BELUM
2.4.5	Program Peningkatan Pengendalian Polusi								
2.4.5.1	Persentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin		100,00%	100,00%	20,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
2.4.6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam								
2.4.6.1	Indeks Kualitas Air		36,6%	46,47%	52,00%	58,33%	16,67%	76,84%	BELUM

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.4.6.2	Indeks Kualitas Udara		58,24%	85,69%	84,91%	87,69%	83,67%	79,1%	MELAMPAU I
2.4.6.3	Indeks Tutupan Hutan		54,03%	57,24%	38,22%	38,22%	31,38%	49,56%	BELUM
2.4.6.4	Jumlah SDA yang terkonservasi		4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	SESUAI
2.4.6.5	Jenis flora terkonservasi		3,00	8,00	12,00	12,00	0,00	17,00	BELUM
2.4.6.6	Jenis fauna terkonservasi		2,00	2,00	3,00	3,00	0,00	3,00	BELUM
2.5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2.5.1	Program Penataan Administrasi Kependudukan								
2.5.1.1	Cakupan penduduk memiliki KTP-el		88,00%	94,34%	96,18%	96,77%	99,79%	100,00%	BELUM
2.5.1.2	Cakupan penduduk memiliki KIA		26,79%	57,84%	76,47%	97,08%	94,26%	100,00%	BELUM
2.5.1.3	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan		99,99%	#N/A	97,99%	99,98%	100,00%	100,00%	SESUAI
2.5.1.4	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk		873,88	887,35	917,07	926,32	991,81	950,00	MELAMPAU I

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.5.1.5	Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
2.5.1.6	Persentase kepemilikan akte kematian		55,01%	79,82%	100,00%	93,51%	100,00%	75,00%	MELAMPAU I
2.5.1.7	Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi		0,00%	#N/A	90,91%	90,91%	118,18%	100,00%	MELAMPAU I
2.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
2.6.1	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan								
2.6.1.1	Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat		70,59%	35,29%	35,29%	58,82%	58,82%	52,94%	MELAMPAU I
2.6.1.2	Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	SESUAI
2.6.2	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa								
2.6.2.1	Persentase PL KB yang mendapat pembinaan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
2.6.3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.6.3.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat		1,00	1,10	1,09	1,00	0,94	15	BELUM
2.6.3.2	LPM berprestasi:								
	LPM berprestasi tingkat kota		35,00%	24,00%	68,98%	61,64%	76,33%	0,00%	MELAMPAU I
	LPM berprestasi tingkat nasional		50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Tidak ada lomba tingkat nasional	0,00%	BELUM
	LPM berprestasi tingkat provinsi		100,00%	50,00%	0,00%	Peringkat 1	p2	0,00%	BELUM
2.6.3.3	Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang		11,76%	23,53%	47,06%	64,71%	76,47%	70,59%	MELAMPAU I
2.6.3.4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		142,18	142,18	143,00	143,00	143,00	143,00	SESUAI
2.6.4	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
2.6.4.1	Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa		53,18%	22,82%	40,94%	60,94%	80,94%	100,00%	BELUM
2.6.5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.6.5.1	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif		88,24%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	82,35%	MELAMPAU I
2.6.6	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan								
2.6.6.1	Persentase PKK Aktif		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
2.7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
2.7.1	Program Keluarga Berencana								
2.7.1.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga		2,00	2,03	2,03	1,53	0,81	2,00	BELUM
2.7.2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja								
2.7.2.1	Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun		1,75%	2,03%	1,75%	0,00%	1,05%	1,00%	MELAMPAU I
2.7.3	Program pelayanan kontrasepsi								
2.7.3.1	Cakupan peserta KB aktif		75,05%	78,63%	78,04%	100,00%	100,00%	81,00%	MELAMPAU I

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.7.4	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri								
2.7.4.1	Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I		62,83%	64,38%	66,05%	69,95%	70,73%	81,00%	BELUM
2.7.5	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR								
2.7.5.1	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun		3,85%	2,99%	1,99%	0,00%	0,19%	2,00%	MELAMPAU I
2.7.6	Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS								
2.7.6.1	Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS		0,00%	2,44%	6,47%	9,71%	0,00% (tidak ada acara)	15,19%	BELUM
2.7.7	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.7.7.1	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi		5,54%	5,01%	4,09%	10,19%	5,79%	3,00%	BELUM
2.7.7.2	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB		78,64%	77,25%	89,23%	74,91%	77,88%	81,00%	BELUM
2.7.7.3	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB		88,23%	88,28%	88,28%	73,87%	100,00%	88,00%	MELAMPAU I
2.7.7.4	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) kelurahan		176,47%	176,47%	152,94%	164,71%	164,71%	100,00%	MELAMPAU I
2.7.7.5	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	111,76%	100,00%	MELAMPAU I
2.7.7.6	Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat		100,00%	12078,00%	12078,00%	186,95%	100,00%	100,00%	SESUAI

[illegible]

[illegible]

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.8	Perhubungan								
2.8.1	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan								
2.8.1.1	Jumlah pelayanan umum		3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	MELAMPAUI
2.8.2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan								
2.8.2.1	Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik		20,00%	20,00%	40,00%	40,00%	40,00%	100,00%	BELUM
2.8.2.2	Jumlah Sub terminal (TERMINAL Tipe C) yang tertata		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	BELUM
2.8.2.3	Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik		45,00%	55,70%	66,12%	60,11%	100,00%	100,00%	SESUAI
2.8.2.4	Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum		85,00%	90,91%	90,91%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
2.8.2.5	Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte)		17,00	17,00	21,00	21,00	21,00	22,00	BELUM
2.8.3	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas								

[illegible]

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.9	Komunikasi dan Informatika								
2.9.1	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media								
2.9.1.1	Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan		60,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,00%	MELAMPAU I
2.9.2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa								
2.9.2.1	Persentase publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah: Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media:		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	SESUAI
2.9.2.2	Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin		3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	3,00	MELAMPAU I
2.9.2.3	Cakupan KIM		100,00%	123,53%	123,53%	123,53%	123,53%	100,00%	MELAMPAU I

[illegible]

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.9.5	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi								
2.9.5.1	Sumber daya manusia pada PD yang memiliki kecakapan di bidang teknologi informasi		1,00	1,00	2,55	2,55	2,55	1,00	MELAMPAU I
2.10	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								
2.10.1	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif								
2.10.1.1	Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM		94,00%	8,89%	8,89%	-12,17%	-59,32%	7,00%	BELUM
2.10.1.2	Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI		10,00%	1005,21%	15,17%	12,35%	14,65%	10,00%	MELAMPAU I
2.10.2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah								
2.10.2.1	Jumlah wirausaha baru (UMKM)		367,00	79,00	617,00	294,00	214,00	100,00	MELAMPAU I

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.10.3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah								
2.10.3.1	Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan		2,00%	18,41%	36,72%	42,03%	54,91%	7,00%	MELAMPAU I
2.10.4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi								
2.10.4.1	Prosentase koperasi aktif		93,07%	95,39%	93,24%	93,13%	93,25%	94,00%	BELUM
2.10.4.2	Prosentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP		28,64%	26,04%	27,46%	29,08%	30,26%	40,00%	BELUM
2.10.4.3	Jumlah koperasi		202,00	217,00	222,00	233,00	237,00	235,00	MELAMPAU I
2.10.4.4	Jumlah koperasi syariah		12,00	14,00	16,00	18,00	18,00	24,00	BELUM
2.11	Penanaman Modal								
2.11.1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								
2.11.1.1	Jumlah kerjasama pemerintah dan investor		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	4,00	MELAMPAU I
2.11.2	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
	Peringkat di PORPROV		0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	SESUAI
2.12.1.3	Jumlah klub olah raga		183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	SESUAI
2.12.1.4	Jumlah organisasi olah raga		35,00	35,00	37,00	37,00	37,00	36,00	MELAMPAU I
2.12.2	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda								
2.12.2.1	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif		100,00%	100,00%	88,24%	87,50%	97,73%	91,18%	MELAMPAU I
2.12.2.2	Prestasi pemuda di tingkat Propinsi dan Nasional								
	a. Propinsi		1,00	1,00	368,00	5,00	8,00	8,00	SESUAI
	b. Nasional		1,00	0,00	80,00	1,00	7,00	1,00	MELAMPAU I
2.12.3	Program peningkatan peran serta kepemudaan								
2.12.3.1	Persentase organisasi pemuda yang dibina / difasilitasi		118,52%	96,67%	85,29%	100,00%	90,91%	98,00%	BELUM
2.12.3.2	Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi		6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	BELUM
2.12.3.3	Persentase pengangguran pemuda		6,20%	6,27%	#N/A	6,29%	6,25%	5,37%	MELAMPAU I
2.12.4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.12.4.1	Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi		0,00%	17,65%	35,29%	1,59%	0,00%	29,41%	BELUM
2.12.4.2	Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik		65,00%	65,00%	68,75%	81,75%	83,00%	89,00%	BELUM
2.12.5	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda								
2.12.5.1	Persentase kelompok wirausaha pemuda		50,00%	70,59%	#N/A	0,00%	81,25%	75,00%	MELAMPAU I
2.12.6	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba								
2.12.6.1	Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN		0,60%	1,19%	#N/A	2,89%	0,00%	2,57%	BELUM
2.13	Statistik								
2.13.1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah								
2.13.1.1	Persentase pemenuhan data statistik		87,00%	90,99%	97,82%	99,14%	96,25%	95,00%	MELAMPAU I

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.14	Persandian								
2.14.1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa								
2.14.1.1	Ketersediaan SOP persandian		0,00	1,00	1,00	4,00	4,00	1,00	MELAMPAU I
2.14.1.2	Tingkat kapasitas SDM persandian		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
2.14.1.3	Persentase SKPD yang menerapkan SOP persandian		0,00%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	100,00%	BELUM
2.15	Kebudayaan								
2.15.1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya								
2.15.1.1	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		100,00%	100,00%	89,74%	85,37%	100,00%	100,00%	SESUAI
2.15.1.2	Jumlah pengunjung museum		5.050,00	10.769,00	6.118,00	1.557,00	982,00	5.600,00	BELUM
2.15.1.3	Jumlah koleksi museum		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	15,00	MELAMPAU I
2.15.2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya								

[illegible]

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.16	Perpustakaan								
2.16.1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan								
2.16.1.1	Persentase peningkatan judul buku		-100,00%	11,15%	5,83%	23,58%	29,76%	15,99%	MELAMPAU I
2.16.1.2	Persentase peningkatan jumlah buku		-100,00%	14,43%	6,31%	28,44%	37,16%	9,89%	MELAMPAU I
2.16.1.3	Prosentase SDM pengelola perpustakaan yang berkompeten		0,00%	47,73%	52,27%	56,82%	61,93%	66,35%	BELUM
2.16.1.4	Presentase perpustakaan aktif		14,24%	18,99%	21,52%	24,05%	26,58%	28,44%	BELUM
2.16.1.5	Cakupan pelayanan melalui e-Library		0,00%	0,00%	6,25%	6,25%	6,25%	5,00%	MELAMPAU I
2.16.1.6	Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan		0,00%	71,62%	41,51%	127,27%	0,00%	25,00%	BELUM
2.17	Kearsipan								
2.17.1	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan								
2.17.1.1	Persentase sarpras arsip yang terpelihara		0,00%	40,00%	50,00%	100,00%	76,92%	89,00%	BELUM

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.17.2	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi								
2.17.2.1	Cakupan pelayanan acces arsip		0,00%	104,29%	91,94%	97,56%	92,59%	82,00%	MELAMPAUI
2.17.2.2	Tingkat Komptensi SDM Pengelola Kearsipan		0,00%	67,20%	73,60%	70,42%	59,15%	67,00%	BELUM
2.17.3	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah								
2.17.3.1	Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku		0,00%	34,48%	44,83%	72,41%	89,66%	100,00%	BELUM
2.17.3.2	Persentase arsip dan risalah		82,00%	#N/A	#N/A	0,00%	50,00%	85,00%	BELUM
2.17.3.3	Persentase Penyelamatan Arsip		0,00%	0,00%	53,33%	60,31%	67,24%	73,00%	BELUM
2.17.4	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan								
2.17.4.1	Presentase implementasi e-arsip		0,00%	0,00%	43,64%	69,09%	74,07%	100,00%	BELUM
2.17.4.2	Persentase ketersediaan sarpras arsip		0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	28,26%	60,00%	BELUM
3	URUSAN PILIHAN								
3.1	Kelautan dan Perikanan								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.1	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan								
3.1.1.1	Persentase unit pengolahan ikan yang telah bersertifikasi SKP		100,00%	#N/A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	BELUM
3.1.1.2	Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar		1,00	2,00	3,00	3,00	6,00	6,00	SESUAI
3.1.2	Program pengembangan budidaya perikanan								
3.1.2.1	Produksi Ikan		165,36	153,01	152,44	164,02	165,86	167,83	BELUM
3.1.2.2	Persentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikasi CPIB		0,00%	#N/A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	BELUM
3.1.2.3	Persentase unit pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi CBIB		42,85%	#N/A	200,00%	85,71%	85,71%	70,00%	MELAMPAU I
3.1.3	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan								
3.1.3.1	Luas lahan perikanan organik		0,10	0,10	0,30	0,30	0,45	0,60	BELUM
3.2	Pariwisata								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata								
3.2.1.1	Destinasi Wisata Unggulan		2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	BELUM
3.2.1.2	Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona		40,00%	50,00%	80,00%	72,73%	77,78%	88,89%	BELUM
3.2.2	Program Pengembangan Kemitraan								
3.2.2.1	Jumlah lembaga kerjasama pengembangan dan promosi pariwisata		9,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	BELUM
3.2.3	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata								
3.2.3.1	Lama Kunjungan Wisatawan		1-2 HARI	2-3 HARI	1-2 HARI	1-2 HARI	1-2	2-4 HARI	BELUM
3.2.3.2	Persentase TIC yang representatif		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
3.2.3.3	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara		1.043.000,00	1.269.949,00	1.215.978,00	1.560.199,00	524.052,00	1.143.954,20	BELUM
3.2.3.4	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara		6.625,00	6.341,00	6.343,00	8.784,00	4.123,00	5.219,28	BELUM
3.3	Pertanian								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
3.3.1	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner								
3.3.1.1	Persentase Unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi NKV		2,05%	3,65%	2,42%	3,03%	3,64%	4,24%	BELUM
3.3.2	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan								
3.3.2.1	Prosentase Petani yang melaksanakan GAP		0,00%	5,88%	11,76%	25,19%	36,71%	52,94%	BELUM
3.3.2.2	Rasio petani terlatih		85,15%	85,88%	85,88%	91,94%	92,41%	90,00%	MELAMPAU I
3.3.3	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak								
3.3.3.1	Persentase hewan sehat		81,00%	86,16%	93,33%	87,50%	87,66%	87,00%	MELAMPAU I
3.3.4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani								
3.3.4.1	Jumlah kelompok pembudidaya tanaman hias dan bunga di Kota Magelang		3,00	4,00	7,00	8,00	8,00	8,00	SESUAI

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
3.3.5	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan								
3.3.5.1	Prosentase Petani yang melaksanakan GHP		0,00%	1,18%	4,24%	7,56%	8,86%	10,00%	BELUM
3.3.5.2	Pertumbuhan jumlah komoditas agribisnis pertanian		9,00	10,00	11,00	13,00	13,00	13,00	SESUAI
3.3.6	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan								
3.3.6.1	Persentase unit usaha peternakan yang telah bersertifikasi halal		2,05%	2,43%	2,42%	4,85%	6,06%	4,24%	MELAMPAU I
3.3.7	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan								
3.3.7.1	Luas lahan pertanian organik		0,00	1,00	1,00	1,03	1,20	1,14	MELAMPAU I
3.3.7.2	Persentase petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian		37,64%	45,18%	78,82%	84,38%	84,81%	72,00%	MELAMPAU I
3.3.8	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan								
3.3.8.1	Jumlah pelaku usaha peternakan organik:		0,00	3,00	6,00	6,00	12,00	15,00	BELUM

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
3.3.8.2	Rasio peternak terlatih		85,15%	85,00%	#N/A	26,44%	87,01%	90,00%	BELUM
3.3.9	Program peningkatan produksi hasil peternakan								
3.3.9.1	Daging Ruminansia		1.063.181,00	1.209.046,00	1.084.242,00	1.208.830,00	934.190,00	1.401.690,00	BELUM
3.3.9.2	Daging Unggas		4.912.429,00	7.001.713,00	6.504.136,00	7.150.234,00	7.551.516,00	5.660.315,00	MELAMPAUI
3.3.9.3	Telur		67.972,00	71.918,00	71.038,00	61.626,00	62.924,00	500.000,00	BELUM
3.3.9.4	Susu		188.422,00	214.105,00	214.830,00	214.830,00	209.014,00	209.000,00	MELAMPAUI
3.3.10	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan								
3.3.10.1	Padi		3.171,00	3.069,44	3.001,20	2.440,24	2.230,40	3.120,00	BELUM
3.3.10.2	Jagung		11,00	12,60	14,00	23,00	14,40	11,00	MELAMPAUI
3.3.10.3	Ubi kayu		13,50	15,00	16,00	15,80	13,00	13,50	BELUM
3.4	Perdagangan								
3.4.1	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan								
3.4.1.1	Cakupan PKL yang dibina		18,52%	59,63%	59,63%	76,16%	95,23%	16,00%	MELAMPAUI

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
3.4.1.2	Jumlah shelter PKL yang dikelola		16,00	19,00	18,00	19,00	19,00	17,00	MELAMPAU I
3.4.2	Program Pengelolaan Pasar								
3.4.2.1	Persentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar		53,85%	83,33%	#N/A	1200,00%	160,00%	54,00%	MELAMPAU I
3.4.2.2	Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional		40,00%	-68,18%	242,86%	23,21%	10,79%	10,00%	MELAMPAU I
3.4.2.3	Cakupan pedagang pasar yang dibina		6,76%	10,14%	10,44%	18,93%	57,78%	16,00%	MELAMPAU I
3.4.2.4	Persentase pasar tradisional yang dikelola		80,00%	75,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	SESUAI
3.4.3	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor								
3.4.3.1	Jumlah ekspor produk ke LN		883.090,74	1.950.541,37	2.308.905,97	2.308.905,97	2.423.087,00	1.250.000,00	MELAMPAU I
3.4.4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri								
3.4.4.1	Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah		2,00%	10,54%	13,96%	20,81%	24,97%	7,00%	MELAMPAU I

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
3.4.5	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan								
3.4.5.1	Jumlah alat UTTP yang ditera		2.600,00	3.712,00	4.267,00	7.921,00	6.348,00	3.100,00	MELAMPAU I
3.4.5.2	Data & informasi cukai palsu/ilegal		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	BELUM
3.4.6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
3.4.6.1	Persentase sarana perdagangan yang memenuhi universal design		20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	40,00%	60,00%	BELUM
3.5	Perindustrian								
3.5.1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah								
3.5.1.1	Peningkatan daya saing IKM Formal		4,12%	-0,68%	3,16%	135,12%	-58,51%	3,30%	BELUM
3.5.2	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial								
3.5.2.1	Jumlah sentra industri		10,00	11,00	12,00	13,00	13,00	15,00	BELUM

[illegible]

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
4.1.4	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan								
4.1.4.1	Jumlah review PERDA / PERWAL		0,00	1,00	4,00	6,00	1,00	3,00	BELUM
4.1.4.2	Jumlah RAPERDA / RAPERWAL baru tentang investasi		1,00	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00	SESUAI
4.1.4.3	Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS		0,00	0,00	1,00	0,00	5,00	1,00	MELAMPAUI
4.1.5	Program pengelolaan barang milik daerah								
4.1.5.1	Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah kota Magelang		53,53%	74,36%	75,24%	76,18%	77,91%	80,00%	BELUM
4.1.5.2	Barang milik daerah yang didayagunakan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
4.1.5.3	Pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu		97,83%	100,00%	96,55%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
4.1.5.4	Pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu		97,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
4.1.6	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
4.1.6.1	Rasio pemenuhan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
4.1.7	Program Penataan Daerah Otonomi Baru								
4.1.7.1	Cakupan kebijakan penataan daerah		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	BELUM
4.1.8	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah								
4.1.8.1	Tingkat Ketersediaan pokok pikiran dewan tepat waktu		50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
4.1.9	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah								
4.1.9.1	Cakupan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri		88,71%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
4.1.10	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
4.1.10.1	Persentase hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti		80,00%	56,29%	56,29%	63,69%	78,53%	55,00%	MELAMPAU I
4.1.10.2	Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Review		80,00%	100,00%	85,71%	100,00%	93,75%	100,00%	SESUAI
4.1.10.3	Persentase zona integritas yang terbentuk		0,00%	10,34%	10,34%	10,34%	10,34%	50,00%	BELUM
4.1.10.4	Nilai hasil LKJip SKPD		CC	CC	B	B	B	B	SESUAI
4.1.10.5	Persentase SKPD yang direview LKJiP		26,08%	58,62%	62,07%	75,86%	86,21%	75,00%	MELAMPAU I
4.1.10.6	Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK		97,65%	88,73%	85,24%	93,07%	95,78%	95,00%	MELAMPAU I
4.1.10.7	Temuan ketidakpatuhan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun		45,45%	114,29%	50,00%	19,23%	16,67%	5,00%	BELUM
4.1.10.8	Penyelesaian TLHP BPK meningkat		49,42%	88,73%	46,02%	95,45%	95,78%	100,00%	BELUM
4.1.10.9	Prosentasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal		100,00%	100,00%	100,00%	92,80%	131,82%	100,00%	MELAMPAU I
4.1.10.10	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan		60,39%	86,36%	91,39%	83,44%	84,42%	85,00%	BELUM
4.1.10.11	persentase SPM yang mencapai target nasional		70,00%	86,09%	80,00%	75,86%	72,41%	85,00%	BELUM

[illegible]

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
4.3	Perencanaan Pembangunan								
4.3.1	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi								
4.3.1.1	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
4.3.2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
4.3.2.1	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,04%	100,00%	BELUM
4.3.2.2	Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir		65,00%	70,22%	75,14%	84,55%	12,69%	90,00%	BELUM
4.3.2.3	Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir		70,00%	74,00%	76,00%	88,71%	74,32%	85,00%	BELUM
4.3.2.4	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik		35,00%	36,00%	44,44%	45,24%	67,00%	55,00%	MELAMPAUI
4.3.2.5	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir		75,00%	76,00%	80,00%	81,48%	82,39%	85,00%	BELUM

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
4.3.3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya								
4.3.3.1	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
4.3.4	Program Kerjasama Pembangunan								
4.3.4.1	Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti		2,00	2,00	3,00	#N/A	0,00	4,00	BELUM
4.3.5	Program Pengembangan data / informasi								
4.3.5.1	Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan		60,00%	90,00%	85,71%	85,71%	57,14%	95,00%	BELUM
4.3.5.2	Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date		60,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
4.3.6	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
4.3.6.1	Cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	BELUM
4.3.7	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana								
4.3.7.1	Cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
4.4	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan								
4.4.1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur								
4.4.1.1	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi:		58,73%	53,82%	55,63%	55,63%	58,70%	59,00%	BELUM
4.4.1.2	Persentase ASN yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BKD		101,00%	100,00%	100,00%	96,44%	100,00%	100,00%	SESUAI
4.4.1.3	Persentase sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis TIK		45,45%	45,45%	54,55%	54,55%	59,09%	46,00%	MELAMPAU I

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
4.4.1.4	Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural		71,43%	100,00%	100,00%	60,00%	57,14%	100,00%	BELUM
4.4.1.5	Jumlah jabatan kosong yg dipersyaratkan lelang		66,67%	100,00%	100,00%	62,50%	80,00%	5,00%	MELAMPAU I
4.4.1.6	Persentase ASN yang dijatuhi hukuman		0,00%	0,20%	0,14%	0,07%	0,15%	0,01%	BELUM
4.4.2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
4.4.2.1	Persentase kehadiran ASN		100,00%	97,78%	97,83%	98,25%	97,81%	98,00%	BELUM
4.4.2.2	Persentase pelanggaran disiplin ASN		0,00%	0,26%	0,28%	0,28%	0,19%	0,18%	BELUM
4.4.3	Program Pendidikan Kedinasan								
4.4.3.1	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis		84,26%	142,66%	125,56%	83,00%	166,67%	98,00%	MELAMPAU I
4.4.3.2	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan		69,77%	100,00%	100,00%	97,37%	0,00%	100,00%	BELUM
4.4.4	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemda								
4.4.4.1	Persentase ASN yang mengikuti diklat pra jabatan		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	BELUM

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
4.4.4.2	Persentase ASN yang mengikuti diklat fungsional		78,95%	175,00%	102,86%	125,00%	100,00%	90,00%	MELAMPAU I
4.4.4.3	Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan karakter		96,61%	96,15%	121,88%	68,93%	93,33%	97,00%	BELUM
4.4.5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
4.4.5.1	Persentase SKPD yang menerapkan finger print		0,00%	100,00%	100,00%	93,79%	100,00%	100,00%	SESUAI
4.4.6	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS								
4.4.6.1	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi		0,02%	78,14%	15,39%	16,88%	97,05%	92,00%	MELAMPAU I
4.5	Penelitian dan Pengembangan								
4.5.1	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat								
4.5.1.1	Persentase krenova masyarakat yang berkualitas		10,50%	38,46%	36,00%	36,22%	34,15%	23,00%	MELAMPAU I
4.5.1.2	Presentase krenova OPD yang berkualitas		2,17%	25,58%	8,57%	12,86%	14,29%	12,00%	MELAMPAU I

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
4.5.2	Program Penelitian dan Pengkajian								
4.5.2.1	Persentase hasil riset/kajian yang ditidakanjuti		26,67%	33,33%	46,67%	42,31%	42,11%	50,00%	BELUM
4.5.3	Program Pengembangan dan Penerapan IPTEK								
4.5.3.1	Cakupan Pengembangan dan Penerapan IPTEK		7,50%	80,00%	14,45%	15,16%	12,59%	20,00%	BELUM
4.5.4	Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan								
4.5.4.1	Cakupan Monev dan/atau Pengendalian Riset dan/atau Kebijakan		7,00%	37,60%	33,85%	48,15%	55,23%	20,00%	MELAMPAU I
4.5.5	Program Pendokumentasian dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian								
4.5.5.1	Cakupan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian		60,00%	50,00%	40,00%	55,00%	75,00%	80,00%	BELUM
4.5.6	Program Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
4.5.6.1	Cakupan Pembinaan Hilirisasi Produk Teknologi dan Inovasi		0,00%	#N/A	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	SESUAI
4.5.7	Program Perlindungan Produk Teknologi dan Inovasi								
4.5.7.1	Persentase Produk Teknologi dan Inovasi yang dilindungi HKI		8,30%	13,04%	32,00%	21,74%	4,35%	15,00%	BELUM
4.5.8	Program Penguatan Inovasi Daerah								
4.5.8.1	Cakupan Penguatan SIDA		30,00%	45,00%	53,33%	56,67%	63,33%	75,00%	BELUM
4.5.9	Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan								
4.5.9.1	Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan		30,00%	46,93%	57,86%	61,65%	70,87%	75,00%	BELUM
4.6	Pengawasan								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
4.6.1.1	Cakupan pemeriksaan (diperinci dari Orbik SKPD, Satker dan BUMD plus targetnya)		50,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	87,00%	MELAMPAU I
4.6.1.2	Persentase Aparat SPIP aktif		32,60%	51,72%	55,17%	75,86%	89,66%	80,00%	MELAMPAU I
4.6.1.3	Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,00%	MELAMPAU I
4.6.2	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan								
4.6.2.1	Level APIP Kota Magelang menjadi level 3		2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	SESUAI
4.6.2.2	Persentase APIP yang bersertifikat Kompetensi meningkat		46,15%	53,13%	100,00%	95,00%	100,00%	80,00%	MELAMPAU I
4.6.2.3	Persentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat		100,00%	53,13%	100,00%	100,00%	100,00%	85,00%	MELAMPAU I
4.6.3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
4.6.3.1	Persentase kesesuaian perencanaan yang dilakukan oleh SKPD dengan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	80,00%	MELAMPAU I
4.6.3.2	Perjanjian Kinerja yang memenuhi kriteria standar		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SESUAI
4.6.3.3	Persentase LKJIP SKPD dengan nilai baik		26,08%	58,62%	58,62%	75,86%	86,21%	90,00%	BELUM
4.6.3.4	Penurunan kasus temuan LKPD		4	-2	0	0	1,00	0,00	BELUM
4.6.3.5	Rasio laporan APBD, DAK dan Bantuan Keuangan tepat waktu		75,00%	89,65%	97,70%	97,70%	100,00%	100,00%	SESUAI
4.6.3.6	Nilai survey kepuasan penggunaan layanan PD		0,00	78,19	79,66	80,82	82,47	95,00	BELUM
4.6.4	Program Sinergisitas Penerapan SPI pada PD								
4.6.4.1	Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil Pemeriksaan APIP		73,46%	73,60%	96,56%	76,64%	83,33%	55,00%	BELUM
4.6.4.2	Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan APIP		62,35%	0,02%	1,01%	0,05%	0,23%	5,00%	MELAMPAU I
4.6.4.3	Persentase implementasi SPIP		1,20%	51,72%	55,17%	75,86%	89,66%	100,00%	BELUM

No	Urusan, Program, Indikator	Satuan	Realisasi					Standar	Interpretasi
			2016	2017	2018	2019	2020		
3	DAYA SAING DAERAH								
3.1	Indeks Reformasi Birokrasi		#N/A	#N/A	64.75	66.33	66.50	59.00	MELAMPAUI
3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat		#N/A	78.19	79.66	80.82	82.81	80.00	MELAMPAUI
3.3	Rasio Infrastruktur Perkotaan dalam kondisi baik		79.00%	82.62%	85.34%	85.13%	85.75%	86.00%	BELUM
3.4	Tingkat Kematangan Kota Cerdas		48.89	63.70	63.70	65.00	65.00	62.60-65.00	SESUAI
3.5	Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	SESUAI

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, tahun 2021

2.6. Capaian Standar Pelayanan Minimal

Terkait dukungan Pemerintah Kota Magelang dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, berikut disajikan capaian selama tahun 2019 dan 2020.

Tabel 2.152
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Magelang
Tahun 2019-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
	PENDIDIKAN			
1	Pendidikan Dasar	Jumlah anak Usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	80,7%
		Jumlah anak Usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar		57,6%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	88,7%
	KESEHATAN			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	93,24%	96,09%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	99,41%	98,7%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	95,17%	71,47%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100.00%	89,2%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100.00%	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	78.60%	85,1%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100.00%	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100.00%	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100.00%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	97.13%	100%
PEKERJAAN UMUM				
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	96,9%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	97,7%
PERUMAHAN RAKYAT				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program oleh fasilitasi penyediaan rumah yang Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperlayak huni	0	0
KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM				
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
		bencana		
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%
	SOSIAL			
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	NA

2.7. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam pelaksanaan pembangunan, Kota Magelang juga mendukung dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Capaian Kota Magelang dalam mendukung TPB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.153
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Magelang
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan 1	MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN						
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	8,79	8,75	7,87	7,46	7.58
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Meningkat menjadi 95%	100	100	100	97,26	96.25
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	70,32	71,86	71,99	71,92	NA
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Meningkat menjadi 17,12%	5,71	19,53	30,89	40,74%	53.91
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	2000	1941	2882	3143	3430

No	Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Meningkat menjadi 70%	100	100	100	100	100
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Meningkat menjadi 65%	75,16	75,55	76,28	74,54	68.66
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	81,07	87,88	93,78	96,05%	97.06%
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	88	65.19	93.34	97,18	97.18
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.		NA	NA	NA	11,01	11.01
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	97,31	82,84	92,74	109,80%	110.13%
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	76	78	78	136,17%	136.88%
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	90,5	93,71	96,5	98,31%	99.22%
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	72,55	27,94	8,2	15,54	19.63
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Meningkat menjadi 39 daerah	0	1	2	4	4
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Menurun menjadi 118,6	108	108	108	108	108
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Menurun	1.179.683.647	663.200.000	190.500.000	84.000.000	347,500,000
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	ada	0	0	2	4	4
Tujuan 2	MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN						
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun				6,83	9.43
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Menurun menjadi 28%				2,74	1,24

No	Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2.2.2.(c)	"Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	85	87,9	88,3	88,7	89
Tujuan 3	MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA						
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Menurun menjadi 306	0	192,43	130,98	130,55	138.79
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	100	100	100	100	100
3.1.2.(a)	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85%	100	100	100	100	100
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	127	141	151	1,175	166
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Menurun	7,33	9,62	7,86	5,87	
3.2.2.(a)	Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Menurun menjadi 24	10,66	12,19	13,10	10,44	13,88
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Meningkat menjadi 95%	1	1	1	1	1

No	Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Menurun menjadi <0,5%	0,02	0,03	0,02	0,01	
3.3.2.(a)	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Menurun menjadi 245	111,56	155,90	151,53	174,23	195,28
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Menurun	24.2	25	NA	0	0
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Meningkat menjadi 300	0	0	0	1	1
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B	Meningkat	0	0	1	1	1
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Menurun	1	2	3	1	0
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan Eliminasi Kusta	Meningkat menjadi 34 provinsi	1	1	1	1	1
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	Meningkat menjadi 35.	TKD	TKD	TKD	TKD	TKD
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun	Menurun menjadi 5,4%	60,69	30,53	1,8	NA	NA
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	1,27	4,28	0,15	2,38	4.76
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	0.154	0.155	0.156	0,15	0.89

No	Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Meningkat menjadi 280	1	1	1	1	1
3.5.1.(a)	Jumlah penyalah guna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis		NA	NA	NA	NA	NA
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi		NA	NA	NA	11	9
3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan		NA	NA	NA	11	9
3.5.1.(d)	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu		NA	NA	NA	1	1
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%	20	30	33	35	20
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir	Menurun					
3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas		37	31	28	26	24

No	Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Meningkat menjadi 66%	105,58	95,43	87,82	86,66	74.58
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Meningkat menjadi 65%	75,16	75,55	76,28	74,54	68,66
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Meningkat menjadi 23,5%	28,74	29,29	30,75	27,9	28,44
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	Menurun menjadi 38	22	20	19		
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	Menurun menjadi 2,28	12,62	12,23	12,1	11,98	11,98
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%	NA	NA	NA	NA	NA
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	114,45	81,23	110,84	97,26	96.25
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	125,71	79,97	110,84	97.87	NA

No	Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
3.9.3.(a)	Proporsi Kematian Akibat Keracunan	Menurun	0	0	0	0	0
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Menurun			25,83	24,73	
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Meningkat	100	100	100	100	100
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	5,65	6,39	8,97	9,07	9.23
Tujuan 4	MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INSKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA						
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Meningkat menjadi 84,2%	97,40%	88,31%	88,31%	96,15%	96,15%
4.1.1.(b)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Meningkat menjadi 81%	86,96%	95,65%	95,65%	95,65%	95,65%
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	133,41	94,45	107,65	133,21%	134,37%
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	115,73	74,94	84,43	176,09%	175,86%
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	Meningkat menjadi 8,8 tahun	10,29	10,3	10,31	10,33	10.39
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	67,12	91,61	95,46	52,4	89,69

No	Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Meningkat	NA	NA	NA	90,93	NA
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat	Meningkat	SD: 120,76 SMP:115,73	SD:82,48 SMP:79,94	SD: 82,48 SMP:84,43	SD: 99,60 SMP:105,45	SD: 98,09 SMP:123,44
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	98	97,99	98,49	98,18	98.08
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24	Meningkat	100	100	100	100	100
	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59	Meningkat	97,72	95,77	98,65	98,41	100
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	Meningkat	PAUD: 14,07%; SD: 60,07%; SMP: 64,95%	PAUD: 45,25%; SD: 47,54%; SMP: 61,61%	PAUD: 52,65%; SD: 45,52%; SMP: 76,71%	PAUD: 45,42%; SD: 44,32%; SMP: 67,61%	PAUD: 24,91%; SD:45,12%; SMP: 68,20%
Tujuan 5	MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN						
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16	4 perda, 2 perwal	4 perda, 2 perwal	4 perda, 2 perwal	4 perda, 2 perwal	4 perda, 2 perwal
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Menurun	0,02%	0,04%	0,04%	0,02%	0.02%

No	Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	0,07%	0,11%	0,06%	0,05%	0,02%
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Menurun	4%	0,00%	0,00%	4%	2%
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	100	100	100	100%	100%
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	3,85%	2,03%	3%	10.19	NA
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Meningkat	0,53	0,06	0,2	0,24	0.2
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Meningkat	46,90%	14,06%	23%	15,38%	14.81%
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Menurun menjadi 9,9%	5,54%	5,01%	4%	10,19%	4.66%
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Meningkat menjadi 85%	56%	57%	60%	100%	100%

No	Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi		ada	ada	ada	ada	ada
Tujuan 6	MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA						
5.b.1*	<i>Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam</i>	<i>Meningkat</i>	71,8	77,96	NA	83	NA -
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	81.07	87.88	93.78	96.05	97.3	81.07
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri	484 m3/ detik	484 m3/ detik	484 m3/ detik	484 m3/ detik-	484 m3/ detik-	484 m3/ detik
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	0%	0%	1,5%-	1,5%-	0%
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	NA	NA	NA	NA	56%
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	87.55	65.19	93.34	97.18	97.8

No	Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	0	17	17	17	17
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	0	0	2	3	3
6.2.1.(e)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Meningkat menjadi 438 kabupaten/ kota.	NA	NA	NA	265	305
6.3.1.(a)	Jumlah Kab/Kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	Meningkat menjadi 409 kabupaten/ kota	1	1	1	1	1
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada	2	2	2	2	2
Tujuan 7	MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA						
7.1.1*	Rasio elektrifikasi		93.94	NA	NA	97.88	NA

No	Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.		NA	NA	NA	NA	NA
Tujuan 8	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA						
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	5.17	5.18	NA	5.44	NA
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	57,99 juta	62,61 juta	67,29 juta	72,14 juta	NA
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	NA	NA	NA	4.96	NA
8.6.1*	Jumlah usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat	NA	NA	NA	21.22	NA
Tujuan 9	MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI						
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	NA	-4.48%	8.04%	121.69%	NA
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	71.8	77.96	NA	83,00	NA
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	42.7	45.7	NA	69.36	NA

No	Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan 10	MENGURANGI KESENJANGAN INTRA-DAN ANTARNEGARA						
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	8.79	8.75	7.87	7.46	7.6
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Ada	0	0	0	0	0
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	71.85	71.86	71.99	71.927	NA
Tujuan 11	MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN						
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	3,7 juta rumah tangga	95.8	94%	94%	90%	90.14
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.		4.76	4.76	5	7%	7%

No	Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	ada	Tidak mengikuti program kota pusaka	Tidak mengikuti program kota pusaka	Tidak mengikuti program kota pusaka	Tidak mengikuti program kota pusaka	Tidak mengikuti program kota pusaka
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	72.55	27.94	8.2	15.54	19.63
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%	108	108	108	75.6	NA
11.5.1.(b)	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana		0	1	2	4	4
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan		0	0	2	4	4
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Menurun	1179683647	663200000	190500000	84000000	347500000
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	85.7	86.2	87.63	79.3	75.96
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Meningkat/ ada	Kota Magelang belum mengikuti Program Pengembangan Kota Hijau	Kota Magelang belum mengikuti Program Pengembangan Kota Hijau	Kota Magelang belum mengikuti Program Pengembangan Kota Hijau	Kota Magelang belum mengikuti Program Pengembangan Kota Hijau	Kota Magelang belum mengikuti Program Pengembangan Kota Hijau
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Meningkat/ ada	Kota Magelang belum mengikuti Program Pengembangan Kota Hijau	Kota Magelang belum mengikuti Program Pengembangan Kota Hijau	Kota Magelang belum mengikuti Program Pengembangan Kota Hijau	Kota Magelang belum mengikuti Program Pengembangan Kota Hijau	Kota Magelang belum mengikuti Program Pengembangan Kota Hijau

No	Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.		NA	NA	NA	NA	NA
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.		Belum	Punya	Punya	Punya	punya
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	ada	0	0	2	4	4
Tujuan 12	MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN						
12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking Biru		NA	1	NA	1	NA
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	NA	115,95 ton/tahun	136,50 ton/tahun	147,08 ton/tahun	NA-
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	NA	231,39 ton/th o,64 ton/hr	362,74 ton/th 0,99ton/hari	1181,64 ton/tahun 3,237 ton/hari	901,14 ton/tahun 2,469 ton/hari
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Meningkat	0	0	0	0	0
Tujuan 13	MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA						
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	0	0	2	4	NA

No	Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	72.55	27.94	8.2	15.54	NA
Tujuan 16	PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH						
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	NA	NA	NA	0	0
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	1.1	1	NA	NA	NA
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Menurun	NA	0.07%	0.03%	0.03%	0.01%
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan	Menurun	NA	0.10%	0.05%	0.05%	0.01%
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Menurun	NA	NA	NA	NA	NA
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.		100%	100%	100%	100%	100%
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.		0	0	0	0	0

No	Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Meningkat menjadi 4,0	NA	NA	NA	NA	NA
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Meningkat	79,54	77,75	81,48	85,77	69,64
16.6.1.(a)	Opini BPK	Meningkat menjadi: Kabupaten: 60%, Kota: 65%	WDP	WTP	WTP	WTP	NA
16.6.1.(b)	Nilai SAKIP	Meningkat menjadi: Kabupaten/ Kota: 50%	CC	CC	B	B	NA
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi menjadi 80%	5.58%	4.85%	5.75%	26,43%-	NA
16.6.1.(d)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik	Meningkatk menjadi: Kabupaten/ Kota: 45%	NA	NA	64.75	66.33	NA
16.6.2.(a)	Persentase Unit Pelayanan Publik yang mengimplementasikan standar pelayanan publik	Meningkat menjadi: Kabupaten/ Kota: 80%	NA	NA	NA	100	100
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Meningkat	20	20	20	24	20

No	Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II)	Meningkat	11.05	6.37	14.81	44.51	43.93
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	95	97	98	99.75	99.9
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Meningkat menjadi 77,4%	NA	NA	NA	98.16	98.65
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Meningkat menjadi 85%	90%	93%	95%	98%	NA
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		100%	100%	100%	Tersedia	Tersedia
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi		100%	100%	100%	100%	100%
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat	1	1	1	1	1

No	Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
16.b.1(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Tidak ada	0	0	0	0	0

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kondisi Perekonomian Global, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Resesi ekonomi dunia dan imbas pandemi yang menghantam Indonesia sejak awal tahun 2020 melahirkan beberapa respon kebijakan adaptif pada skala nasional sampai level daerah. Perlambatan perekonomian sudah mulai dirasakan pada Triwulan I 2020 dimana pertumbuhan ekonomi hanya mampu mencapai 2,97 persen. Kontraksi terus berlangsung sampai dengan akhir tahun. Data BPS mengungkap sampai dengan Triwulan III 2020 perekonomian nasional berkontraksi -3,49 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi seiring dengan perlambatan ekonomi pada negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Sampai akhir tahun 2020 secara perlahan ekonomi nasional menunjukkan tren membaik meski masih terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07 persen. Perlambatan Dampak pandemi juga mulai terlihat dengan meningkatnya persentase penduduk miskin di Maret 2020 menjadi pada angka 9,78 persen.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Makro Nasional, 2016- 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02	5,07	5,17	5,02*	- 2,07**	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,61	5,50	5,34	5,28	7,07	Agust 2020
Inflasi (%)	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	
Rasio Gini	0,397	0,393	0,389	0,382	0,381	Maret 2020
Persentase Penduduk Miskin (%)	10,86	10,64	9,82	9,41	9,78	Maret 2020

Sumber: BPS, 2021

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Dampak pandemi juga mulai dirasakan di Jawa Tengah sejak Triwulan I 2020 dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi jawa Tengah di angka 2,6 persen. Kontraksi terjadi di Triwulan III dengan pertumbuhan sebesar -3,93 persen. Angka ini lebih baik dibandingkan kontraksi Triwulan II 2020 yang mencapai -5,92 persen yang dialami hampir seluruh lapangan usaha. Pada akhir tahun tercatat kontraksi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar -2,65 persen. Peningkatan persentase penduduk miskin mulai dirasakan di Maret 2020 yang naik sebesar 0,61 poin menjadi sebesar 11,41 persen.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Makro Jawa Tengah, 2016- 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28	5,27	5,32	5,41*	- 2,65**	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,63	4,57	4,51	4,49	6,48	Agust 2020
Inflasi (%)	2,36	3,71	2,82	2,81	1,56	
Rasio Gini (Maret)	0,366	0,365	0,378	0,361	0,362	Maret 2020
Persentase Penduduk Miskin (%)	13,27	13,01	11,32	10,8	11,41	Maret 2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021
 * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

3.2 Kondisi Perekonomian Kota Magelang

Perolehan PDRB Kota Magelang secara nominal mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sejak tahun 2016 dengan total nilai tambah bruto di tahun 2019 sebesar 8,81 triliun Rupiah (atas dasar harga berlaku). Pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB riil Kota Magelang melambat sebesar 1% dengan perolehan sebesar 8,72 triliun Rupiah.

Perlambatan di tahun 2020 ini terjadi pada beberapa lapangan usaha, dengan perlambatan tertinggi dari lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (-25,16%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-8,94%) serta lapangan usaha Jasa Lainnya (-5,84%). Sementara itu beberapa lapangan usaha tetap mampu tumbuh positif dengan pertumbuhan terapat pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (17,49%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (11,65%) serta lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (5,83%).

Keberadaan pandemi sepanjang tahun 2020 cukup melemahkan pertumbuhan ekonomi Kota Magelang. Secara riil PDRB Kota Magelang di tahun 2020 mencapai 6,314 Triliun Rupiah. Nilai tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kota Magelang pada tahun 2020 berkontraksi sebesar -2,45%. Perlambatan ekonomi Kota Magelang tercatat lebih dalam dibandingkan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2020 (-2,07%), namun masih lebih baik dibandingkan Jawa Tengah (-2,65%). Sementara itu jika dibandingkan dengan enam kota di Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Kota Magelang pada tahun 2020 berkontraksi paling dalam, demikian juga dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kawasan Purwomangung. Hal ini

mengingat Kota Magelang merupakan kota jasa dimana lapangan usaha merupakan sektor yang cukup terpukul akibat pandemi.

Hampir seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Magelang mengalami perlambatan di tahun 2020. Lapangan usaha yang paling terdampak adalah Transportasi dan Pergudangan (-27,68%). Lapangan usaha yang masih mampu tumbuh positif di tahun 2020 diantaranya adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,37%), Pengadaan Listrik dan Gas (1,8%), Informasi dan Komunikasi (17,32%), Jasa Keuangan dan Asuransi (1,2%) dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8,63%).

Sementara itu perkembangan harga komoditas di Kota Magelang sepanjang tahun 2016-2020 terkendali dengan baik. Keberadaan pandemi tidak begitu berimbas pada pergerakan harga komoditas di Kota Magelang. Sampai dengan akhir tahun 2020 tidak ada gejolak harga yang signifikan. Berdasar hasil kajian ilmiah, diprediksi inflasi Kota Magelang di akhir tahun 2020 tetap stabil pada *range* 1,84%-3,84%. Kehadiran teknologi pendukung dalam pemantauan pergerakan harga secara *realtime* dan efektifnya kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah merupakan beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pengendalian inflasi di Kota Magelang.

Meski demikian imbas pandemi cukup dirasakan pada beberapa indikator sosial di Kota Magelang. Jumlah penduduk miskin Kota Magelang pada Tahun 2020 mencapai 9.270 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar 522.099 Rupiah per kapita per bulan. Garis kemiskinan di tahun 2020 tumbuh 8,48% dan merupakan rekor pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2017. Keberadaan pandemi menyebabkan persentase penduduk miskin Kota Magelang tercatat naik menjadi 7,58% di tahun 2020. Kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin melebar di tahun 2020 dengan naiknya indeks keparahan kemiskinan dari 0,99 ke angka 1,22. Demikian juga dengan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan yang melebar dengan perolehan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,24 naik 0,05 poin dari tahun 2019.

Kondisi ketenagakerjaan juga tidak lepas dari pukulan pandemi. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Magelang pada tahun 2020 melejit pada angka 8,59% dari 4,37% di tahun 2020. Penduduk usia kerja terdampak Covid-19 sebesar 23.522 jiwa dengan proporsi pengangguran 5,59%, sementara tidak bekerja (9,08%), pengurangan jam kerja (81,59%) dan sisanya beralih menjadi bukan angkatan kerja.

3.3 Kondisi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kondisi pengelolaan keuangan daerah tahun 2016-2020, diwarnai oleh dinamika perubahan sistem pemerintahan daerah. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mulai dilaksanakan secara efektif pada tahun 2017 yang ditindaklanjuti daerah dengan penyesuaian kembali struktur perangkat daerah dan penataan kembali sumber daya, program, kegiatan, urusan serta kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Selain hal tersebut, juga memberikan kejelasan dan fokus dalam pelaksanaan prioritas program kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan nasional. Pengalihan urusan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, kewenangan provinsi menjadi kewenangan pusat, dan sebaliknya sangat mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah serta peluang yang lebih dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga menjadi fakta transisional yang harus diimplementasikan mulai tahun 2021. Berbagai persiapan yang harus dilakukan termasuk implementasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah juga menjadi tantangan tak terbantahkan yang harus dihadapi Pemerintah Daerah.

3.4 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan dokumen ini terdiri dari beberapa bab, salah satunya adalah BAB III yang merupakan pembahasan mengenai gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan. Pada bab ini akan bersinergi dan menjadi landasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi dan sumber daya yang dimiliki, mengalokasikan sumber daya dengan tepat dan sesuai kebijakan pemerintah yang

ditetapkan dan mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan anggaran secara tepat dan baik.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebelumnya. Dasar yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Magelang mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.4.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek pendapatan, aspek belanja, dan aspek pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Aspek Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

a. Pendapatan daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dibagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Magelang tahun 2015 sampai tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.3

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Magelang

No	Uraian	REALISASI						Rata-rata Pertumbuha n
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	Rp	(Rp)	
1	PENDAPATAN	781,335,799,509	840,042,626,525	909,525,862,920	908,089,485,909	967,785,834,243	946,188,761,537	3.99%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	186,677,410,081	220,315,848,702	233,557,714,356	249,877,424,347	273,582,932,151	290,756,816,510	9.36%
1.1.1	Pajak Daerah	26,185,301,675	25,974,837,133	31,206,960,485	34,283,039,991	40,432,696,639	35,958,686,531	7.21%
1.1.2	Retribusi Daerah	6,999,474,592	6,663,308,913	6,243,021,736	5,642,331,979	6,942,060,743	5,319,316,332	-4.21%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan	6,598,774,537	6,182,279,953	7,711,404,121	8,693,813,515	9,098,845,504	9,217,035,218	7.42%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	146,893,859,277	181,495,422,703	188,396,328,014	201,258,238,862	217,109,329,265	240,261,778,429	10.54%
1.2	Pendapatan Transfer	594,626,907,896	618,962,380,124	651,711,303,112	639,410,274,912	674,758,581,877	635,300,826,727	1.44%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	542,792,920,465	567,636,707,545	600,154,473,612	588,705,641,253	616,495,417,956	582,999,203,057	1.54%
1.2.	Transfer antar	51,833,987,431	51,325,672,579	51,556,829,500	50,704,633,659	58,263,163,921	52,301,623,670	0.50%

2	- daerah							
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	31,481,532	764,397,699	24,256,845,452	18,801,786,650	19,444,320,215	20,131,118,300	1077.17%
1.3.1	Hibah	0	0	24,050,844,059	18,087,872,725	18,556,798,966	19,563,703,991	16.65%
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0	0.00%
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	31,481,532	764,397,699	206,001,393	713,913,925	887,521,249	567,414,309	497.97%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 2020

Sumber penerimaan Kota Magelang selama tahun 2015-2020 berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi:

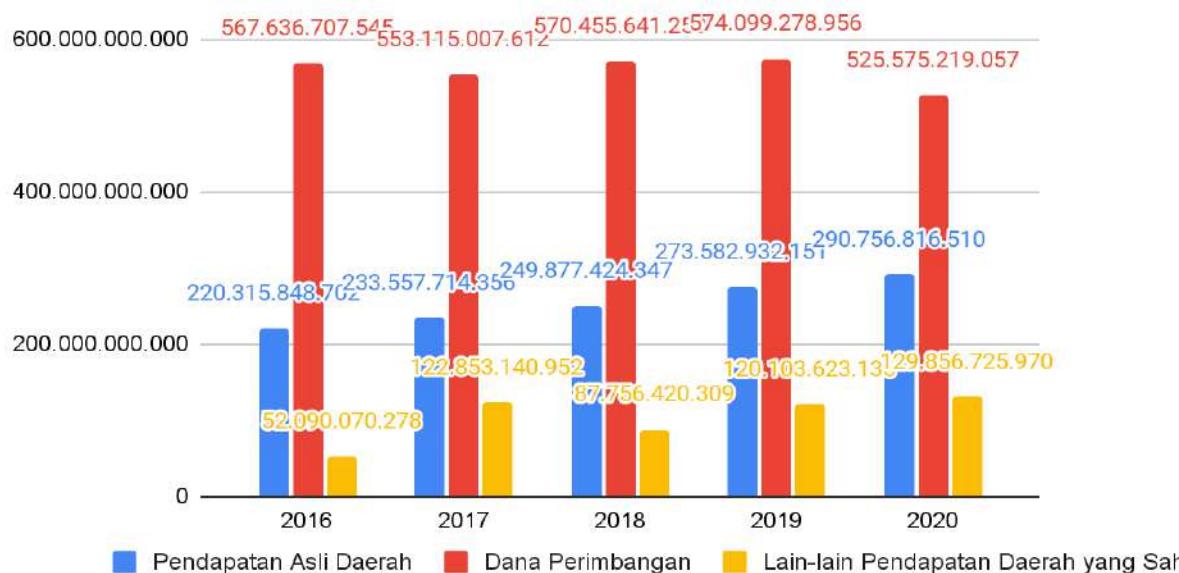
- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; dan
- 3) Lain - lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah. Total pendapatan daerah mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan rata - rata 5,55% per tahun, dengan rata-rata kenaikan yang tidak sama antar komponen pembentuknya. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menempati porsi terbesar (rata-rata 12,64%), diikuti lain-lain pendapatan daerah yang sah (rata-rata 10,67%) dan dari dana perimbangan (rata-rata 5,8%). Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Magelang selama tahun 2016-2020 dapat dilihat gambar 3.4.

Tabel 3.4
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Magelang Tahun 2015-2020

No	Tahun	Pendapatan Daerah	% Kenaikan		Rata- rata % kenaikan
1	2015	781,335,799,509	7,51%		5,55%
2	2016	840,042,626,525		8.27%	
3	2017	909,525,862,920	-0.16%		
4	2018	908,089,485,909		6.57%	
5	2019	967,785,834,243	-5.37%		
6	2020	946,188,761,537			

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 2020



Gambar 3.1 Proporsi Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2020

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja (*Performance Budgeting*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Belanja daerah sampai dengan tahun 2020 dikelompokkan kedalam dua kelompok belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung, namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 secara nomenklatur sudah berubah. Memperhatikan hal tersebut agar terjamin keterukuran yang linier, maka kami telah menkonversinya ke dalam struktur sesuai dengan regulasi terbaru.

Perkembangan realisasi terkonversi belanja daerah Kota Magelang tahun 2015 sampai tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Magelang

No	Uraian	REALISASI						Rata-rata Pertumbuha n
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	Rp	(Rp)	
2	BELANJA	736,340,437,750	871,859,130,603	879,408,181,447	937,345,746,470	995,162,119,612	798,353,191,714	2.45%
2.1	Belanja Operasi	593,485,013,145	648,585,872,187	645,645,777,975	699,262,129,977	722,541,935,708	657,879,303,385	2.30%
2.1.1	Belanja Pegawai	347,634,403,350	346,458,910,068	321,762,777,524	317,860,101,090	333,008,382,806	315,070,595,219	-1.86%
2.1.2	Belanja barang dan jasa	235,270,109,795	297,447,892,119	310,534,234,831	364,256,470,509	375,529,934,302	320,083,062,368	7.29%
2.1.3	Belanja bunga	0		0	0	0	0	0.00%
2.1.4	Belanja subsidi	0		0	0	0	0	0.00%
2.1.5	Belanja Hibah	9,688,650,000	1,486,806,000	8,385,895,620	10,447,285,378	11,693,478,600	21,817,815,798	100.49%
2.1.6	Belanja bantuan sosial	891,850,000	3,192,264,000	4,962,870,000	6,698,273,000	2,310,140,000	907,830,000	44.43%
2.2	Belanja Modal	141,308,934,005	221,924,457,916	233,070,956,632	237,422,914,193	272,055,204,204	116,558,397,390	4.27%
2.2.1	Belanja Tanah	2,450,000	52,100,000	1,476,985,650	15,078,648,890	19,083,942,600	1,783,211,520	1123.65%
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	44,913,373,232	105,565,517,576	83,664,119,327	50,034,279,487	64,971,969,322	59,325,288,806	19.05%

No	Uraian	REALISASI						Rata-rata Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	Rp	(Rp)	
2.2.3	Belanja bangunan dan gedung	56,417,256,483	56,533,614,650	91,270,842,710	99,301,309,579	122,480,146,205	35,885,805,077	4.62%
2.2.4	Belanja Jalan, irigasi dan jalanan	37,004,298,168	57,482,755,890	54,349,670,922	70,172,294,944	62,926,365,948	17,676,097,819	-0.65%
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	840,783,100	1,756,599,100	1,392,612,400	1,391,667,188	1,374,620,905	1,534,741,955	19.71%
2.2.6	Belanja aset lainnya	2,130,773,022	533,870,700	916,725,623	1,444,714,105	1,218,159,224	353,252,213	-6.46%
2.3	Belanja Tidak Terduga	1,066,915,000	706,972,000	130,744,540	0	1,780,000	23,915,490,939	268670.33%
2.4	Belanja transfer	479,575,600	641,828,500	560,702,300	660,702,300	563,199,700	0	-15.15%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	479,575,600	641,828,500	560,702,300	660,702,300	563,199,700		-15.15%
3	Pembiayaan	156,231,733,106	194,161,404,030	150,875,083,403	163,665,060,875	134,421,683,315	103,679,397,946	-6.06%
3.1	Penerimaan Pembiayaan	162,765,733,106	201,248,404,030	165,042,740,403	184,727,834,875	134,421,683,315	107,052,397,946	-6.00%

No	Uraian	REALISASI						Rata-rata Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	Rp	(Rp)	
3.1.1	SiLPA	155,719,254,108	201,227,094,865	162,344,899,952	180,992,764,876	134,408,800,314	107,045,397,946	-4.94%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	7,000,000,000	0	0	0	0	0	-20.00%
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.1.6	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	46,478,998	21,309,165	2,697,840,451	3,735,069,999	12,883,001	7,000,000	2479.89%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	6,534,000,000	7,087,000,000	14,167,657,000	21,062,774,000	0	3,373,000,000	31.41%

No	Uraian	REALISASI						Rata-rata Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	Rp	(Rp)	
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	0	0					0.00%
3.2.2	Penyertaan modal daerah	6,534,000,000	7,087,000,000	14,167,657,000	21,062,774,000	0	3,373,000,000	31.41%
3.2.3	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perautran perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	0.00%
	SILPA	201,227,094,865	162,344,899,952	180,992,764,876	134,408,800,314	107,045,397,946	251,514,967,769	16.21%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 2020

Berdasarkan pada tabel 3.3 dapat dilihat bahwa selama periode 2016-2020, belanja daerah Kota Magelang mengalami perkembangan yang positif, pada tahun 2020, mengalami perkembangan negatif sebagai dampak adanya pandemi COVID-19. Kedepan perlu dilakukan perencanaan yang lebih baik dan pelaksanaan program kegiatan yang lebih progresif, agar SILPA di akhir tahun bisa diminimalisir.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan SKPD.

Tabel 3.6
Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Magelang

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	781.335.799.509,00	840.042.626.525,00	909.525.862.920,00	908.089.485.909,00	967.785.834.243,00	946.188.761.537,00
	Dikurangi realisasi :						
2	Belanja Daerah	736.340.437.750,00	871.859.130.603,00	879.408.181.447,00	937.345.746.470,00	995.162.119.612,00	798.353.191.714,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.534.000.000,00	7.087.000.000,00	14.167.657.000,00	21.062.774.000,00	0,00	3.373.000.000,00
	Defisit riil	51.529.361.759,00	24.729.504.078,00	44.285.338.473,00	-8.193.486.561,00	27.376.285.369,00	151.208.569.823,00
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	155.719.254.108,00	201.227.094.865,00	162.344.899.952,00	180.992.764.876,00	134.408.800.314,00	107.045.397.946,00
2	Pencairan dana cadangan	7.000.000.000,00	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6	Penerimaan Piutang Daerah	46.478.998,00	21.309.165,00	2.697.840.451,00	3.735.069.999,00	12.883.001,00	7.000.000,00
7	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.534.000.000,00	7.087.000.000,00	14.167.657.000,00	21.062.774.000,00	-	3.373.000.000,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 2020

3.4.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kota Magelang selama kurun waktu 2015-2020 dijelaskan secara rinci pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7

Rata Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Magelang

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan %
1	ASET	2.573.083.505.29 8,98	2.920.893.584.60 7,44	3.579.209.910.12 9,97	3.865.401.096.56 4,41	4.012.816.686.65 1,14	4.160.262.610.51 7,39	10,31%
1.1	ASET LANCAR	252.054.952.846, 94	211.503.342.479, 99	212.425.650.919, 94	175.098.679.790, 26	176.270.898.822, 44	345.951.698.256, 85	12,74%
1.1.1	Kas	201.250.824.529,0 0	167.404.003.837,0 0	181.106.014.439,0 0	134.423.794.329,0 0	107.069.456.872,0 0	251.514.756.899,0 0	16,03%
1.1.3	Piutang	37.497.535.339,00	28.106.600.630,06	17.716.765.637,55	21.536.169.008,95	47.864.897.085,21	71.994.341.658,91	26,44%
1.1.6	Persediaan	13.306.592.978,94	15.992.738.012,93	13.602.870.843,39	19.138.716.452,31	21.336.544.865,23	22.442.599.698,94	12,52%
	INVESTASI JANGKA PANJANG	77.271.357.272,5 8	89.338.735.769,7 5	109.334.517.241, 24	124.443.174.602, 53	126.473.160.502, 91	121.584.251.686, 00	9,92%
	Investasi Jangka Panjang Permanen	77.271.357.272,58	89.338.735.769,75	109.334.517.241,2 4	124.443.174.602,5 3	126.473.160.502,9 1	121.584.251.686,0 0	9,92%
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	77.271.357.272,58	89.338.735.769,75	109.334.517.241,2 4	124.443.174.602,5 3	126.473.160.502,9 1	121.584.251.686,0 0	9,92%
1.2	ASET TETAP	2.186.014.234.16 9,96	2.500.007.190.53 1,80	3.204.873.913.12 0,14	3.489.931.876.61 2,97	3.651.659.024.73 4,83	3.605.532.864.66 5,91	10,96%
1.2.1	Tanah	1.357.376.035.522 ,81	1.561.853.532.620 ,40	2.177.804.254.186 ,15	2.346.271.101.655 ,67	2.369.221.751.438 ,00	2.322.986.280.955 ,00	12,25%
1.2.2	Peralatan dan Mesin	340.456.111.560,2 7	424.799.734.189,2 7	489.719.252.800,7 0	536.735.763.075,3 9	605.800.111.405,0 0	668.527.914.546,0 0	14,58%

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbu han %
1.2. 3	Gedung dan bangunan	571.947.666.425,5 2	601.388.084.569,4 8	653.837.525.062,1 7	703.774.035.589,6 4	836.444.325.724,0 0	933.346.403.288,0 0	10,39%
1.2. 4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	731.916.532.116,4 3	784.700.988.086,5 6	844.320.054.861,7 6	944.832.338.718,8 9	976.046.672.581,0 0	998.344.063.394,0 0	6,46%
1.2. 5	Aset tetap lainnya	45.937.856.766,94	43.811.793.704,31	27.793.539.650,19	26.398.360.505,91	12.248.361.639,00	12.352.825.481,00	-19,79%
1.2. 6	Konstruksi dalam pengerjaan	23.703.236.464,00	12.389.754.400,00	25.912.529.715,00	67.361.492.107,00	66.205.013.087,00	9.496.336.393,00	26,80%
	Akumulasi Penyusutan	(885.323.204.686, 01)	(928.936.697.038, 22)	(1.014.513.243.15 5,83)	(1.135.441.215.03 9,53)	1.214.307.211.139 ,17	(1.339.520.959.39 1,09)	8,66%
1.3	ASET LAINNYA	57.742.961.009,5 0	120.044.315.825, 90	52.575.828.848,6 5	75.927.365.558,6 5	58.413.602.590,9 6	87.193.795.908,6 3	24,46%
1.3. 1	Tagihan penjualan angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3. 2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3. 3	Kemitraan dengan pihak <i>ketiga</i>	12.468.000.000,00	12.468.000.000,00	12.468.000.000,00	12.468.000.000,00	12.468.000.000,00	29.764.909.000,00	27,75%
1.3. 4	Aset tak berwujud	9.898.310.201,00	10.631.176.588,00	11.286.514.877,00	13.644.073.232,00	9.031.963.866,00	9.185.506.479,00	0,47%
1.3.	Aset lain-	51.417.417.965,13	146.596.567.716,8	63.225.375.526,11	85.227.289.851,71	113.589.559.179,0	125.350.720.447,0	41,33%

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbu han %
5	lain		8			0	0	
	Amortisasi	(8.773.981.319,00)	(9.447.984.658,53)	(9.756.948.720,46)	(10.806.274.622,40)	-6.822.691.347,80	-7.472.572.953,04	-1,13%
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain- Lain	(7.266.785.837,63)	(40.203.443.820,45)	(24.647.112.834,00)	(24.605.722.902,66)	- 69.853.229.106,24	- 69.634.767.064,33	119,59%
	JUMLAH ASET DAERAH	2.573.083.505.298,98	2.920.893.584.607,44	3.579.209.910.129,97	3.865.401.096.564,41	4.012.816.686.651,14	4.160.262.610.517,39	10,31%
2.	KEWAJIBA N	1.801.314.356,35	5.827.232.904,63	1.768.768.797,17	2.062.128.961,00	1.942.887.272,00	2.475.296.228,00	38,41%
2.1	KEWAJIBA N JANGKA PENDEK	1.801.314.356,35	5.827.232.904,63	1.768.768.797,17	2.062.128.961,00	1.942.887.272,00	2.475.296.228,00	38,41%
2.1. 1	Utang perhitunga n pihak ketiga	10.734.064,00	10.734.064,00	107.649.002,00	10.534.064,00	21.137.409,00	0,00	162,66%
2.1. 2	Uang muka dari kas daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1. 3	Pendapatan diterima dimuka	561.127.903,35	672.985.716,63	826.448.167,17	646.008.936,00	197.048.750,00	195.093.750,00	-9,92%
2.1. 4	Utang belanja	1.141.751.289,00	5.134.044.504,00	768.961.561,00	1.387.999.461,00	1.724.062.613,00	2.280.202.478,00	80,32%
2.1. 5	Utang jangka pendek	87.701.100,00	9.468.620,00	65.710.067,00	17.586.500,00	638.500,00	0,00	47,03%

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbu han %
	lainnya							
2.1. 6	Utang Pihak ketiga lainnya			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	EKUITAS DANA	2.571.282.190.94 2,63	2.915.066.351.70 2,81	3.577.441.141.33 2,80	3.863.338.967.60 3,41	4.010.873.799.37 9,14	4.157.787.314.28 9,39	10,31%
3.1	EKUITAS DANA LANCAR							
3.1. 1	SILPA							
3.1. 2	Cadangan Piutang							
3.1. 3	Cadangan Persediaan							
3.1. 4	Lain- lainnya							
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI							
3.2. 1	Diinvestasi kan dalam aset tetap							
3.2. 2	Diinvestasi kan dalam aset lainnya							
3.2. 3	Dana yang harus							

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbu han %
	disediakan untuk pembayara n utang jangka panjang							
3.2. 4	Diinvestasi kan dalam investasi jangka panjang							
	JUMLAH KEWAJIBA N DAN EKUITAS DANA	2.573.083.505.29 8,98	2.920.893.584.60 7,44	3.579.209.910.12 9,97	3.865.401.096.56 4,41	4.012.816.686.65 1,14	4.160.262.610.51 7,39	10,31%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 2020

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya. Pada tahun 2020, Kota Magelang memiliki aset senilai Rp 4.160.262.610.517,39, dengan tingkat pertumbuhan 10.31 persen per tahun. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada tahun 2019 mencapai Rp. 3.6 triliun dan rata-rata pertumbuhannya adalah 10.96 persen per tahun.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 2.47 milyar. Pada tahun 2015 hingga 2020, jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu terendah pada tahun 2017 dan tertinggi pada tahun 2016. Oleh karena itu nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kota Magelang tahun 2020 mencapai Rp. 4,1 triliun dan mengalami pertumbuhan dari tahun 2015-2019 dengan rata-rata 10,31 persen.

3.5. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta

pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 49 menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Selanjutnya, belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sementara itu, belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran Kinerja (*Performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (*pro-poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dan perluasan lapangan kerja (*pro-job*). Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu

terkait proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan yang mencakup:

3.5.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Kota Magelang

No	Uraian	Total Belanja Untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	2015	347.634.403.350,00	742.874.437.750,00	46,80
2	2016	346.458.910.068,00	878.946.130.603,00	39,42
3	2017	321.762.777.524,00	893.575.838.447,00	36,01
4	2018	317.860.101.090,00	958.408.520.470,00	33,17
5	2019	333.008.382.806,00	995.162.119.612,00	33,46
6	2020	315.070.595.219,00	801.726.191.714,00	39,30

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 2020

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2015-2020, total belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur mengalami pertumbuhan negatif yang mengindikasikan belanja untuk publik semakin meningkat proporsinya. Pada tahun 2020, terjadi pertumbuhan positif dikarenakan adanya kebijakan refocusing anggaran, dimana sebagian anggaran untuk aparatur dialihkan ke belanja tidak terduga untuk mengantisipasi penanganan pandemi COVID-19.

3.5.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya,

mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; pemberian pinjaman daerah; dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran. Perkembangan defisit anggaran pemerintah Kota Magelang dalam kurun tahun 2015-2020 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Defisit Riil Anggaran Kota Magelang

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	781.335.799.509,00	840.042.626.525,00	909.525.862.920,00	908.089.485.909,00	967.785.834.243,00	946.188.761.537,00
	Dikurangi realisasi :						
2	Belanja Daerah	736.340.437.750,00	871.859.130.603,00	879.408.181.447,00	937.345.746.470,00	995.162.119.612,00	798.353.191.714,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.534.000.000,00	7.087.000.000,00	14.167.657.000,00	21.062.774.000,00	0,00	3.373.000.000,00
	Defisit riil	51.529.361.759,00	- 24.729.504.078,00	44.285.338.473,00	- 8.193.486.561,00	- 27.376.285.369,00	151.208.569.823,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 2020

Berdasarkan tabel defisit riil anggaran di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat surplus anggaran, hal ini dikarenakan kebijakan refokusing anggaran dan pembatasan kegiatan masyarakat yang berimbas pada tidak terlaksananya beberapa program kegiatan yang telah direncanakan. Untuk menutupi defisit

anggaran tersebut dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi penerimaan pembiayaan yaitu sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana tabel 3.10

Tabel 3.10
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Magelang

No	Uraian	Proporsi dari total defisit Riil					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	155.719.254.108,00	201.227.094.865,00	162.344.899.952,00	180.992.764.876,00	134.408.800.314,00	107.045.397.946,00
2	Pencairan dana cadangan	7.000.000.000,00	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	46.478.998,00	21.309.165,00	2.697.840.451,00	3.735.069.999,00	12.883.001,00	7.000.000,00
7	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.534.000.000,00	7.087.000.000,00	14.167.657.000,00	21.062.774.000,00	-	3.373.000.000,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 2020

Tabel 3.11
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Magelang

No	Uraian	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA	201.227.094.865,00		162.344.899.952,00		180.992.764.876,00		134.408.800.314,00		107.045.397.946,00		251.514.967.769,00	
2	Pelampauan Penerimaan PAD	33.871.415.081,00	16,83%	22.850.370.702,00	14,08%	15.472.529.356,00	8,55%	23.961.092.347,00	17,83%	31.178.636.151,00	29,13%	50.335.609.510,00	20,01%
3	Pelampauan penerima an dana perimbangan	-20.516.254.361,00	-10,20%	(6.749.416.876,00)	-4,16%	(33.864.119.888,00)	-18,71%	(19.081.130.088,00)	-14,20%	(22.758.045.123,00)	-21,26%	(8.679.197.273,00)	-3,45%
4	Pelampauan penerima an lain-lain pendapat an daerah yang sah	-716.266.211,00	-0,36%	764.397.699,00	0,47%	271.574.452,00	0,15%	533.586.650,00	0,40%	772.320.215,00	0,72%	(536.791.700,00)	-0,21%
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	188.588.200.356,00	93,72%	145.479.548.427,00	89,61%	199.112.780.956,00	110,01%	128.995.251.405,00	95,97%	97.852.486.703,00	91,41%	210.395.347.232,00	83,65%

No	Uraian	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	1.801.314.356,35	0,90 %	5.827.232.904,63	3,59 %	1.768.768.797,17	0,98%	2.062.128.961,00	1,53 %	1.942.887.272,00	1,82 %	2.475.296.228,00	0,98 %
7	Kegiatan lanjutan		0%		0,00 %		0,00%		0,00 %		0,00 %	-	0,00 %

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 2020

Berdasarkan tabel 3.9 di atas terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir (2015-2020), sebagai tahun rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah daerah, adanya kecenderungan peningkatan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya. Berdasarkan ketentuan pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

SiLPA di masa mendatang diharapkan semakin menurun, karena dengan semakin menurunnya SiLPA merupakan salah satu indikasi semakin sinergisnya antara perencanaan dengan penganggaran. Selain itu semakin besar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan maka akan memiliki *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang.

3.6 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat, prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu kerangka pendanaan dialokasikan untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.6.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Secara keseluruhan proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021-2026 disajikan pada tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Magelang

No	Uraian	Pertumbuhan (%)	2021 Rp.	2022 Rp.	2023 Rp.	2024 Rp.	2025 Rp.	2026 Rp.
1	PENDAPATAN	3,99%	893.727.109.000	851.284.262.000	927.785.250.000	952.285.435.000	977.684.057.000	1.003.690.452.916
1.1	Pendapatan Asli Daerah	9,36%	212.850.446.000	221.765.020.000	234.262.700.000	245.775.322.000	257.861.570.000	264.720.687.762
1.1.1	Pajak Daerah	7,21%	32.597.000.000	33.979.000.000	35.938.192.000	37.735.101.000	39.621.856.000	40.675.797.370
1.1.2	Retribusi Daerah	-4,21%	4.913.993.000	5.364.708.000	5.012.763.000	5.062.890.000	5.113.518.000	5.249.537.579
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan	7,42%	10.214.013.000	7.050.995.000	11.260.948.000	11.823.995.000	12.415.194.000	12.745.438.160
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	10,54%	165.125.440.000	175.370.317.000	182.050.797.000	191.153.336.000	200.711.002.000	206.049.914.653
1.2	Pendapatan Transfer	1,44%	664.705.463.000	613.348.042.000	676.870.438.000	689.691.480.000	702.835.668.000	721.531.096.769
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1,54%	590.481.263.000	556.270.842.000	625.910.498.000	636.183.543.000	646.652.335.000	663.853.287.111
1.2.2	Transfer antar - daerah	0,50%	74.224.200.000	57.077.200.000	50.959.940.000	53.507.937.000	56.183.333.000	57.677.809.658
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	1077,17%	16.171.200.000	16.171.200.000	16.652.112.000	16.818.633.000	16.986.819.000	17.438.668.385

No	Uraian	Pertumbuhan (%)	2021 Rp.	2022 Rp.	2023 Rp.	2024 Rp.	2025 Rp.	2026 Rp.
1.3.1	Hibah	16,65%	0					
1.3.2	Dana Darurat	0,00%	0					
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	497,97%	16.171.200.000	16.171.200.000	16.652.112.000	16.818.633.000	16.986.819.000	17.438.668.385
		0,00%						
2	BELANJA	2,45%	1.000.966.121.000	899.530.930.000	975.212.250.000	1.000.940.435.000	1.027.627.057.000	1.054.961.936.716
2.1	Belanja Operasi	2,30%	781.607.890.800	752.109.505.000	774.397.250.000	790.347.285.000	806.769.476.000	828.229.544.061
2.1.1	Belanja Pegawai	-1,86%	411.746.240.000	392.186.240.000	390.600.000.000	410.130.000.000	430.636.500.000	442.091.430.900
2.1.2	Belanja barang dan jasa	7,29%	361.501.026.800	351.423.265.000	367.337.250.000	364.266.485.000	360.663.192.000	370.256.832.907
2.1.3	Belanja bunga	0,00%	0					
2.1.4	Belanja subsidi	0,00%	0					
2.1.5	Belanja Hibah	100,49%	7.273.332.000	7.000.000.000	14.210.000.000	13.925.800.000	13.647.284.000	14.010.301.754
2.1.6	Belanja bantuan sosial	44,43%	1.087.292.000	1.500.000.000	2.250.000.000	2.025.000.000	1.822.500.000	1.870.978.500
2.2	Belanja Modal	4,27%	208.358.230.200	140.921.425.000	194.250.000.000	203.962.500.000	214.160.625.000	219.857.297.625
2.2.1	Belanja Tanah	1123,65%	32.400.000.000	21.913.481.247	30.206.150.215	31.716.457.726	33.302.280.612	34.188.121.277
2.2.2	Belanja Peralatan dan	19,05%	55.281.910.200	37.389.478.470	51.538.693.941	54.115.628.638	56.821.410.070	58.332.859.578

No	Uraian	Pertumbuhan (%)	2021 Rp.	2022 Rp.	2023 Rp.	2024 Rp.	2025 Rp.	2026 Rp.
	Mesin							
2.2.3	Belanja bangunan dan gedung	4,62%	70.116.547.000	47.422.766.597	65.368.856.520	68.637.299.346	72.069.164.314	73.986.204.084
2.2.4	Belanja Jalan, irigasi dan jalanan	-0,65%	48.554.984.000	32.839.775.657	45.267.257.420	47.530.620.291	49.907.151.305	51.234.681.530
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	19,71%	2.004.789.000	1.355.923.029	1.869.041.904	1.962.493.999	2.060.618.699	2.115.431.156
2.2.6	Belanja aset lainnya	-6,46%	0	0	0	0	0	0
2.3	Belanja Tidak Terduga	268670,33%	11.000.000.000	6.500.000.000	6.565.000.000	6.630.650.000	6.696.956.000	6.875.095.030
2.4	Belanja transfer	-15,15%	0	0	0	0	0	0
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00%	0					
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-15,15%	0					
		0,00%						
3	Pembiayaan	-6,06%						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-6,00%	118.739.012.000	59.746.668.000	59.427.000.000	60.655.000.000	61.943.000.000	63.590.683.800
3.1.1	SiLPA	-4,94%	118.719.012.000	59.726.668.000	59.427.000.000	60.655.000.000	61.943.000.000	63.590.683.800
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-20,00%	0					
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00%	0					

No	Uraian	Pertumbuhan (%)	2021 Rp.	2022 Rp.	2023 Rp.	2024 Rp.	2025 Rp.	2026 Rp.
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00%	0					
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0,00%	20.000.000	20.000.000				
3.1.6	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2479,89%	0					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	31,41%	11.500.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.319.200.000
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	0,00%	0					
3.2.2	Penyertaan modal daerah	31,41%	11.500.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.319.200.000
3.2.3	Pembentukan dana cadangan	0,00%	0					
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0,00%	0					
3.2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perautran	0,00%	0					

No	Uraian	Pertumbuhan (%)	2021 Rp.	2022 Rp.	2023 Rp.	2024 Rp.	2025 Rp.	2026 Rp.
	perundang-undangan							

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 2020

a. Kebijakan Pendapatan

Berdasarkan angka 5 tahun yang lalu, pendapatan dilaksanakan melalui:

- a. Melaksanakan kaidah-kaidah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Untuk merespon Pasca Pandemi COVID - 19, dengan ancaman penurunan PAD Tahun 2021, maka strategi yang akan di tempuh pada tahun 2021-2026, antara lain:
 - Review Perda Retribusi Daerah yang bertujuan untuk menyesuaikan tarif retribusi;
 - Asumsi dana transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2021-hingga 2023 menerapkan kebijakan kehati-hatian (*prudent*), yang ditandai dengan trend *fiscal tightening* (peralatan kebijakan fiskal) mempedomani kebijakan APBN.
- c. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- d. Penerapan dan penggunaan digitalisasi peta melalui *one map policy* untuk mengoptimalkan pendapatan daerah (*Fiscal Cadaster Policy*);
- e. Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemasangan alat deteksi transaksi dan monitoring berkelanjutan terhadap wajib pajak daerah;
- f. Penegakan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya dan fasilitasi kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak daerah;
- g. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pajak daerah (fiskus) melalui diklat terkait pajak daerah;
- h. Peningkatan integritas SDM perpajakan dan wajib pajak untuk meminimalkan pengelakan pajak (*tax evasion*);
- i. Perubahan regulasi yang sudah *out of date* menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah;
- j. Koordinasi intensif dengan OPD terkait yang berkorelasi mendukung peningkatan pendapatan asli daerah; dan

- k. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, yang diarahkan:

- a. Memprioritaskan belanja daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian indikator pembangunan daerah, serta program dan kegiatan terkait pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19
- b. Mengacu Standar Pelayanan Minimal;
- c. Mengalokasikan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
- d. Memenuhi alokasi minimal mandatory spending yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan diantaranya fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan;
- e. Mengakomodir aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota;
- f. Mengimplementasikan ketentuan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan, serta memanfaatkan sistem informasi dalam mengimplementasikannya.
- g. Komposisi Struktur Belanja APBD Tahun anggaran 2021 hingga RPJMD berakhir di tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian
 - a) Belanja Operasi
 - b) Belanja Modal
 - c) Belanja Tidak Terduga
 - d) Belanja Transfer
- h. Penyesuaian Belanja Hibah dan Bansos, yang sebelumnya tercantum dalam DPA-PPKD/BPKAD, menjadi diampu oleh masing-masing perangkat daerah/unit kerja yang membidangi;
- i. Belanja prioritas RPJMD 2021-2026, meliputi :
 - a) Pemulihan kondisi pasca pandemi covid 19, mencakup :

- 1) Penguatan Penanganan Kesehatan, terutama berbasis masyarakat
- 2) Penanganan Dampak Ekonomi berbasis inovasi, khususnya terhadap UMKM, IKM dan pedagang sektor informal
- 3) Penanganan Dampak Sosial berbasis inovasi dan rekayasa sosial
- b) SDG's (pengurangan kemiskinan) dan sinkronisasi prioritas program/ kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- c) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada 6 urusan wajib pelayanan dasar.
- d) Pendanaan pencapaian target target RPJMD 2021-2026
- j. Mendorong reformasi belanja dalam rangka penyehatan fiskal sekaligus penguatan efektifitas belanja dalam menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang yaitu memperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Magelang diarahkan untuk Meningkatkan performance dan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara Bertahap. Penyertaan Modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Selain

Penyertaan Modal kepada BUMD, Pemerintah Kota Magelang menempatkan modal disetor ke dalam PT. Bank Jateng guna meningkatkan Struktur permodalan dan meningkatkan sharing kepemilikan saham Pemerintah Kota Magelang pada PT. Bank Jateng, Bank Magelang dan BUMD lainnya sehingga pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Magelang tidak mengalami penurunan.

3.6.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Secara keseluruhan kerangka pendanaan daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021-2026 pada tabel 3.13 berikut ini.

Tabel 3.13**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Magelang**

No	Uraian	PROYEKSI					
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	Pendapatan	893.727.109.000	851.284.262.000	927.785.250.000	952.285.435.000	977.684.057.000	1.003.690.452.916
2	Pencairan dana cadangan (Sesuai dengan Perda)	0	0	0	0	0	0
3	Sisa lebih riil Perhitungan Anggaran	118.739.012.000	59.746.668.000	59.427.000.000	60.655.000.000	61.943.000.000	63.590.683.800
	Total Penerimaan	1.012.466.121.000	911.030.930.000	987.212.250.000	1.012.940.435.000	1.039.627.057.000	1.067.281.136.716
	Dikurangi :						
4	Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0
5	Pengeluaran Pembiayaan	11.500.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.319.200.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.000.966.121.000	899.030.930.000	975.212.250.000	1.000.940.435.000	1.027.627.057.000	1.054.961.936.716

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 2021

Tabel 3.14**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Magelang**

No	Uraian	Proyeksi					
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
	Kapasitas Riil kemampuan keuangan	1.000.966.121.000	899.030.930.000	975.212.250.000	1.000.940.435.000	1.027.627.057.000	1.054.961.936.716

	Prioritas I (60%)	600.579.672.600	539.418.558.000	585.127.350.000	600.564.261.000	616.576.234.200	632.977.162.030
	Prioritas II (40%)	400.386.448.400	359.612.372.000	390.084.900.000	400.376.174.000	411.050.822.800	421.984.774.686

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 2020

Berdasarkan tabel 3.12 di atas, rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, dan prioritas II, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II.

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20%. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan, bersifat mendukung program prioritas utama. Disamping itu Program prioritas II berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan pembangunan didapatkan dari hasil evaluasi yang menyandingkan kondisi yang ada dengan standar yang berlaku. Permasalahan pembangunan juga didapatkan melalui identifikasi gap atau celah antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal. Berdasarkan kondisi yang disajikan pada Bab II, maka identifikasi permasalahan pembangunan pada setiap urusan adalah sebagai berikut.

4.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

4.1.1.1. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan pendidikan akan sangat menentukan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan landasan pendidikan yang memadahi, dan diperkuat dengan sikap religius, berbudaya, beradab dan toleran akan membentuk aset yang berharga bagi Kota Magelang. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan pada urusan pendidikan, yaitu:

- a. Belum terpenuhinya fasilitas dasar (fasilitas pendukung pembelajaran) pada satuan pendidikan jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/MTs;
- b. Belum terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (Standar Sarana Prasarana dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan) pada satuan pendidikan jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/MTs, hal ini dibuktikan dengan masih belum memenuhi 2 standar dari 8 standar Nasional Pendidikan yaitu Standar Sarana Prasarana dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Belum optimalnya prestasi yang diraih Pendidik/Guru dan Siswa pada ajang regional dan nasional/internasional;
- d. Belum optimalnya kompetensi guru IT mengingat pembelajaran di Sekolah sangat membutuhkan IT;
- e. Masih fluktuatifnya angka APM SD/MI/Paket A, APM SMP/MTs/Paket B, APK SD/MI/ sederajat, dan APK SMP/MTs/ sederajat

4.1.1.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan selain ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, juga untuk mewujudkan kota sehat.

Keberhasilan pembangunan kesehatan akan sangat mendukung tercapainya komponen visi Kota Magelang. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja urusan kesehatan, beberapa permasalahan yang masih dihadapi adalah:

- a. Masih adanya kasus Angka Kematian Ibu, dimana masih terjadi kasus kematian ibu sebanyak 2 kasus di tahun 2020;
- b. Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), dimana rata-ratanya masih di atas 10 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir;
- c. Angka Kematian Balita (AKABA) yang masih cukup tinggi, pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus kematian balita;
- d. Masih ditemukannya kasus balita gizi buruk;
- e. Angka prevalensi TB yang terus meningkat;
- f. Jumlah kasus HIV/AIDS yang masih cukup tinggi;
- g. Pelayanan lansia yang belum bisa mencakup semua lansia, dibuktikan dengan masih ada sekitar 5000-an lansia yang belum terlayani;
- h. Pandemi Covid-19 yang belum stabil dan menunjukkan penurunan.

4.1.1.3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam menggerakkan pembangunan. Infrastruktur yang memadai dapat mendukung peningkatan kualitas hidup, peningkatan produktivitas, menggerakkan roda perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan juga diperlukan arahan dengan tata ruang yang baik. Tata ruang bermanfaat dalam mewujudkan keserasian pembangunan antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung agar terjadi keserasian pembangunan dengan nasional, provinsi, daerah sekitar dan tidak terjadinya konflik pemanfaatan lahan dalam mewujudkan hunian kota yang nyaman. Namun demikian masih terdapat permasalahan dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, diantaranya:

- a. masih ditemukan adanya kerusakan jalan, kerusakan jembatan, dan bangunan kelengkapannya, serta masih diperlukan pemeliharaan yang berkelanjutan;
- b. Masih terdapat bangunan drainase yang belum sesuai kapasitas dan belum adanya keterpaduan dalam penanganan jaringan drainase;
- c. Belum terpenuhinya 100% drainase dalam kondisi baik;
- d. Masih terdapatnya saluran irigasi yang belum memenuhi standar;
- e. Belum terpenuhinya 100% akses air bersih layak;

- f. Masih terdapat infrastruktur dan bangunan yang belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis;
- g. Masih terdapat 2,2% rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terkait dengan BABS dan berkelanjutan;
- h. Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

4.1.1.4. Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh rumah dengan lingkungan permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Namun demikian dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

- a. Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh karena terkendala asset dan kewenangan serta belum optimalnya penanganan kawasan kumuh secara komprehensif, lintas sektoral dan kolaboratif
- b. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum tertangani;
- c. Masih tingginya ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah (backlog);
- d. Rendahnya penyediaan hunian khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), baik rumah tapak atau rumah susun yang disediakan dengan sewa atau hak milik;
- e. Keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman
- f. Masih adanya pengembang yang tidak menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan perumahan.
- g. Masih adanya prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan perumahan yang belum memenuhi standar.

4.1.1.5. Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan aspek yang penting dalam menjaga kondusivitas wilayah di Kota Magelang. Dengan kondisi wilayah yang kondusif akan memberi rasa aman bagi warga dalam menjalankan aktivitasnya, serta akan meningkatkan iklim investasi di daerah. Beberapa permasalahan yang masih dijumpai adalah:

- a. Belum semua masyarakat memperoleh pemahaman tentang bencana, penanggulangan dan mitigasi bencana;
- b. Masih sekitar 23,53% kelurahan tanggap bencana yang terbentuk;

- c. Perlu upaya yang lebih optimal dalam pembentukan kampung bebas narkoba;
- d. Perlu upaya yang lebih optimal dalam pemahaman dan pencegahan bahaya penggunaan narkoba bagi pelajar dan masyarakat.

4.1.1.6. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial. Permasalahan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Magelang antara lain:

- a. Perlunya optimalisasi penanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- b. Perlunya pengelolaan dan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanggulangan kemiskinan dan pengatasan masalah PMKS lainnya;
- c. Perlunya penambahan jumlah personil dan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) serta Tagana untuk mendukung usaha peningkatan kesejahteraan sosial serta penanganan bencana.
- d. Meningkatnya angka PMKS dari semula 8224 pada tahun 2016, sementara pada akhir 2020 mencapai 11898.

4.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

4.1.2.1. Ketenagakerjaan

Dalam aspek demografi, Kota Magelang sudah memasuki kategori mendapatkan bonus demografi. Hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi khususnya dalam urusan ketenagakerjaan adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing dalam tataran nasional dan global. Fokus prioritas dalam pembangunan ketenagakerjaan adalah pada peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja. Permasalahan yang masih dijumpai adalah:

- a. Masih adanya kesenjangan antara kualifikasi jabatan yang dibutuhkan (*demand*) dengan minat/bakat dan kemampuan/kompetensi pencari kerja (*supply*);
- b. Masih rendahnya persentase wirausaha baru;

- c. Meningkatnya pengangguran terbuka sebagai akibat terjadinya pandemi Covid 19;
- d. Belum optimalnya perencanaan pelatihan kompetensi sesuai kualifikasi klaster;
- e. Belum optimalnya kondisi hubungan industrial.

4.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dalam membangun sumber daya manusia, menempatkan kesetaraan gender menjadi prioritas untuk melindungi hak perempuan dan anak agar terhindar dari diskriminasi dan kekerasan. Dengan menempatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai arus utama dalam setiap langkah pembangunan, maka akan mendukung upaya meningkatkan ketahanan keluarga di Kota Magelang. Dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa permasalahan, yaitu:

- a. Perlunya penambahan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) serta optimalisasi dalam pendampingannya untuk penyadaran hak-hak perempuan dan anak secara lebih intensif dan menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan;
- b. Optimalisasi penanganan anak berkebutuhan khusus (ABK);
- c. Perlunya penguatan mekanisme pendataan gender, utamanya keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah dan swasta.

4.1.2.3. Ketahanan Pangan

Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan yang mana pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia. Dengan tujuan dan fungsinya aspek ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup sub sistem yaitu: ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi dan keamanan. Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkannya antara lain:

- a. Semakin banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang menyebabkan semakin berkurangnya produksi pangan
- b. Belum optimalnya ketersediaan energi dan protein
- c. Rendahnya penganekaragaman konsumsi pangan
- d. Belum optimalnya pengamanan mutu dan keamanan pangan

4.1.2.4. Pertanian

Pembangunan bidang pertanian adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik material maupun secara spiritual berdasarkan Pancasila. Terkait hal tersebut permasalahan pertanian yang muncul diantaranya:

- a. Belum optimalnya akses reforma agraria, sehingga masih banyak pemanfaatan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum dilaksanakan secara optimal.
- b. Tanah milik pemerintah daerah belum seluruhnya bersertifikat (hal ini disebabkan banyak persyaratan administrasi dan pembiayaan yang harus dipersiapkan untuk melegalkan aset tanah tersebut).
- c. Konflik di bidang pertanahan masih sering terjadi di masyarakat
- d. Kondisi lahan yang sempit mengakibatkan sering terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan penggunaan tanahnya

4.1.2.5. Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup yang optimal akan memberi manfaat dalam penyediaan unsur-unsur penting yang diperlukan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Beberapa permasalahan yang masih dijumpai adalah:

- a. Tingginya pencemaran air
- b. Meningkatnya pencemaran udara
- c. Masih kurangnya proporsi ruang terbuka hijau publik;
- d. Belum optimalnya pengelolaan limbah B-3;
- e. Terjadinya kerusakan tanah/lahan;
- f. Belum optimalnya pengelolaan sampah.
- g. Menurunnya Indeks Kualitass Lingkungan Hidup yang di tahun 2017 sempat mencapai 62,54 namun turun menjadi 47,03 di tahun 2020

4.1.2.6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang baik merupakan bukti kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan hak kepada masyarakatnya. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

- a. Masih perlu optimalisasi perekaman wajib KTP-el;
- b. Perlu dioptimalkan upaya pemberian Kartu Identitas Anak (KIA);
- c. Perlu upaya yang lebih optimal dalam pemberian kepemilikan akte kelahiran penduduk..

4.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Keberadaan kelurahan adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam wilayah kelurahan bersangkutan. Untuk lebih optimal dalam pelaksanaan

tugasnya, maka diperlukan dukungan masyarakat yang berdaya. Beberapa permasalahan yang dijumpai adalah:

- a. Perlu ditingkatkan jalinan kemitraan antara perangkat daerah dengan forum warga;
- b. Perlu peningkatan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan program perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- c. Belum semua kelurahan mempunyai predikat kelurahan cepat berkembang

4.1.2.8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tujuan dilaksanakannya pengendalian penduduk adalah untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan kapasitas sumber daya pendukungnya. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

- a. Perlu optimalisasi peran Pusat Informasi dan Konseling bagi remaja/mahasiswa, untuk menekan angka pernikahan dini;
- b. Perlu peningkatan kualitas dan pengelolaan jaringan PIK-Remaja secara lebih terpadu;
- c. Masih perlu ditingkatkan angka partisipasi laki-laki dalam ber-KB;
- d. Perlu optimalisasi cakupan akseptor KB untuk lebih meningkatkan keterjangkauan, akseptabilitas, ketersediaan dan ketercukupan sarana dan informasi pelayanan KB.

4.1.2.9. Perhubungan

Transportasi berperan dalam melancarkan arus barang dan manusia serta dalam menggerakkan perekonomian, namun demikian masih terdapat permasalahan di sektor perhubungan, diantaranya:

- a. Sarana Prasarana Angkutan yang berkeselamatan dan ramah lingkungan belum optimal
- b. Sistem Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL) Perkotaan belum optimal
- c. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor belum optimal
- d. Menurunnya jumlah kendaraan bermotor yang laik jalan
- e. Terjadinya peningkatan peningkatan kecelakaan lalu lintas
- f. Manajemen Angkutan Perkotaan belum optimal
- g. Semakin menurunnya jumlah arus penumpang angkutan umum dari tahun ke tahun

4.1.2.10. Komunikasi Dan Informatika

Guna mendukung implementasi kota cerdas, maka akan terus dikembangkan pemanfaatan aplikasi informatika dalam rangka

meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan yang masih dijumpai adalah:

- a. Jaringan intra pemerintah belum merata dan belum terintegrasi.
- b. Jaringan intra pemerintah belum memenuhi standar.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan intra pemerintah.

4.1.2.11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pemberdayaan koperasi secara baik diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat. namun dalam pembangunan sektor koperasi dan usaha kecil menengah masih ditemukan masalah-masalah yang perlu ditangani yaitu:

- a. Belum memadainya pengelolaan dan SDM koperasi
- b. Rendahnya daya saing Usaha Kecil dan Menengah dalam kemampuan inovasi dan kreativitas produk
- c. Belum optimalnya sinergitas, kolaborasi dan kontinuitas dalam fasilitasi, peningkatan ketrampilan dan pendampingan terhadap UMKM

4.1.2.12. Penanaman Modal

Penanaman modal yang dikelola dengan optimal akan memberi pengaruh positif terhadap pendapatan daerah, disamping itu juga akan memperbesar kapasitas produksi. Dalam pelaksanaannya masih ditemu beberapa permasalahan, yaitu:

- a. Belum optimalnya informasi dan promosi potensi investasi di Kota Magelang
- b. Keterbatasan lahan yang sesuai dengan kebutuhan investor dan status lahan yang belum clear and clean
- c. Belum adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya optimalisasi pelayanan perijinan terpadu

4.1.2.13. Kepemudaan Dan Olahraga

Pembinaan pemuda ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pemuda agar lebih berperan dalam pembangunan. Sedangkan dalam pembangunan olah raga fokus yang dicapai adalah meningkatkan kesehatan masyarakat, selain untuk meraih prestasi pada cabang olah raga tertentu. Beberapa permasalahan yang masih dijumpai adalah:

- a. Perlu penyusunan mekanisme pembinaan dan pengembangan atlet secara insentif, terencana, berjenjang dan berkelanjutan;
- b. Belum adanya tenaga kepelatihan yang bersertifikat;
- c. Belum adanya mekanisme yang jelas terkait dengan kesejahteraan dan insentif bagi pelatih dan atlet berprestasi;

- d. Masih minimnya sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar;
- e. Masih minimnya pengembangan olah raga rekreasi;
- f. Masih perlu dikembangkan model-model baru yang inovatif bagi pembinaan organisasi pemuda.

4.1.2.14. Statistik

Permasalahan urusan statistik antara lain:

- a. Masih ditemuinya inkonsistensi data;
- b. Masih rendahnya kompetensi dan komitmen produsen data;
- c. Belum optimalnya metadata indikator; dan
- d. Kebutuhan data daerah yang dinamis.

4.1.2.15. Persandian

Berdasarkan kondisi masalah keamanan informasi yang belum optimal di Kota Magelang dapat dilihat di urusan persandian bagi pemerintah daerah yaitu:

- a. Insiden keamanan informasi: peretasan Web Kota Magelang, data LPSE baru 1 laporan di Tahun 2018
- b. Hasil Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) masih di level 1

4.1.2.16. Kebudayaan

Pembangunan tidak dapat berlangsung secara berkelanjutan apabila tidak memasukkan aspek kebudayaan didalamnya. Penguatan aspek kebudayaan akan mampu menjadi faktor yang memperkuat daya tahan dalam mengantisipasi derasnya arus globalisasi. Dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa permasalahan, yaitu:

- a. Masih belum optimalnya pengembangan budaya lokal;
- b. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya belum memadai;
- c. Penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya;
- d. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian benda cagar budaya;
- e. Menurunnya jumlah pengunjung museum dari 2017 yang sempat menyentuh 10.769, sementara di tahun 2020 hanya 982 pengunjung. Hal ini juga dipengaruhi akibat adanya pandemi covid-19

4.1.2.17. Perpustakaan

Kehadiran perpustakaan adalah untuk mendukung upaya peningkatan minat baca bagi masyarakat, selain itu adanya perpustakaan juga bisa menjadi simbol peradaban daerah. Beberapa permasalahan yang dijumpai adalah:

- a. Masih kurangnya pembinaan perpustakaan;

- b. Perlunya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengembangan perpustakaan;
- c. Perlunya peningkatan kualitas profil perpustakaan;
- d. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang mengelola perpustakaan;
- e. Masih perlu ditingkatkan upaya sosialisasi budaya baca dan literasi;

4.1.2.18. Kearsipan

Dalam pelaksanaan urusan kearsipan masih ditemui beberapa kendala atau permasalahan, terutama mengingat urgensi pengelolaan arsip, maka kinerja harus terus ditingkatkan. Beberapa kendala yang masih dihadapi yaitu:

- a. Belum optimalnya pengelolaan arsip
- b. Belum optimalnya perlindungan dan penyelamatan arsip

4.1.3. Urusan Pilihan

4.1.3.1. Kelautan Dan Perikanan

Perikanan di Kota Magelang merupakan perikanan darat. Pembangunan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk menjaga produksi perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha pengolahan guna meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Budidaya ikan perkotaan saat ini sebagai solusi jitu dalam upaya mendukung penyediaan pangan dari sub sektor perikanan yang lebih sehat dan bergizi bagi masyarakat. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi urusan kelautan dan perikanan yaitu:

- a. Semakin berkurangnya lahan perikanan karena beralih fungsi untuk permukiman.
- b. Kompetensi, pengetahuan dan ketampilan/pelatihan teknologi budidaya perikanan pelaku perikanan masih rendah.

4.1.3.2. Pariwisata

Pembangunan pariwisata meliputi beberapa pilar, yaitu pengembangan destinasi wisata; peningkatan pemasaran pariwisata; pewujudan industri pariwisata serta peningkatan kualitas kelembagaan. Dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa permasalahan, yaitu:

- a. Diperlukan upaya peningkatan pengelolaan destinasi wisata dan promosi daya tarik wisata untuk menurunkan potensi titik jenuh wisatawan;
- b. Terdapat penurunan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara;

- c. Masih belum optimal kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
- d. Perlu peningkatan diversifikasi produk wisata, utamanya dengan memasukkan aspek budaya, alam, kuliner dan kerajinan.

4.1.3.3. Pertanian

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Terkait dengan situasi dan kondisi Kota Magelang saat ini lebih intens dan fokus dalam mengembangkan model pertanian perkotaan secara terpadu (integrated urban farming) di lahan sempit. Selain itu dari sisi non budidaya/hasil pasca panen dilakukan melalui pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produksi. Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian antara lain:

- a. Semakin berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi
- b. Kurangnya keanekaragaman produksi pertanian
- c. Masih rendahnya produksi pertanian
- d. Semakin berkurangnya produksi peternakan
- e. Masih adanya ancaman penyakit hewan dan zoonosis

4.1.3.4. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Dalam pelaksanaan urusan energi dan sumber daya mineral, masih dijumpai beberapa permasalahan diantaranya:

- a. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energi alternative/ energy baru terbarukan
- b. Belum terpenuhinya PJU bagi masyarakat
- c. Belum tersedianya data TPB urusan energi dan sumber daya mineral

4.1.3.5. Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis guna mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, pembentukan harga wajar, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. sektor perdagangan penting terus dikembangkan mengingat sifat sektor ini saling berkaitan dengan hampir semua sektor pembangunan. namun demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan pengembangan sektor perdagangan di Kota Magelang, antara lain:

- a. Pertumbuhan PKL yang sulit dikendalikan.
- b. Kurangnya penegakan ketertiban PKL

- c. Kurangnya kesadaran pelaku ekspor untuk melaporkan informasi data ekspor
- d. Pasar tradisional bersaing dengan pasar modern

4.1.3.6. Perindustrian

Pembangunan industri Kota Magelang berfokus pada sektor industri kecil yang menjadi kewenangan daerah. namun dalam melaksanakan pembangunan sektor ini masih menemui masalah - masalah diantaranya:

- a. rendahnya daya saing hasil produk IKM
- b. Menurunnya omset usaha industri sebagai akibat pandemi Covid
- c. Kurangnya kemandirian dan lemahnya penguasaan teknologi produksi dan pemasaran

4.1.3.7. Transmigrasi

Pengembangan transmigrasi memiliki fungsi setrategis guna mengatasi permasalahan demografi, memberikan kesempatan hidup layak bagi warga masyarakat, mengatasi kemiskinan, menjadi solusi bagi pengangguran. Namun, masalah utama urusan transmigrasi di Kota Magelang yaitu sangat tergantung pada kuota transmigran yang diberikan pemerintah pusat.

4.1.4. Penunjang Urusan Pemerintahan

4.1.4.1. Fungsi Lain

Permasalahan dalam pelaksanaan fungsi lain-lain diantaranya sebagai berikut:

1. Capaian SPM Kota Magelang

Permasalahan terkait dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yaitu terdapat beberapa target yang belum tercapai oleh OPD sebagai pengampu SPM, hal ini dikarenakan dalam penetapan target awal capaian SPM tidak akurat penetapannya, dalam artian tidak didukung dengan data kondisi realita dan kemampuan sumberdaya.

2. Hasil Implementasi SAKIP

- a. Belum terintegrasinya sistem perencanaan kinerja bebrbasis teknologi informasi yang sudah dibangun dan diimplementasikan yaitu e-planning, e-budgeting, dan e-SAKIP.

- b. Penjabaran kinerja secara berjenjang belum dilakukan oleh seluruh OPD dan belum dimanfaatkan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja di tingkat penanggungjawab program dan kegiatan.
 - c. Penjabaran juga belum dilakukan sampai tingkat individu pegawai sehingga keselarasan pengukuran antara kinerja individu pegawai dengan kinerja organisasi belum terkawal dengan baik yang berpotensi pada pemberian reward and punishment pada individu pegawai yang kurang berorientasi pada kinerja.
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan baru sebatas memonitor capaian program dan kegiatan secara fisik dan serapan anggaran dan belum digunakan untuk mengukur capaian (*outcome*) program serta keselarasan program dan kegiatan dalam mendukung capaian sasaran strategis organisasi.
3. Persentase perkembangan kerjasama daerah
- Permasalahan yang ada pada indikator ini adalah masih fluktuatifnya perkembangan Kerjasama Kota Magelang. Pada tahun 2020 menunjukkan penurunan dari tahun 2019 dengan selisih sekitar 4,79%. Hal ini dikarenakan belum adanya TKKSD (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, seharusnya dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang bertugas untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama daerah. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dibentuk oleh Kepala Daerah.
4. Persentase PD dengan nilai pelayanan baik, permasalahan dalam survey kepuasan masyarakat :
- a. Belum seluruh Unit Pelayanan Publik di Kota Magelang menjadikan survey kepuasan masyarakat sebagai dasar peningkatan kinerja pelayanan, hal ini ditandai belum seluruh UPP melaksanakan rekomendasi atau saran masukan yang diberikan oleh pengguna layanan.
 - b. Belum seluruh Unit Pelayanan Publik Kota Magelang memiliki unit aduan yang mengelola dan menindaklanjuti setiap aduan yang diberikan oleh penerima layanan yang dalam hal ini adalah responden survey kepuasan masyarakat

5. Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi
Masih adanya perangkat daerah yang mengajukan mengajukan harmonisasi produk hukum diluar perencanaan.
6. Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan
Sejauh ini penyelenggaraan pelayanan belum terintegrasi dengan unit pelayanan terkait, sehingga birokrasi terkesan masih belum sederhana.

4.1.4.2. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang ideal akan bertumpu pada prinsip good governance yang selaras dengan prinsip good financial governance. Pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah harus senantiasa seiring sejalan agar pembangunan di Kota Magelang dapat berjalan baik. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan yaitu:

- a. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien
- b. Optimalisasi penggalan potensi PAD untuk peningkatan pendapatan daerah
- c. Pengoptimalan manajemen asset agar aset dapat terkelola secara baik.
- d. Peningkatan kinerja BUMD agar optimal dalam kontribusinya terhadap PAD

4.1.4.3. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses awal dalam pembangunan daerah dan memiliki kedudukan yang sangat strategis untuk mengatasi permasalahan dan mendukung pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan
- b. Belum optimalnya pemantauan, pengevaluasian serta pengendalian pembangunan daerah sehingga rekomendasi hasil evaluasi masih perlu ditingkatkan kualitasnya.
- c. Belum tersedianya data dan informasi yang lengkap, komprehensif, akurat, update dan akuntabel serta analisis pembangunan daerah yang dapat menggambarkan kondisi Kota Magelang secara utuh.

- d. Belum optimalnya peran masyarakat dan *stakeholders* dalam proses perencanaan karena masih adanya anggapan bahwa peran masyarakat dan *stakeholders* hanya sekedar formalitas

4.1.4.4. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka mendukung terselenggaranya misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif, Pemerintah Kota Magelang perlu terus meningkatkan upaya penguatan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas dan peran sumber daya aparturnya. Upaya itu tentunya merupakan wujud komitmen pemerintah agar dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, melalui perhatian secara lebih sungguh-sungguh pada urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk Aparatur Sipil negara.

Permasalahan yang dapat diinventarisir pada urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk dapat mencapai hal diatas, antara lain:

1. Belum diterapkannya Sistem Merit dalam manajemen SDM aparatur secara maksimal. Dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belum dibentuk tim penilai mandiri Sistem Merit yang ditetapkan dengan SK Walikota.
 - b. Belum dilaksanakannya penilaian mandiri pelaksanaan Sistem Merit dalam manajemen SDM aparatur.
 - c. Belum dilaksanakannya Manajemen Talenta SDM aparatur
 - d. Belum adanya *Assesment Center* pada Pemerintah Kota Magelang
 - e. Belum selesainya pelaksanaan pemetaan atau *talent pool/ assestmen* terhadap SDM aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Magelang
 - f. Belum adanya Database Kompetensi Pegawai secara menyeluruh. Data ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas SDM ASN Kota Magelang. Selain menjadi kewenangan BKPP untuk Menyusun Database ini, perlu juga peran aktif OPD dalam mengelola dan menyajikan data pegawaiannya.
 - g. Belum adanya Pedoman Pola Karir ASN Kota Magelang
 - h. Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan pegawai kaitanya dengan aspek-aspek pada sistem merit
2. Belum diterapkannya sistem *reward and punishment* yang terintegrasi (tidak relevan karena pemberlakuan TPP yang berbasis e-kinerja dan disiplin)

3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan kepegawaian (meskipun sudah dilaksanakan).

4.1.4.5. Penelitian dan Pengembangan

Kontribusi penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah adalah dalam pemberian rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian. Litbang juga memberikan sumbangan dalam pengembangan inovasi daerah. Permasalahan yang masih dijumpai adalah:

- a. Belum optimalnya proses bisnis kelitbangan;
- b. Masih perlu optimalisasi pemanfaatan hasil kajian litbang sebagai rekomendasi perumusan kebijakan;
- c. Belum optimalnya manajemen kelitbangan;
- d. Belum semua produk teknologi dan inovasi yang berpotensi, dilindungi Hak Kekayaan Intelektual-nya.

4.1.4.6. Pengawasan

Keberadaan lembaga pengawasan di daerah adalah untuk menjaga agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan, yaitu:

- a. Masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia APIP;
- b. Identifikasi dan analisis resiko belum dilakukan secara komprehensif terhadap lingkungan pengendalian dan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi yang belum efektif dan efisien;
- c. Kurang optimalnya OPD dalam memanfaatkan Inspektorat sebagai *consulting partner* dan *quality assurance*;
- d. Belum optimalnya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

4.2. Lingkungan Strategis

Penentuan isu strategis daerah juga dilakukan dengan melihat isu strategis global, nasional, maupun regional. Isu-isu strategis tersebut dapat juga termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan, khususnya RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD daerah lain. Keterkaitan terhadap isu penataan ruang juga perlu dilakukan yaitu dengan melihat dokumen RTRW Kota Magelang, RPJPD Kota Magelang dan juga Dokumen KLHS RPJMD Kota Magelang. Penelaahan isu-isu strategis sebagai bahan pertimbangan isu strategis Kota Magelang akan dijelaskan pada sub bab berikut ini.

4.2.1. Isu Global

4.2.1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda internasional kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium. Secara umum, TPB ditetapkan pada tanggal 25 September 2015 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, komunitas masyarakat, dan pelaku ekonomi. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. TPB terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target. Target dari pencapaian tujuan ini diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030, yang meliputi 3 dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pada akhir tahun 2020, Pemerintah Pusat melakukan update terhadap indikator-indikator yang tertuang dalam buku metadata yang dikeluarkan oleh Bappenas. Metadata awal yang terdiri dari 319 diupdate menjadi 289 indikator di buku metadata tahun 2020. Indikator-indikator yang ada dalam metadata ini perlu dilakukan pencermatan dan diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD Kota Magelang ini. Tujuh belas tujuan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tertuang dalam metadata terbaru adalah:

- a. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan
- b. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
- c. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- d. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
- e. Tujuan 5 Kesetaraan Gender
- f. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
- g. Tujuan 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua
- h. Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
- i. Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
- j. Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara
- k. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
- l. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
- m. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

- n. Tujuan 14 Ekosistem Lautan
- o. Tujuan 15 Ekosistem Daratan
- p. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- q. Tujuan 17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

4.2.1.2. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Penyebaran Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Kondisi ini dalam rangka menyikapi penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas, dimana WHO (*World Health Organization*) telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Kota Magelang menetapkan kondisi ini sebagai kejadian luar biasa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Nomor 360.2/70/112 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Bencana wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* di Kota Magelang.

Sampai saat ini, pandemi covid-19 masih berlangsung dan memberi dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Berbagai sektor mengalami tekanan, seperti sektor kesehatan terkait penanganan wabah. Selama tahun 2020, jumlah penderita terus mengalami kenaikan dan memberikan dampak kepada tenaga medis dalam rangka penanganan kasus tersebut. Selain sektor kesehatan, covid-19 juga berdampak pada sektor Pendidikan. Adanya pandemi ini membatasi kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang, sehingga pembelajaran dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh melalui daring. Metode ini berdampak pada kebutuhan jaringan internet untuk kelancaran kegiatan pembelajaran. Sektor transportasi dan pariwisata banyak mengalami kerugian yang mengakibatkan adanya pemutusan hubungan kerja. Pandemi ini juga memberikan dampak kepada sektor perekonomian. Dampak terhadap sektor perekonomian ini sangat terlihat dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional turun sebesar -2,07 di tahun 2020. Begitu juga dengan kondisi perekonomian di Kota Magelang yang menunjukkan penurunan, dimana pertumbuhannya sebesar -2,45.

Untuk mengurangi dampak dari pandemi covid-19 tersebut, diperlukan upaya antisipasi dan pemulihan seperti:

- Perbaikan pelayanan kesehatan;
- Perluasan penerapan pola hidup sehat masyarakat;

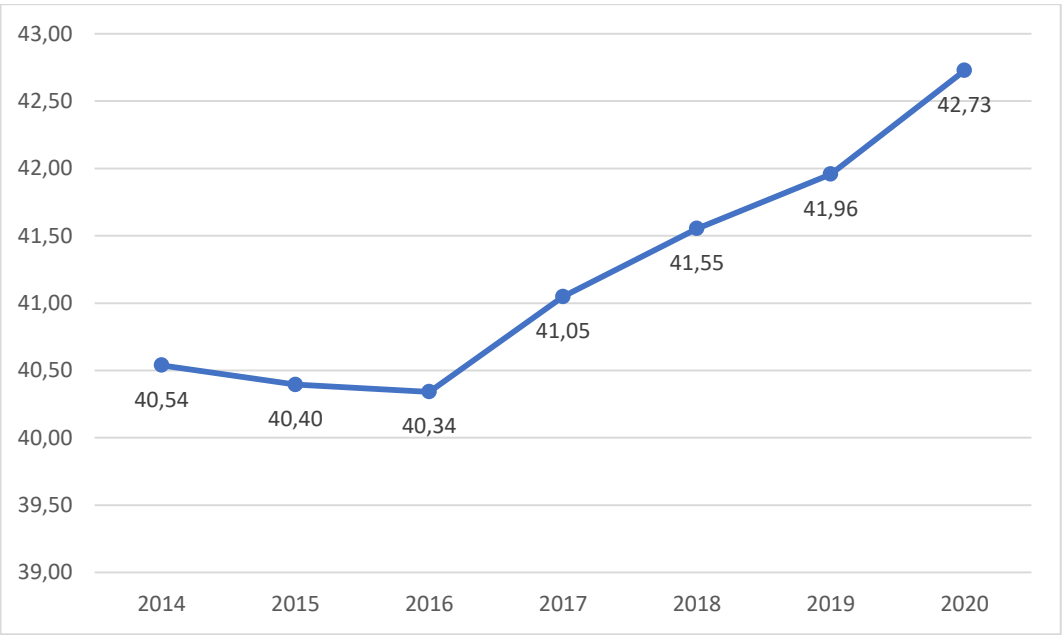
- Peningkatan akses terhadap jaringan teknologi informasi;
- Perluasan akses terhadap jaring pengaman sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak

4.2.2. Isu Strategis Nasional

4.2.2.1. Bonus Demografi

Bonus demografi terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Kondisi ini mengakibatkan adanya penurunan rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan yang semakin kecil menunjukkan banyaknya angkatan kerja yang bisa mendorong produktivitas. Kondisi ini mendorong pembukaan lapangan kerja yang lebih luas untuk dapat menampung angkatan kerja yang ada. Di sisi lain, bonus demografi akan memberi dampak negatif ketika kondisi ini tidak mampu dimanfaatkan, salah satunya adalah banyaknya pengangguran usia produktif.

Kondisi bonus demografi Kota Magelang sudah mulai mengalami kenaikan dilihat dari angka rasio ketergantungan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, angka rasio ketergantungan terkecil berada pada tahun 2016, sebesar 40,34. Tahun 2017 sudah menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2016, dimana terjadi kenaikan sebesar 0,71. Kondisi ini terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2020 yang menunjukkan angka rasio ketergantungan sebesar 42,73.



Gambar 4.1 Angka Rasio Ketergantungan Kota Magelang Tahun 2014-2020

Sumber: Analisis, 2021

Kondisi ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Magelang untuk dapat memanfaatkan bonus demografi yang ada. Langkah yang dapat diambil adalah dengan perluasan lapangan kerja. Fasilitasi penyaluran tenaga kerja ke perusahaan dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan penyerapan angkatan kerja. Selain itu, penguatan UMKM dan IKM yang ada diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Selain itu, perlu Langkah antisipasi jangka panjang dalam menyikapi bonus demografi ini. Berdasarkan tren peningkatan angka rasio ketergantungan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang berkisar 0,60 akan terjadi perubahan piramida penduduk menjadi piramida penduduk tua (*aging population*). Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan menjadi salah satu langkah antisipasi yang dapat dilakukan.

4.2.2.2. Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Penelaahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yaitu pada arahan presiden dan agenda pembangunan nasional. Visi Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misinya adalah:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Visi misi pembangunan nasional tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam arahan presiden. Lima arahan presiden tersebut adalah:

- a. Pembangunan SDM

- b. Pembangunan infrastruktur
- c. Penyederhanaan regulasi
- d. Penyederhanaan birokrasi
- e. Transformasi ekonomi

Agenda pembangunan dalam rangka menerjemahkan arahan presiden tersebut adalah:

- f. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
- g. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- h. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- i. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- j. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- k. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- l. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public

Arah pengembangan wilayah RPJMN 2020-2024, Kota Magelang masuk dalam agenda pengembangan kota besar, kota sedang, kota kecil di Jawa Tengah selain Surakarta, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan. Beberapa proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan di Kota Magelang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Proyek Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024 yang berlokasi
di Kota Magelang

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikator Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)			
Pembangunan Fly Over Canguk	Panjang Fly Over terbangunan (lokasi)	1 (selesai)	53,88	Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah	Program Penyelenggaraan Jalan	Kementerian PUPR

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2024	(Rp Miliar)			
SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)		957,03	Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal (Provinsi Jawa Tengah)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR; DAK; APBD; Masyarakat; CSR
Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA baru yang terbangun (unit)		621,52	Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal (Provinsi Jawa Tengah)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PUPR, KPBU, APBD

Berdasarkan arahan presiden dan agenda pembangunan tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Hasil Telaahan terhadap RPJMN Tahun 2020-2024

Arahan Presiden	Agenda Pembangunan	Implikasi
- Pembangunan SDM - Pembangunan infrastruktur - Penyederhanaan regulasi	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	- Memperkuat peran UMKM dan IKM - Mengurangi jumlah pengangguran - Menurunkan angka kemiskinan

Arahan Presiden	Agenda Pembangunan	Implikasi
- Penyederhanaan birokrasi - Transformasi ekonomi	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	- Mendorong pemerataan pembangunan sesuai dengan potensi dan masalah yang ada
	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	- Meningkatkan kualitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM - Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk membentuk SDM yang sehat
	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	- Meningkatkan toleransi dan gotong royong masyarakat - Meningkatkan pelestarian cagar budaya - Mendorong peningkatan kualitas seni dan budaya yang berkembang di masyarakat
	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	- Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur - Meningkatkan aksesibilitas - Meningkatkan akses pelayanan dasar terhadap air dan sanitasi
	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana
	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	- Meningkatkan toleransi dan gotong royong masyarakat - Mempercepat reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik

4.2.2.3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang

Peraturan ini disusun untuk percepatan pembangunan dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi Kawasan yang diharapkan akan berdampak pada perekonomian regional dan nasional. Kota Magelang masuk dalam Kawasan pengembangan Kawasan Purwomanggung (Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung), dimana Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kawasan ini dikembangkan dengan *quick win* pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur. Usulan program/kegiatan Kawasan Purwomanggung untuk Kota Magelang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Usulan Program/Kegiatan Kota Magelang sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Estimasi Nilai Investasi (IDR M)	Sumber Dana
1	Revitalisasi sempadan Sungai Progo (<i>river amenity</i>), Kab. Magelang dan Kota Magelang	50,0	APBN
2	Pembangunan TPA/TPST Regional, Kab. Magelang	200,0	KPBU
3	Peningkatan Terminal Tipe A Tidar, Kota Magelang	50,0	APBN
4	Pembangunan RSUD Tipe C, Kota Magelang	50,0	KPBU
5	Pembangunan RSUD Rujukan Kanker, Kota Magelang	900,0	KPBU

4.2.3. Isu Strategis Regional

4.2.3.1. Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Telaahan terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dilakukan dalam rangka mengetahui kebijakan strategis yang terkait dengan Kota Magelang. Identifikasi awal dilakukan terhadap isu strategis Provinsi Jawa Tengah. Isu strategis pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah antara lain:

- a. Penanggulangan Kemiskinan
- b. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
- c. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha
- d. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam
- e. Kedaulatan pangan dan energi
- f. Kesenjangan wilayah
- g. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

Sedangkan dalam rangka mengantisipasi isu dan memecahkan permasalahan yang ada, visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 yaitu:

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi

Visi tersebut dimaknai sebagai berikut:

Sejahtera

Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Berdikari

Berdikari merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumberdaya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumberdaya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan. Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari dilandasi semangat dan nilai utama **Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**. Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

- h. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
- i. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota
- j. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
- k. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Berdasarkan visi misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut, beberapa implikasi bagi pembangunan Kota Magelang kedepannya disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.4
Hasil Telaahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

ISU STRATEGIS	MISI	IMPLIKASI
- Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia	- Meningkatkan toleransi antar masyarakat - Membangun masyarakat yang religius
- Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota	- Mempercepat reformasi birokrasi

ISU STRATEGIS	MISI	IMPLIKASI
- Penanggulangan Kemiskinan - Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha - Kesenjangan wilayah	Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	- Memberdayakan UMKM dan IKM yang berkembang - Memperluas perlindungan sosial sebagai salah satu cara mengurangi kemiskinan - Menurunkan angka pengangguran
- Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia - Kedaulatan pangan dan energi - Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan	- Meningkatkan kualitas Pendidikan - Meningkatkan akses pelayanan Kesehatan - Mendorong pelestarian seni dan budaya termasuk cagar budaya

4.2.3.2. Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Penelaahan terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 perlu dilakukan untuk mengetahui arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan, mengingat Kota Magelang berada di tengah-tengah Kabupaten Magelang. Dengan mengetahui arah kebijakan pembangunan Kabupaten Magelang kedepannya, diharapkan terjadi sinkronisasi pembangunan.

Isu strategis Kabupaten Magelang yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024 adalah:

- a. Kualitas sumber daya manusia
- b. Daya saing daerah
- c. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Dalam rangka menyelesaikan isu-isu strategis tersebut, visi Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera,
Berdaya Saing dan Amanah
(SEDAYA AMANAH)”.**

Dengan misi:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia
- 2) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
- 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah

Selain itu, penetapan Kawasan Borobudur menjadi Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN) yang didukung adanya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya perlu menjadi perhatian. Pembangunan fisik dan non fisik akan banyak dilakukan pada kawasan tersebut untuk meningkatkan kualitas dan kondisi obyek wisata maupun peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Kota Magelang harus dapat menangkap peluang dari pengembangan Kawasan Borobudur tersebut. Peningkatan akses dan akomodasi untuk menampung wisatawan yang berkunjung menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kota Magelang.

4.2.4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang 2011-2031

Telaah terhadap RTRW dilakukan untuk mengetahui program kegiatan yang diamanatkan. Sinkronisasi RPJMD terhadap RTRW dilakukan sehingga nanti dapat dioperasionalkan. Hasil telaahan RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Hasil Telaahan RTRW Kota Magelang 2011-2031

No	Strategi Pengembangan	Implementasi		Kajian sederhana	Bentuk eksekusi
1.	Strategi penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang mampu meningkatkan peran dan fungsi Daerah menjadi PKW di Jawa Tengah dan pusat Wilayah Pengembangan (WP) Purwomanggung	a.	meningkatkan keterkaitan antar daerah di Wilayah Pengembangan (WP) Purwomanggung dengan Daerah sebagai PKW di Jawa Tengah	Kota Magelang memiliki potensi berupa Lokasi yang cukup strategis sehingga secara histori, Ruang ini memiliki kegiatan dominan berupa sektor perdagangan, perdagangan yang berkembang secara alami ini kemudian perlu untuk dikembangkan lebih lanjut dengan menyesuaikan kondisi saat ini. sehingga pada ruang - ruang yang mengalami kemunduran dapat disegarkan Kembali dan dikembalikan vitalitas ruang ini. contoh Kawasan pecinan dan Rejowinangun. Potensi ekonomi pada wilayah juga dapat dikembangkan sesuai dengan misi ke-4 dengan mengambil tema kekhasan budaya dan memanfaatkan media untuk mempopulerkan Kembali. selain itu sektor jasa berupa Pendidikan dan Kesehatan yang memiliki potensi yang cukup tinggi	

No	Strategi Pengembangan	Implementasi		Kajian sederhana	Bentuk eksekusi
		b.	menata, mengembangkan, dan/atau membangun kawasan pusat-pusat kegiatan perekonomian Daerah yang mempunyai skala pelayanan regional	di Kota Magelang masih perlu untuk ditingkatkan dalam rangka memaksimalkan potensi yang ada dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki. Sebagaimana kita tahu bahwa prestasi dibidang Pendidikan dan Kesehatan cukup tinggi sehingga banyak pembeli jasa disektor Pendidikan dan Kesehatan berasal dari Daerah lain.	Memaksimalkan penataan/pengembangan/pembangunan BWK 1 Kota Magelang
		c.	menata, mengembangkan, mengkoordinasi, dan/atau membangun kawasan pusat-pusat kegiatan pendidikan Daerah yang mempunyai skala pelayanan regional dan/atau nasional		Memaksimalkan pembangunan pusat kegiatan Pendidikan secara fisik dan non fisik, serta peningkatan fasilitas ruang terbuka melalui penambahan fasilitas wifi sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan
		d.	menata, mengembangkan, mengkoordinasi, dan/atau membangun kawasan pusat-pusat kegiatan kesehatan Daerah		Peningkatan Fasilitas Kesehatan dan kualitas pelayanan Kesehatan Daerah

No	Strategi Pengembangan	Implementasi		Kajian sederhana	Bentuk eksekusi
2.	Strategi pengembangan sistem Prasarana dan Sarana yang terintegrasi dengan sistem regional, Provinsi, dan nasional	a.	memadukan, meningkatkan, dan/atau membangun jaringan infrastruktur transportasi darat yang terdiri atas jaringan perkeretaapian, jaringan Jalan beserta pendukungnya, sarana Terminal penumpang dan barang, dan lokasi pergantian moda transportasi barang dan orang secara terintegrasi dengan jaringan pelayanan transportasi regional, Provinsi, dan nasional;	Ada beberapa sistem jaringan sarana dan prasarana yang terhubung secara regional dan nasional seperti : 1. Jaringan Transportasi 2. Sungai 3. Jaringan irigasi 4. Geologi dan Hidrologi (untuk kepentingan air bersih) 5. Jaringan Persampahan 6. Drainase di bagian selatan Kota 7. Pola Jaringan Distribusi Pangan Jaringan Transportasi Jaringan antar Kota/ Provinsi tidak memiliki masalah, akan tetapi isu terkait adanya pembangunan Jalan Toll memerlukan suatu gagasan tindak lanjut, hal ini bisa bersifat positif maupun negative. Bisa berupa upaya rekayasa lalu lintas untuk kendaraan yang masuk kota atau berupa suatu upaya meningkatkan daya Tarik kota sehingga menarik minat	
		b.	memadukan, menata, dan/atau membangun jaringan pengolahan Sampah Daerah dengan Kawasan Kabupaten Magelang secara terintegrasi melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional;		

No	Strategi Pengembangan	Implementasi	Kajian sederhana	Bentuk eksekusi
		c. memadukan, mengembangkan, dan menjaga kualitas jaringan Irigasi sebagai bagian infrastruktur pengairan Pemerintah untuk menunjang pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	pengunjung sehingga target pertumbuhan ekonomi tetap dapat dicapai. Sungai BBWS yang merupakan Lembaga yang menangani penataan, pemanfaatan dan pengendalian aktivitas sungai. Sungai ini belum dimanfaatkan secara maksimal. (contoh: sumber air baku permukaan, perikanan darat, pariwisata, dsb), saat ini hanya untuk pembuangan air limbah domestik sehingga memiliki tingkat pencemaran bakteri koli yang sangat tinggi, tingkat pencemaran rata2 dimusim kemarau ± 6000 JPT/100ml, jauh diatas ambang batas pencemaran ± 1000 JPT/ml. selain itu debit air sungai (air permukaan) juga semakin menurun seiring bertambahnya waktu dan jumlah penduduk. Jaringan Irigasi Sebagian jaringan irigasi mengalami kerusakan ringan. Sebagian jaringan irigasi juga bercampur dengan drainase kota akibat dari alihfungsi lahan untuk permukiman. Jaringan Geologi dan Hidrologi Jaringan ini memiliki suatu sebab musabab lahirnya sumber air tanah dangkal maupun dalam. Sumber air berasal dari kabupaten Magelang.	Penetapan Lahan Sawah yang masuk dalam LP2B dan penataan Kawasan permukiman yang ada disekitarnya sehingga tidak terjadi kasus Irigasi yang bercampur dengan drainase

No	Strategi Pengembangan	Implementasi		Kajian sederhana	Bentuk eksekusi
3.	Strategi pengembangan Struktur Ruang untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem Prasarana dan Sarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah sesuai dengan arahan penyediaan yang berdasarkan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan	a.	meningkatkan kualitas dan kuantitas, menata, dan/atau membangun sistem prasarana transportasi darat di Daerah untuk kelancaran distribusi barang/jasa dengan mengembangkan Terminal penumpang tipe A, Terminal penumpang tipe C, terminal barang, jaringan jalan kota, sarana angkutan umum, prasarana pejalan kaki, dan prasarana pendukung jaringan jalan;	Dalam rangka meningkatkan jangkauan layanan dalam rangka mengembangkan jangkauan layanan sistem sarana dan prasarana maka perlu dikembangkan : 1. Jaringan Jalan berupa Terminal A-C, angkutan barang, jaringan jalan dan moda transportasi umum, prasarana untuk pejalan kaki dan sarana pendukung transportasi . 2. Pengembangan Jaringan Utilitas Kota (Listrik, Telekomunikasi, Persampahana, Air Bersih, Air Limbah)	
		b.	mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun Prasarana dan Sarana telekomunikasi dan informatika secara proporsional, efektif, dan efisien yang meliputi jaringan tetap dan jaringan bergerak;		

No	Strategi Pengembangan	Implementasi	Kajian sederhana	Bentuk eksekusi
		c. mengembangkan, menata, dan mewujudkan keterpaduan sistem prasarana jaringan energi yang meliputi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, dan energi terbarukan;		
		d. mengembangkan, menata, dan mengintegrasikan sistem prasarana dan jaringan pengairan Irigasi Daerah agar terpadu dengan Daerah Irigasi regional untuk menunjang kegiatan sektor pertanian pangan berkelanjutan;		
		e. menata, memantau, melindungi, dan mengkonservasi Air Tanah dan Air Permukaan sebagai sumber daya air Daerah dengan prinsip berkelanjutan		Identifikasi Catchment area untuk program kegiatan konservasi air tanah melalui penanaman pohon, biopori, dsb.

No	Strategi Pengembangan	Implementasi		Kajian sederhana	Bentuk eksekusi
		f.	mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun kualitas sistem jaringan Air Baku untuk air bersih Daerah dengan pemanfaatan Air Permukaan dan pemanfaatan Air Tanah		Identifikasi permasalahanan pada sistem jaringan distribusi dan solusi untuk menjaga kuantitas air
		g.	mengembangkan, menata, meningkatkan kualitas sistem pengelolaan Sampah Daerah dengan metode penggunaan kembali Sampah, reduksi Sampah, dan daur ulang Sampah, serta membangun dan mewujudkan keterpaduan sistem pengelolaan persampahan Daerah dengan wilayah Kabupaten Magelang		Pemuthakiran sistem jaringan persampahan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan sampah

No	Strategi Pengembangan	Implementasi		Kajian sederhana	Bentuk eksekusi
		h.	mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun secara bertahap jaringan dan sarana pengolahan Air Limbah sehingga terpisah dengan jaringan drainase untuk kesehatan dan keberlanjutan lingkungan Daerah		Peningkatan pengelolaan Air Limbah Domestik melalui sarana pengolahan limbah Rumah Tangga secara terpadu sehingga mereduksi resiko pencemaran lingkungan oleh bakteri koli
		i.	mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun jaringan drainase secara bertahap dan berhierarki sehingga tercapai keterpaduan sistem drainase untuk menghindari genangan air dan/atau banjir akibat hujan di wilayah Daerah		Identifikasi titik - titik permasalahan pada jaringan drainase untuk program pembangunan jaringan drainase terintegrasi, perawatan jaringan drainase colonial, dsb.

No	Strategi Pengembangan	Implementasi		Kajian sederhana	Bentuk eksekusi
		j.	mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun Prasarana dan Sarana dasar lingkungan Perumahan dan kawasan Permukiman untuk mewujudkan keterpaduan dengan sistem penyediaan jaringan pelayanan air bersih, persampahan, Air Limbah, dan drainase tingkat kota agar lebih berkualitas		
		k	mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun infrastruktur perkotaan secara bertahap meliputi jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda		Identifikasi potensi wilayah, keamanan dan kenyamanan untuk Pembangun jalur sepeda dan pedestrian ways
		l	meningkatkan kualitas dan menata prasarana infrastruktur perkotaan berupa reklame secara bertahap		Penentuan titik/ lokasi dan desain papan reklame
		m	meningkatkan kualitas dan menyediakan Prasarana dan Sarana jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana		Identifikasi lokasi yang tepat untuk jalur evakuasi dan lokasi/bangunan untuk evakuasi Bencana

No	Strategi Pengembangan	Implementasi		Kajian sederhana	Bentuk eksekusi
4.	Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung	a.	pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup		
		b.	pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.		
5.	Strategi pengembangan Kawasan Lindung untuk pemeliharaan dan peningkatan kelestarian fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	a.	menetapkan Kawasan Lindung di ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi yang meliputi kawasan perlindungan setempat, RTH Kota, Kawasan Lindung geologi dan kawasan Cagar Budaya;	Kawasan Lindung yang ditetapkan berdasarkan berupa ; 1. Kawasan perlindungan setempat 2. Kawasan RTH 3. Kawasan Lindung Geologi 4. Kawasan Cagar Budaya	
		b.	mewujudkan RTH Kota untuk mencapai luasan 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Daerah	Kawasan perlindungan setempat di Kota Magelang meliputi Gunung Tidar, Mata Air Tuk Pecah, dll. Kesemua itu memberikan dukungan yang baik terhadap jasa Lingkungan	Identifikasi potensi RTH
		c.	mengembangkan, menata dan mengembalikan fungsi kawasan perlindungan setempat dalam rangka perlindungan kawasan dan pemeliharaan ekosistem kawasan	Kawasan RTH Kawasan ini ditargetkan 30% sesuai dengan Amanat Undang - Undang Penataan Ruang, dimana 20% adalah RTH Publik dan 10% adalah	

No	Strategi Pengembangan	Implementasi		Kajian sederhana	Bentuk eksekusi
		d.	pengaturan dan penataan fungsi Kawasan Lindung geologi dalam rangka perlindungan fungsi kawasan	RTH Privat. Saat ini pencapaian RTH adalah 19%, oleh karena itu untuk mencapai 30% diperlukan suatu strategi tertentu. Manfaat dari pelestarian RTH ini selain untuk mendukung jasa ingkungan berupa udara yang bersih sehat yang mendukung pada pencapaian derajat Kesehatan yang lebih baik, juga untuk memperindah wajah kota.	
		e.	mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah	Kawasan Geologi Kawasan Cagar Alam Geologi Kota Magelang saat ini belum	konservasi dan revitalisasi Kawasan Gunung Tidar,

No	Strategi Pengembangan	Implementasi	Kajian sederhana	Bentuk eksekusi
		f. mengembangkan, menata, mempertahankan, dan/atau meningkatkan kualitas kawasan Cagar Budaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Pariwisata Daerah	teridentifikasi dengan baik, oleh karena itu perlu kiranya identifikasi dan observasi lebih lanjut untuk ditetapkan. Saat ini memang telah ada beberapa Goa yang berlokasi di Kawasan Hutan Lindung Gunung Tidar yang sebentar lagi akan berubah status menjadi Kebun Raya untuk melindungi keberadaan supaya tetap eksis sepanjang waktu sebagai Hutan Lindung. Karena Ketika suatu Kawasan telah ditetapkan sebagai Kebun Raya maka selamanya akan tetap menjadi kehunraya. Kawasan Cagar Budaya Kawasan ini di dominasi oleh Bangunan dengan status kepemilikan pribadi. Sementara saat ini belum ada Penetapan Bangunan Cagar Budaya di Kota Magelang sehingga eksistensi Bangunan ini tergantung pada pihak lain. Pemerintah Kota tidak bisa mengintervensi.	Revitalisasi, pengembangan dan menghidupkan aktivitas Kawasan Cagar Budaya yang telah ada saat ini (Lapangan Kwarasan, Prasasti Gelangan,

No	Strategi Pengembangan	Implementasi		Kajian sederhana	Bentuk eksekusi
6.	Strategi pengembangan Kawasan Lindung untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup	a.	menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup	Perlunya aturan/ regulasi terkait dengan pola perlindungan Kawasan lindung dalam rangka menjada keseimbangan ekosistem. Hal ini dilakukan melalui : 1. Regulasi terkait dengan pola pengelolaan lingkungan budidaya (saat ini baru ada beberapa perda terkait in, seperti perda bangunan Gedung, penetapan Kawasan rawan bencana) secara terintegratif yang mencakup aktivitas yang cukup luas seperti : 1. Regulasi terkait pembuangan air limbah rumah tangga dan limbah B3 2. Pembatasan Kegiatan pada kaw rawan bencana 3. Resulasi terkait pemanfaatan air tanah 4. Regulasi terkait penyediaan RTH Privat. 5. Regulasi terkait pengelolaan air hujan, dsb.	Mengupayakan prinsip - prinsip sustainable development pada setiap tahapan pembangunan
		b.	melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya		Manajemen resiko pencemaran lingkungan di air, tanah dan udara oleh aktivitas manusia
		c.	melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang dibuang ke dalamnya		
		d.	mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan		Pembuatan regulasi yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi mengikat

No	Strategi Pengembangan	Implementasi		Kajian sederhana	Bentuk eksekusi
		e.	mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan		
		f.	mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di Kawasan yang memiliki risiko bencana		
7.	Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya	a.	perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya		
		b.	pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui Daya Dukung Lingkungan Hidup		

No	Strategi Pengembangan	Implementasi		Kajian sederhana	Bentuk eksekusi
8.	Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya	a.	menetapkan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis kota untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan Pemanfaatan Ruang wilayah	Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh nilai tambah dari suatu aktivitas budidaya sehingga terbentuk aglomerasi yang saling menguntungkan dari suatu Kawasan yang secara tidak langsung akan menjaga kelangsungan hidup Masyarakat yang ada disekitarnya. Sebagai contoh adalah : Pengembangan urban farming ini kelak diharapkan dapat meningkatkan dukungan terhadap pembentukan urban fishing, 2 pola ini diharapkan kelak akan memiliki multiplayer efek berupa pembentukan kelompok THP (teknologi hasil pertanian, perikanan dan peternakan) dan pariwisata Kota, untuk kemudian melahirkan usaha penjualan baru baik setempat maupun keluar Daerah karena Kota memiliki potensi sebagai pasar untuk berdagang dan penyedia jasa hospitality berupa restaurant.	
		b.	mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya		
		c.	mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, dan ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi		

No	Strategi Pengembangan	Implementasi		Kajian sederhana	Bentuk eksekusi
		d.	mengembangkan dan melestarikan Kawasan Budi Daya Pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan Daerah dan/atau Provinsi, serta nasional		Penetapan LP2B/ sawah lestari
		e.	mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya Lahan untuk meningkatkan kualitas kawasan Permukiman, Kawasan Peruntukan Industri, kawasan Pariwisata, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, kawasan Pertanian, kawasan perikanan, dan kawasan hutan rakyat		
9.	Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui Daya Dukung	a.	mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budi daya sesuai Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Pentingnya pembentukan regulasi yang mengatur dan mengendalikan kegiatan budidaya : 1. Penetapan Kawasan rawan bencana	

No	Strategi Pengembangan	Implementasi		Kajian sederhana	Bentuk eksekusi
	Lingkungan Hidup	b.	mengembangkan secara selektif bangunan fisik di Kawasan yang memiliki risiko bencana berdasarkan kajian teknis untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana	2. Zonasi Kawasan berdasarkan KDB dan KLB yang sesuai 3. Pencermatan peruntukan lahan dan aktivitas yang diijinkan didalamnya sehingga tidak saling me - negasikan satu sama lain (pencermatan Zonifikasi Kawasan) 4. Penetapan LP2B	Pengurangan aktivitas dan pembangunan pada Kawasan rawab bencana (longsor, banjir) yang umumnya ada pada kontur yang curam dan di daerah sempadan sungai.
		c.	mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana		
		d.	penataan perkembangan kawasan terbangun di Kawasan Perkotaan dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang secara vertikal dan tidak sporadis		Identifikasi zona Kawasan sesuai KDB/KLB. KDB/ KLB ini diatur melalui konsep dasar keruangan tertentu (filosofis, ekonomis, fisika bangunan, dll)
		e.	mempertahankan Lahan pangan pertanian berkelanjutan		Penetapan LP2B

No	Strategi Pengembangan	Implementasi		Kajian sederhana	Bentuk eksekusi
		f.	mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat mempertahankan keberadaan kawasan dari dampak negatif yang mungkin timbul termasuk bencana		
10.	Kebijakan penetapan Kawasan Strategis Daerah	a.	pelestarian dan peningkatan fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya Daerah		
		b.	pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian Daerah yang produktif, efisien, dan mampu berdaya saing		

No	Strategi Pengembangan	Implementasi		Kajian sederhana	Bentuk eksekusi
		c.	pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya		
11.	Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya Daerah	a.	menetapkan kawasan strategis lingkungan hidup yang berpengaruh pada fungsi lindung	Strategi ini lebih pada aspek pengendalian lingkungan. Dimana pentingnya perlindungan terhadap Kawasan lindung yang memberikan manfaat dan keberlanjutan sumberdaya lingkungan melalui pembatasan aktivitas budidaya sekalipun aktivitas ini memberi dampak ekonomi yang baik. Kenapa? Karena uang yang dihasilkan tidak akan mampu membayar dampak lingkungan yang dihasilkan. Contohnya adalah perlindungan Kawasan sekitar mata air dari aktivitas budidaya yang memiliki dampak pencemaran yang tinggi misal perumahan, fasum/fasos, industry, dll	Penetapan Kawasan Lindung yang ada saat ini untuk pengembangan lebih lanjut (Kaw. Gunung Tidar)
		b.	mencegah dan membatasi Pemanfaatan Ruang di Kawasan Strategis Daerah yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan		
		c.	membatasi pengembangan Prasarana dan Sarana di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Daerah yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan		
		d.	mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Daerah yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan Lindung dengan Kawasan Budi Daya terbangun		

No	Strategi Pengembangan	Implementasi		Kajian sederhana	Bentuk eksekusi
		e	merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak Pemanfaatan Ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Daerah		
12.	Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Daerah yang produktif, efisien, dan mampu berdaya saing	a.	menetapkan Kawasan Strategis Daerah dengan fungsi pertumbuhan ekonomi	Dukungan terhadap iklim investasi yang baik sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan PAD yang kelak juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kota Magelang. Akan tetapi kegiatan ini tetap harus terkendali dan berada dalam koridor pelestarian lingkungan hidup dalam rangka menyesuaikan daya tampung lingkungan dan mempertahankan daya dukung lingkungan. Sebagai contoh adalah sebagai berikut : Kondisi ruang yang kondusif akan menciptakan iklim investasi yang baik, hal ini berimplikasi pada meningkatnya Kawasan terbangun untuk bangunan komersial ataupun permukiman.	Penetapan Kawasan yang memiliki potensi perdagangan dan Jasa
		b.	mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Daerah untuk pengembangan ekonomi		
		c.	mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya manusia dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan perekonomian Daerah		
		d.	menciptakan iklim investasi yang kondusif		

No	Strategi Pengembangan	Implementasi		Kajian sederhana	Bentuk eksekusi
		e.	mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan	Peningkatan Kawasan terbangun berimplikasi pada penurunan RTNH maupun RTH, penurunan RTH dan RNTH berimplikasi pada penurunan luas lahan untuk penyerapan air, penurunan air tanah untuk aktivitas, penambahan volume sampah dan limbah domestic. Oleh karena itu perlunya aturan yang mengatur mengenai luasan RTH privat yang disediakan bangunan privat dan sarana pengelolaan air hujan sehingga air hujan ini terserap kedalam tanah dan mendukung ketersediaan air tanah, pentingnya mengelola air limbah melalui standar septick aman dan penyediaan sarana pengumpulan sampah yang tepat.	
		f.	mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan		
		g.	mengintensifkan promosi peluang investasi		
		h.	meningkatkan pelayanan Prasarana dan Sarana penunjang kegiatan ekonomi		
13.	Strategi mengembangkan kawasan strategis untuk melestarikan dan meningkatkan sosial dan	a.	menetapkan Kawasan Strategis Daerah dengan fungsi pelestarian warisan budaya	Budaya yang memiliki arti culture, lebih luas daripada custome. Culture itu berarti menyangkut nilai sejarah, adat istiadat, Bahasa,	

No	Strategi Pengembangan	Implementasi		Kajian sederhana	Bentuk eksekusi
	budaya Daerah	b.	mengoordinasikan penataan dan ikut memelihara kawasan strategis dengan fungsi pelestarian warisan budaya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berupa kawasan konservasi warisan budaya	pandangan hidup, dsb. Sedangkan custome hanya sebatas kesenian dan hal - hal yang tampak oleh mata. Maksud dari Strategi mengembangkan Kawasan Strategis untuk melestarikan dan meningkatkan sosial dan budaya daerah adalah lebih pada pelestarian Kawasan dan budaya yang tampak secara fisik sebagai peninggalan budaya masa lampau untuk kemudian dilestarikan dan memberikan dukungan terhadap nilai ekonomi melalui produk pariwisata, peningkatan image Kota Magelang sebagai Kota Kolonial dengan layanan perdagangan dan jasa yang handal, dsb sehingga meningkatkan daya Tarik Kota terhadap masyarakat untuk datang ke Kota Magelang yang secara tidak langsung memberikan dampak secara ekonomi.	
		c.	mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif dan melalui kajian teknis zonasi di dalam dan di sekitar kawasan strategis sosial dan budaya		
		d.	melestarikan keaslian fisik serta bentuk bangunan yang ada di kawasan strategis sosial dan budaya		
		e.	meningkatkan kecintaan Masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur		

No	Strategi Pengembangan	Implementasi		Kajian sederhana	Bentuk eksekusi
		f.	mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan bermasyarakat		

4.2.5. Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang 2005-2025

Penelaahan tetrhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 dilakukan untuk mengevaluasi capaian pembangunan dan antisipasi yang harus dilakukan dalam perencanaan pembangunan periode ini. Kondisi ini perlu diperhatikan karena RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan periode akhir (tahap IV) dalam RPJPD Kota Magelang 2005-2025. Telaahan dilakukan terhadap prioritas dan kebijakan periode tahun tersebut. Hasil dari telaahan RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Hasil Telaahan RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025
Periode Perencanaan 2021-2025

No	Prioritas RPJPD Periode Perencanaaan n 2021-2025	Isu Strategis RPJPD Periode Perencanaan 2021-2025	Kebijakan Terkait	Implikasi
1	Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang	Pembangunan di seluruh bidang	Pemantapan pembangunan pada seluruh aspek sesuai kewenangan pemerintah kota.	- Meningkatkan kualitas dan layanan sarana prasarana perkotaan - Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan - Memperkuat aksesibilitas baik dalam kota, maupun antara Kota Magelang dengan wilayah sekitarnya

No	Prioritas RPJPD Periode Perencanaaan 2021- 2025	Isu Strategis RPJPD Periode Perencanaan 2021-2025	Kebijakan Terkait	Implikasi
2	Mewujudkan tercapainya perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi, berlandaskan budaya yang unggul, sumber daya manusia yang berkualitas dan mandiri	Daya saing ekonomi	Peningkatan daya saing ekonomi dengan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki.	- Meningkatkan kontribusi sektor jasa dalam perekonomian daerah - Memperkuat peran UMKM - Meningkatkan nilai investasi riil ke dalam Kota Magelang

No	Prioritas RPJPD Periode Perencanaan 2021- 2025	Isu Strategis RPJPD Periode Perencanaan 2021-2025	Kebijakan Terkait	Implikasi
		Masyarakat berbudaya	Pemajuan kebudayaan masyarakat yang tidak hanya diartikan secara sempit pada pemajuan seni budaya tetapi mencakup nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang erat kaitannya dengan moral dan etika.	- Meningkatkan rasa toleransi dan gotong royong dalam masyarakat - Memperkuat peran seni budaya sebagai identitas daerah - Mewujudkan stabilitas dan kondusifitas daerah - Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat
		Sumber daya manusia berkualitas	Peningkatan kualitas sumber daya manusia.	- Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan - Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan

No	Prioritas RPJPD Periode Perencanaaan 2021-2025	Isu Strategis RPJPD Periode Perencanaan 2021-2025	Kebijakan Terkait	Implikasi
3	Mewujudkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat madani	Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi	Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraa n pemerintahan.	- Mengintegrasika n sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi - Meningkatkan inovasi daerah - Mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan penyelenggaraa n pemerintahan, manajemen SD aparatur, serta pelayanan publik
		Masyarakat madani	Peningkatan upaya mewujudkan masyarakat kota yang beradab.	- Meningkatkan rasa toleransi dan gotong royong dalam masyarakat - Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat

4.2.6. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026

Dokumen KLHS RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen analisis terkait kondisi lingkungan dan juga integrasi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Isu strategis dalam dokumen ini diperoleh dari analisis dari capaian indikator TPB yang belum mencapai target. Isu-isu strategis tersebut disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.7

Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

NO. TPB	INDIKATOR	PERTIMBANGAN DOKUMEN LAIN			HASIL FGD UJI PUBLIK	PENGELOMPOKAN ISU STRATEGIS PB
		RPJMD 2016-2021	RTRW	IKPLHD/ RPPLH		
Tujuan 1: Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan di manapun						
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Pengurangan kemiskinan			Peningkatan koordinasi para pihak dan transparansi dalam penanganan kemiskinan	Kemiskinan
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan					Kualitas SDM
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan					Kualitas SDM
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Pengurangan kemiskinan			Transparansi data penanggulangan kemiskinan	Kemiskinan
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Pengurangan kemiskinan			Transparansi data penanggulangan kemiskinan	Kemiskinan

NO. TPB	INDIKATOR	PERTIMBANGAN DOKUMEN LAIN			HASIL FGD	PENGELOMPOKAN
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	“Key Performance Indicators” akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, akses sanitasi layak 100%			- Kualitas air sungai sebagai sumber air baku - Pemberdayaan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat	Kualitas Permukiman dan Sarana Prasarana Perkotaan
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin					Kualitas sumber daya manusia
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	“Key Performance Indicators” akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, akses sanitasi layak 100%			- Kualitas air sungai sebagai sumber air baku - Pemberdayaan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat	Kualitas Permukiman dan Sarana Prasarana Perkotaan

NO. TPB	INDIKATOR	PERTIMBANGAN DOKUMEN LAIN			HASIL FGD	PENGELOMPOKAN
1.4.1.(e)	Masih terbatasnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.			Permukiman	Peningkatan layanan IPAL 100% untuk masyarakat	Kualitas Permukiman dan Sarana Prasarana Perkotaan
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan			Permukiman	Kota Magelang menjadi kota layak huni	Kualitas Permukiman dan Sarana Prasarana Perkotaan
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang					Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah					Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi					Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana					Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah					Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

NO. TPB	INDIKATOR	PERTIMBANGAN DOKUMEN LAIN			HASIL FGD	PENGELOMPOKAN
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Pengurangan kemiskinan			Peningkatan koordinasi para pihak dan transparansi dalam penanganan kemiskinan	kemiskinan
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	• Pengurangan kemiskinan • Pendidikan				Kualitas SDM
Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan						
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Ketahanan pangan			Kedaulatan dan kemandirian pangan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi	Kualitas SDM
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Ketahanan pangan			Kedaulatan dan kemandirian pangan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi	Kualitas SDM

[illegible]

NO. TPB	INDIKATOR	PERTIMBANGAN DOKUMEN LAIN			HASIL FGD	PENGELOMPOKAN
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)					Kualitas SDM
3.2.1*	Angka kematian balita					Kualitas SDM
3.4.1.(a)	persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun					Kualitas SDM
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.					Kualitas SDM
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi					Kualitas SDM
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.					Kualitas SDM
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern					Kualitas SDM
3.8.1.(a)	Unmeet need pelayanan kesehatan.					Kualitas SDM
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.					Kualitas SDM
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).					Kualitas SDM

NO. TPB	INDIKATOR	PERTIMBANGAN DOKUMEN LAIN			HASIL FGD	PENGELOMPOKAN
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun					Kualitas SDM
3.b.1(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas					Kualitas SDM
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.					Kualitas SDM
Tujuan 4: Menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua						
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Pendidikan				Kualitas SDM
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					Kualitas SDM
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Pendidikan				Kualitas SDM
Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan						

NO. TPB	INDIKATOR	PERTIMBANGAN DOKUMEN LAIN			HASIL FGD	PENGELOMPOKAN
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.					Reformasi birokrasi
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan					Kualitas SDM
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir					Kualitas SDM
5.5.2*	Rendahnya proporsi perempuan yang berada di posisi managerial					Kualitas SDM
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam					Daya saing daerah
Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk semua						
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	"Key Performance Indicators" akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, akses sanitasi layak 100%		Permukiman	Kota Magelang menjadi Kota Layak Huni	Kualitas permukiman dan sarana prasarana perkotaan

NO. TPB	INDIKATOR	PERTIMBANGAN DOKUMEN LAIN			HASIL FGD	PENGELOMPOKAN
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri					Kualitas permukiman dan sarana prasarana perkotaan
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.			Permukiman	Kota Magelang menjadi Kota Layak Huni	Kualitas permukiman dan sarana prasarana perkotaan
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air belum meningkat	“Key Performance Indicators” akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, akses sanitasi layak 100%		Permukiman	Kota Magelang menjadi Kota Layak Huni	Kualitas permukiman dan sarana prasarana perkotaan
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	“Key Performance Indicators” akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, akses sanitasi layak 100%		Permukiman	Kota Magelang menjadi Kota Layak Huni	Kualitas permukiman dan sarana prasarana perkotaan
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).					Kualitas permukiman dan sarana prasarana perkotaan
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).					Kualitas permukiman dan sarana prasarana perkotaan

[illegible]

NO. TPB	INDIKATOR	PERTIMBANGAN DOKUMEN LAIN			HASIL FGD	PENGELOMPOKAN
7.1.1*	Rasio elektrifikasi					Kualitas lingkungan permukiman dan sarana perkotaan
Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yg inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yg produktif & menyeluruh, serta pekerjaan yg layak untuk semua						
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Industri perdagangan Pengurangan pengangguran				Daya saing daerah
8.1.1.(a)	PDB per kapita	• Industri perdagangan • Pengurangan pengangguran				Daya saing daerah
8.2.1*	Belum tersedia data laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	• Industri perdagangan • Pengurangan pengangguran			Kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi	Daya saing daerah
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	Pengurangan pengangguran				Daya saing daerah
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Pengurangan pengangguran				Daya saing daerah
8.6.1*	Jumlah usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Pengurangan pengangguran				Kualitas SDM
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Pariwisata				Daya saing daerah

NO. TPB	INDIKATOR	PERTIMBANGAN DOKUMEN LAIN			HASIL FGD	PENGELOMPOKAN
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Pariwisata				Daya saing daerah
Tujuan 9: Membangun infrastruktur yg tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi						
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Industri perdagangan			Pengoptimalan potensi daerah untuk peningkatan pendapatan daerah	Daya saing daerah
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Penyediaan sarana komunikasi dan informatika untuk masyarakat dengan meningkatkan perhatian kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan mengelola informasi publik dengan baik			Kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi	Kualitas permukiman dan sarana prasarana perkotaan
Tujuan 10: Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara						
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Penurunan kemiskinan			Peningkatan transparansi dalam penanggulangan kemiskinan	Kemiskinan
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Kemiskinan			Peningkatan transparansi dalam penanggulangan kemiskinan	Kemiskinan

NO. TPB	INDIKATOR	PERTIMBANGAN DOKUMEN LAIN			HASIL FGD	PENGELOMPOKAN
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.					Reformasi birokrasi
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan					Kualitas SDM
Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan						
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	“Key Performance Indicators” akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, akses sanitasi layak 100%		Permukiman	Kota Magelang menjadi Kota Layak Huni	Kualitas permukiman dan sarana prasarana perkotaan
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Sarana prasarana transportasi kelengkapan jalan (ACTS, PJU, dan lain-lain) belum memadai serta belum tersedianya terminal ipe C di Kota Magelang			Kota Magelang menjadi Kota Layak Huni	Kualitas permukiman dan sarana prasarana perkotaan
11.3.2.(b)	Belum adanya lembaga pembiayaan infrastruktur					Kualitas permukiman dan sarana prasarana perkotaan

NO. TPB	INDIKATOR	PERTIMBANGAN DOKUMEN LAIN			HASIL FGD	PENGELOMPOKAN
11.5.1*	Meningkatnya jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.					Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).					Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
11.5.1.(b)	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana					Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan					Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana					Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani					Kualitas lingkungan hidup
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.					Kualitas lingkungan hidup
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.					Kualitas lingkungan hidup

[illegible]

NO. TPB	INDIKATOR	PERTIMBANGAN DOKUMEN LAIN			HASIL FGD	PENGELOMPOKAN
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.					Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang					Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh						
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir					Daya saing daerah
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.					Daya saing daerah
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir				kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi	Daya saing daerah
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresinya psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir					Kualitas SDM
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan					Kualitas SDM

NO. TPB	INDIKATOR	PERTIMBANGAN DOKUMEN LAIN			HASIL FGD	PENGELOMPOKAN
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.					Reformasi birokrasi
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.				Koordinasi antar instansi	Reformasi birokrasi
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)				kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi	Reformasi birokrasi
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui					Reformasi birokrasi
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan					Reformasi birokrasi
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)					Reformasi birokrasi
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan					Reformasi birokrasi

NO. TPB	INDIKATOR	PERTIMBANGAN DOKUMEN LAIN			HASIL FGD	PENGELOMPOKAN
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Implementasi e-Government kurang optimal karena kurangnya kesiapan dari pemerintah baik dari SDM maupun sarana prasarana				Reformasi birokrasi
Tujuan 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan						
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya				Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah	Daya saing daerah
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.				Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah	Daya saing daerah
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.				Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah	Daya saing daerah

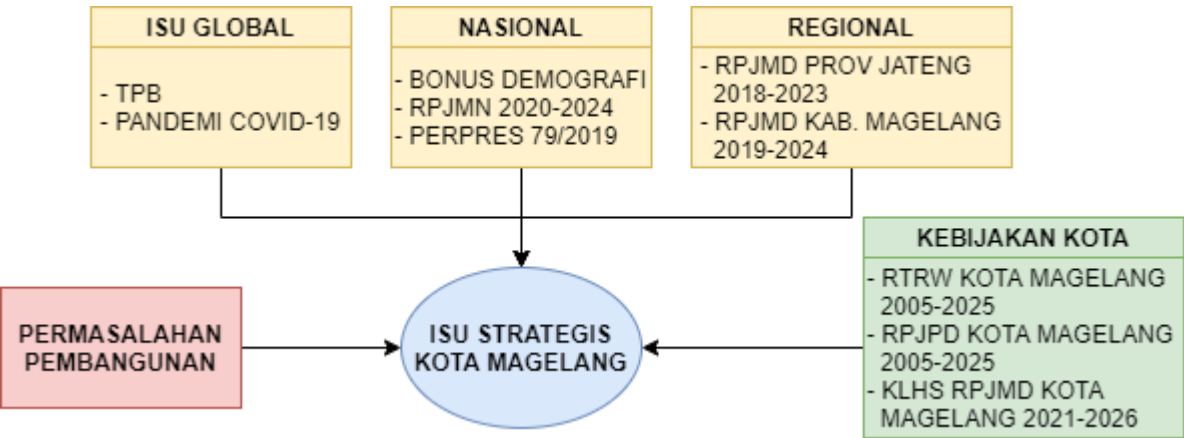
NO. TPB	INDIKATOR	PERTIMBANGAN DOKUMEN LAIN			HASIL FGD	PENGELOMPOKAN
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Pemerataan infrastruktur (Penyediaan sarana komunikasi dan informatika untuk masyarakat)			Kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi	Kualitas permukiman dan sarana prasarana perkotaan
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet					Kualitas permukiman dan sarana prasarana perkotaan
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Industri perdagangan			Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah	Daya saing daerah
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).					Kualitas permukiman dan sarana prasarana perkotaan
17.17.1.(b)	Alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).					Kualitas permukiman dan sarana prasarana perkotaan

4.3. Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Kondisi yang belum menjadi maslaha saat ini tetapai berpotensi akan menjadi masalah daerah dalam kurun waktu mendatang dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola. Potensi ini jika dapat dikelola dengan depat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis Kota Magelang diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya:

- a. Permasalahan pembangunan Kota Magelang;
- b. Isu strategis global, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kota Magelang;
- c. Kebijakan pembangunan daerah sekitar, khususnya Kabupaten Magelang, yang melingkupi wilayah kota;
- d. Isu strategis dan kebijakan pembangunan Kota Magelang yang terdiri dari RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031; dan
- e. KLHS RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026.



Gambar 4.2
Penentuan Isu Strategis Kota Magelang

Isu-isu strategis Kota Magelang hasil dari identifikasi permasalahan pembangunan dan penelaahan isu-isu strategis regional sampai dengan global disajikan pada sub bab berikut.

4.3.2. Kemiskinan

Sebagai suatu keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, dan Hidup Layak, yang meliputi sandang, pangan, dan papan, maka Kemiskinan

merupakan permasalahan global yang tidak mudah untuk ditiadakan. Dampak dari berbagai upaya yang dilakukan hanyalah dengan harapan untuk dapat menurunkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Data series penurunan penduduk miskin di Kota Magelang menunjukkan trend sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.8
Angka Kemiskinan Kota Magelang Tahun 2016-2020

Tahun	Angka Kemiskinan
2016	8,79
2017	8,75
2018	7,87
2019	7,46
2020	7,58

Tahun 2020 yang merupakan tahun terjadinya bencana non alam pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai bidang, namun tidak signifikan pengaruhnya terhadap persentase penduduk miskin yang sedikit terdapat kenaikan sebesar 0,12 %., Apabila dibandingkan dengan tahun 2016, penurunan persentase jumlah penduduk miskin sampai dengan tahun 2020 turun sebesar 1,21 persen, sehingga masih berada di atas target 2020 yang berada di rentang angka 6,42 - 6,61. Hal ini dapat diartikan bahwa situasi pandemi COVID-19 sangat berpengaruh pada upaya penurunan angka kemiskinan di Kota Magelang.

Memperhatikan situasi tersebut, diperlukan upaya keras untuk dapat mencapai target *zero poverty* (nol persen kemiskinan) SDG's di tahun 2031. Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan pemerintah bersama mitra dengan fokus pada pemulihan ekonomi khususnya bagi masyarakat yang terdampak covid-19, perluasan/ peningkatan perlindungan sosial (khususnya untuk lanjut usia tidak potensial), optimalisasi pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta peningkatan peran Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (**TJSLP**) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data Keluarga Miskin juga harus selalu update melalui verifikasi validasi sehingga tercermin gambaran yang lebih mendekati kebenaran terhadap kondisi kemiskinan di Kota Magelang

4.3.3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Pada kurun waktu tahun 2016-2020 pertumbuhan IPM (sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan SDM) Kota Magelang mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan, angkanya di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Upaya peningkatan kualitas SDM diarahkan pada prioritas perbaikan kualitas (daya saing) tenaga kerja, untuk mengurangi pengangguran, perbaikan kualitas kesehatan masyarakat untuk meningkatkan usia harapan hidup, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan perlindungan keluarga. Kondisi unsur pembentuk yang menggambarkan kualitas SDM adalah :

- a. Kenaikan angka TPT yang sangat signifikan sebagai dampak pandemi COVID-19 yang diharapkan mengalami penurunan dari 4,43 di tahun 2019, tetapi mengalami kenaikan menjadi 8,59. Tantangan menjadi semakin berat karena upaya yang dilakukan harus semakin keras agar TPT kembali menurun
- b. Belum terpenuhinya target tenaga kerja tersertifikasi
- c. Pertumbuhan rata2 lama sekolah dan usia harapan hidup dibawah 1%
- d. Kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masih perlu ditingkatkan
- e. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan
- f. Peningkatan promosi kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat untuk pencegahan penyakit
- g. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan, bayi dan balita
- h. Peningkatan perlindungan keluarga untuk meminimalkan KDRT

4.3.4. Sarana prasarana perkotaan yang berkelanjutan

Isu pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sarana prasarana perkotaan berkembang sebagai respon terhadap amanat tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan 11, yaitu untuk menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Lebih rinci pada target 1 disebutkan bahwa pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan. Hingga tahun 2020, kawasan kumuh Kota Magelang masih tersisa 39,91 Ha atau 2,15% dari luas kota, dengan spektrum meliputi akses air minum (capaian 96,05%) dan sanitasi layak (capaian 97,18%) rumah tidak layak huni masih ada sebesar 2.852 unit.

Selain perumahan dan pelayanan dasar, isu lain terkait sarana prasarana perkotaan sesuai amanat SDGs adalah kebutuhan penyediaan sistem transportasi (publik) dan jalan yang berkelanjutan dan inklusif. Tantangan pada sektor transportasi adalah untuk meningkatkan penggunaan moda transportasi umum, melihat terjadinya penurunan *load factor* angkutan umum di Kota Magelang pada periode tahun 2016-2019, bahkan di tahun 2020 karena dampak pandemi COVID-19, yang berakur pada rendahnya kualitas dan pelayanan angkutan sehingga masyarakat bergeser pada penggunaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Sebagai kota yang memiliki visi sebagai kota modern dan cerdas, tantangan penyediaan jalan bukan pada kuantitas namun kualitas layanan, yaitu bagaimana menjadikan jalan di Kota Magelang inklusif, mudah diakses oleh semua komponen masyarakat, termasuk mereka yang berada di situasi rentan, perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas dan manula. Hingga tahun 2020 hanya sekitar 50% jalan di Kota Magelang yang memenuhi standar aksesibilitas.

4.3.5. Kualitas lingkungan hidup

Upaya mewujudkan kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan tidak terlepas dari upaya peningkatan kualitas lingkungan. Salah satu target SDGs menyatakan bahwa tahun 2020 kota dan pemukiman wajib mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan dan rencana yang terintegrasi menuju inklusif, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, tahan terhadap bencana, dan mengembangkan dan mengimplementasikan, sejalan dengan *The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*, dan manajemen resiko bencana yang holistic pada semua level.

Kondisi kualitas lingkungan di Indonesia diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada tahun 2020 IKLH Kota Magelang masih di bawah target nasional, dengan kecenderungan penurunan Indeks Tutupan Vegetasi dan Indeks Kualitas Air sehingga upaya pengurangan pencemaran air dan penambahan tutupan vegetasi harus menjadi prioritas.

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Magelang tidak dapat dilepaskan dari permasalahan sampah. Dari tahun 2016 - 2020 volume sampah yang dibuang ke TPSA semakin meningkat, mengindikasikan bahwa upaya pengurangan timbulan sampah dari sumbernya belum berhasil, sementara kapasitas TPA sudah mendekati penuh. Skenario pengurangan sampah melalui kampung organik dan

pembangunan TPST 3R yg digagas beberapa waktu sebelumnya perlu dioptimalisasi.

4.3.6. Ketahanan Daerah (Ketahanan terhadap Pangan dan bencana)

Ketahanan pangan menjadi salah satu isu yang mencuat saat terjadi pandemi covid 19, yaitu terkait kondisi ketersediaan pangan dan distribusinya sekarang dan di masa depan. Dari sisi produksi, hasil pertanian Kota Magelang belum mencukupi kebutuhan pangan masyarakat lokal sehingga bergantung pada produksi komoditas dari daerah lain. Oleh karenanya perlu mulai dilakukan upaya antisipasi kemungkinan terburuk terjadinya gangguan distribusi pangan akibat kejadian bencana atau hal lainnya, melalui pengembangan pertanian perkotaan dan pemantapan jaringan distribusi pangan.

Pemerintah harus memikirkan penyediaan cadangan pangan untuk penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat serta menjaga stabilisasi harga pangan di daerah. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam memanfaatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di Bulog, untuk penanganan tanggap darurat, namun dalam proses pengeluarannya diperlukan persetujuan pemerintah pusat yang disertai dengan penetapan status tanggap darurat, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dapat menjadi bantuan pangan tanggap darurat pertama sebelum turunnya bantuan beras dari CBP.

Terhadap kemungkinan terjadinya bencana, kualitas lingkungan yang kurang baik, dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana. Meskipun magelang termasuk daerah dengan resiko bencana (alam) rendah namun ancaman bencana non alam tetap harus diantisipasi, melalui upaya peningkatan ketahananbencanaan kota. Pandemi covid 19 menyadarkan bahwa kejadian bencana pada masa yang akan datang tidak mudah diprediksi sehingga kota harus sadar dan siaga bencana. Beberapa hal yang harus dibenahi antara lain kelembagaan, ketersediaan sarana prasarana, dan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap bencana. Adanya perangkat khusus yang bertugas menangani bencana sudah saatnya untuk berperan lebih aktif termasuk dari sisi pencegahan, terlebih upaya dengan konsep yang jelas yang harus dilakukan apabila bencana benar benar terjadi di Kota Magelang

4.3.7. Daya saing ekonomi

Daya saing merupakan kemampuan untuk dapat memiliki daya tarik sehingga akan memiliki nilai lebih tersendiri di dalam suatu

persaingan. Daya saing daerah menggambarkan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya. Terdapat 3 (tiga) komponen yang sangat berpengaruh adalah iklim yang kondusif, keunggulan komparatif, dan keunggulan kompetitif. Daya saing di bidang ekonomi tidak terlepas dari 3 komponen tersebut :

- a. Kondusifitas wilayah berpengaruh pada keberanian investor untuk berinvestasi dengan memperhatikan dinamika angka kriminalitas beserta faktor pendukung lain yang menjamin kenyamanan berinvestasi. Di Kota Magelang, terus dilakukan upaya untuk menekan angka kriminalitas, serta didukung dengan peningkatan kualitas iman taqwa, dan religiusitas masyarakat
- b. Keunggulan Komparatif lebih mengarah kepada bagaimana suatu daerah memanfaatkan keunggulan yang dimiliki di berbagai sektor untuk bersaing dengan daerah sekitar. Termasuk dalam hal ini keunggulan produk UMKM yang terus dilakukan pembinaan pada peningkatan kualitas produk dan kemasan, serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM sehingga menjadi lebih berani berinovasi terhadap produknya.
- c. Keunggulan kompetitif dengan indikator :
 - 1) makroekonomi yang meliputi pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja
 - 2) kualitas infrastruktur, yang dalam hal ini, infrastruktur Kota Magelang sudah terjaga untuk selalu dalam kondisi baik
 - 3) kesehatan dan pendidikan dasar, yang tercermin dengan nilai IPM yang meskipun semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun tetap diupayakan untuk peningkatan pelayanan dan kualitas pelayanannya dalam rangka peningkatan SDM yang berkualitas

4.3.8. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi Birokrasi terhadap 8 area perubahan bertujuan untuk terjadi perubahan yang sistematis dan konsisten agar pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja menjadi lebih baik.

Komitmen Pemerintah Kota Magelang terhadap reformasi birokrasi dengan meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan indikator keberhasilan Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Tahun 2019 Indeks RB Kota Magelang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dari 64,75 menjadi 66,33. Meskipun meningkat namun belum semua area perubahan reformasi birokrasi menunjukkan hasil yang optimal, diantaranya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan pengawasan birokrasi.

Berkembangnya teknologi dan informasi yang semakin mempermudah mekanisme kerja menjadikan efisiensi dengan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dan mekanisme koordinasi antar dan inter perangkat daerah untuk bersama sama memecahkan persoalan yang dihadapi dalam pembangunan daerah dan masyarakatnya. Implementasi konsep kota cerdas menjadi strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur Kota Magelang dalam menjaga bahkan meingkatkan indeks Reformasi Birokrasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kota cerdas dapat berperan sebagai *enabler* maupun katalisator dalam upaya perbaikan dan penguatan implementasi reformasi birokrasi pada area-area tersebut di atas. Tidak hanya terkait pemanfaatan teknologi, implementasi kota cerdas sejatinya mendorong tercapainya reformasi birokrasi yaitu melalui komponen *smart people* (masyarakat cerdas), dalam hal ini aparatur yang cerdas, dan *smart government* (pemerintahan yang cerdas).

Untuk itu perlu peningkatan kapasitas sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informatika serta sumber daya manusia (SDM) aparatur. Pada aspek manajerial perlu perbaikan manajemen SDM aparatur melalui implementasi sistem merit secara menyeluruh. Diharapkan melalui optimalisasi pemanfaatan TIK, peningkatan kapasitas SDM, dan perbaikan manajemen SDM dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus terwujud reformasi birokrasi untuk Kota Magelang yang lebih baik.

Tabel 4.9
Keterkaitan Isu Global, Nasional, dan Regional terhadap Isu Strategis RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026

Isu Global		Isu Nasional			Isu Regional		RTRW Kota Magelang 2011-2031	Isu Strategis RPJPD Kota Magelang 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Magelang	Isu Strategis RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026
TPB	Pandemi Covid-19	Bonus Demografi	RPJMN 2020-2024	Perpres 79 Tahun 2019	Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Magelang				
- Tujuan 1 Tanpa kemiskinan - Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	- Perluasan jaringan pengaman sosial		- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	- TPT di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah	- Penanggulangan Kemiskinan - Kesenjangan wilayah		- Strategi penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang mampu meningkatkan peran dan fungsi Daerah menjadi PKW di Jawa Tengah dan pusat Wilayah Pengembangan	- Pembangunan di seluruh bidang	Kemiskinan	Kemiskinan

Isu Global		Isu Nasional			Isu Regional		RTRW Kota Magelang 2011-2031	Isu Strategis RPJPD Kota Magelang 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Magelang	Isu Strategis RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026
TPB	Pandemi Covid-19	Bonus Demografi	RPJMN 2020-2024	Perpres 79 Tahun 2019	Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Magelang				
							(WP) Purwomanggung			
- Tujuan 3 Kehidupan sehat dan sejahtera - Tujuan 4 Pendidikan berkualitas - Tujuan 5 Kesenjangan gender	- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	- Peningkatan kualitas dan akses pendidikan - Peningkatan kualitas layanan kesehatan	- Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing - Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	- Pembangunan RSUD Tipe C, Kota Magelang - Pembangunan RSUD Rujukan Kanker, Kota Magelang	- Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	- Kualitas sumber daya manusia		- Masyarakat berbudaya - Sumber daya manusia berkualitas - Masyarakat madani	Kualitas sumber daya manusia	Kualitas SDM
- Tujuan 6 Air bersih dan			- Membangun lingkungan hidup,	- Revitalisasi sempadan Sungai	- Keberlanjutan Pembangunan		- Kebijakan pengembangan	- Pembangunan di seluruh bidang	Kualitas lingkungan hidup dan	Kualitas lingkungan hidup

Isu Global		Isu Nasional			Isu Regional		RTRW Kota Magelang 2011-2031	Isu Strategis RPJPD Kota Magelang 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Magelang	Isu Strategis RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026
TPB	Pandemi Covid-19	Bonus Demografi	RPJMN 2020-2024	Perpres 79 Tahun 2019	Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Magelang				
sanitasi layak - Tujuan 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab - Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim			meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Progo (<i>river amenity</i>), Kab. Magelang dan Kota Magelang - Pembangunan TPA/TPST Regional, Kab. Magelang	Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam		Kawasan Lindung - Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya		ketahanan daerah	
- Tujuan 2 Tanpa kelaparan - Tujuan 11	-			- Rawan terhadap gerakan tanah (sepanjang lembah Sungai Progo	- Kedaulatan pangan dan energi			- Pembangunan di seluruh bidang	Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah	Ketahanan daerah (bencana dan pangan)

Isu Global		Isu Nasional			Isu Regional		RTRW Kota Magelang 2011-2031	Isu Strategis RPJPD Kota Magelang 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Magelang	Isu Strategis RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026
TPB	Pandemi Covid-19	Bonus Demografi	RPJMN 2020-2024	Perpres 79 Tahun 2019	Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Magelang				
Kota dan pemukiman yang berkelanjutan				dan Sungai Elo)						
- Tujuan 7 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua - Tujuan 9 Membangun			- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	- Kesenjangan pembangunan cukup tinggi antara Kota Magelang sebagai pusat Purwomanggung dengan kabupaten di sekitarnya - Peningkatan			- Strategi pengembangan sistem Prasarana dan Sarana yang terintegrasi dengan sistem regional, Provinsi, dan nasional - Strategi pengembangan Struktur	- Pembangunan di seluruh bidang	Kualitas permukiman dan sarana prasarana perkotaan	Sarana prasarana perkotaan berkelanjutan

Isu Global		Isu Nasional			Isu Regional		RTRW Kota Magelang 2011-2031	Isu Strategis RPJPD Kota Magelang 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Magelang	Isu Strategis RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026
TPB	Pandemi Covid-19	Bonus Demografi	RPJMN 2020-2024	Perpres 79 Tahun 2019	Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Magelang				
infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi				Terminal Tipe A Tidar, Kota Magelang			Ruang untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem Prasarana dan Sarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah sesuai dengan arahan			

Isu Global		Isu Nasional			Isu Regional		RTRW Kota Magelang 2011-2031	Isu Strategis RPJPD Kota Magelang 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Magelang	Isu Strategis RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026
TPB	Pandemi Covid-19	Bonus Demografi	RPJMN 2020-2024	Perpres 79 Tahun 2019	Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Magelang				
							penyediaan yang berdasarkan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan			
- Tujuan 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,	- Perluasan jaringan pengaman ekonomi	- Perluasan kesempatan kerja - Peningkatan peran UMKM	- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	- Perkembangan sektor potensial pariwisata: Wisata Taman Kyai Langgeng dan Alun-Alun Magelang	- Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha	- Daya saing daerah	- Kebijakan penetapan Kawasan Strategis Daerah - Strategi pengembangan dan peningkatan	- Daya saing ekonomi	Daya saing daerah	Daya saing ekonomi

Isu Global		Isu Nasional			Isu Regional		RTRW Kota Magelang 2011-2031	Isu Strategis RPJPD Kota Magelang 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Magelang	Isu Strategis RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026
TPB	Pandemi Covid-19	Bonus Demografi	RPJMN 2020-2024	Perpres 79 Tahun 2019	Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Magelang				
kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua				-			fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Daerah yang produktif, efisien, dan mampu berdayasaing			
- Tujuan 16 Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh - Tujuan	- Pemanfaatan teknologi informasi		- Memperkuat stabilitas polhukham dan transformasi pelayanan publik		- Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	- Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel		- Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi	Reformasi birokrasi	Reformasi birokrasi

[illegible]

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Arah pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2021-2026 dilandasi Visi, Misi serta Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota Magelang hasil Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020. Substansi Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Magelang 2021-2026 mengacu pada Tema Tahap ke-IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025. Visi dan misi yang merupakan janji politik kemudian diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran sebagai landasan perumusan strategi dan arah kebijakan yang akhirnya mengarah pada program pembangunan daerah. Isu strategis lokal, regional dan nasional serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tetap menjadi perhatian dalam implementasi program pembangunan.

5.1. Visi

Visi Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah: **“Magelang Maju, Sehat dan Bahagia”**. Visi tersebut selain menggambarkan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, juga menandai pencapaian kondisi yang harus dicapai dalam pembangunan jangka panjang Kota Magelang. Rumusan Visi Kota Magelang mengarah pada 2 (dua) dimensi pembangunan, yaitu pembangunan **wilayah** Kota Magelang dan pembangunan **masyarakat** Kota Magelang. Kota Magelang diarahkan untuk menjadi kota yang **maju** dan kota yang **sehat**. Sedangkan dalam membangun masyarakat Kota Magelang, diarahkan untuk menjadi **masyarakat yang sehat** dan **masyarakat yang bahagia**.

Makna dari visi Kota Magelang 2021-2026 tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 5. 1 Makna Visi Kota Magelang

No	Unsur	Penjelasan
1	Magelang	Magelang adalah suatu wilayah dibawah administrasi Pemerintah Kota Magelang, dengan luas wilayah ±18,54 km ² dan terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan.

No	Unsur	Penjelasan
2	Maju	Kota Magelang yang maju dimaknai sebagai kota yang lebih berkembang serta didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Sebagai kota yang maju, selain tampilan fisik selalu dijaga untuk lebih baik dari daerah lain, juga ditandai dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan ditingkatkan dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebagai kota yang maju maka iklim inovasi selalu ditingkatkan.
2	Sehat	Magelang kota sehat mengandung pengertian bahwa di setiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik. Sebagai kota sehat, maka Kota Magelang diarahkan untuk memenuhi tatanan kota sehat. Semua sarana yang menopang keberlangsungan kegiatan perkotaan diarahkan untuk memenuhi syarat dan kaidah kesehatan. Sedangkan dalam membangun masyarakat yang sehat diartikan sebagai meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang didukung dengan peran pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk didalamnya peningkatan akses terhadap pendidikan, terciptanya pola hidup masyarakat yang sehat, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta lingkungan yang sehat. Faktor genetika juga mempengaruhi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5	Bahagia	Masyarakat Kota Magelang yang bahagia mengandung makna keadaan masyarakat yang senang, tentram, damai, sentosa dan makmur lahir batin karena dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya. Dalam mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang bahagia ditempuh dengan pembentukan perilaku masyarakat yang berbudaya sehingga terwujud rasa saling menghormati dan berkurangnya konflik antar masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat harus ditingkatkan sebagai sarana peningkatan ekonomi masyarakat.

Kebijakan makro pembangunan daerah tentunya tidak terlepas dari kebijakan makro pembangunan nasional maupun provinsi.

Dalam konteks kebijakan pembangunan jangka menengah daerah juga sebagai pelaksanaan tahap-tahap rencana pembangunan jangka panjang daerah. Keterkaitan antara kebijakan-kebijakan yang tersurat dari rumusan visi pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.2
Keterkaitan Visi Jangka Panjang dan Menengah Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang

Visi Nasional		Visi Provinsi Jawa Tengah		Visi Kota Magelang	
RPJPN 2005- 2025	RPJMN 2020-2024	RPJPD 2005- 2025	RPJMD 2018- 2023	RPJPD 2005- 2025	RPJMD 2021- 2026
Indonesia Yang Mandiri, Maju , Adil Dan Makmur	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat , Mandiri , dan Berkepribadian an Berlandaskan Gotong Royong	Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju , Sejahtera , Dan Lestari	Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Mandiri , Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi	Magelang Sebagai Kota Jasa Yang Berbudaya, Maju Dan Berdaya Saing Dalam Masyarakat Madani	Magelang Maju , Sehat dan Bahagia

Tersirat dalam persandingan visi tersebut bahwa mewujudkan Magelang sebagai kota yang maju merupakan salah satu kondisi menuju kemandirian daerah, yang dapat diartikan sebagai dukungan terhadap kebijakan Provinsi Jawa Tengah terkait kemandirian daerah. Kesehatan dan kebahagiaan masyarakat merupakan cerminan dari keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan hal ini selaras dan mendukung kebijakan Provinsi Jawa Tengah untuk lebih membuat sejahtera masyarakatnya.

Sedangkan dalam persandingan dengan kebijakan tingkat nasional, menjadikan Magelang sebagai kota yang maju selaras dengan mewujudkan Indonesia maju. Masyarakat Kota Magelang yang lebih sehat dan bahagia menjadi modal yang kuat dalam mengembangkan kepribadian diri berlandaskan nilai-nilai etika dan budaya lokal. Semangat untuk saling membantu dalam lingkungan yang toleran akan menumbuhkan jiwa gotong royong, dan kondisi tersebut mencerminkan dukungan terhadap kebijakan nasional.

Keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang 2005-2025, Visi Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan dari Tema Tahap Ke-4 RPJPD, yaitu tahun 2020-2025. Tema yang diamanatkan adalah:

- 1. Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh di Berbagai Bidang;
- 2. Mewujudkan Tercapainya Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Tinggi, Berlandaskan Budaya Yang Unggul, Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Mandiri, serta;
- 3. Mewujudkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalam Masyarakat Madani.

Gambaran keterkaitan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. 1 Keterkaitan RPJMD 2021-2026 dan RPJPD 2005-2025

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun

5.2. Misi

Visi yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, dalam perwujudannya ditempuh melalui misi, dan telah dirumuskan 5 (lima) butir misi, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Yang Religijs, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq:

Misi ini untuk mewujudkan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang yang **bahagia**. Masyarakat Kota Magelang yang religijs, berbudaya, beradab dan toleran menjadi dasar dalam mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat yang religijs selalu menggunakan landasan nilai-nilai keagamaan dalam menerapkan cara hidup dan membangun tatanan sosial, sehingga tingkat religijsitas masyarakat nantinya akan diukur dari menurunnya segala bentuk penyakit sosial masyarakat.

Manusia yang berbudaya adalah manusia yang telah menerapkan nilai-nilai luhur budaya yang membentuk moral dan etika masyarakat. Dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya maka harus dimulai dari komponen terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma atau aturan terutama tentang sopan santun, dan tentunya dilandasi aturan keagamaan. Keberadaban masyarakat akan diterapkan dalam pergaulan antar masyarakat, antar lingkungan dan antar tetangga.

Masyarakat yang toleran adalah masyarakat yang saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan yang ada, baik perbedaan pandangan, perbedaan pilihan politik, dan yang paling utama adalah perbedaan agama. Kebhinekaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara selayaknya tetap bisa terasa kehadirannya di Kota Magelang. Dengan penguatan kehidupan beragama, menjadi modal utama dalam membangun toleransi.

Landasan iman dan taqwa (imtaq) yang semakin kokoh tentunya menjadi modal utama daam mewujudkan masyarakat religijs, berbudaya, beradab dan toleran. Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling membantu, dan saling memberi dan menerima. Dengan terciptanya kondisi yang aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari maka pada akhirnya akan menuju pada terwujudnya masyarakat Kota Magelang yang bahagia.

2. **Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia:**

Misi ke-2 ini dirumuskan untuk mewujudkan komponen visi **Kota** dan **masyarakat** Magelang yang **sehat**, serta **masyarakat** Kota Magelang yang **bahagia**. Pembangunan daerah pada hakekatnya membangun sumber daya manusia. Hal itu termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan. Di era globalisasi seperti sekarang ini, menuntut kesiapan pemerintah daerah agar mampu bersaing dalam mengelola sumber daya yang dipunyai yang pada akhirnya bisa memberi dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya yang ditempuh adalah dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan agar lebih terjangkau oleh semua komponen dan kelas masyarakat. Selain itu, kebutuhan pelayanan dasar masyarakat juga ditingkatkan pemenuhannya. Akses air bersih dan sanitasi yang layak menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Lebih jauh lagi melalui penataan lingkungan permukiman dan penanganan rumah tidak layak huni akan mampu menopang upaya pembangunan masyarakat.

Tersirat dalam misi ke-2 ini bahwa prinsip inklusifitas mutlak diterapkan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Kelompok masyarakat dari semua golongan dengan berbagai kondisi harus secara setara dapat menikmati kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, penerapan prinsip *universal design* harus menjadi arus utama dalam penyediaan layanan dasar. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akan sangat diperhatikan pemenuhannya.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif:

Perbaikan tata kelola pemerintahan dengan sentuhan inovasi akan mewujudkan komponen visi Magelang Kota yang **maju**. Kemajuan suatu kota sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan kota. Dengan demikian reformasi birokrasi menjadi aspek utama dalam misi ke 3 ini. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: organisasi; tata laksana; peraturan perundang-undangan; sumber daya manusia aparatur; pengawasan; akuntabilitas; pelayanan publik; serta budaya kerja.

Sejalan dengan penerapan konsep pengembangan kota cerdas, maka kehadiran teknologi informasi (TIK) dan komunikasi akan sangat dibutuhkan, oleh karena itu **pemanfaatan TIK** menjadi prioritas utama dalam menopang upaya peningkatan tata kelola pemerintahan. Konsep yang diterapkan adalah memadukan antara kecerdasan manusia (*human intelligence*) dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Sumber daya manusia yang semakin cerdas dan didukung kehadiran TIK akan menghasilkan berbagai inovasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, yang pada akhirnya akan mengarah pada terwujudnya Magelang sebagai kota yang maju.

Kehadiran TIK juga akan diterapkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, utamanya pelayanan perizinan. Bukan saatnya lagi perizinan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya sesuai peraturan yang berlaku. **Kepastian menjadi kata kunci**, yaitu kepastian yang terkait **waktu** lamanya proses perizinan, kepastian terkait **besaran biaya** yang harus dikeluarkan, serta kepastian dalam mendapatkan **kemudahan**. Dengan kualitas pelayanan perizinan yang lebih baik akan menjadikan Magelang sebagai kota yang lebih maju.

4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan:

Pelaksanaan misi ke-4 ini sebagai perwujudan komponen visi membangun **masyarakat** Kota Magelang agar menjadi lebih **bahagia**. Kondisi yang akan dicapai adalah terbangunnya ekonomi inklusif di Kota Magelang, yang ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: pembentukan usaha baru; peningkatan usaha rumah tangga dan UMKM agar lebih berdaya saing; serta promosi dan penyiapan tenaga kerja yang inklusif dan berdaya saing.

Pembangunan ekonomi inklusif, yaitu pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, pada akhirnya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan dipadukan dengan upaya peningkatan pemerataan maka akan mengurangi prosentase penduduk miskin dan mengurangi pengangguran.

5. Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur:

Kota Magelang yang modern dan berdaya saing akan mendorong perwujudan Magelang sebagai **kota yang lebih maju**. Sebagai kota modern tidak hanya ditampilkan dari wujud fisik kota yang indah dan mempesona, namun yang tidak kalah penting adalah pada tata kelola kawasan perkotaan yang mampu menjawab tuntutan kehidupan masyarakat dan seluruh elemen penghuni kota. **Lingkungan permukiman yang sehat** akan mendukung pola dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Di dalam kota yang modern memungkinkan terjalinnya **pertukaran informasi secara masal**.

Kinerja penataan ruang akan menjadi ‘panglima’ dalam mewujudkan ruang kota yang berkelanjutan. Tuntutan alokasi ruang kota untuk menjawab kegiatan masyarakat modern harus tetap dalam kendali yang ketat agar prinsip keberlanjutan wilayah tetap bisa terjaga. Eksploitasi ruang kota untuk kegiatan budi daya apabila tidak terkendali maka dimasa mendatang akan merusak lingkungan hidup kawasan perkotaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Visi terdiri dari beberapa komponen visi. Dari rumusan visi: **“Magelang Maju, Sehat dan Bahagia”** yang menyiratkan adanya 2 (dua) dimensi yang akan diwujudkan, yaitu dimensi membangun wilayah kota dan membangun masyarakatnya, maka untuk mewujudkan **Magelang sebagai kota yang maju** ditempuh melalui **misi ke-3** yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif**, serta **misi ke-5** yaitu **Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur**. Sedangkan untuk mewujudkan Magelang sebagai kota sehat, dilaksanakan melalui **misi ke-2**, yaitu **Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**. Misi ke-2 tersebut juga sebagai upaya untuk mewujudkan komponen visi membangun **masyarakat** Kota Magelang agar menjadi **lebih sehat**.

Untuk mewujudkan **masyarakat** Kota Magelang menjadi **lebih bahagia** ditempuh melalui pelaksanaan **misi ke-1**, yaitu **Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq**, **misi ke-2** yaitu **Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**, dan **misi ke-4**, yaitu **Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan**.

Perwujudan unsur visi kedalam misi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5.2 Penerjemahan Unsur Visi Kedalam Misi

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun

Sedangkan dalam konteks bangunan misi secara keseluruhan, yang dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kota Magelang, dari ke lima misi yang dirumuskan bisa dibagi dalam beberapa kategori. Kategori pertama adalah misi ke-3 yang bersifat memberikan landasan atau pondasi, yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif**. Kondisi yang akan dicapai dari misi ke-3 ini adalah terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel dan inovatif. Birokrasi yang inovatif mampu mengembangkan pola pikir '*out of the box*', sehingga berbagai terobosan baru akan dihasilkan dalam menjawab berbagai tantangan serta dalam mengatasi permasalahan dan isu. Kondisi tersebut akan menjadi landasan yang kokoh dalam melaksanakan upaya-upaya selanjutnya dalam rangka mencapai visi Kota Magelang.

Sebagai pilar yang menjadi penopang dalam pelaksanaan pemerintahan adalah misi ke-2, misi ke-4 dan misi ke-5. Kondisi yang akan diciptakan dari misi ke-2 adalah kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang semakin meningkat, yang akan menjadi modal dalam membangun ekonomi yang inklusif. Akses dan kesempatan yang terbuka secara merata pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan. Dalam aspek spasial tersirat dari misi ke-5 bahwa ruang kota yang berkelanjutan merupakan kondisi yang akan dicapai. Aspek penataan ruang kota akan menjadi acuan dalam mengendalikan pertumbuhan kota.

Ketiga pilar ini secara sinergi akan menopang pewujudan misi ke-1, yaitu **Mewujudkan Masyarakat Yang Religijs, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq**. Kondisi yang akan dicapai dari misi ke-1 adalah terwujudnya masyarakat Kota Magelang yang berbudaya, yaitu masyarakat yang telah menerapkan nilai-nilai luhur budaya yang membentuk moral dan etika.

Dengan menyikapi bangunan misi secara keseluruhan tersebut maka menjadi satu modal yang kuat dalam mewujudkan terciptanya Visi Kota Magelang, yaitu sebagai kota yang maju, sehat dan bahagia. Gambaran bangunan misi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5.3 Bangunan Misi Kota Magelang

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun

Mengacu pada tujuan perencanaan pembangunan daerah yaitu diarahkan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, maka dalam dokumen rencana pembangunan daerah harus terdapat keselarasan dengan dokumen rencana pembangunan dari pemerintah di atasnya. Terkait dengan keselarasan misi, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 3

Penerjemahan Misi RPJMN kedalam Misi RPJMD

No	Misi RPJMN 2020-2024	Penerjemahan Dalam Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Diterjemahkan dalam misi ke-2, yaitu: Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Diterjemahkan dalam misi ke-4, yaitu: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Diterjemahkan dalam misi ke-4, yaitu: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Diterjemahkan dalam misi ke-5, yaitu: Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur.
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Diterjemahkan dalam misi ke-1, yaitu: Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq.
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Diterjemahkan dalam misi ke-3, yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif.
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	Diterjemahkan dalam misi ke-1, yaitu: Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq.
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Diterjemahkan dalam misi ke-3, yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif.

No	Misi RPJMN 2020-2024	Penerjemahan Dalam Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Negara Kesatuan	Diterjemahkan dalam misi ke-3, yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif.

Sedangkan keselarasan terhadap misi yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 4
Penerjemahan Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Kedalam Misi RPJMD Kota Magelang

No	Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	Penerjemahan Dalam Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026
1	Membangun Masyarakat Jawa Tengah Yang Religius, Toleran Dan Guyup Untuk Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Diterjemahkan dalam misi ke-1, yaitu: Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq.
2	Mempercepat Reformasi Birokrasi Yang Dinamis Serta Memperluas Sasaran Ke Pemerintah Kabupaten/Kota.	Diterjemahkan dalam misi ke-3, yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif.
3	Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat Dan Membuka Lapangan Kerja Untuk Mengurangi Kemiskinan Dan Pengangguran.	Diterjemahkan dalam misi ke-4, yaitu: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan

No	Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	Penerjemahan Dalam Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026
4	Menjadikan Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya, Dan Mencintai Lingkungan.	Diterjemahkan dalam misi ke-2, yaitu: Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, serta misi ke-1, yaitu: Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq.

Selain mengacu pada dokumen Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah, misi tersebut juga terkait dengan kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025. Penerjemahan RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025 kedalam Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.5

Penerjemahan RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025 ke dalam Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026

N o	Prioritas RPJPD Periode Perencanaan 2021-2025	Komponen Prioritas RPJPD Periode Perencanaan 2021-2025	Penerjemahan dalam Visi Misi RPJMD 2021-2026	Penerjemahan dalam Tujuan Sasaran RPJMD 2021-2026
1.	Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang	Pembangunan di seluruh bidang	Maju	Misi 5: Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur

No	Prioritas RPJPD Periode Perencanaan 2021-2025	Komponen Prioritas RPJPD Periode Perencanaan 2021-2025	Penerjemahan dalam Visi Misi RPJMD 2021-2026	Penerjemahan dalam Tujuan Sasaran RPJMD 2021- 2026
2.	Mewujudkan tercapainya perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi, berlandaskan budaya yang unggul, sumber daya manusia yang berkualitas dan mandiri	Daya saing ekonomi	Bahagia	Misi 4: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan
		Masyarakat berbudaya	Bahagia	Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq
		Sumber daya manusia berkualitas	Bahagia Sehat	Misi 2: Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3.	Mewujudkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat	Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi	Maju	Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif

N o	Prioritas RPJPD Periode Perencanaan 2021-2025	Komponen Prioritas RPJPD Periode Perencanaan 2021-2025	Penerjemahan dalam Visi Misi RPJMD 2021-2026	Penerjemahan dalam Tujuan Sasaran RPJMD 2021- 2026
	madani	Masyarakat madani	Bahagia	Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq

5.3. Program Unggulan

Terdapat 38 Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Magelang, dimana 12 diantaranya merupakan **Program Unggulan**. Program Unggulan dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Magelang disusun untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Yang menjadi program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Magelang adalah:

1. Peningkatan peran rumah ibadah

Program unggulan ini bertujuan untuk meningkatkan kerukunan antar umat Bergama dengan memaksimalkan fungsi rumah ibadah. Rumah-rumah ibadah akan difungsikan juga sebagai wahana komunikasi dalam membangun kerukunan umat beragama selain fungsi utama sebagai sarana menjalankan ibadah bagi pemeluk agama.

2. Apresiasi untuk pembinaan keagamaan

Pembina keagamaan, salah satunya guru TPQ, menjadi salah satu komponen penting dalam membangun masa depan Kota Magelang yang lebih baik. Para Pembina keagamaan menjadi perantara dalam penyampaian pesan dan ajaran agama kepada generasi muda. Selain itu, pengurus rumah ibadah juga memiliki peran penting dalam kelancaran pelaksanaan ibadah semua agama. Pengurus rumah ibadah akan diberikan insentif sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah.

3. Jaminan kesehatan gratis untuk masyarakat tidak mampu

Program unggulan ini mendukung capaian untuk mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang lebih sehat. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditentukan dari kualitas pelayanan kesehatan. Akses pelayanan kesehatan yang diperluas cakupannya akan berdampak pada semakin meluasnya cakupan pelayanan kesehatan kepada semua lapisan masyarakat. Pemerintah hadir untuk memberi jaminan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu.

4. Home care bagi balita dan lansia

Melalui program unggulan ini, Pemerintah Kota Magelang hadir secara konkrit untuk memberikan pelayanan kesehatan khususnya bagi balita dan lansia dengan memberikan pelayanan ke tempat tinggal mereka atau home care. Dengan melaksanakan program ini maka akan mendukung capaian mewujudkan masyarakat Kota Magelang menjadi lebih sehat.

5. Pelayanan kesehatan paripurna

Pelayanan kesehatan paripurna dapat diartikan sebagai pelayanan kesehatan menyeluruh yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Melalui program unggulan ini Pemerintah Kota Magelang hadir secara konkrit untuk memberikan pelayanan kesehatan.

6. Pelayanan pendidikan gratis mulai PAUD, SD, SMP

Pendidikan merupakan salah satu bentuk pemberian layanan dasar kepada semua kelompok masyarakat. Untuk meningkatkan akses pendidikan kepada semua maka melalui program unggulan pendidikan gratis tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Magelang.

7. Peningkatan kesejahteraan guru honorer

Tenaga pendidik juga akan mendapatkan perhatian dengan meningkatkan kesejahteraan mereka. Program unggulan ini mendukung pelaksanaan misi ke-2, yang akan memberikan hasil pada terwujudnya masyarakat Kota Magelang yang lebih bahagia.

8. Reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi

Melalui program unggulan ini fokus yang dituju dalam lingkup reformasi birokrasi adalah pada peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan diterapkan secara lebih optimal melalui integrasi berbagai aplikasi pelayanan. Modal Kota Magelang yang beberapa kali meraih predikat sebagai kota cerdas, serta keberadaan *command center* akan dimanfaatkan lebih optimal guna keberhasilan pelaksanaan program unggulan ini. Dalam pelaksanaannya, Reformasi Birokrasi berbasis teknologi harus diarahkan pada tiga hal yaitu **Pertama**, kemudahan akses (gratis, efektif, efisien, cepat, tepat, akurat, dan tidak berbelit-belit) masyarakat terhadap seluruh layanan publik” yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang; **kedua**, adanya transparansi informasi dan tatakelola pemerintahan; dan yang **ketiga**, tata kelola pemerintah yang bersih. Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel dan inovatif akan terdukung dengan pelaksanaan program unggulan ini, yang pada akhirnya akan menopang perwujudan komponen visi Magelang sebagai kota yang lebih maju.

9. Program pelatihan dan pembentukan 1500 wirausaha muda (startup) dan ruang usaha baru

Program ini selain menargetkan penciptaan wira usaha baru, juga memberikan prioritas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha melalui berbagai program pelatihan. Secara demografis Kota Magelang sudah mendapatkan bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif melebihi penduduk usia tidak produktif. Melalui program unggulan ini akan memberikan wadah bagi penduduk usia produktif agar bisa lebih mengembangkan potensinya secara mandiri. Program unggulan ini juga mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif di Kota Magelang.

10. Pengembangan daya saing daerah berbasis inovasi dan potensi lokal

Penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ditujukan untuk meningkatkan daya saing daerah. Sesuai definisi dari Bank Indonesia, daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Program unggulan ini mewadahi pengembangan inovasi dan pengembangan potensi lokal daerah. Inovasi berbagai produk unggulan daerah akan diarahkan dan difasilitasi agar mampu menjadi penopang peningkatan perekonomian daerah. Dengan daya saing yang semakin tinggi maka Kota Magelang akan menjadi lebih maju, yang pada akhirnya akan memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

11. Pengalokasian APBD untuk Anggaran Dana RT (ADRT) sebesar 30 juta setiap RT untuk pemberdayaan masyarakat

Program unggulan ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Sesuai amanat Pasal 230 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Sasaran program unggulan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat kelurahan, memperbaiki dan memelihara infrastruktur kelurahan, serta mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu program ini mempertimbangkan adanya Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan menjadi koridor dan arahan usulan Rencana Kerja Masyarakat. Sasaran penerima manfaat, secara spasial adalah dalam wilayah dan warga RT setempat sehingga mampu mendorong peningkatan capaian indikator kinerja pemerintah daerah antara lain penurunan angka kemiskinan, peningkatan nilai IPM, penurunan TPT, serta pertumbuhan ekonomi.

12. Program pengelolaan sampah komprehensif menuju bebas sampah

Predikat Kota Magelang sebagai kota yang bersih akan selalu dijaga eksistensinya, yang salah satunya melalui pelaksanaan program unggulan ini. Keberadaan kampung organik dan bank sampah yang sudah tersebar secara proporsional di semua kelurahan akan lebih dioptimalkan pelaksanaan dan pengelolaannya. Pengurangan volume sampah dimulai dari sumbernya melalui penerapan prinsip 3-R, yaitu *reduce, reuse* dan *recycle*.

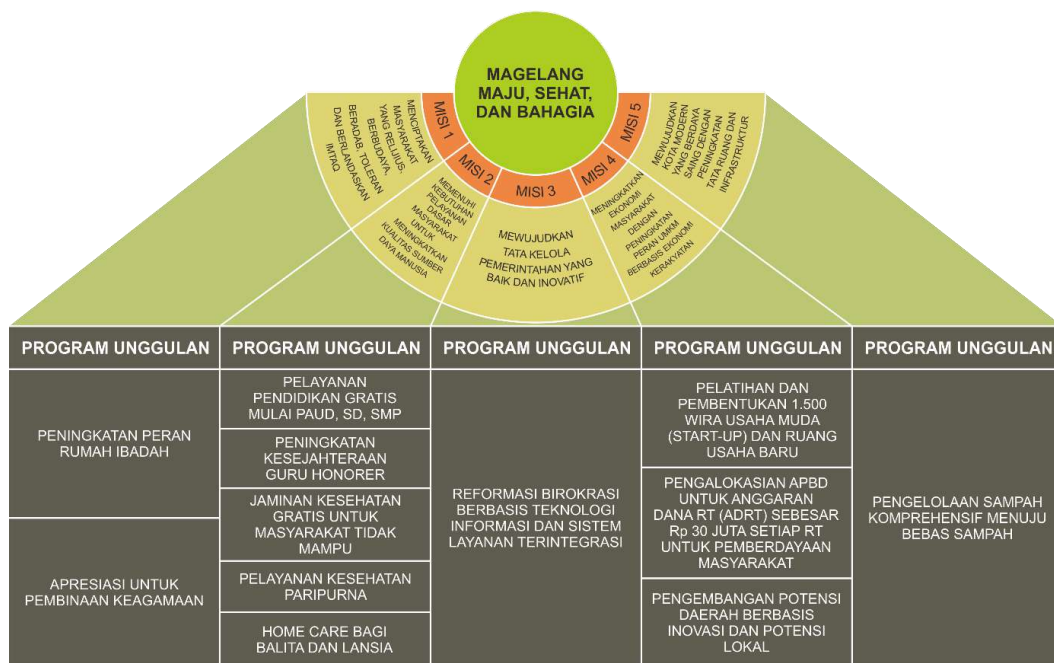
Untuk memberikan motivasi dan sebagai *tetenger* dalam beberapa program unggulan, disusun beberap Branding Program Unggulan, yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.6
Branding Program Unggulan

No	Misi	Program Unggulan	Branding
1	Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq	▪ Peningkatan peran rumah ibadah ▪ Apresiasi untuk pembinaan keagamaan	
2	Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	▪ Pelayanan pendidikan gratis mulai PAUD, SD, SMP ▪ Peningkatan kesejahteraan guru honorer ▪ Jaminan kesehatan gratis untuk masyarakat tidak mampu ▪ Pelayanan kesehatan paripurna ▪ Home care bagi balita dan lansia	
			
			

No	Misi	Program Unggulan	Branding
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif	Reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi	 MAGESTY Magelang Smart City
			 NGOPI BARENG PAK WALI
4	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	- Program pelatihan dan pembentukan 1500 wirausaha muda (startup) dan ruang usaha baru - Pengembangan daya saing daerah berbasis inovasi dan potensi lokal	 MAGELANG KEREN Kelurahan Entrepreneurship Centre
		Pengalokasian APBD untuk Anggaran Dana RT (ADRT) sebesar 30 juta setiap RT untuk pemberdayaan masyarakat	 RODANYA MAS BAGYA Program Pemberdayaan Masyarakat Maju, Sehat & Bahagia
5	Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur	Program Pengelolaan Sampah Komprehensif Menuju Bebas Sampah	 MAGELANG CANTIK Cinta Organik

Keterkaitan visi, misi dan program unggulan dapat dilihat pada gambar berikut.



5.4. Tujuan dan Sasaran

1. Misi ke-1: **Mewujudkan Masyarakat yang Religijs, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq.**

- Meningkatnya Penguatan Toleransi;
- Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum;
- Meningkatnya stabilitas daerah;
- Meningkatnya penguatan kebudayaan; dan
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Misi ke-2: **Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.**

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing;
- b. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
- c. Meningkatnya daya beli masyarakat; dan
- d. Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan.

3. Misi ke-3: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif.**

Tujuan misi ketiga ini adalah: **Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif**, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- b. Menciptakan birokrasi yang kapabel; dan
- c. Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

4. Misi ke-4: **Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan.**

Misi ke 4 mempunyai tujuan yaitu **meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif**, dengan sasaran adalah:

- a. Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan;
- b. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi;
- c. Meningkatnya angka kunjungan wisatawan;
- d. Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
- e. Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; dan
- f. Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro.

5. Misi ke-5: **Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur.**

Misi ke 5 mempunyai 2 tujuan, yaitu **Terwujudnya ruang kota yang berkelanjutan**, dengan sasaraannya adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur kota;
- b. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang;
- c. Meningkatnya aksesibilitas perkotaan;
- d. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;

- e. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan;

Sedangkan tujuan yang kedua adalah: **Meningkatnya ketahanan daerah.** Sebagai sasaran adalah:

- a. Meningkatkan ketahanan terhadap bencana; dan
- b. Meningkatkan ketahanan pangan daerah.

Ringkasan terkait tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

MISI 1 Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq



Gambar 5. 5 Cascading Misi 1
Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun

MISI 2 Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat
Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

TUJUAN	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia				
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Pembangunan Manusia				
SASARAN	Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk Masyarakat berdaya saing	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan	
INDIKATOR SASARAN	Indeks Pendidikan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Kesehatan	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Indeks Pembangunan Gender
PERANGKAT DAERAH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Kesehatan	Bagian Perekonomian; Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Gambar 5. 6 Cascading Misi 2

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun

MISI 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif



Gambar 5. 7 Cascading Misi 3

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun

MISI 4 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan



Gambar 5. 8 Cascading Misi 4
Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun

MISI 5 Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur

TUJUAN	Terwujudnya ruang kota yang berkelanjutan						Meningkatnya Ketahanan Daerah	
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Kualitas Ruang Kota						Indeks Resiliensi Daerah	
SASARAN	Meningkatnya kualitas infrastruktur kota	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Meningkatnya aksesibilitas perkotaan	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Meningkatnya ketahanan pangan daerah
INDIKATOR SASARAN	Indeks Infrastruktur Wilayah	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Indeks aksesibilitas perkotaan	Persentase Luas Kawasan Kumuh	IKLH	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik	Indeks Ketahanan Daerah	Skor PPH
PERANGKAT DAERAH	Dinas PUPR, Dishub	Dinas PUPR	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	Dinas Perkim	Dinas Lingkung an Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Satpol PP; BPBD	Dinas Pertanian dan Pangan

Gambar 5. 9 Cascading Misi 5
Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun

Penerjemahan visi misi ke dalam tujuan dan sasaran tersebut disertai dengan penerjemahan ke dalam indikator-indikator kinerja sebagai pengukuran keberhasilan visi misi. Indikator kinerja tujuan dan sasaran tersebut disajikan pada tabel 5.7 berikut.

Tabel 5.7
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
					2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Yang Religijs, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq										
1.1	Terwujudnya masyarakat kota yang berkarakter		Nilai Pembangunan Masyarakat	Nilai	NA	71,97	75,50	78,38	81,09	83,93	83,93
1.1.1		Meningkatnya toleransi	Nilai Penguatan Toleransi	Nilai	NA	55	58	60	63	65	65
1.1.2		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Nilai Penguatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai	NA	72,91	80,43	87,95	94,61	97,86	97,86
1.1.3		Meningkatnya stabilitas daerah	Nilai stabilitas daerah	Nilai	NA	91,31	92,20	93,09	93,98	94,87	94,87
1.1.4		Meningkatnya penguatan kebudayaan	Nilai pemajuan kebudayaan	Nilai	NA	58,65	63,39	64,87	66,36	71,91	71,91
1.1.5		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Nilai partisipasi masyarakat	Nilai	NA	82	84	86	88	90	90

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
					2020	2022	2023	2024	2025	2026	
3.1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66,50	71,10	73,10	75,10	83,10	85,10	85,10
3.1.1		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82,91	83,91	84,41	84,91	85,41	85,91	85,91
3.1.2		Terciptanya birokrasi yang kapabel	Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)	Tingkat	30	30,2	30,4	30,6	30,8	31	31
			Indeks Sistem Merit	Indeks	NA	0,645	0,6825	0,705	0,73	0,73	0,73
			Indeks SPBE	Indeks	3,21	2,4	2,55	2,675	2,975	3,25	3,25
3.1.3		Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Maturitas SPIP	Nilai	3,038	3,391	3,568	3,745	3,921	4,000	4,000
			Nilai SAKIP	Nilai	B	BB	BB	A	A	A	A
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	NA	93,27	93,45	93,59	93,60	93,61	93,61
4	Misi 4: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan										
4.1	Meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif		Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,45	4,35-5,05	5,05-5,14	5,14-5,36	5,18-5,43	5,32-5,70	5,32-5,70
			Persentase Penduduk Miskin	%	7,58	6,73-7,58	6,41-7,30	6,36-7,00	6,12-6,76	6,06-6,70	6,06-6,70

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
					2020	2022	2023	2024	2025	2026	
			Ketimpangan Pendapatan	%	16,26 sedang	16,34 sedang	16,38 sedang	16,42 sedang	16,46 sedang	16,50 sedang	16,50 sedang
4.1.1		Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan	Persentase Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan	%	30,42	29,79	29,81	29,83	29,85	29,87	29,87
4.1.2		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase pertumbuhan investasi	%	16	16	16	16	16	16	16
4.1.3		Meningkatnya angka kunjungan wisatawan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	-66,41	3,00	3,05	3,10	3,18	3,26	3,26
4.1.4		Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PMKS	%	9,29	9,25	9,23	9,20	9,18	9,16	9,16
4.1.5		Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	8,59	6,8-7,8	6,3-7,5	5,8-7,1	5,3-6,3	4,8-6,0	4,8-6,0

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
					2020	2022	2023	2024	2025	2026	
4.1.6		Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	10,34	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
5	Misi 5: Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur										
5.1	Terwujudnya ruang kota yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Ruang Kota	Indeks	NA	63,11	65,38	67,04	68,64	70,21	70,21
5.1.1		Meningkatnya kualitas infrastruktur kota	Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	NA	90,36	90,86	91,36	91,86	92,36	92,36
5.1.2		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	52,36	72	74	76	78	80	80
5.1.3		Meningkatnya aksesibilitas perkotaan	Indeks aksesibilitas perkotaan	Indeks	NA	54,49	63,59	68,70	73,80	78,90	78,90
5.1.4		Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh	%	2,15	1,61	0,80	0,26	0,00	0,00	0,00
5.1.5		Terwujudnya lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	47,03	48,00	49,00	50,00	51,00	52,00	52,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
					2020	2022	2023	2024	2025	2026	
		yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik	%	16	16	16,5	17	17,5	18	18
5.2	Meningkatnya ketahanan daerah		Indeks Resiliensi Daerah	Indeks	NA	52,94	58,68	66,36	71,94	77,22	77,22
5.2.1		Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	NA	22,90	33,20	47,40	57,40	66,80	66,80
5.2.2		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor PPH	Skor	89,00	90,59	91,29	92,03	92,74	93,24	93,24

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan strategi dan arah kebijakan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kota Magelang tahun 2021-2026. Strategi adalah serangkaian langkah yang berisi program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah Kota Magelang hingga tahun 2026 dari setiap misi pembangunan dirumuskan sebagai berikut:

6.1.1. Misi 1: Menciptakan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, Beradab, Toleran dan Berlandaskan Imtaq

Misi ini menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kota Magelang dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab dan toleran dan berlandaskan imtaq. Penerapan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan akan tercermin dalam kehidupan masyarakat yang aman, bertenggang rasa, dan bergotong-royong sebagai modal sosial pembangunan.

Ukuran keberhasilan misi ini adalah tercapainya tujuan terwujudnya masyarakat kota yang berkarakter dengan sasaran meningkatnya penguatan toleransi, meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum, meningkatnya stabilitas daerah, meningkatnya penguatan kebudayaan, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Strategi dalam upaya pencapaian tujuan sasaran pada misi ini adalah:

- a. Penguatan penegakan Perda
- b. Peningkatan kapasitas SDM trantibumnas
- c. Fasilitas dialog antar kelompok dan antar umat beragama
- d. Peningkatan wawasan kebangsaan
- e. Deteksi dini gangguan keamanan
- f. Pengembangan seni budaya lokal
- g. Pelestarian cagar budaya
- h. Pendampingan keberdayaan masyarakat
- i. Peningkatan peran LKM

Program unggulan yang mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran misi ini adalah program pelayanan Pendidikan gratis mulai PAUS, SD, SMP, Program peningkatan kesejahteraan guru honorer, Program jaminan Kesehatan gratis untuk masyarakat yang tidak mampu, Program pelayanan Kesehatan paripurna, Program *Homecare* bagi balita dan lansia.



Gambar 6.1
Skema Strategi Pencapaian Misi 1

6.1.2. Misi 2: Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Misi kedua ini bertitik berat pada pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dan peningkatan kualitas SDM. Nilai IPM Kota Magelang tahun 2020 mencapai 78,99 dan berada pada posisi nomor 4 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Aspek pendidikan dan kesehatan yang merupakan komponen IPM erat kaitannya dalam peningkatan kualitas dan daya saing SDM. Kondisi rata-rata lama sekolah di Kota Magelang pada tahun 2020 mencapai 10,39; angka harapan lama sekolah mencapai 14,14 pada tahun 2020 dan angka harapan hidup mencapai 76,85 pada tahun 2020. Sedangkan jika dilihat dari kesetaraan gender, meskipun sudah termasuk dalam kategori baik tetapi masih belum ideal dan terjadi ketimpangan yang ditunjukkan dengan nilai IPG tahun 2020 sebesar 95,27 atau menurun dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 95,51.



Gambar 6.2

Skema Strategi Pencapaian Misi 2

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi kedua ini adalah meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dengan sasaran meningkatnya kualitas Pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing; meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat; meningkatnya daya beli masyarakat; dan meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan. Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran misi ini adalah:

- a. Peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing
- b. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- c. Peningkatan literasi masyarakat
- d. Pembinaan pemuda
- e. Pembinaan olahraga
- f. Pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat
- g. Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan
- h. Perluasan akses pelayanan Kesehatan
- i. Peningkatan pemahaman terkait Kesehatan reproduksi untuk pengendalian penduduk
- j. Pemasyarakatan olahraga
- k. Pengarusutamaan gender
- l. Pemberdayaan perempuan
- m. Perlindungan perempuan dan anak
- n. Peningkatan kualitas keluarga

Pencapaian tujuan sasaran misi kedua ini juga dilakukan melalui beberapa program unggulan, yaitu:

- a. Pelayanan pendidikan gratis jenjang PAUD, SD, SMP;
- b. Peningkatan kesejahteraan guru honorer;
- c. Jaminan kesehatan gratis untuk masyarakat tidak mampu;
- d. Home care bagi lansia dan balita;
- e. Memaksimalkan pelayanan kesehatan paripurna.

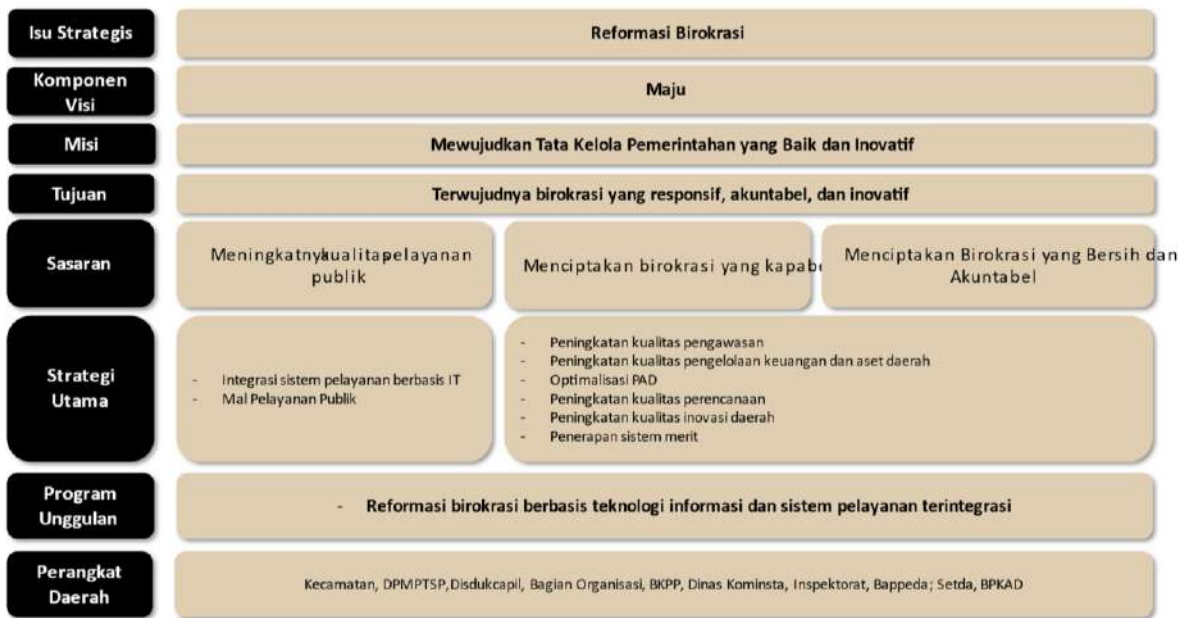
6.1.3. Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif

Komponen utama misi ketiga ini adalah reformasi birokrasi dalam pengelolaan pemerintahan. Tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif, dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik; menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan menciptakan birokrasi yang kapabel. Untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, inovasi perlu dilakukan agar birokrasi lebih efektif dan efisien. Komponen inovatif dalam misi tersebut merupakan alat yang digunakan untuk mewujudkan reformasi birokrasi, sehingga komponen ini tidak menjadi sasaran.

Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada misi ini adalah:

- a. Integrasi system pelayanan berbasis IT
- b. Pelayanan punlik
- c. Peningkatan kualitas pengawasan
- d. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
- e. Optimalisasi PAD
- f. Peningkatan kualitas perencanaan
- g. Peningkatan kualitas inovasi daerah
- h. Penerapan system merit

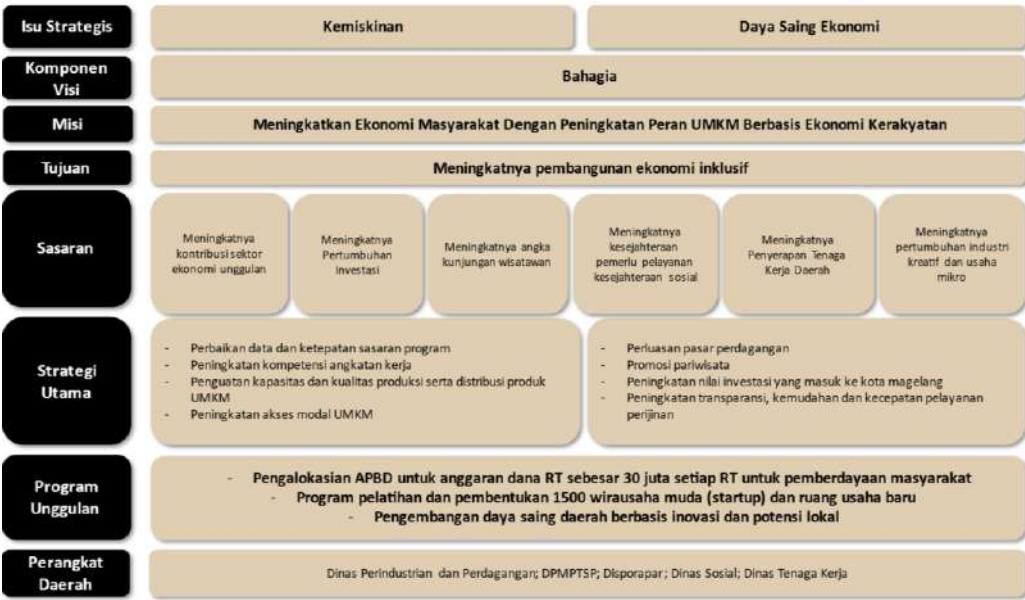
Program unggulan dalam mewujudkan tujuan sasaran pada misi ketiga ini adalah reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi. Program ini menekankan pada integrasi sistem layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi pendekatan yang perlu diterapkan dengan cakupan layanan administrasi pemerintahan (internal) maupun layanan publik (eksternal).



Gambar 6.3
Skema Strategi Pencapaian Misi 3

6.1.4. Misi 4: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Fokus dari misi keempat ini adalah penguatan ekonomi daerah berbasis masyarakat. Terdapat sebuah tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini yaitu meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif. Pembangunan ekonomi tidak hanya terpusat pada mengejar pertumbuhan tetapi juga memperhatikan pemerataan kesempatan ekonomi bagi seluruh masyarakat sehingga gap ketimpangan tidak semakin lebar. Peran Kota Magelang sebagai pusat kegiatan wilayah dengan tumpuan kegiatan ekonomi pelayanan jasa juga perlu dimantabkan. Kontribusi ekonomi dari peran Kota Magelang ini perlu didorong untuk terus ditingkatkan.



Gambar 6.4
Skema Strategi Pencapaian Misi 4

Sasaran dalam pencapaian tujuan dari visi ini adalah meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan; meningkatnya pertumbuhan investasi; meningkatnya angka kunjungan wisatawan; meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan social; meningktanya penyerapan tenaga kerja daerah; meningkatnya pertumbuhan industry kreatif dan usaha mikro. Adapun strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. Perbaikan data dan ketetapan sasaran program
- b. Peningkatan kompetensi Angkatan kerja
- c. Penguatan kapasitas dan kualitas produksi serta distribusi produk UMKM
- d. Peningkatan akses modal UMKM
- e. Perluasan pasar perdagangan
- f. Promosi pariwisata
- g. Peningkatan nilai investasi yang masuk ke Kota Magelang
- h. Peningkatan transparansi, kemudahan dan kecepatan pelayanan perijinan

Program unggulan yang dirumuskan dalam pencapaian misi ini adalah:

- a. Pengalokasian APBD untuk anggaran dana RT sebesar 30 juta setiap RT untuk pemberdayaan masyarakat
- b. Program pelatihan dan pembentukan 1.500 Wirausaha Muda (*Start Up*) dan ruang usaha baru
- c. Pengembangan daya saing daerah berbasis inovasi dan potensi lokal

6.1.5. Misi 5: Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur

Misi mewujudkan Kota Magelang yang modern dan maju dimaknai dengan ketersediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Prinsip inklusifitas akses infrastruktur diterapkan selaras dengan upaya pengarusutamaan keberlanjutan. Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah terwujudnya ruang kota yang berkelanjutan dan meningkatnya ketahanan daerah. Sasaran yang dirumuskan adalah meningkatnya kualitas infrastruktur kota; meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang; meningkatnya aksesibilitas perkotaan; meningkatnya kualitas lingkungan permukiman; terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan; meningkatnya ketahanan terhadap bencana; meningkatnya ketahanan pangan daerah.

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan sasaran pada misi ini adalah:

- a. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur kota
- b. Penyediaan dokumen rencana rinci penataan ruang
- c. Perluasan media info dan komunikasi penataan ruang
- d. Penyediaan sarana perkotaan yang inklusif
- e. Penyediaan angkutan umum terintegrasi
- f. Peningkatan akses rumah layak huni
- g. Peningkatan akses sanitasi aman
- h. Peningkatan akses air bersih
- i. Peningkatan pencegahan pencemaran lingkungan
- j. Rehabilitasi lingkungan
- k. Penataan dan penambahan RTH public
- l. Pengembangan system informasi mitigasi bencana
- m. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
- n. Urban farming
- o. Pemenuhan cadangan pangan

Program unggulan yang dirumuskan dalam perwujudan kota maju adalah program pengelolaan sampah komprehensif menuju bebas sampah.

Isu Strategis	Kualitas Lingkungan Hidup			Sarana Prasarana Perkotaan Berkelanjutan		Ketahanan Daerah (Bencana dan Pangan)	
Komponen Visi	Maju					Sehat	
Misi	Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur						
Tujuan	Terwujudnya ruang kota yang berkelanjutan				Meningkatnya Ketahanan Daerah		
Sasaran	Meningkatnya kualitas infrastruktur kota	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Meningkatnya aksesibilitas perkotaan	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Meningkatnya ketahanan pangan daerah
Strategi Utama	- Pembangunan dan perbaikan infrastruktur kota - Penyediaan dokumen rencana rinci penataan ruang - Perluasan media info dan komunikasi penataan ruang - Penyediaan sarana perkotaan yang inklusif - Penyediaan angkutan umum terintegrasi - Peningkatan akses rumah layak huni - Peningkatan akses sanitasi aman				- Peningkatan akses air bersih - Peningkatan pencegahan pencemaran lingkungan - Rehabilitasi lingkungan - Penataan dan penambahan RTH Publik - Pengembangan sistem informasi mitigasi bencana - Peningkatan pemberdayaan masyarakat - Urban farming - Pemenuhan cadangan pangan		
Program Unggulan	- Program pengelolaan sampah komprehensif menuju bebas sampah						
Perangkat Daerah	Dinas PUPR, Dishub, Dinas Perhubungan, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, BPBD, dan Dinas Pertanian dan Pangan						

Gambar 6.5
Skema Strategi Pencapaian Misi 5

Ringkasan strategi dari pencapaian visi misi pembangunan Kota Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kota Magelang Tahun 2021-2026

VISI: “MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA”			
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Menciptakan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, Beradab, Toleran dan Berlandaskan Imtaq	Terwujudnya masyarakat kota yang berkarakter	- Meningkatnya penguatan toleransi - Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum - Meningkatnya stabilitas daerah - Meningkatnya penguatan kebudayaan, dan - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	- Penguatan penegakan Perda - Peningkatan kapasitas SDM trantibumnas - Fasilitas dialog antar kelompok dan antar umat beragama - Peningkatan wawasan kebangsaan - Deteksi dini gangguan keamanan - Pengembangan seni budaya lokal - Pelestarian cagar budaya - Pendampingan keberdayaan masyarakat - Peningkatan peran LKM

VISI: "MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA"			
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	- Meningkatkan kualitas Pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing; - meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat; - Meningkatkan daya beli masyarakat; dan - Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan	- Peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing - Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan - Peningkatan literasi masyarakat - Pembinaan pemuda - Pembinaan olahraga - Pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat - Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan - Perluasan akses pelayanan Kesehatan - Peningkatan pemahaman terkait Kesehatan reproduksi untuk pengendalian penduduk - Pemasyarakatan olahraga - Pengarustamaan gender - Pemberdayaan perempuan - Perlindungan perempuan dan anak - Peningkatan kualitas keluarga

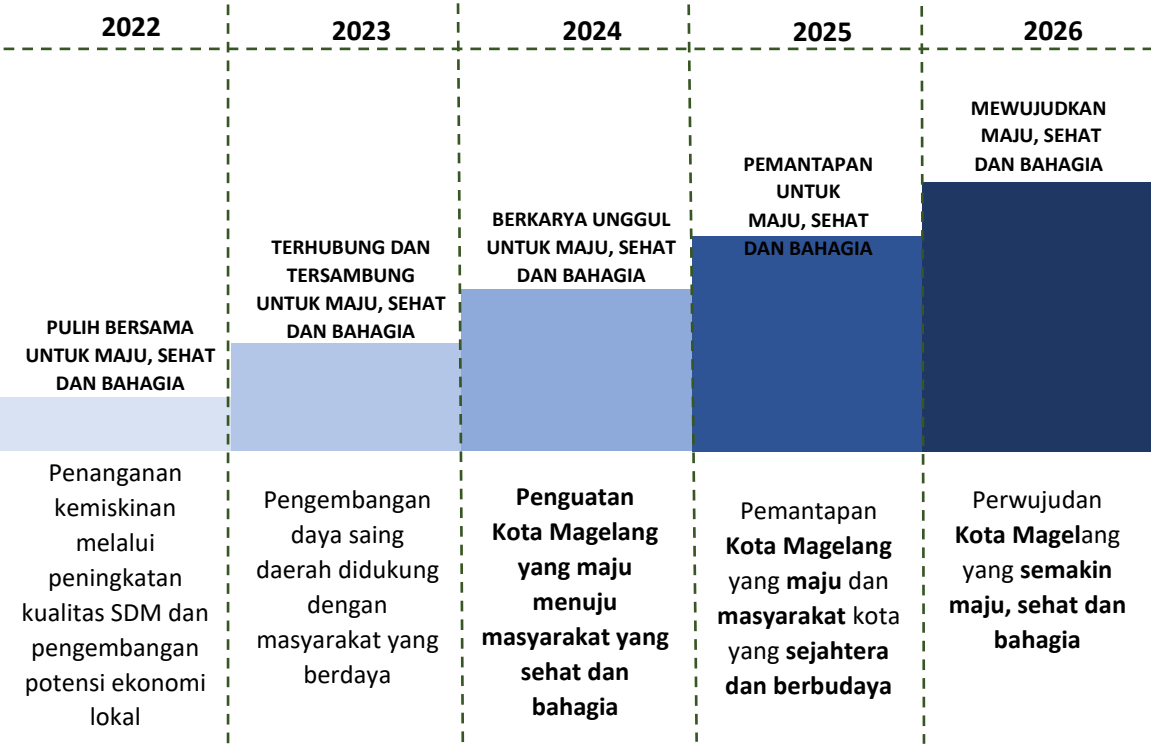
VISI: “MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA”			
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	- Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan - Penguatan Gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan - Pengawasan sediaan obat, alat kesehatan dan makanan minuman di masyarakat - Pemasyarakatan olahraga - Peningkatan kesehatan reproduksi untuk pengendalian penduduk
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif	Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik; - Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan - Menciptakan birokrasi yang kapabel	- Integrasi system pelayanan berbasis IT - Pelayanan punlik - Peningkatan kualitas pengawasan - Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah - Optimalisasi PAD - Peningkatan kualitas perencanaan - Peningkatan kualitas inovasi daerah - Penerapan system merit

VISI: “MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA”			
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif	- Meningkatkan kontribusi sektor ekonomi unggulan; - Meningkatkan pertumbuhan investasi; - Meningkatkan angka kunjungan wisatawan; - Meningkatkan kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan social; - Mmeningktanya penyerapan tenaga kerja daerah; - Meningkatkan pertumbuhan industry kreatif dan usaha mikro	- Perbaikan data dan ketetapan sasaran program - Peningkatan kompetensi Angkatan kerja - Penguatan kapasitas dan kualitas produksi serta distribusi produk UMKM - Peningkatan akses modal UMKM - Perluasan pasar perdagangan - Promosi pariwisata - Peningkatan nilai investasi yang masuk ke Kota Magelang - Peningkatan transparansi, kemudahan dan kecepatan pelayanan perijinan

VISI: "MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA"			
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur	Terwujudnya ruang kota yang berkelanjutan dan meningkatnya ketahanan daerah	- Meningkatkan kualitas infrastruktur kota; - Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang; - meningkatnya aksesibilitas perkotaan; - Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; - Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan; - Meningkatkan ketahanan terhadap bencana; - Meningkatkan ketahanan pangan daerah	- Pembangunan dan perbaikan infarastruktur kota - Penyediaan dokumen rencana rinci penataan ruang - Perluasan media info dan komunikasi penataan ruang - Penyediaan sarana perkotaan yang inklusif - Penyediaan angkutan umum terintegrasi - Peningkatan akses rumah layak huni - Peningkatan akses sanitasi aman - Peningkatan akses air bersih - Peningkatan pencegahan pencemaran lingkungan - Rehabilitasi lingkungan - Penataan dan penambahan RTH public - Pengembangan system informasi mitigasi bencana - Peningkatan pemberdayaan masyarakat - Urban farming - Pemenuhan cadangan pangan -

6.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian visi misi pembangunan Kota Magelang Tahun 2021-2026 yang telah diterjemahkan kedalam beberapa strategi pembangunan, diperlukan arah kebijakan tahunan agar lebih fokus dalam setiap tahapan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan setiap tahun. Pentahapan yang dibuat juga dilakukan dengan sinkronisasi terhadap arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Arah kebijakan pembangunan Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.



Gambar 6.6
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Magelang
Tahun 2021-2026

1. Arah Kebijakan Tahun 2022

Kondisi ini merupakan tahap awal perencanaan untuk pembangunan jangka menengah Kota Magelang. Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2022 ditujukan untuk **“Penanganan kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengembangan potensi ekonomi lokal”**, dengan prioritas pada:

- a. Peningkatan kualitas layanan dasar dan tata kelola pemerintahan didukung penerapan TIK;
- b. Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan;

- c. Peningkatan daya saing dengan perbaikan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur;
- d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah;
- e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan
- f. Peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah.

2. Arah Kebijakan Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan Kota Magelang tahun 2023 diarahkan pada **“Pengembangan daya saing daerah didukung dengan masyarakat yang berdaya”**, dengan fokus prioritas pada:

- a. Percepatan penanggulangan kemiskinan
- b. Penguatan kualitas layanan dasar dan tata kelola pemerintahan
- c. Perluasan akses partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- d. Peningkatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat
- e. Penguatan potensi ekonomi lokal dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan
- f. Pengembangan kawasan strategis
- g. Pengembangan integrasi sistem informasi
- h. Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan
- i. Pengembangan inovasi

3. Arah Kebijakan Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan akhir masa jabatan walikota dan wakil walikota, sehingga diharapkan sudah mulai muncul indikasi hasil dari perwujudan visi **“Kota Magelang Maju, Sehat, dan Bahagia”**. Untuk itu, arah kebijakan pembangunan ditujukan pada **“Penguatan Kota Magelang yang maju menuju masyarakat yang sehat dan Bahagia”** dengan prioritas:

- a. Penguatan peran masyarakat sebagai mitra
- b. Perluasan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin
- c. Penguatan daya saing daerah
- d. Pemantapan ketahanan sosial budaya dan toleransi masyarakat
- e. Perwujudan layanan publik prima
- f. Penguatan dan pengembangan kawasan strategis
- g. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas SDM

4. Arah Kebijakan Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 tentunya masih dalam rangka mewujudkan visi Kota Magelang Tahun 2021-2026. Selain itu, tahun ini merupakan akhir dari periode RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025, sehingga diharapkan tujuan dari pembangunan jangka panjang tersebut sudah menunjukkan tanda perwujudan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan tahun 2025 adalah **“Pemantapan Kota Magelang yang maju dan masyarakat kota yang sejahtera dan berbudaya”**, dimana diprioritaskan pada:

- a. Pemantapan kesejahteraan masyarakat
- b. Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra
- c. Pemantapan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin
- d. Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah
- e. Penguatan perwujudan ruang kota layak huni
- f. Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat
- g. Pemantapan layanan publik prima
- h. Pemantapan daya saing daerah

5. Arah Kebijakan Tahun 2026

Tahun 2026 menjadi akhir dari pembangunan jangka menengah periode 2021-2026. Selain itu, tahun ini juga menjadi masa transisi kepemimpinan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 adalah “Perwujudan Kota Magelang yang semakin maju, sehat dan bahagia”. Fokus pembangunannya antara lain:

- a. Perwujudan kesejahteraan masyarakat
- b. Perwujudan keberdayaan masyarakat
- c. Perwujudan ruang kota layak huni

6.3 Arah Pengembangan Wilayah

6.3.1 Pengembangan Internal Wilayah

Kota Magelang tumbuh seiring dengan perkembangan waktu bersama dengan wilayah lainnya. Kota Magelang telah berkembang dari waktu ke waktu dengan empat konsepnya yaitu suci, subur, indah dan strategis. Suci yaitu dengan adanya Gunung Tidar sebagai kota wisata spiritual. Magelang yang didalamnya terdapat Gunung Tidar, menjadi bagian dari perkembangan wilayah Dieng saat menjadi daerah yang banyak dibangun candi. Secara historis, keberadaan Gunung Tidar sebagai

Pakuning Tanah Jawa sudah menjadi legenda. Kota Magelang dan Gunung Tidar mempunyai kesamaan konotasi, artinya ketika mendengar kata Gunung Tidar maka sudah terasosiasi dengan Kota Magelang, dan sebaliknya.

Kemudian “subur” yaitu mendukung sebagai kota taman. Dari beberapa referensi, Kota Magelang juga secara historis pernah mendapat sebutan positif, yaitu sebagai kota kebun tanah Jawa atau *‘Tuin Van Java’*, dan juga ada sebutan Magelang sebagai *‘Paradijs Van Java’* atau Magelang adalah surganya Pulau Jawa (sebutan tersebut dimuat dalam artikel berjudul *‘In En Om Magelang (1920). Konsep ketiga yaitu indah dimana Kota Magelang sebagai kota yang nyaman untuk relaksasi, dan yang terakhir adalah strategis dimana terletak pada persimpangan jalur Semarang-Yogyakarta.*

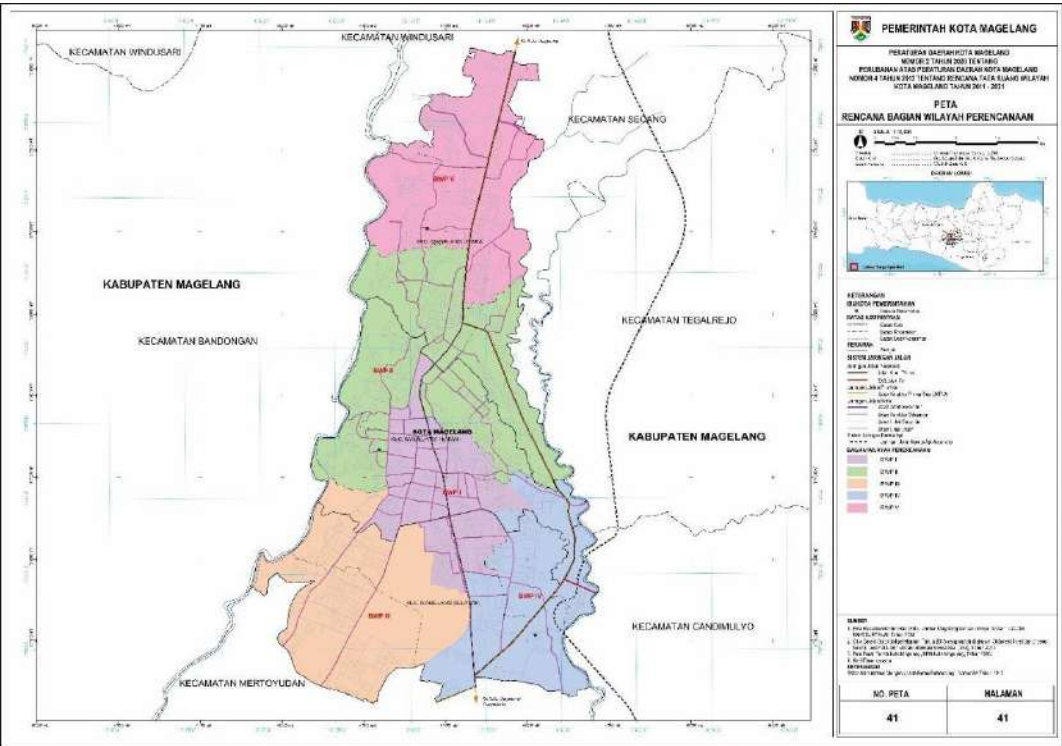
Sementara itu, keberadaan Sungai Progo dan Elo telah menghubungkan Kota Magelang dengan Semarang, Purworejo pada saat Semarang dan Purworejo berkembang sebagai bagian dari kerajaan kuno sebagai jalur transportasi air dan semakin menguat hubungannya pada saat Semarang dan Magelang sama-sama menjadi wilayah yang dikuasai Belanda serta saat Kota Magelang sebagai kota militer dan ibu kota karesidenan Kedu.

Menurut Peraturan Daerah Kota Magelang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang 2011-2031, Kota Magelang terbagi menjadi pusat pelayanan dan subpusat pelayanan. Pusat pelayanan Kota Magelang terletak di Kawasan Alun-Alun atau disebut sebagai BWP I. BWP I mempunyai luas kurang lebih 245 ha dengan fungsi utama sebagai Kawasan pusat pelayanan sosial dan ekonomi skala kota rekreasi wisata perkotaan, dan permukiman dengan kepadatan tinggi. Subpusat pelayanan merupakan pusat pelayanan skala kota atau fungsi Kawasan dalam memberikan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam masing-masing bagian wilayah kota atau fungsi pelayanan internal.

Sub pusat pelayanan di Kota Magelang yaitu:

- a. Sub Pusat Pelayanan Kota berada pada BWP I yaitu Kawasan Pasar Rejowinangun sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota berada pada BWP II yaitu Kawasan Kebonpolodengan fungsi utama pusat pelayanan Permukiman kepadatan tinggi dan sedang, perdagangan, perguruan tinggi, dan pendidikan angkatan darat.

- c. Sub Pusat Pelayanan Kota berada pada BWP III yaitu Kawasan Taman Kyai Langgeng dengan fungsi pusat pelayanan rekreasi kota/wisata alam skala regional, pelestarian alam, pendidikan angkatan darat, dan Permukiman dengan kepadatan sedang
- d. Sub Pusat Pelayanan Kota berada pada BWP IV yaitu Kawasan Sukarno-Hatta dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan kota, pengembangan perdagangan dan jasa, simpul pergerakan barang, jasa dan orang, dan Permukiman kepadatan tinggi
- e. Sub Pusat pelayanan kota berada pada BWP V yaitu Kawasan Sidotopo dengan fungsi pusat pelayanan perguruan tinggi, perbelanjaan toko modern, kawasan pengembangan sosial budaya, olahraga, dan rekreasi, Permukiman kepadatan sedang.



Gambar 6.7
Rencana Bagian Wilayah Perencanaan Kota Magelang
Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031

Beberapa potensi internal Kota Magelang yang menjadi generator perkembangan kota, diantaranya yaitu keberadaan Akademi Militer yang merupakan pusat pendidikan kemiliteran dengan layanan nasional sudah banyak dikenal dari seluruh penjuru wilayah Indonesia, sehingga berdampak pada kunjungan ke Kota Magelang semakin meningkat. Kebutuhan akomodasi menjadi daya tarik investor untuk mengembangkan usaha perhotelan dan restoran di Kota Magelang. Potensi pengembangannya dapat terbagi menjadi:

- a. Kawasan Sidotopo sebagai pusat pelayanan pendidikan, perdagangan dan jasa, pada kawasan ini direncanakan untuk memwadhahi pendirian perguruan tinggi negeri dan kawasan perdagangan dan jasa;
- b. Kawasan Sukarno Hatta sebagai pusat pelayanan kegiatan transportasi dan perdagangan jasa, pada kawasan ini sudah disiapkan sebidang lahan untuk pembangunan pasar induk yang dipadukan dengan pergudangan dan integrated station terminal penumpang dan stasiun kereta api;
- c. Kawasan Kebonpolo sebagai pusat pelayanan kegiatan transportasi dan perdagangan;
- d. Kawasan Alun-alun sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan perkantoran Regional, juga memwadhahi kegiatan rekreasi masyarakat;
- e. Kawasan GOR Samapta sebagai pusat pelayanan rekreasi dan olahraga, kelengkapan sarana, seperti lapangan tennis *indoor* dan *outdoor*, *samapta aquatic stadium*, Stadion Moch. Soebroto, GOR samapta, dan rencana pelengkap kawasan termasuk RTH Publik, Masjid Kawasan, Kantor Kepemudaan dan Olahraga, BMX dan skater track, dan sebagainya.
- f. Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan kesehatan akan dikembangkan menjadi pusat perdagangan dan pendukung pengembangan wisata Kebun Raya Gunung Tidar dengan pembangunan IKM Center;
- g. Kawasan Objek Wisata Taman Kyai Langgeng sebagai kawasan pusat pelayanan rekreasi dan olahraga, dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kawasan, maka pada lokasi sekitar Taman Kyai Langgeng telah dibangun Showroom Mudalrejo yang memwadhahi pemasaran hasil-hasil UMKM Kota Magelang.

Skenario pengembangan Kota Magelang adalah dengan menciptakan pusat-pusat kegiatan baru yang berfungsi sebagai generator pertumbuhan ekonomi dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan perekonomian, kesehatan, dan pendidikan yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota / regional. Dari Kawasan-kawasan strategis yang ada di dalam RTRW Kota Magelang, fokus pengembangan kawasan di antaranya adalah: a). Pengembangan kawasan sport center di daerah GOR Samapta/ Sanden; b). Pengembangan kawasan Sidotopo; c). Pengembangan kawasan Mantyasih; d). Pengembangan kawasan Gunung Tidar; e). pengembangan Kawasan Soekarno Hatta; dan f) kawasan Alun-Alun

Sebagaimana halnya Akademi Militer sebagai pusat pendidikan militer skala nasional di Kota Magelang, dengan ditetapkannya Universitas Tidar sebagai universitas negeri di Indonesia juga menyebabkan terjadinya perubahan fisik sosial di lingkungan sekitar Universitas Tidar, seperti semakin banyaknya tempat kos sebagai tempat tinggal sementara para mahasiswa, semakin menjamurnya tempat usaha untuk melayani kebutuhan mahasiswa, dan semakin banyaknya pendatang seperti mahasiswa yang belajar di Universitas Tidar. Keberadaan Universitas Tidar sebagai universitas negeri akan menjadi tarikan bagi masyarakat dari luar Magelang yang menyebabkan Kota Magelang menjadi semakin padat. Berkembangnya Kawasan Universitas Negeri Tidar akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kepadatan permukiman, sehingga berpotensi terjadinya penurunan kualitas permukiman. Hal ini harus diantisipasi mulai dari sekarang sehingga potensi tersebut tidak terjadi.

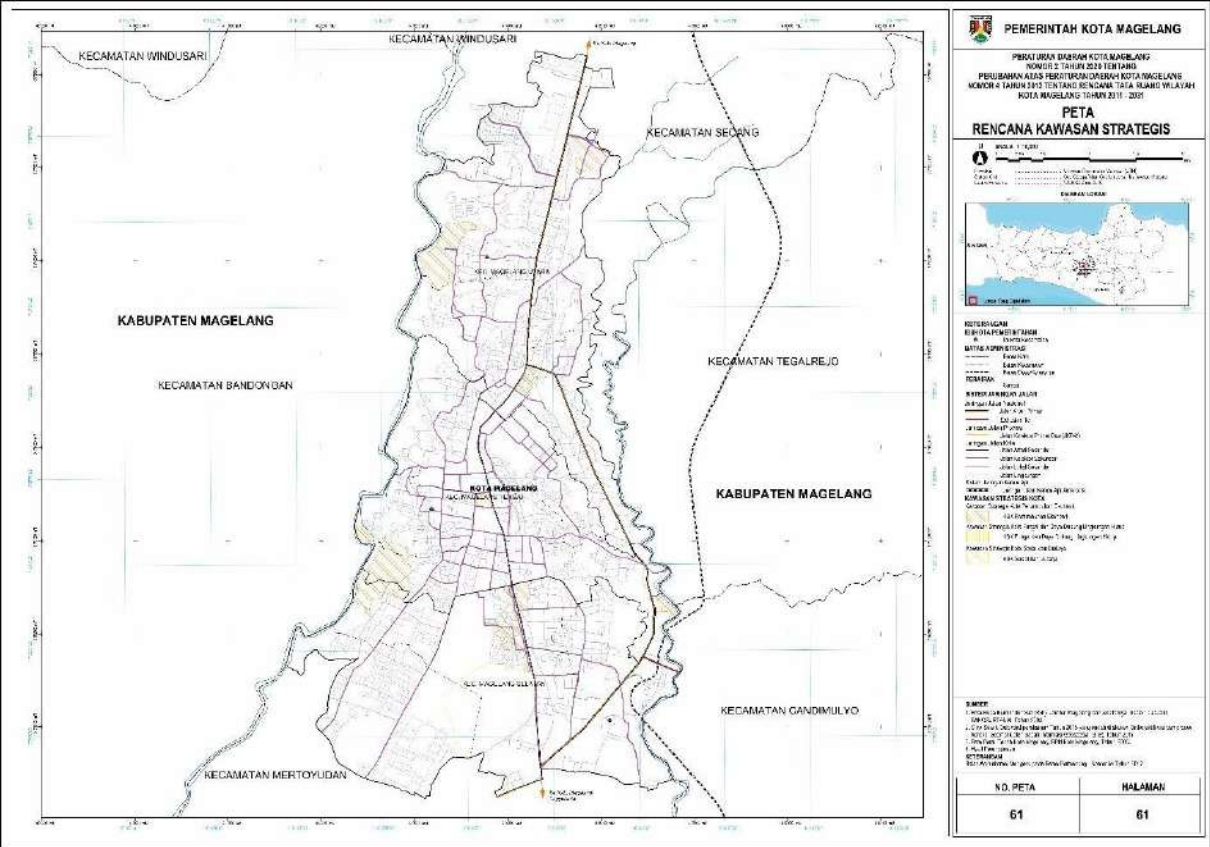
Pengembangan Kawasan Universitas Negeri Tidar sudah diatur di dalam tata ruang RDTR BWP V yaitu Kawasan Sidotopo. Kawasan ini juga telah ditetapkan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan nantinya akan terbagi menjadi kawasan pendidikan dan kawasan perdagangan dan jasa. Di sekitar Kawasan Sidotopo juga dikembangkan kawasan permukiman untuk mendukung kegiatan pendidikan disana.

Gunung Tidar saat ini dikembangkan menjadi Kebun Raya. Dengan perubahan status menjadi Kebun Raya, Gunung Tidar yang saat ini sebagai destinasi wisata religius dan juga sebagai kawasan lindung, fungsinya akan meningkat yaitu untuk konservasi, pendidikan, penelitian, wisata dan jasa lingkungan. Dengan perubahan status ini, Gunung Tidar ke depan akan menjadi daya tarik dan destinasi utama di Kota Magelang yang mampu menggenerate perekonomian Kota Magelang.

Kawasan Soekarno Hatta, sebagai salah satu kawasan strategis Kota Magelang bersinggungan dengan program strategis nasional yaitu rencana exit tol Tol Bawen-Yogyakarta dan stasiun terintegrasi reaktivasi Jalur Kereta Api Semarang- Borobudur-Yogyakarta. Disamping itu Pemerintah Kota Magelang juga telah mengajukan usulan untuk pembangunan Fly-Over Canguk untuk mengurai kemacetan di sekitar kawasan tersebut.

Untuk mendukung pelayanan pemerintah yang prima kepada masyarakat, maka akan dibangun juga kantor pemerintahan Kota

Magelang pada kawasan perkantoran di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan.



Gambar 6.8
Rencana Kawasan Strategis Kota Magelang
Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031

Beberapa arahan indikasi program untuk mewujudkan keterpaduan internal wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 disajikan pada tabel berikut

Tabel 6.2
Arahan Indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang Penunjang Keterpaduan Wilayah Internal
Kota Magelang 2022-2016

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
B	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG								
II	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kota								
	a. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Darat								
	1. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan								
	a. Program Pengembangan Jaringan Jalan berdasarkan Sistem								
	Persiapan, perencanaan dan pembebasan lahan <i>Exit</i> Jalan Tol Bawen-Yogyakarta	<i>Exit</i> Jalan Tol Kota Magelang						APBN, APBD Kota	DPUPR, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BPN
	Pembangunan <i>Exit</i> Jalan Tol Bawen-Yogyakarta	<i>Exit</i> Jalan Tol Kota Magelang						APBN, APBD Kota	DPUPR, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan
	Pengembangan jalur lambat pada jalan arteri	Jalan Arteri Kota Magelang						APBN	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII, DPUPR

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum								
	Studi Kelayakan dan perencanaan pengembangan terminal penumpang tipe A	Terminal Bus Tidar						APBN	DPUPR, DISHUB, BAPPEDA, DLH
	Pengembangan terminal penumpang Tipe A terintegrasi dengan sarana transportasi lainnya	Terminal Bus Tidar						APBN	Kementerian Perhubungan, DPUPR, DISHUB
	c. Pengembangan Terminal Barang								
	Studi kelayakan sarana pergudangan dan <i>rest area</i> angkutan barang Kota Magelang	Terminal Barang Jalan Sukarno-Hatta						APBN	DISHUB, DPUPR, BAPPEDA, Kementerian Perhubungan
	Pembangunan dan pengembangan sarana pergudangan dan <i>rest area</i> angkutan barang Kota Magelang	Terminal Barang Jalan Sukarno-Hatta						APBN	DISHUB, Kementerian Perhubungan
	d. Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	• Perencanaan <i>Fly Over</i>	Kawasan Cangkuk dan Kawasan Trio						APBN	DPUPR, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII,
	• Pembebasan Lahan dampak <i>Fly Over</i>	Kawasan Cangkuk dan Kawasan Trio						APBN	DPUPR, BPN, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII,
	• Pembangunan <i>Fly Over</i>	Kawasan Cangkuk dan Kawasan Trio						APBN	DPUPR, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII,
	2. Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api								
	- Perencanaan jaringan kereta api	Rencana Jaringan Pelayanan Kereta Api yang ditetapkan						APBN	Kementerian Perhubungan, PT KAI, DPUPR, BAPPEDA
	- Pembebasan lahan jaringan kereta api	Rencana Jaringan Pelayanan Kereta Api yang ditetapkan						APBN	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, BAPPEDA, BPN, DPUPR

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Pembangunan jalur kereta api dan stasiun kereta api	Jalur dan stasiun kereta api yang ditetapkan						APBN	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, BAPPEDA, BPN, DPUPR
	b. Perwujudan Sistem Infrastruktur Perkotaan								
	1. Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah								
	- Pengembangan dan Pembangunan IPAL Permukiman	Seluruh Kota Magelang						APBN, APBD Provinsi, APBD Kota , NGO	DPUPR, DLH DISPERKIM, NGO
	2. Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan								
	TPST Regional								
	- Pembebasan Lahan TPST Regional	Kabupaten Magelang						APBN, APBD Kota, APBD Provinsi	DLH, BAPPEDA, DPUPR, Pemprov Jawa Tengah dan Pemda regional Kawasan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Pembangunan dan penataan TPST Regional	Kabupaten Magelang						APBN, APBD Kota, APBD Provinsi	DLH, BAPPEDA, DPUPR, Pemprov Jawa Tengah dan Pemda regional Kawasan

Sumber: Perda Kota Magelang No. 2 Tahun 2020

Tabel 6.3
Arahan Indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang Penunjang Keterpaduan Wilayah Internal
Kota Magelang 2022-2026

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
B	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG								
I	Perwujudan Pusat Kegiatan Kota								
	a. Perwujudan Sistem Perkotaan dilakukan melalui program :								
	1. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Kota	BWP I Kota Magelang meliputi							
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota BWP I	sebagian Kelurahan Cacaban, sebagian						APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	Penyusunan Peraturan Zonasi	Kelurahan Kemirirejo, sebagian Kelurahan Magelang, sebagian Kelurahan Magersari, Kelurahan Panjang, Kelurahan Rejowinangun Selatan, dan sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara, yaitu Kawasan Alun-alun.						APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA
	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan							APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA
	Penyusunan Panduan Rancang Kawasan Perkotaan							APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA
	2. Program Pengembangan Subpusat Pelayanan Kota	2. Subpusat pelayanan kota terdapat di pusat BWP I meliputi							
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota BWP II, BWP III, BWP IV dan BWP V							APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	Penyusunan Peraturan Zonasi	sebagian Kelurahan Cacaban, sebagian						APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA
	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan							APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
		Kelurahan Kemirirejo, sebagian Kelurahan Magelang, sebagian Kelurahan Magersari, sebagian Kelurahan Panjang, Kelurahan Rejowinangun Selatan dan sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara, yaitu Kawasan Rejowinangun 3. subpusat pelayanan kota terdapat di pusat BWP II meliputi sebagian Kelurahan Cacaban, sebagian Kelurahan Magelang, Kelurahan Potrobangsari							DPUPR, BAPPEDA

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
II	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kota								
	a. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Darat								
	1. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan								
	a. Program Pengembangan Jaringan Jalan berdasarkan Sistem								
	Studi pengembangan dan inventarisasi jaringan jalan arteri, kolektor, lokal sekunder dan lingkungan serta sertifikasi asset jalan	Wilayah Kota Magelang tersebar						APBD Kota	DPUPR
	Pembangunan jaringan jalan baru	Jalan Sukarno Hatta menuju Jalan Magelang-Salatiga Jalan Jend. SarwoEdi Wibowo menuju Jalan Jend. Sudirman Jalan lainnya di kota Magelang						APBN, APBD Provinsi dan Kota	DPUPR, DISHUB

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
.	b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum								
	Pengembangan integrasi sarana prasarana angkutan umum dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki	Seluruh Kota Magelang						APBD Kota	DISHUB , DPUPR

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Studi kelayakan dan perencanaan pengembangan terminal penumpang tipe C	- Terminal Kawasan Lembah Tidar - Terminal Kawasan Kebonpolo - Terminal Kawasan Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo - Terminal Kawasan Sukarno-Hatta - Terminal Kawasan Sidotopo - Terminal Kawasan Jalan Kalimas						APBD Kota	DPUPR, DISHUB, BAPPEDA, DLH

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Pembangunan, pengembangan dan revitalisasi terminal penumpang tipe C	- Terminal Kawasan Lembah Tidar - Terminal Kawasan Kebonpolo - Terminal Kawasan Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo - Terminal Kawasan Sukarno-Hatta - Terminal Kawasan Sidotopo - Terminal Kawasan Jalan Kalimas						APBN, APBD Kota	DPUPR, DISHUB
	c. Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Perencanaan, Pembangunan dan penataan area parkir umum/komunal	Parkir Umum Gunung Tidar dan Wilayah Kota Magelang tersebar						APBN, APBD Kota	DPUPR, DISHUB, DLH
	- Penataan, pemeliharaan, pengendalian dan pengembangan Parkir <i>on street</i> dan <i>off street</i>	Wilayah Kota Magelang tersebar						APBD Kota	DPUPR, DISHUB
	• Pengembangan Alinyemen	Wilayah Kota Magelang tersebar						APBN, APBD provinsi dan Kota	DPUPR, DISHUB
	• Pengembangan, Penataan dan pemeliharaan simpang dengan penambahan Alat Pengendali Lalu Lintas (APILL) dan sistem <i>Automatic Traffic Control System</i> (ATCS)	- Wilayah Kota Magelang tersebar - Persimpangan jalur lintas utama wilayah Daerah						APBD Kota	DISHUB
	b. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi								
	- Penyusunan Perda/Perwal jaringan telekomunikasi	Seluruh Kota Magelang						APBD Kota	DISKOMINSTA

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Pengembangan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jaringan lainnya dan pengembangan sistem bawah tanah (<i>ducting utilities</i>)	Seluruh Kota Magelang						APBD Kota,	DPUPR, DISKOMINSTA, Telkom,
	c. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
	Hidran								
	- Perencanaan, Penataan dan pengembangan hidran	Kawasan pusat pelayanan kota, kawasan strategis daerah, kawasan perumahan perkepadatan tinggi, kawasan perdagangan dan jasa						APBD Kota	BAPPEDA, DPUPR
	d. Perwujudan Sistem Infrastruktur Perkotaan								
	1. Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Pengembangan dan Pembangunan <i>reservoir</i> air minum	<i>Reservoir</i> Tidar, dan <i>reservoir</i> lainnya						APBN, APBD Kota, BUMD	PDAM, DPUPR
	2. Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah								
	- Studi Pencemaran Air Limbah di Kawasan Perumahan Padat	Kawasan Perumahan Padat Kota Magelang						APBD Kota	DLH, DISPERKIM
	- Pembangunan, penataan, dan pengembangan kapasitas dan jangkauan pelayanan jaringan limbah setempat skala komunal	Seluruh Kota Magelang						APBD Kota	DLH, DPUPR,DISPERKIM
	- Pengembangan dan pembangunan sanitasi komunal (MCK Komunal)	Kawasan perumahan sedang hingga padat						APBD Provinsi, APBD Kota , NGO	DPUPR, DLH DISPERKIM, NGO
	- Kajian Pengembangan pengelolaan limbah menjadi energi terbarukan	Seluruh Kota Magelang						APBD Kota	DPUPR, DLH DISPERKIM, DISPERINDAG

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Pengembangan jaringan air limbah yang terpisah dengan jaringan drainase	Seluruh Kota Magelang						APBD Kota	DLH,DPUPR
	3. Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan								
	TPST								
	- Pembangunan dan penataan TPST	TPST Jurangombo, dan TPST lainnya						APBN, APBD Kota	DLH, DPUPR, BAPPEDA
	TPS/TPS 3R								
	- Pengembangan dan penambahan/ pembangunan TPS/TPS 3R	Seluruh Kota Magelang						APBD Kota	DLH
	<i>Transfer Depo</i>								
	- Pengembangan dan penambahan Transfer Depo	Seluruh Kota Magelang						APBD Kota	DLH
	4. Perwujudan Sistem Jaringan Drainase								
	- Inventarisasi dan Studi Pengembangan Jaringan Drainase	Seluruh Kota Magelang						APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Pengembangan dan pembangunan jaringan drainase	Seluruh Kota Magelang						APBD Provinsi, Kota	DPUPR
	- Pengembangan sistem <i>ecodrain</i> (drainase berwawasan lingkungan)	Seluruh Kota Magelang						APBN, APBD Kota,	DPUPR, Litbang,
	- Pengembangan sistem drainase terpisah dengan sistem air limbah	Seluruh Kota Magelang						APBD Kota	DPUPR, DLH
	5. Perwujudan Sistem Jaringan Reklame								
	- Penyusunan Perda tentang pengembangan prasarana reklame	Kota Magelang						APBD Kota	DPUPR, DPMPTSP, BAPPEDA
	- Penyusunan Perda/Perwal arahan insentif dan disinsentif	Kota Magelang						APBD Kota	DPUPR, DPMPTSP, BAPPEDA
	6. Perwujudan Sistem Jaringan Pejalan Kaki								
	- Perencanaan, pengembangan, dan pembangunan trotoar/ruas pejalan kaki	Wilayah Kota Magelang tersebar						APBD Kota	DPUPR

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Perencanaan, pengembangan dan pembangunan fasilitas penyeberangan (jembatan penyeberangan, <i>zebra cross</i> , zona selamat sekolah, penyeberangan pelikan, penyeberangan <i>underpass</i>)	Wilayah Kota Magelang tersebar						APBD Kota	DPUPR, DISHUB
	7. Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana								
	- Perencanaan ruang evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana	Kota Magelang						APBD Kota	BAPPEDA, DPUPR, DISPERKIM, KESBANGPOLINMAS, DISPERKIM
	8. Perwujudan Jalur Sepeda								
	- Perencanaan/Penyusunan Perwal dan Penetapan jalur sepeda	Jalur sepeda yang telah ditetapkan						APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA, DISHUB
	- Pembangunan jalur sepeda atau marka jalur khusus sepeda	Jalur sepeda yang telah ditetapkan						APBD Kota	DPUPR, DISHUB
	- Pembangunan dan Pengembangan sarana pendukung jalur sepeda	Jalur sepeda yang telah ditetapkan						APBD Kota	DPUPR, DISHUB

Sumber: Perda Kota Magelang No. 2 Tahun 2020

Tabel 6.4
Arahan Indikasi Program Perwujudan Pola Ruang Penunjang Keterpaduan Wilayah Internal
Kota Magelang 2022-2026

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
C	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA								
I	Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung								
	a. Perwujudan Kawasan Lindung Setempat								
	1. Sempadan Jaringan Irigasi								
	- Sertifikasi asset sempadan irigasi daerah	- Saluran Kota						APBD Kota	BPKAD, BPN, DPUPR
	b. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota								
	- Inventarisasi RTH Kota Magelang	Kota Magelang						APBD Kota	DLH, DPUPR, Kecamatan, Kelurahan, UPTD Gunung Tidar, Swasta (<i>Developer</i>)
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan/Masterplan RTH Kota Magelang	Kota Magelang						APBD Kota	BAPPEDA, DLH

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Penyediaan dan Pemenuhan RTH Publik 20% (Pembebasan Lahan untuk RTH)	A. Taman Kota pada Kawasan Strategis Kota Magelang meliputi : - Kawasan Sukarno-Hatta - Kawasan Sidotopo - Kawasan Lembah Tidar - Kawasan <i>Sport Center</i> - Taman pengganti Gunung Tidar - Kawasan strategis lainnya B. Taman Kota yang tersebar di seluruh wilayah C. Kawasan perumahan berupa taman lingkungan D. RTH fungsi tertentu (Kawasan sempadan Irigasi kota dan Kawasan sempadan sungai) E. Pengembangan Pulau dan Median Jalan						APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta, CSR	BBWS, Bappeda, DPUPR, DLH, BPN, <i>Developer</i> , Swasta

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Penyusunan arahan insentif dan disinsentif dalam pengembangan RTH publik dan privat	Seluruh Kota Magelang						APBD Kota	DLH, DPMPTSP, BAPPEDA
	c. Perwujudan RTH Kebun Raya Gunung Tidar								
	- Perencanaan dan Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar	Kebun Raya Gunung Tidar						APBN, APBD Kota	BAPPEDA, DPUPR, DLH, UPTD Gunung Tidar, DISHUB, DISPORAPAR, LIPI
	- Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar sebagai destinasi wisata	Kebun Raya Gunung Tidar						APBN, APBD Kota	DISPORAPAR, UPTD Gunung Tidar
	- Pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada koridor jalan di sekeliling Kebun Raya	Jalan sekeliling kebun raya						APBD Kota	DISHUB
	d. Perwujudan Kawasan Lindung Geologi								
	- Pemenuhan RTH Kota minimal 30% sebagai bentuk perlindungan imbuhan air tanah secara alami	Kota Magelang						APBD Kota	DLH

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Pemenuhan prasarana imbuhan buatan seperti sumur resapan, biopori, dan prasarana lainnya	CAT Magelang-Temanggung dan Mata Air						APBD Kota	DLH, DPUPR, DISPERKIM
	e. Perwujudan Kawasan Cagar Budaya								
	- Identifikasi dan penetapan cagar budaya	Seluruh Kota Magelang tersebar						APBD Kota	DISDIKBUD
	- revitalisasi dan/atau adaptasi terhadap bangunan cagar budaya	Seluruh Kota Magelang tersebar						APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, CSR, Swadana	BAPPEDA, DPUPR, DISDIKBUD
	- Perencanaan dan penataan potensi wisata cagar budaya	Seluruh Kota Magelang tersebar						APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, CSR, Swadana	DISDIKBUD, DISPORAPAR
	- Penyusunan sistem insentif dan disinsentif	Seluruh Kota Magelang tersebar						APBD Kota	DISDIKBUD,
II	Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	a. Perwujudan Kawasan Permukiman								
	1. Perwujudan Kawasan Perumahan								
	- Penertiban kawasan perumahan informal <i>squatter area</i> (liar)	Kota Magelang						APBD Kota	SATPOL PP, DLH, DISPERKIM, Kelurahan, Kecamatan
	- Penertiban dan pemindahan Lokasi permukiman tidak teratur di sempadan sungai atau sempadan irigasi	Kota Magelang						APBD Kota, APBN	DISPERKIM, DPUPR, Satpol PP
	2. Perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa								
	Sarana Pasar Rakyat								
	- Perencanaan Pasar Induk	Pasar Induk Kota Magelang						APBD Kota	DISPERINDAG, DISPERKIM, DISHUB, DPUPR, BAPPEDA
	- Pembangunan Pasar Induk	Pasar Induk Kota Magelang						APBN, APBD Provinsi, Kota, hibah, dan bantuan	DISPERINDAG, DISHUB, DPUPR

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	3. Perwujudan Kawasan Sektor Informal								
	- Arahan insentif dan disinsentif sektor informal	Seluruh Kota Magelang						APBD Kota	DISPERINDAG, SATPOL PP, LSM Paguyuban PKL
	4. Perwujudan Kawasan Pendidikan								
	- Perencanaan dan penataan Kawasan Pendidikan Sidotopo	Kawasan Sidotopo						APBN, APBD Kota	BAPPEDA, DPUPR, Universitas Tidar
	5. Perwujudan Kawasan Transportasi								
	- Pengadaan dan pembebasan lahan pengembangan terminal penumpang tipe C	Terminal penumpang Tipe C						APBD Kota	DISHUB
	6. Perwujudan Kawasan Kesehatan								
	- Pengembangan Teknologi Pengelolaan Limbah Cair dan Padat di Pusat Pelayanan Kesehatan (Sampah Spesifik) dan/atau melalui landfill atau incenerator	Seluruh kawasan kesehatan di Kota Magelang						APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Hibah, Bantuan	DLH

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	7. Perwujudan Kawasan Olah raga								
	- Perencanaan Sport Center	Sport Center/ GOR Samapta						APBD Kota	DISPORAPAR,BAPPEDA
	- Pengadaan Lahan Sport Center	Sport Center/ GOR Samapta						APBD Kota	DISPORAPAR, DIPERKIM, BPN
	- Pembangunan Sport Center	Sport Center/ GOR Samapta						APBN, APBD Kota	DPUPR, DISPORAPAR
	b. Perwujudan Kawasan Peruntukkan Industri								
	- Studi identifikasi dan inventarisasi jenis industri beserta sarana penunjangnya	Tersebar di Seluruh Wilayah Kota Magelang						APBD Kota	DISPERINDAG
	- Penataan, Peningkatan dan Pengembangan Sentra Industri	Tersebar di Seluruh Wilayah Kota Magelang						APBD Kota	DISPERINDAG
	- Pengembangan arahan insentif dan disinsentif	Tersebar di Seluruh Wilayah Kota Magelang						APBD Kota	DISPERINDAG
	- Pembangunan dan Pengembangan Sentra IKM	Tersebar di Seluruh Wilayah Kota Magelang						APBN, APBD Kota	DISPERINDAG, DPUPR
	c. Perwujudan Kawasan Pariwisata								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Pengembangan destinasi wisata baru/ daya tarik objek wisata baru	Seluruh Kota Magelang						APBD Kota, Swasta BUMD	DISPORAPAR, Swasta
	d. Perwujudan Kawasan Pertanian								
	- Inventarisasi kepemilikan lahan pertanian	Seluruh Kawasan pertanian Kota Magelang						APBD Kota	Dinas Pertanian dan Pangan
	- Penyusunan regulasi/ peraturan daerah terkait pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Seluruh Kawasan pertanian Kota Magelang						APBD Kota	Dinas Pertanian dan Pangan
	- Penyusunan arahan insentif disinsentif	Seluruh Kawasan pertanian Kota Magelang						APBD Kota	Dinas Pertanian dan Pangan
	- Pembebasan lahan KP2B	KP2B Kota Magelang						APBD Kota	Dinas Pertanian dan Pangan, BPKAD, DISPERKIM, BPN

Sumber: Perda Kota Magelang No. 2 Tahun 2020

Tabel 6.5

Arahan Indikasi Program Perwujudan Kawasan Strategis Penunjang Keterpaduan Wilayah Internal Kota Magelang 2022-2026

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3	SUMBER	INSTANSI PELAKSANA

			2022	2023	2024	2025	2026	DANA	
	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS								
	- Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis	Kawasan Strategis Kota Magelang						APBD Kota	DPUPR
	- Penyusunan Masterplan/Rencana Tata Bangun dan Lingkungan (RTBL)	Kawasan Strategis Kota Magelang						APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA
	a. Kawasan Strategis Kota Pertumbuhan Ekonomi								
	1. Kawasan Alun-alun dan sekitarnya								
	- Perencanaan rencana detail/RTBL/masterplan kawasan alun-alun	Kawasan Alun - alun Kota						APBD Kota	BAPPEDA, DPUPR
	- Pengaturan lalu lintas di sekitar Kawasan Alun-Alun	Kawasan Alun - alun Kota						APBN, APBD Provinsi dan Kota	DISHUB
	- Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung	Kawasan Alun - alun Kota						APBN, APBD Provinsi dan Kota	DPUPR, DISHUB, BAPPEDA, DLH
	- Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan kawasan alun-alun dan sekitarnya	Kawasan Alun - alun Kota						APBN, APBD Provinsi dan Kota	DPUPR, BAPPEDA,DLH, Investor, Swasta
	- Penyediaan dan penataan lokasi untuk kegiatan sektor informal	Kawasan Alun - alun Kota						APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA, DISPERINDAG, DLH

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Pengelolaan dan pengendalian kawasan sekitar alun-alun	Kawasan Alun - alun Kota						APBD Kota	DPUPR, DISHUB, BAPPEDA, DISPERINDAG, DLH
	2. Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar							APBN, APBD Provinsi dan Kota	DPUPR, DISHUB, BAPPEDA, DISPERINDAG
	- Revitalisasi dan/atau Pengembangan Kawasan Pasar Rejowinangun, Pasar Gotong Royong dan <i>Shopping Center</i> (kawasan perekonomian lembah tidar)	Kawasan Perekonomian Lembah Tidar						APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, swasta, CSR	DPUPR, DISPERINDAG, DISHUB, DLH, DISPORAPAR, swasta
	- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung	Kawasan Perekonomian Lembah Tidar						APBN, APBD Provinsi dan Kota	DPUPR, DISHUB, DLH
	3. Kawasan Kebonpolo								
	- Revitalisasi dan pengembangan kawasan Kebonpolo	Kawasan Kebonpolo						APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA, BPN, DISHUB, PT KAI, DLH
	- Penataan PKL Terminal Kebonpolo dan sekitarnya	Kawasan Kebonpolo						APBD Kota	DISHUB, DISPERINDAG, SATPOL PP
	4. Rencana Pengembangan Kawasan Sukarno Hatta								
	- Perencanaan Masterplan Kawasan Pasar Induk	Kawasan Pasar Induk						APBD Kota	DISPERINDAG, DPUPR, BAPPEDA, BPN, DISHUB, DLH

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Penataan dan Pembangunan Kawasan Pasar Induk	Kawasan Pasar Induk						APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DISPERINDAG, DISHUB, DPUPR
	5. Pengembangan Kawasan Sidotopo								
	- Penyusunan DED dan Masterplan Kawasan Sidotopo	Kawasan Sidotopo						APBN, APBD Kota	BAPPEDA, DPUPR, UN Tidar
	- Penataan dan Pembangunan Kawasan Sidotopo	Kawasan Sidotopo						APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Universitas	DPUPR, UN Tidar, DLH,
	6. Rencana Pengembangan Kawasan GOR Samapta								
	- Penataan dan Pengembangan Kawasan GOR Samapta	Kawasan GOR Samapta						APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA, DISPORAPAR, DISHUB
	b. Kawasan Strategis Kota Sosial dan Budaya								
	1. Kawasan Mantyasih								
	- Penyusunan DED dan Masterplan Kawasan Mantyasih	Kawasan Mantyasih						APBD Kota	BAPPEDA, DISDIKBUD, DLH, DPUPR, DISPORAPAR, BPN
	- Revitalisasi dan Penataan Kawasan Mantyasih	Kawasan Mantyasih						APBD Kota	DISDIKBUD, DISPORAPAR, DPUPR, BPN

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Penataan perumahan di Kawasan Mantyasih	Kawasan Mantyasih						APBD Kota	BAPPEDA, DISDIKBUD, DLH, DPUPR, DISPERKIM, BPN
	2. Cagar Budaya								
	- Inventarisasi cagar budaya							APBD Kota	DISDIKBUD
	- Revitalisasi dan adaptasi cagar budaya	Kawasan Cagar Budaya						APBD Kota	BAPPEDA,DISDIKBUD, DPUPR
	c. Kawasan Strategis Kota Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup								
	- Perencanaan dan Pengembangan kawasan Gunung Tidar sebagai Kebun Raya	Kawasan Gunung Tidar						APBN, APBD Kota	BAPPEDA, DPUPR, DLH, UPTD Gunung Tidar, DISHUB, DISPORAPAR, LIPI

Sumber: Perda Kota Magelang No. 2 Tahun 2020

6.3.2 Pengembangan Eksternal Wilayah

Rencana Pembangunan Nasional berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dengan sasaran-sasaran pokok yang direalisasikan melalui tahapan dan skala prioritas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Kota Magelang termasuk pada wilayah pengembangan Jawa-Bali dan koridor pemeratan Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Kabupaten Magelang dan 4 (empat) kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Klaten. Kota Magelang akan menerima manfaat dari beberapa program/proyek prioritas seperti berikut:

- (1). pengembangan kawasan strategis Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan sekitarnya.
- (2). pengembangan dan penguatan konektivitas darat (Jalan Tol Yogya-Bawen).
- (3). pengembangan Magelang yang termasuk dalam proyek prioritas pengembangan kawasan perkotaan, meliputi proyek prioritas nasional pembangunan *Fly Over* Canguk, SPALD-T skala permukiman, dan sistem pengelolaan persampahan skala kota.

Pengembangan Kota Magelang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Berpedoman pada RTRWN, Kota Magelang sebagai sebuah sistem perkotaan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Purwomanggung (Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, dan Kab. Temanggung). terdapat beberapa amanat pembangunan kewilayahan berupa:

- (1). rencana jalan bebas hambatan Pulau Jawa Yogyakarta-Bawen serta Kota Magelang;
- (2). termasuk dalam wilayah sungai Progo-Opak-Serang (bagian dari DAS Progo)
- (3). bagian pendukung kawasan andalan Borobudur dan sekitarnya dengan salah satu sektor unggulannya adalah pariwisata.

Implikasi dari penetapan Kota Magelang sebagai PKW yaitu menyediakan sarana prasarana yang tidak hanya melayani masyarakat dalam kota tetapi juga melayani masyarakat dalam skala regional Purwomanggung

Amanat nasional terkait dengan arah pengembangan Kota Magelang tidak hanya terdapat pada rencana pembangunan maupun rencana tata ruang nasional, tetapi juga diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 79 Tahun 2019 dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan. Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan sesuai dengan Lampiran Perpres 79 Tahun 2019 maka Kota Magelang masuk pada Kawasan Pendukung Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan Sekitarnya. Hal ini sinergis dengan peraturan perundangan lainnya untuk mendukung pengembangan KSPN Borobudur dan sekitarnya ditetapkan sebagai kawasan strategis dan/atau kawasan andalan. Disisi lain, dalam konteks kewilayahan, potensi utama di Wilayah Pengembangan (WP) Purwomanggung adalah di bidang pariwisata dan pertanian. Bidang pariwisata berpusat pada Kawasan Candi Borobudur dan potensi potensial lainnya sejauh 50-100 km dari Borobudur ke arah Yogyakarta-Dieng-Solo (Sangiran) dan Semarang. Sedangkan, potensi bidang pertanian berupa tanaman pangan dan holtikultura yang dioptimalkan menjadi agroindustri. Tema pembangunan Kawasan Purwomanggung adalah "Pengembangan Purwomanggung Berbasis Pertanian dan Pariwisata Guna Mendorong Sektor Industri Pertanian dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan." Dengan demikian posisi Kota Magelang harus ikut serta dalam pembangunan koridor Pariwisata KPSN Borobudur melalui pembangunan wisata perkotaan dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta pembangunan sektor jasa pendukung aktivitas masyarakat di kawasan Purwomanggung, serta memberikan dukungan konektivitas, dimana Kota Magelang menjadi salah satu simpul kedatangan wisatawan dengan pengintegrasian jalur kereta api Semarang-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta serta peningkatan jalan nasional baik arteri maupun jalan bebas hambatan Bawen-Yogyakarta.

Beberapa program yang dialokasikan di Kota Magelang yaitu:

- (1). revitalisasi sempadan Sungai Progo (river amenity);
- (2). peningkatan Terminal Tipe A Tidar; (rencana dibangun di lokasi Terminal Tidar, Jl. Sukarno Hatta, Tidar Utara , Kec Magelang Selatan)
- (3). pembangunan RSUD Tipe C; (rencana dibangun di eks Gedung Disporapar, Jl. Jend Gatot Subroto, kelurahan Jurangombo Selatan, Kec Magelang Selatan)
- (4). pembangunan RSUD Rujukan Kanker; (rencana dibangun di Eks Bakorwil II Karesidenan Kedu, Jl Diponegoro, Kel Cacaban, Magelang Tengah)

- (5). pembangunan Jalan Tol Ruas Bawen-Yogyakarta-Kab. Magelang;
- (6). reaktivasi pembangunan jalur kereta api Semarang-Ambarawa-Magelang-Borobudur; dan
- (7). pembangunan TPA/TPST-Regional Kab. Magelang.

Kota Magelang sebagai daerah penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dalam pembangunan dan pengembangannya memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 dan Perpres Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya, serta Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dimana terdapat lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas berupa Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Bitung-Liukupang.

Berdasarkan Perpres Nomor 58 Tahun 2014 wilayah KSN Borobudur dan sekitarnya terbagi menjadi dua, yaitu Sub Kawasan Pelestarian 1 (SP-1) yang berada pada radius 5 km, dan Sub Kawasan Pelestarian 2 (SP-2) yang berada pada radius 5-10 km. Sub Kawasan Pelestarian 1 (SP-1) diarahkan sebagai kawasan pelestarian utama, sedangkan Sub Kawasan Pelestarian 2 (SP-2) diarahkan sebagai kawasan penyangga yang dikendalikan pertumbuhan kawasan terbangunnya. Kota Magelang sebenarnya tidak masuk dalam radius tersebut sehingga ditetapkan Candi Borobudur sebagai Kawasan Strategis Nasional tidak memberikan dampak langsung untuk Kota Magelang. Akan tetapi, ditetapkan KSN Borobudur memberikan potensi bagi Kota Magelang berupa adanya potensi limpahan wisatawan dari Candi Borobudur untuk berkunjung ke Kota Magelang sehingga dapat memberikan dampak ekonomi bagi Kota Magelang.

Di sisi lain, jika dicermati lagi mengenai arahan pengembangan Sub Kawasan Pelestarian 2 (SP-2) yaitu sebagai kawasan penyangga yang dikendalikan pertumbuhan kawasan terbangunnya, maka dapat diketahui bahwa Kawasan SP-2 tidak akan dibuat menjadi kawasan perkotaan. Hal ini menjadi peluang bagi Kota Magelang untuk dapat menarik para wisatawan dari Candi Borobudur ke Kota Magelang. Peluang ini berlatar belakang bahwa saat ini Kota Magelang merupakan kawasan perkotaan dan banyak terdapat sarana perdagangan dan jasa yang diharapkan dapat melayani para wisatawan. Penetapan Candi Borobudur sebagai kawasan strategis nasional juga berkorelasi dengan pengembangan jalur pergerakan

sebagaimana tercantum pada Perpres Nomor 109 Tahun 2020, pada beberapa tahun ke depan akan dikembangkan jalan tol Yogyakarta-Bawen (Program Pengembangan Jalan Akses Exit Toll) dan jalur kereta api Semarang-Yogyakarta untuk meningkatkan konektivitas di kedua kota tersebut dan konektivitas menuju Candi Borobudur.

Pengembangan Kewilyahan menurut Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sinergis dengan penetapan Kota Magelang sebagai PKW meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi. Kota Magelang menjadi salah satu *vocal point* pelayanan di sisi Jawa Tengah Bagian Selatan sebagai Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Beberapa pengembangan dan acuan kewilayahan dari struktur ruang dan pola ruang sebagai berikut:

- (1). Rencana pengembangan jalan Arteri Primer, Bawen - Magelang - Perbatasan Yogyakarta;
- (2). Rencana pengembangan jalan kolektor Primer;
- (3). Rencana pengembangan jalan tol Pengembangan jalan tol sepanjang Yogyakarta - Bawen;
- (4). Rencana pengembangan terminal penumpang jalan Tipe A;
- (5). Rencana pengembangan kereta api komuter jalur Magelang - Yogyakarta;
- (6). Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat;
- (7). Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- (8). Kawasan rawan letusan gunung berapi Gunung Merapi;
- (9). Sebaran kawasan perlindungan Plasma Nutfah di daratan;
- (10). Kawasan hutan rakyat;
- (11). Kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- (12). Kawasan peruntukan peternakan besar dan kecil serta Peternakan unggas;
- (13). Lahan perikanan budidaya air tawar;

Tabel 6.6
Arahan Indikasi Program Perwujudan Pola Ruang Penunjang Keterpaduan Wilayah Eksternal
Kota Magelang 2022-2026

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
C	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA								
I	Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung								
	f. Perwujudan Kawasan Lindung Setempat								
	2. Sempadan Sungai								
	- Studi Penataan Sempadan Sungai	- Sungai Elo - Sungai Progo						APBN, APBD Kota	BBWS, DPUPR, BAPPEDA
	- Penetapan batas dan pemantapan fungsi sempadan sungai sebagai kawasan sempadan sungai	- Sungai Elo - Sungai Progo						APBN, APBD Kota	BAPPEDA, BPN, DPUPR, BBWS
	- Penataan dan pengembangan (revitalisasi) sempadan sungai	- Sungai Elo - Sungai Progo						APBN, APBD Kota	BAPPEDA, BPN, DPUPR, BBWS
	- Penataan dan pengembangan sempadan sungai sebagai RTH Publik	- Sungai Elo - Sungai Progo						APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Hibah, Bantuan, CSR	BAPPEDA, BPN, DPUPR, DLH, BBWS, Swasta

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Pembebasan Lahan sebagai RTH Publik sempadan sungai	- Sungai Elo - Sungai Progo						APBN, APBD Kota, Hibah, Bantuan , CSR	BBWS, BAPPEDA, DLH, DPUPR, Swasta, BPN
	3. Sempadan Jaringan Irigasi								
	- Studi penataan sempadan irigasi	- Saluran Progo Manggis - Saluran Bening - Saluran Kota - Saluran Ngaran - Saluran Gandekan - Saluran Kedali						APBN, APBD Kota	BBWS, DPUPR, BAPPEDA, DLH
	- Penetapan batas dan pemantapan fungsi sempadan irigasi	- Saluran Progo Manggis - Saluran Bening - Saluran Kota - Saluran Ngaran - Saluran Gandekan - Saluran Kedali						APBN, APBD Kota	BBWS, DPUPR, BAPPEDA, DLH, BPN

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Pengembangan, penataan dan pembebasan lahan sempadan irigasi sebagai RTH Publik	- Saluran Progo Manggis - Saluran Bening - Saluran Kota - Saluran Ngaran - Saluran Gandekan - Saluran Kedali						APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, CSR, Swasta	BBWS, BAPPEDA, DPUPR, DLH,BPN, Swasta
	- Penataan kawasan sempadan irigasi	- Saluran Progo Manggis - Saluran Bening - Saluran Kota - Saluran Ngaran - Saluran Gandekan - Saluran Kedali						APBN, APBD Provinsi, Kota	BBWS, DLH, DPUPR
	4. Sempadan Kereta Api								
	- Penataan sempadan kereta api	Sempadan Kereta Api Regional Ambarawa-Secang-Magelang Yogyakarta						APBN	Kementerian Perhubungan, PT KAI,DPUPR, BAPPEDA
	- Pembebasan lahan terdampak sempadan	Sempadan Kereta Api Regional Ambarawa-Secang-Magelang Yogyakarta						APBN	Kementerian Perhubungan, PT KAI,DPUPR, BAPPEDA, BPN

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	1. Perwujudan Kawasan Transportasi								
	- Revitalisasi, Pengembangan dan peningkatan terminal penumpang	Terminal penumpang Tipe A Tidar dan Seluruh terminal penumpang Tipe C						APBN dan APBD Kota	DISHUB
	2. Perwujudan Kawasan Kesehatan								
	- Perencanaan dan Pembangunan RSUD Tipe C	Kota Magelang						APBD Kota, KPBU	DKK
	- Perencanaan dan Pembangunan RSUD Rujukan Kanker	Kota Magelang						KPBU	DKK, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Perda Kota Magelang No. 2 Tahun 2020

Tabel 6.7

Arahan Indikasi Program Perwujudan Kawasan Strategis Penunjang Keterpaduan Wilayah Eksternal Kota Magelang 2022-2026

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS								
	a. Kawasan Strategis Kota Pertumbuhan Ekonomi								
	1. Rencana Pengembangan Kawasan Sukarno Hatta								
	- Penataan kawasan simpang canguk	Simpang Canguk						APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DPUPR, DISHUB
	- Penataan dan Pengembangan Terminal Angkutan Barang	Terminal Angkutan Barang Kawasan Pasar Induk						APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DISHUB, DPUPR, BPN, BAPPEDA, DLH, Kementerian Perhubungan
	- Penataan dan Pengembangan Terminal Angkutan Penumpang	Terminal A Tidar; Terminal C Kawasan Pasar Induk						APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DISHUB, DISPERINDAG, Kementerian Perhubungan

Sumber: Perda Kota Magelang No. 2 Tahun 2020

6.3.3 Strategi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan lokasi strategis dan keterkaitan dengan daerah sekitarnya, maka Kota Magelang perlu mengambil langkah dalam rangkaantisipasi dan menangkap peluang yang ada. Beberapa strategi yang dapat dilakukan diantaranya:

- a. Saujana Magelang sebagai dasar pengembangan fisik kota;
- b. melakukan penataan fisik kawasan yang sudah ada dengan perkuatan pada karakter masing-masing khususnya pada kawasan wisata minat khusus. Salah satu contohnya adalah dengan lebih menggaungkan legenda Gunung Tidar sebagai pakunya tanah Jawa;
- c. Menjaga keindahan, ketertiban, kebersihan kota dengan mengembangkan strategi yang sudah dikembangkan, yaitu: untuk menjaga dan meningkatkan keindahan kota bisa diterapkan kosep branding Magelang Kota Sejuta Bunga, untuk menjaga ketertiban kota diterapkan konsep penataan dan pemberdayaan PKL, untuk menjaga kebersihan kota diterapkan pengembangan kampung organik (Magelang Cantik) dan pengembangan bank sampah;
- d. Menggali dan menampilkan potensi seni-budaya kota;
- e. Memperkuat dan menjaga potensi kawasan dan bangunan cagar budaya;

6.4 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ditujukan untuk menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya. Program-program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 menjawab isu strategis Kota Magelang diantaranya:

- a. Kemiskinan;
- b. Kualitas sumber daya manusia;
- c. Sarana prasarana perkotaan yang berkelanjutan;
- d. Kualitas lingkungan hidup;
- e. Ketahanan daerah (ketahanan bencana dan ketahanan pangan);
- f. Daya saing ekonomi; dan
- g. Reformasi birokrasi.

Selain untuk menjawab isu strategis, program pembangunan yang dilaksanakan juga diarahkan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. SPM sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerjemahan program pembangunan dalam rangka pemenuhan SPM urusan pelayanan dasar ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 6.8
Penerapan Standar Pelayanan Minimal

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	PENDIDIKAN		
1	Pendidikan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Pendidikan Kesetaraan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
	KESEHATAN		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
PEKERJAAN UMUM			
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
PERUMAHAN RAKYAT			
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM		
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satpol PP
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
	SOSIAL		
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	

Perencanaan program pembangunan juga harus selaras dengan visi misi daerah yang telah diterjemahkan kedalam strategi dan arah kebijakan. Selain itu, terdapat juga program prioritas Wali Kota yang menjadi janji politik. Program ini juga merupakan operasionalisasi program prioritas Kepala Daerah. Penerjemahan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.9

Penerjemahan Program Unggulan Kepala Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026

N o	Misi	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Implementasi Kegiatan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Keterangan

No	Misi	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Implementasi Kegiatan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	Mewujudkan Masyarakat Yang Religi, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq	Peningkatan peran rumah ibadah 	Program ini berupaya untuk meningkatkan peran dan fungsi rumah ibadah. Selain sebagai tempat ibadah, dapat dimanfaatkan untuk aktivitas non ibadah, seperti bermuamalah, pemberdayaan dan persatuan umat, meningkatkan Imtaq, kecerdasan umat dan peningkatan kualitas hidup jasmani dan rohani	- Rehap dan peningkatan pengelolaan rumah ibadah - Pendirian “Magelang Rumah Bersama” sebagai tempat menjalin komunikasi dan bertukar pikiran antar kelompok dan agama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	- Rumah ibadah yang direhab - Pembangunan dan pengelolaan “Magelang Rumah Bersama”

No	Misi	Program Unggulan		Konsep Operasional	Indikasi Implementasi Kegiatan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
		Apresiasi untuk pembinaan keagamaan		Program ini berupaya untuk memberikan penghargaan bagi para pembina keagamaan	Pemberian penghargaan/apresiasi kepada pembina keagamaan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Jumlah pembina keagamaan yang diberi penghargaan

No	Misi	Program Unggulan		Konsep Operasional	Indikasi Implementasi Kegiatan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
2	Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jaminan kesehatan gratis untuk masyarakat tidak mampu		Program ini berupaya untuk memberikan jaminan Kesehatan kepada masyarakat tidak mampu, sehingga semua lapisan masyarakat dapat tercakup pelayanan Kesehatan. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan capaian UHC Kota Magelang menjadi 100%	Pemenuhan jaminan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	

No	Misi	Program Unggulan		Konsep Operasional	Indikasi Implementasi Kegiatan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
		Home care bagi lansia dan balita		Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan Kesehatan yang optimal kepada lansia dan balita. Petugas kesehatan akan mendatangi lansia atau balita yang memerlukan perawatan maupun penanganan.	Kunjungan ke rumah untuk perawatan balita dan lansia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	

No	Misi	Program Unggulan		Konsep Operasional	Indikasi Implementasi Kegiatan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
		Memaksimalkan pelayanan kesehatan paripurna		Program ini berupaya untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan di Kota Magelang, terutama pelayanan di rumah sakit. Perbaikan sarana prasarana dan kualitas pelayanan menjadi poin penting, salah satunya dengan layanan antar jemput pasien, agar nantinya pasien yang sakit dapat pulang dengan sehat	Pelayanan jemput pasien yang memerlukan penanganan darurat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	

No	Misi	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Implementasi Kegiatan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
		Pelayanan pendidikan gratis mulai PAUD, SD, SMP	 Program ini merupakan upaya dalam memberikan bantuan fasilitas pendidikan bagi masyarakat berupa penyediaan layanan Pendidikan yang terjangkau dan juga berkualitas utamanya di sekolah-sekolah milik pemerintah atau sekolah negeri, sehingga dapat diakses oleh banyak masyarakat di Kota Magelang.	- Rehab sarana prasarana sekolah - Pengelolaan dana BOS	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Jumlah sarana prasarana Pendidikan yang harus direhab - Jumlah peserta didik yang menerima BOS

No	Misi	Program Unggulan		Konsep Operasional	Indikasi Implementasi Kegiatan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
		Peningkatan kesejahteraan guru honorer		Program ini berupaya untuk memberikan kompensasi kepada guru honorer. Kompensasi yang diberikan akan sesuai dengan UMK namun akan dilaksanakan secara bertahap	Pemberian kompensasi kepada guru honorer	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah guru honorer yang mendapatkan kompensasi

No	Misi	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Implementasi Kegiatan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif	Reformasi Birokrasi berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi 	Program ini merupakan penguatan dan peningkatan reformasi birokrasi, dimana salah satunya dengan pengoptimalan fungsi teknologi informasi. Pengoptimalan ini termasuk di dalamnya adalah pengintegrasian sistem informasi yang ada sehingga lebih efektif dan efisien. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.	Integrasi sistem informasi dalam aplikasi 'Magelang Smart City'	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Integrasi pelayanan yang akan dikembangkan dalam aplikasi Magelang Smart City: RSU dan belanja online

No	Misi	Program Unggulan		Konsep Operasional	Indikasi Implementasi Kegiatan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			 NGOPI BARENG PAK WALI	Program ini merupakan upaya untuk menjaring aspirasi masyarakat dan bertukar pikiran dengan para stakeholder	- Dialog interaktif yang dilaksanakan melalui media radio maupun di kelurahan/kecamatan	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
4	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Program pelatihan dan pembentukan 1.500 Wirausaha Muda (Start Up) dan ruang usaha baru	 MAGELANG KEREN Kelurahan Entrepreneurship Center	Program ini merupakan salah satu upaya menumbuhkan perekonomian di masyarakat. Dengan terbentuknya wirausaha muda baru diharapkan dapat	- Pelatihan kerja bagi para pencari kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang berwirausaha setelah mengikuti pelatihan
					- Pelatihan wirausaha bagi pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	Jumlah pemuda yang berwirausaha setelah mengikuti pelatihan

No	Misi	Program Unggulan		Konsep Operasional	Indikasi Implementasi Kegiatan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Selain itu, pembentukan ruang usaha di tiap kelurahan dapat dimanfaatkan untuk sharing pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan usaha yang dimiliki oleh masyarakat.	- Pelatihan di bidang pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	
					- Pelatihan kerja bagi perempuan rentan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DP4KB	Jumlah perempuan rentan yang berwirausaha setelah mengikuti pelatihan
					- Pelatihan di bidang pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
					- Pelatihan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

No	Misi	Program Unggulan		Konsep Operasional	Indikasi Implementasi Kegiatan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
		Pengembangan daya saing daerah berbasis inovasi dan potensi lokal		Program ini sebagai upaya dalam meningkatkan potensi daerah, salah satu contohnya	- Peningkatan kualitas obyek wisata - Peningkatan kualitas SDM pendukung pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	

No	Misi	Program Unggulan		Konsep Operasional	Indikasi Implementasi Kegiatan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				adalah pariwisata. Peningkatan daya tarik Kota Magelang sehingga akan banyak pengunjung yang dating memerlukan upaya perbaikan baik dari kondisi daya tarik yang ada dan juga infrastruktur pendukungnya . Hal ini tentunya tidak lepas dari pengembangan inovasi dari pemerintah dan masyarakat	-	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

N o	Misi	Program Unggulan		Konsep Operasional	Indikasi Implementasi Kegiatan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
8		Pengalokasian APBD untuk Angaran Dana RT (ADRT) sebesar 30 juta setiap RT setiap tahun untuk pemberdayaa n masyarakat	 RODANYA MAS BAGYA Program Pemberdayaan Masyarakat Maju, Sehat & Bahagia	Program ini merupakan upaya peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Alokasi dana APBD dengan plafon sebesar	- Bimbingan teknis kepada kelompok masyarakat	Program Peningkatan Kerjasama Desa	DP4KB	
					- Pendampingan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik		- DPUPR - Dinas Perumahan dan Kaw. Permukiman	

No	Misi	Program Unggulan		Konsep Operasional	Indikasi Implementasi Kegiatan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				30 juta setiap RT tiap tahun bisa diajukan masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan ekonomi maupun peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang akan diatur dalam peraturan wali kota	- Implementasi usulan masyarakat (RKM) melalui program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana program		- Dinas perumahan dan Kawasan permukiman - Dinas social - Dinas pertanian dan ketahanan pangan - Dinas Lingkungan hidup - DPUPR - Dinas Tenaga Kerja - Dinas Perindustrian dan perdagangan - Kecamatan	

No	Misi	Program Unggulan		Konsep Operasional	Indikasi Implementasi Kegiatan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					- Pendampingan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan budaya		- Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Tenaga Kerja - Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	

No	Misi	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Implementasi Kegiatan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
5	Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur	Program pengelolaan sampah konprehensif menuju bebas sampah 	Program ini merupakan upaya untuk mengurangi produksi sampah dari sumbernya. Selain itu, dilakukan juga pengolahan sampah salah satunya adalah dengan pengolahan kompos. Hasil pengolahan ini tentunya akan dimanfaatkan salah satunya dengan penggunaan di rumah tangga yang melakukan urban farming.	- Pengurangan sampah dari sumbernya - Pengolahan sampah (3R)	- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat - Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah sampah yang diangkut ke TPSA
				Pembangunan sarana prasarana persampahan	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

N o	Misi	Program Unggulan		Konsep Operasional	Indikasi Implementasi Kegiatan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				Dengan keterkaitan ini diharapkan sampah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.	Urban farming	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan	

Dari penerjemahan penerapan SPM, penerjemahan program unggulan dan juga menjawab isu-isu strategis yang ada, maka program pembangunan prioritas Kota Magelang Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.10
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Magelang Tahun 2021-2026
VISI: Magelang Maju, Sehat dan Bahagia

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satua n	Kondisi Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Misi 1. Mewujudkan Masyarakat Yang Religius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq																
1.1	Terwujudnya masyarakat kota yang berkarakter	Nilai Pembangunan Masyarakat														
1.1.1	Meningkatnya penguatan toleransi	Nilai peningkatan toleransi														
1.1.1.1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	NA	15.09	238,373,000	30.19	250,000,000	45.28	275,000,000	60.38	300,000,000	75.47	350,000,000	75.47	Kesbangpol
1.1.1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	Persentase Oganisasi Kemasyarakatan yang Diberdayakan	%	NA	16.26	345,920,000	32.52	50,300,000	48.78	55,340,000	65.04	60,390,000	81.3	70,430,000	81.3	Kesbangpol

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satua n	Kondisi Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	80.49	82.11		83.74		85.37		86.99		88.62		88.62	Kesbangpol
1.1.1.3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	1.78	3.57	217,914,000	5.73	240,000,000	7.9	265,000,000	10.06	290,000,000	12.23	320,000,000	12.23	Kesbangpol
1.1.1.4	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Konflik Sosial	Jumla h	0	0	462,241,000	0	500,000,000	0	550,000,000	0	600,000,000	0	660,000,000	0	Kesbangpol
1.1.1.5	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang Berpartisipasi dalam Agenda Politik	%	NA	0.69	668,352,000	2.17	770,000,000	5.12	780,000,000	5.18	715,000,000	6.5	725,000,000	6.5	Kesbangpol
1.1.2	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Nilai penguatan ketenteraman dan ketertiban umum														
1.1.2.1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3	%	100%	100%	3,554,481,000	100%	3,909,929,000	100%	4,300,922,000	100%	4,731,014,000	100%	5,204,115,000	100	Satpol PP
1.1.2.2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase layanan penanggulangan bencana	%	100%	100%	1,603,268,000	100%	1,763,595,000	100%	1,939,954,000	100%	2,133,949,000	100%	4,267,898,000	58.82	Satpol PP
1.1.2.3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	%	100%	100%	1,501,599,000	100%	1,651,759,000	100%	1,816,935,000	100%	1,998,628,000	100%	2,198,491,000	100%	Satpol PP
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15 menit	15 menit		15 menit		15 menit		15 menit		100		Satpol PP	
1.1.3	Meningkatnya stabilitas daerah	Nilai stabilitas daerah														
1.1.3.1	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Konflik Sosial	Jumla h	0	0	462,241,000	0	500,000,000	0	550,000,000	0	600,000,000	0	660,000,000	0	Kesbangpol

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satua n	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.1.4	Meningkatnya penguatan kebudayaan	Nilai kemajuan kebudayaan														
1.1.4.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	%	89%	89	2,143,000,000	100	2,124,500,000	100	2,179,500,000	100	2,236,000,000	100	2,291,000,000	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.1.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%	67%	67	893,000,000	75	913,000,000	83	931,000,000	92	954,000,000	100	972,000,000	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.1.4.3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	%	67%	67	150,000,000	67	255,000,000	67	270,000,000	67	285,000,000	67	295,000,000	67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.1.4.4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	8%	12	520,000,000	12	396,000,000	14	408,000,000	17	420,000,000	19	432,000,000	19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.1.4.5	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan kunjungan museum	%	20%	20	641,500,000	20	643,000,000	20	645,000,000	20	647,000,000	20	649,000,000	20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.1.5	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Nilai partisipasi masyarakat														
1.1.5.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	10,790,889,000	100	13,524,996,000	100	13,858,492,000	100	15,237,690,000	100	16,584,123,000	100	Kecamatan Magelang Tengah
1.1.5.2	PROGRAM PEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	9,206,760,000	100	14,462,132,000	100	14,281,719,000	100	14,820,142,000	100	15,283,053,000	100	Kecamatan Magelang Utara
1.1.5.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupaan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	9,384,014,000	100	9,280,719,000	100	8,671,251,000	100	9,333,762,000	100	10,057,541,000	100	Kecamatan Magelang Selatan
Misi 2. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM																
2.1	Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia														
2.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing	Indeks Pendidikan														
2.1.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	%	89.69%	92%	62,113,219,000	94%	58,036,043,000	96%	70,483,543,000	98%	71,516,043,000	100%	71,856,043,000	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APM SD/MI	%	98.09%	100%		100%		100%		100%		100%			
		APK SD/MI	%	119.68%	100%		100%		100%		100%		100%			
		APS SD/MI	%	0%	0%		0%		0%		0%		0%			
		APM SMP/MTs	%	123.44%	100%		100%		100%		100%		100%			
		APK SMP/MTs	%	158.58%	100%		100%		100%		100%		100%			
		APS SMP/MTs	%	0%	0%		0%		0%		0%		0%			
		Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan	%	100%	95.50%		96%		96.50%		97%		97.50%			
		Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	%	53.43%	61.06%		64.88%		68.70%		72.51%		72.51%		72.51%	

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satua n	Kondisi Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Persentase SD Terakreditasi	%	98.68%	98.68%		100%		100.00%		100%		100.00%		100.00%	
		Persentase SMP Terakreditasi	%	100%	100.00%		100%		100.00%		100%		100.00%			
		Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi	%	100%	100.00%		100%		100.00%		100%		100.00%			
2.1.1.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum	%	100%	100%	56,000,000	100%	156,500,000	100%	156,500,000	100%	156,500,000	100%	156,500,000	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.1.1.3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru di satuan Pendidikan Dasar yang berkualifikasi minimal S 1	%	96.50%	98%	138,498,000	98.50%	317,578,000	99%	317,578,000	99.50%	317,578,000	100%	317,578,000	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase guru di satuan PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraa n yang berkualifikasi minimal S 1	%	65%	70%	685,320,000	72.50%	805,894,000	75%	805,894,000	77.50%	805,894,000	80%	805,894,000	80%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.1.1.4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang memiliki izin (memiliki izin rekomendasi dari dinas pendidikan dan kebudayaan)	%	100%	100%	47,200,000	100%	47,200,000	100%	47,200,000	100%	47,200,000	100%	47,200,000	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.1.1.5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar yang membuat karya sastra (dalam bentuk buku)	%	0	0	-	20	0	25	100,000,000	30	125,000,000	35	150,000,000	35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Indeks pembangunan literasi masyarakat														
2.1.1.6	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pemerataan layanan perpustakaan	%	55	57	375,138,000	58	412,652,000	59	453,918,000	60	499,309,900	61	549,240,890	61	Dinas Perpustakaan & Arsip
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan	%	49.75	50.25		50.5		50.75		51		51.25		51.5	Dinas Perpustakaan & Arsip
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan	%	57.91	62.91		65.41		67.91		70.41		72.91		72.91	Dinas Perpustakaan & Arsip
		Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan	%	20.02	21.02		22.02		23.02		24.02		25.02		25.02	Dinas Perpustakaan & Arsip
		Persentase Perpustakaan ber-SNP	%	30	35		40		45		50		55		55	Dinas Perpustakaan & Arsip
		Persentase peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	%	20.45	20.76		20.91		21.06		21.21		21.36		21.36	Dinas Perpustakaan & Arsip
		Persentase peningkatan anggota perpustakaan	%	27.95	28.09		28.16		28.23		28.3		28.37		28.37	Dinas Perpustakaan & Arsip

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satua n	Kondisi Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan	%	NA	36.36%	1,362,677,000	54.55%	2,076,500,000	65.91%	2,064,000,000	77.27%	2,364,000,000	88.64%	2,515,000,000	88.64%	Disporapar	
		Persentase peningkatan pemuda yang dibina	%	NA	269.23%		27.08%		6.56%		6.15%		8.70%		8.70%	Disporapar	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase peningkatan prestasi di bidang olahraga	%	NA	25.00%	11,275,250,000	30.00%	12,934,573,000	30.77%	13,026,597,000	17.65%	13,787,597,000	25.00%	14,374,097,000	25.00%	Disporapar	
		Persentase peningkatan atlet yang dibina	%	NA	4.55%		8.70%		13.33%		11.76%		10.53%		10.53%	Disporapar	
		Persentase pelatih yang bersertifikat	%	NA	74.19%		77.42%		80.65%		83.87%		87.10%		87.10%	Disporapar	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	%	NA	88.57%	279,000,000	91.43%	266,000,000	94.29%	276,500,000	97.14%	287,500,000	100.00%	297,500,000	100.00%	Disporapar	
2.1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan															
2.1.2.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular	%	NA	59	64,186,539,000	62	117,395,848,000	65	90,765,641,000	67	74,303,924,000	70	78,019,122,000	70	Dinas Kesehatan	
		Cakupan penemuan dan pengendalian penyakit tidak menular	%	NA	70		72		75		77		80		80		
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100		100		100		100		100		100		100
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		100		100
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		100		100
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100		100		100		100		100		100		100
		Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100		100		100
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100		100		100
		Indeks Keluarga Sehat	Angka	NA	>0,8		>0,8		>0,8		>0,8		>0,8		>0,8		

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satua n	Kondisi Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.1.2.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar (sertifikat kompetensi)	%	100	100	245,616,000	100	257,896,000	100	270,790,000	100	284,330,000	100	298,546,000	100	Dinas Kesehatan
2.1.2.3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan perijinan, pengendalian dan pengawasan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	%	100	100	201,364,000	100	211,430,000	100	222,001,000	100	233,102,000	100	244,757,000	100	Dinas Kesehatan
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang bersertifikat layak hygiene	%	100	100		100		100		100		100			
2.1.2.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif strata mandiri	%	NA	70.59	826,614,000	82.35	867,943,000	88.24	911,341,000	94.12	956,908,000	100	1,004,754,000	100	Dinas Kesehatan
2.1.3	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita yang d disesuaikan														
2.1.3.1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	3.68	<8	80,878,000	<8	95,000,000	<8	101,500,000	<8	108,500,000	<8	251,000,000	<8	Dinas Perindustria n dan Perdagangan
2.1.3.1	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan	Indeks pembangunan gender														
2.1.3.1	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase program perangkat daerah yang responsif gender	%	17.34	17.34	20,000,000	17.34	25,000,000	17.34	30,000,000	17.34	35,000,000	17.34	40,000,000	100	DP4KB
		Persentase perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan terlatih dalam perekonomian keluarga	%	20	20	30,000,000	20	80,000,000	20	85,000,000	20	90,000,000	20	95,000,000	100	DP4KB
		Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	16	16	16,000,000	20	20,000,000	20	25,000,000	20	30,000,000	20	35,000,000	16	DP4KB
		Persentase lembaga yang anggotanya diberdayakan	%	20.9	20.9	1,303,024,000	20.9	400,000,000	20.9	410,000,000	20.9	420,000,000	20.9	450,000,000	100	DP4KB
2.1.3.2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0.04	0.04	657,926,000	0.04	750,000,000	0.04	805,000,000	0.04	890,000,000	0.04	1,000,000,000	0.04	DP4KB

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satua n	Kondisi Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.1.3.3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga Berkualitas	%	4.76	4.76	325,796,000	9.52	410,000,000	14.29	440,000,000	14.29	480,000,000	16.57	545,000,000	100	DP4KB
2.1.3.4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase PD yang mengelola data gender dan anak	%	17.24	17.24	32,650,000	17.24	40,000,000	17.24	50,000,000	17.24	60,000,000	17.24	70,000,000	17.24	DP4KB
2.1.3.5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase capaian 4 (empat) kluster pemenuhan hak anak	%	17,24	17,24	177,000,000	17,24	197,000,000	17,24	207,000,000	17,24	222,000,000	13,79	237,000,000	100	DP4KB
Misi 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif																
3.1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi														
3.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat														
3.1.1.1	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	84,153,000	100	341,491,000	100	375,597,000	100	411,827,000	100	447,066,800	100	Kecamatan Magelang Tengah
3.1.1.2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	1,093,696,000	100	1,213,766,000	100	91,230,000	100	101,343,000	100	111,450,000	100	
3.1.1.3	PROGRAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	-	100	244,379,000	100	260,700,000	100	279,025,000	100	299,210,000	100	
3.1.1.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	10,790,889,000	100	13,524,996,000	100	13,858,492,000	100	15,237,690,000	100	16,584,123,000	100	
3.1.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	177,130,000	100	436,859,000	100	480,530,000	100	528,090,000	100	580,400,000	100	Kecamatan Magelang Utara
3.1.1.6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	102,762,000	100	137,050,000	100	145,650,000	100	160,150,000	100	176,050,000	100	
3.1.1.7	PROGRAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	0	-	100	39,500,000	100	43,450,000	100	47,855,000	100	52,735,000	100	
3.1.1.8	PROGRAM PEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupaan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	9,206,760,000	100	14,462,132,000	100	14,281,719,000	100	14,820,142,000	100	15,283,053,000	100	
3.1.1.9	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	74,832,000	100	158,114,000	100	170,936,000	100	184,420,000	100	191,026,000	100	Kecamatan Magelang Selatan

[illegible]

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satua n	Kondisi Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.1.2.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase capaian target aspek sistem merit	%	NA	95	1,260,121,000	95	2,756,766,000	95	2,581,822,000	95	9,600,822,000	95	2,671,822,000	95	BKPP
3.1.2.3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	%	NA	29	2,927,991,000	31	3,089,534,000	33	2,725,000,000	35	2,600,000,000	37	2,500,000,000	37	BKPP
		Indeks SPBE														
3.1.2.4	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan aplikasi informatika	%	100	100	6,266,583,000	100	5,846,493,000	100	6,153,668,000	100	6,620,950,000	100	6,821,798,000	100	Diskominsta
3.1.2.5	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	%	Menuju informatif	Informatif	1,085,368,000	Informatif	1,120,478,000	Informatif	1,232,525,000	Informatif	1,355,779,000	Informatif	1,491,357,000	97.1	Diskominsta
3.1.2.6	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data	%	NA	14	775,170,000	24	800,000,000	33	880,000,000	39	1,068,587,000	45	1,064,800,000	45	Diskominsta
3.1.2.7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi	Nilai	17	24	510,786,000	34	208,900,000	47	213,900,000	84	223,240,000	84	363,000,000	84	Diskominsta
		Nilai Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi	Nilai	0	18		32		30		48		48			
		Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi	Nilai	0	32		47		47		47		106		106	
		Nilai Pengelolaan Aset Informasi	Nilai	13	44		72		81		81		88		88	
		Nilai Teknologi dan Keamanan Informasi	Nilai	0	20		20		65		65		80		80	
3.1.3	Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Maturitas SPIP														
3.1.3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan	%	92.50%	92%	186,785,000	93%	206,785,000	94.50%	223,000,000	96%	223,000,000	97.5	232,000,000	97.5	Inspektorat
3.1.3.2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi	%	22.50%	47.50%	404,096,000	60%	417,587,000	72.50%	570,750,000	85%	572,750,000	100%	578,750,000	100%	Inspektorat
		Nilai SAKIP														
3.1.3.3	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	%	NA	10.27	834,745,000	20.55	999,948,000	34.25	992,000,000	68.49	1,029,000,000	95.89	664,000,000		Bappeda
3.1.3.4	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	NA	75	367,378,000	80	603,857,000	90	1,439,200,000	100	1,139,910,000	100	1,241,160,000	100	Bappeda
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Per ekonomanian dan SDA	%	NA	67		83		100		100		100		Bappeda	

[illegible]

[illegible]

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satua n	Kondisi Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.1.3.1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Destinasi pariwisata yang dikelola dengan baik	%	NA	73.33%	354,279,000	80.00%	4,570,893,000	86.67%	1,256,682,500	86.67%	667,001,000	93.33%	742,801,000	93.33%	Disporapar
4.1.3.2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	NA	7.14%	535,585,000	8.89%	630,343,000	10.20%	743,377,000	11.11%	856,715,000	12.50%	970,386,000	12.50%	Disporapar
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	%	NA	9.09%		10.83%		12.78%		13.33%		14.71%		14.71%	Disporapar
4.1.3.3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang meningkat kapasitasnya	%	NA	2.83%	131,000,000	4.72%	136,600,000	4.72%	300,260,000	4.72%	340,286,000	4.72%	381,815,000	4.72%	Disporapar
		Persentase peningkatan Pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	%	NA	50.00%		44.44%		38.46%		33.33%		33.33%		33.33%	Disporapar
		Persentase penduduk miskin														
4.1.4	Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PPKS														
4.1.4.1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi	%	100	100	3,034,610,000	100	1,884,000,000	100	1,878,000,000	100	1,905,000,000	100	1,921,500,000	100	Dinsos
4.1.4.2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang menerima bantuan	%	100	100	171,130,000	100	185,595,000	100	191,003,000	100	200,000,000	100	206,000,000	100	Dinsos
4.1.4.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang diberdayakan	%	58.33	66.67	130,509,000	75	138,500,000	83.33	197,500,000	83.33	219,000,000	91.67	219,000,000	91.67	Dinsos
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	%	100	100	63,780,000	100	70,000,000	100	82,000,000	100	95,000,000	100	108,000,000	100	Dinsos
4.1.5	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah	Tingkat pengangguran terbuka														
4.1.5.1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%		40	927,030,000	50	936,300,000	60	983,115,000	70	1,032,270,000	75	1,083,883,000	75	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan kerja	%		60		65		70		75		80		80	Dinas Tenaga Kerja
4.1.5.2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitas penempatan kerja	%		60	4,489,295,000	65	4,635,500,000	70	4,668,000,000	75	3,112,000,000	80	3,125,000,000	80	Dinas Tenaga Kerja

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satua n	Kondisi Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Persentase peserta pelatihan yang menjalankan wirausaha	%		50		60		65		70		75		75	Dinas Tenaga Kerja
4.1.5.3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Strktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	%		30	109,488,000	35	123,283,000	40	132,292,000	45	155,374,000	50	173,922,000	50	Dinas Tenaga Kerja
		Ketimpangan pendapatan														
4.1.6	Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro	Persentase pertumbuhan UMKM														
4.1.6.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan	%	14.01	20	838,191,000	20	980,092,000	20	1,038,092,000	20	1,091,092,000	20	1,144,092,000	20	Disperindag
4.1.6.2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro	%	-8.22	-3	145,000,000	-2	155,000,000	-1	160,000,000	2	165,000,000	3	175,000,000	3	Disperindag
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase jumlah ksp/usp yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	%	37.39	40.18	10,200,000	45.13	12,500,000	54.15	15,000,000	58.87	17,500,000	63.52	20,000,000	64%	Disperindag
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang undangan	%	41.35	41.49	38,300,000	41.97	42,000,000	42.45	47,707,000	42.91	36,077,000	43.37	39,685,000	43.37	Disperindag
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP	Persentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya	%	26.13	26.45	31,000,000	26.78	39,600,000	27.11	42,350,000	27.55	46,585,000	27.87	51,243,000	27.87	Disperindag
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya	%	11.39	15.13	120,000,000	18.84	120,000,000	22.52	120,000,000	26.18	120,000,000	29.81	120,000,000	29.81	Disperindag
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi berkualitas	%	32.91	37	150,000,000	40	150,000,000	44	150,000,000	46	150,000,000	50	150,000,000	50	Disperindag
Misi 5. Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Meningkatkan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur																
5.1	Terwujudnya ruang kota yang berkelanjutan	Indeks kualitas ruang kota														
5.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur kota	Indeks infrastruktur wilayah														
5.1.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang Kondisi Baik	%	81	81	596,000,000	81	1,200,000,000	81	1,200,000,000	81	1,200,000,000	81	1,200,000,000	81	DPUPR

No	Tujuan / Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satua n	Kondisi Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5.1.4.1	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase masalah pada tanah kosong yang terselesaikan	%		20%	180,564,000	40%	165,000,000	60%	100,000,000	80%	190,000,000	100%	100,000,000	90	Dinas Perumahan dan Kaw. Permukiman
5.1.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%		90%	1,668,881,000	90%	3,876,350,000	90%	5,788,655,000	90%	4,031,407,000	90%	3,945,000,000	90%	Dinas Perumahan dan Kaw. Permukiman
		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	%		NA		11.70%		23.39%		35.09%		46.78%		46.78%	Dinas Perumahan dan Kaw. Permukiman
5.1.4.3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditata	%		25.06%	3,551,000,000	62.64%	8,471,000,000	88%	7,276,000,000	100%	6,901,000,000	100%	1.526.000,000	100%	Dinas Perumahan dan Kaw. Permukiman
5.1.4.4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh yang tertangani	%		5.72%	1,885,000,000	20.85%	4,847,500,000	50.63%	9,460,000,000	80.41%	9,460,000,000	100%	6,253,750,000	100%	Dinas Perumahan dan Kaw. Permukiman
5.1.4.5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%		93.20 %	8,960,000,000	96.11 %	8,960,000,000	99.03 %	8,760,000,000	100%	8,910,000,000	100%	8,760,000,000	100%	Dinas Perumahan dan Kaw. Permukiman
5.1.5	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	IKLH														
5.1.5.1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	0	40	98,608,000	60	150,000,000	80	200,000,000	-	-	100	99,000,000	100	Dinas Lingkungan Hidup
5.1.5.2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	100	100	373,782,000	100	484,400,000	100	513,733,000	100	479,553,000	100	506,979,000	100	Dinas Lingkungan Hidup
5.1.5.3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3	%	0	33.33	7,000,000	50	7,700,000	66.67	8,470,000	83.33	9,317,000	100	10,248,700	100	Dinas Lingkungan Hidup
5.1.5.4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	%	0	36.67	105,769,000.00	40	112,553,000	43.33	120,800,000	46.67	129,247,000	50	137,907,000	50	Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satua n	Kondisi Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5.1.5.5	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan	%	0	75	8,981,000	75	14,981,000	75	15,730,000	75	16,516,000	75	17,341,800	75	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase ruang terbuka hijau publik														
5.1.5.6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	0	18.37	245,369,000	15.52	249,543,000	13.43	253,926,000	11.84	258,528,000	10.59	263,360,000	10.59	Dinas Lingkungan Hidup
5.1.5.7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase cakupan penghargaan yang diterima masyarakat	%	0	5.73	514,789,000	6.25	914,789,000	11.98	914,789,000	6.25	914,789,000	18.23	914,789,000	24.48	Dinas Lingkungan Hidup
5.1.5.8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Peningkatan persentase sampah yang terkelola	%	0	3	11,910,227,000	2.6	13,972,299,000	3	14,483,049,000	3.5	14,814,699,000	2.5	15,226,699,000	2.5	Dinas Lingkungan Hidup
5.1.5.9	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	%	25.93	28.09	6,163,570,000	29.17	18,784,740,000	30.25	18,827,929,000	31.33	20,703,134,000	32.41	14,214,123,000	32.41	Dinas Lingkungan Hidup

Selain program pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBD tersebut, terdapat juga program yang menjadi proyek prioritas nasional yang dibiayai di luar APBD. Program pembangunan tersebut yang terkait dengan Pemerintah Kota Magelang disajikan pada tabel berikut

Tabel 6.11
Proyek Prioritas Nasional yang dibiayai diluar APBD

No	Program/Kegiatan	Sumber Dana		Target	Keterangan
		APBN	KPU		
1	Pembangunan Fly Over Cangkuk	√		2024	
2	SPALD-T Skala Permukiman	√			
3	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	√			
4	Revitalisasi sempadan Sungai Progo (<i>river amenity</i>), Kab. Magelang dan Kota Magelang	√			Koordinasi dengan Kab. Magelang
5	Pembangunan TPA/TPST Regional, Kab. Magelang		√		
6	Peningkatan Terminal Tipe A Tidar, Kota Magelang	√			
7	Pembangunan RSUD Rujukan Kanker, Kota Magelang		√		Pelaksana Prov. Jateng

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan

Dalam pelaksanaan program pembangunan daerah, diperlukan pendanaan yang cukup agar program dapat terlaksana dengan baik. Namun realitanya, anggaran pemerintah daerah yang ada terbatas untuk memenuhi pelaksanaan semua kegiatan pembangunan. Untuk itu, diperlukan penentuan prioritas dalam pelaksanaan program pembangunan. Dalam hal ini, proyeksi belanja diperlukan untuk memperkirakan kemampuan anggaran dalam kemampuan untuk membiayai program pembangunan. Proyeksi belanja daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.1
Proyeksi Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	BELANJA DAERAH	899.530.930.000	975.212.250.000	1.000.940.435.000	1.027.627.057.000	1.054.961.936.716
2.1	Belanja Operasi	752.109.505.000	774.397.250.000	790.347.285.000	806.769.476.000	828.229.544.062
2.1.1	Belanja Pegawai	392.186.240.000	390.600.000.000	410.130.000.000	430.636.500.000	442.091.430.900
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	351.423.265.000	367.337.250.000	364.266.485.000	360.663.192.000	370.256.832.907
2.1.3	Belanja Bunga					
2.1.4	Belanja Subsidi					
2.1.5	Belanja Hibah	7.000.000.000	14.210.000.000	13.925.800.000	13.647.284.000	14.010.301.754
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000	2.250.000.000	2.025.000.000	1.822.500.000	1.870.978.500
2.2	Belanja Modal	140.921.425.000	194.250.000.000	203.962.500.000	214.160.625.000	219.857.297.625
2.2.1	Belanja Modal Tanah	21.913.481.247	30.206.150.215	31.716.457.726	33.302.280.612	34.188.121.277
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.389.478.470	51.538.693.941	54.115.628.638	56.821.410.070	58.332.859.578
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.422.766.597	65.368.856.520	68.637.299.346	72.069.164.314	73.986.204.084
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.839.775.657	45.267.257.420	47.530.620.291	49.907.151.305	51.234.681.530
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.355.923.029	1.869.041.904	1.962.493.999	2.060.618.699	2.115.431.156
2.3	Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000	6.565.000.000	6.630.650.000	6.696.956.000	6.875.095.030
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000	6.565.000.000	6.630.650.000	6.696.956.000	6.875.095.030
2.4	Belanja Transfer	0	0	0	0	0
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0	0	0	0	0
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
2.4.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	0	0	0	0	0

7.2. Program Perangkat Daerah

Selain kerangka pendanaan, pada bab ini juga diuraikan terkait program pembangunan beserta indikator dan target pencapaiannya selama 5 tahun kedepan (2021-2026). Rekapitulasi rencana program dan pagu indikatif setiap urusan yang dilengkapi dengan perangkat daerah penanggung jawab disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Magelang Tahun 2021-2026

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Kinerja RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR															
	PENDIDIKAN															
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	%	89,69	92	31.500.000.000	94	32.500.000.000	96	33.500.000.000	98	34.500.000.000	100	35.500.000.000	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APM SD/MI	%	98,09	100		100		100		100		100		100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APK SD/MI	%	119,68	100		100		100		100		100		100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APS SD/MI	%	0	0		0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APM SMP/MTs	%	123,44	100		100		100		100		100		100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APK SMP/MTs	%	158,58	100		100		100		100		100		100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Kinerja RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		APS SMP/MTs	%	0%	0		0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan	%	100	95,50		96		96,50		97		97,50		97,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	%	53,43	61,06		64,88		68,70		72,51		72,51		72,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase SD Terakreditasi	%	98,68	98,68		100		100		100		100		100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase SMP Terakreditasi	%	100	100		100		100		100		100		100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi	%	100	100		100		100		100		100		100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum	%	100	100	80,000,000	100	90,000,000	100	100,000,000	100	110,000,000	100	120,000,000	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru di satuan Pendidikan Dasar yang berkualifikasi minimal S1	%	96.50%	98%	317,578,000	98.50%	317,578,000	99%	317,578,000	99.50%	317,578,000	100%	317,578,000	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase guru di satuan PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan yang berkualifikasi minimal S1	%	65%	70%	805,894,000	72.50%	805,894,000	75%	805,894,000	77.50%	805,894,000	80%	805,894,000	80%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang memiliki izin (memiliki izin rekomendasi dari dinas pendidikan dan kebudayaan)	%	100%	100%	90,000,000	100%	90,000,000	100%	90,000,000	100%	90,000,000	100%	90,000,000	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar yang membuat karya sastra (dalam bentuk buku)	%	0	0	-	20	150,000,000	25	225,000,000	30	300,000,000	35	450,000,000	35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	KESEHATAN															
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular	%	NA	59	33,697,747,000	62	37,067,522,000	65	40,774,274,000	67	44,851,701,000	70	49,336,871,000	70	Dinas Kesehatan
		Cakupan penemuan dan pengendalian penyakit tidak menular	%	NA	70		72		75		77		80		80	Dinas Kesehatan

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Kinerja RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100		100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100		100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100		100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan
		Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan
		Indeks Keluarga Sehat	Angka	NA	>0,8		>0,8		>0,8		>0,8		>0,8		>0,8	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar (sertifikat kompetensi)	%		100		100		257,903,000		100		283,693,000	100
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan perijinan, pengendalian dan pengawasan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	%	100	100	333,273,000	100	366,600,000	100	403,260,000	100	443,586,000	100	487,945,000	100	Dinas Kesehatan
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang bersertifikat layak hygiene	%	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif strata mandiri	%	NA	70.59	836,685,000	82.35	920,354,000	88.24	1,012,389,000	94.12	1,113,628,000	100	1,224,991,000	100	Dinas Kesehatan
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang Kondisi Baik	%	81	81	1,200,000,000	81	1,200,000,000	81	1,200,000,000	81	1,200,000,000	81	1,200,000,000	81	DPUPR

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Kinerja RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	92.44	61	10,600,000,000	62	10,600,000,000	63	10,600,000,000	64	10,600,000,000	65	10,600,000,000	65	DPUPR
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan yang memiliki PBG	%	26.12	26.62	400,000,000	26.8	430,000,000	27	450,000,000	27.25	475,000,000	27.5	500,000,000	27.5	DPUPR
		Persentase Progres Pembangunan Gedung Balai Kota	%	NA	4	8,000,000,000	28	48,000,000,000	66	76,000,000,000	100	68,000,000,000	100	-	100	DPUPR
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan strategis yang ditata	%	100	100	436,205,000	100	450,000,000	100	460,000,000	100	470,000,000	100	480,000,000	100	DPUPR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	%	93	93.14	11,100,000,000	93.46	11,200,000,000	93.67	11,300,000,000	94.88	11,400,000,000	95	11,500,000,000	95	DPUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	275,499,000	100	300,000,000	100	305,000,000	100	310,000,000	100	315,000,000	100	DPUPR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	NA	60	705,000,000	65	1,960,000,000	70	1,660,000,000	75	1,790,000,000	80	1,840,000,000	80	DPUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak	%	90	92	2,456,577,000	92.16	2,291,695,000	92.41	1,634,370,000	92.82	2,046,276,000	93.49	1,458,182,000	93.49	DPUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum layak	%	97.52	98	100,000,000	98.14	100,000,000	98.3	100,000,000	98.5	100,000,000	98.65	100,000,000	98.65	DPUPR
		Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum, aman, dan berkelanjutan	%	10	15	100,000,000	20	100,000,000	25	100,000,000	30	100,000,000	35	100,000,000	35	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pembangunan TPST/3R	%	NA	20	6,000,000,000	30	6,000,000,000	50	7,000,000,000	70	5,000,000,000	80	5,000,000,000	80	DPUPR
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%		90%	201,407,000	90%	600,000,000	90%	620,000,000	90%	1,256,407,000	90%	1,120,000,000	90%	Dinas Perumahan dan Kaw. Permukiman

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Kinerja RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	%		NA		11.70%		23.39%		35.09%		46.78%		46.78%	Dinas Perumahan dan Kaw. Permukiman
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditata	%		25.06%	5,251,000,000	62.64%	6,421,000,000	88%	5,226,000,000	100%	5,226,000,000	100%	3,226,000,000	100%	Dinas Perumahan dan Kaw. Permukiman
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh yang tertangani	%		5.72%	1,885,000,000	20.85%	4,847,500,000	50.63%	9,460,000,000	80.41%	9,460,000,000	100%	6,253,750,000	100%	Dinas Perumahan dan Kaw. Permukiman
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%		93.20 %	8,960,000,000	96.11 %	8,960,000,000	99.03 %	8,760,000,000	100%	8,910,000,000	100%	8,760,000,000	100%	Dinas Perumahan dan Kaw. Permukiman
	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	NA	15.09	238,373,000	30.19	250,000,000	45.28	275,000,000	60.38	300,000,000	75.47	350,000,000	75.47	Kesbangpol
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Oganisasi Kemasyarakatan yang Diberdayakan	%	NA	16.26	395,920,000	32.52	450,000,000	48.78	500,000,000	65.04	550,000,000	81.3	600,000,000	81.3	Kesbangpol
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	80.49	82.11		83.74		85.37		86.99		88.62		88.62	Kesbangpol
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	1.78	3.57	217,914,000	5.73	240,000,000	7.9	265,000,000	10.06	290,000,000	12.23	320,000,000	12.23	Kesbangpol
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Konflik Sosial	Jumla h	0	0	462,241,000	0	500,000,000	0	550,000,000	0	600,000,000	0	660,000,000	0	Kesbangpol

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Kinerja RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang Berpartisipasi dalam Agenda Politik	%	NA	0.69	668,352,000	2.17	770,000,000	5.12	780,000,000	5.18	675,000,000	6.5	685,000,000	6.5	Kesbangpol
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3	%	100%	100%	3,554,481,000	100%	3,909,929,000	100%	4,300,922,000	100%	4,731,014,000	100%	5,204,115,000	100	Satpol PP
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase layanan penanggulangan bencana	%	100%	100%	1,603,268,000	100%	1,763,595,000	100%	1,939,954,000	100%	2,133,949,000	100%	4,267,898,000	58.82	Satpol PP
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	%	100%	100%	1,501,599,000	100%	1,651,759,000	100%	1,816,935,000	100%	1,998,628,000	100%	2,198,491,000	100%	Satpol PP
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15 menit	15 menit		15 menit		15 menit		15 menit		100		Satpol PP	
	SOSIAL															
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi	%	100	100	1,844,576,000	100	1,987,000,000	100	2,005,000,000	100	2,024,000,000	100	2,031,000,000	100	Dinsos
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang menerima bantuan	%	100	100	194,153,000	100	205,000,000	100	222,500,000	100	260,000,000	100	285,000,000	100	Dinsos
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	%	100	100	63,780,000	100	65,000,000	100	67,000,000	100	72,000,000	100	75,500,000	100	Dinsos
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang diberdayakan	%	58.33	66.67	151,865,000	75	334,033,000	83.33	334,033,000	83.33	354,033,000	91.67	354,033,000	91.67	Dinsos
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase luas taman makam pahlawan yang dipelihara	%	100	100	115,100,000	100	195,000,000	100	130,000,000	100	130,000,000	100	130,000,000	100	Dinsos
	TENAGA KERJA															
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%		40	927,030,000	50	936,300,000	60	983,115,000	70	1,032,270,000	75	1,083,883,000	75	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan kerja	%		60		65		70		75		80		80	Dinas Tenaga Kerja

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Kinerja RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi penempatan kerja	%		60	3,121,907,000	65	3,150,276,000	70	3,306,049,000	75	3,335,661,000	80	3,500,337,000	80	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase peserta pelatihan yang menjalankan wirausaha	%		50		60		65		70		75		75	Dinas Tenaga Kerja
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Strktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	%		30	133,300,000	35	153,295,000	40	168,624,000	45	185,486,000	50	204,034,000	50	Dinas Tenaga Kerja
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase program perangkat daerah yang responsif gender	%	17.34	17.34	20,000,000	17.34	25,000,000	17.34	30,000,000	17.34	35,000,000	17.34	40,000,000	100	DP4KB
		Persentase perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan terlatih dalam perekonomian keluarga	%	20	20	30,000,000	20	80,000,000	20	85,000,000	20	90,000,000	20	95,000,000	100	DP4KB
		Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	16	16	16,000,000	20	20,000,000	20	25,000,000	20	30,000,000	20	35,000,000	16	DP4KB
		Persentase lembaga yang anggotanya diberdayakan	%	20.9	20.9	1,303,024,000	20.9	400,000,000	20.9	410,000,000	20.9	420,000,000	20.9	450,000,000	100	DP4KB
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0.04	0.04	189,453,000	0.04	195,000,000	0.04	200,000,000	0.04	210,000,000	0.04	220,000,000	0.04	DP4KB
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga Berkualitas	%	4.76	4.76	200,795,000	9.52	210,000,000	14.29	230,000,000	14.29	240,000,000	16.57	250,000,000	100	DP4KB
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase PD yang mengelola data gender dan anak	%	17.24	17.24	17,650,000	17.24	20,000,000	17.24	25,000,000	17.24	30,000,000	17.24	35,000,000	17.24	DP4KB
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase capaian 4 (empat) kluster pemenuhan hak anak	%	17,24	17,24	30,000,000	17,24	35,000,000	17,24	40,000,000	17,24	45,000,000	13,79	50,000,000	100	DP4KB
	KETAHANAN PANGAN															
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan	%	100	100	1,092,058,000	100	1,191,264,000	100	1,321,390,000	100	1,453,530,000	100	1,598,686,000	100	Dinas Pertanian dan Pangan

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Kinerja RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	%	N/a	0	18,500,000	20	50,000,000	40	65,000,000	60	71,500,000	100	78,650,000	100	Dinas Pertanian dan Pangan
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Aman	%	80	80	96,632,000	82	99,000,000	84	108,900,000	86	119,790,000	88	131,769,000	88	Dinas Pertanian dan Pangan
	PERTANAHAN															
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus sengketa tanah yang tertangani	%		20%	69,858,000	40%	100,000,000	60%	100,000,000	80%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	Dinas Perumahan dan Kaw. Permukiman
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase kasus permasalahan pengadaaan tanah yang mendapat penyelesaian ganti rugi/santunan tanah	%		20%	150,000,000	40%	150,000,000	60%	150,000,000	80%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	Dinas Perumahan dan Kaw. Permukiman
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase masalah pada tanah kosong yang terselesaikan	%		20%	180,564,000	40%	165,000,000	60%	100,000,000	80%	190,000,000	100%	100,000,000	90	Dinas Perumahan dan Kaw. Permukiman
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	%		97.50%	326,433,000	98%	326,433,000	98.50%	326,433,000	99%	326,433,000	100%	326,433,000	100	Dinas Perumahan dan Kaw. Permukiman
	LINGKUNGAN HIDUP															
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	0	40	98,608,000	60	150,000,000	80	200,000,000	-	-	100	99,000,000	100	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	100	100	373,782,000	100	484,400,000	100	513,733,000	100	479,553,000	100	506,979,000	100	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3	%	0	33.33	7,000,000	50	7,700,000	66.67	8,470,000	83.33	9,317,000	100	10,248,700	100	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	%	0	36.67	105,769,000.00	40	112,553,000	43.33	120,800,000	46.67	129,247,000	50	137,907,000	50	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan	%	0	75	8,981,000	75	14,981,000	75	15,730,000	75	16,516,000	75	17,341,800	75	Dinas Lingkungan Hidup

[illegible]

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Kinerja RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kelurahan yang difasilitasi dalam program pemberdayaan masyarakat	%	71	71	2,271,639,000	76	2,271,639,000	82	2,271,639,000	88	2,271,639,000	94	2,271,639,000	94	DP4KB
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	%	71	71	96,518,000	76	96,518,000	82	96,518,000	88	96,518,000	94	96,518,000	94	DP4KB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase kelurahan yang lembaga kemasyarakatannya diberdayakan	%	71	71	354,917,000	76	354,917,000	82	354,917,000	88	354,917,000	94	354,917,000	94	DP4KB
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th)	%		29	206,577,000	27	206,577,000	25	206,577,000	23	206,577,000	22	206,577,000	22	DP4KB
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	%		57.12	1,897,613,000	58.01	1,897,613,000	58.05	1,897,613,000	58.45	1,897,613,000	59.25	1,897,613,000	59.25	DP4KB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB	%		72	38,788,000	72	38,788,000	72.5	38,788,000	73	38,788,000	73.5	38,788,000	73.5	DP4KB
	PERHUBUNGAN															
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	%	0.81	0.79	27,530,000,000	0.78	29,022,000,000	0.77	30,549,000,000	0.76	32,091,000,000	0.75	33,875,000,000	0.75	Dinas Perhubungan
		Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)	%	6.06	6.66		6.71		6.76		6.81		6.86		6.86	Dinas Perhubungan
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan aplikasi informatika	%	100	100	6,266,583,000	100	5,846,493,000	100	6,153,668,000	100	6,620,950,000	100	6,821,798,000	100	Diskominsta
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	%	Menuju Informatif	Informatif	1,085,368,000	Informatif	1,120,478,000	Informatif	1,232,525,000	Informatif	1,355,779,000	Informatif	1,491,357,000	97.1	Diskominsta
	KOPERASI DAN UMKM															
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase jumlah ksp/usp yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	%	37.39	40.18	10,200,000	45.13	12,500,000	54.15	15,000,000	58.87	17,500,000	63.52	20,000,000	64%	Disperindag
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang undangan	%	41.35	41.49	38,300,000	41.97	42,000,000	42.45	47,707,000	42.91	36,077,000	43.37	39,685,000	43.37	Disperindag

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Kinerja RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP	Persentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya	%	26.13	26.45	31,000,000	26.78	39,600,000	27.11	42,350,000	27.55	46,585,000	27.87	51,243,000	27.87	Disperindag
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya	%	11.39	15.13	120,000,000	18.84	150,000,000	22.52	180,000,000	26.18	180,000,000	29.81	180,000,000	29.81	Disperindag
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi berkualitas	%	32.91	37	40,000,000	40	56,000,000	44	80,000,000	46	80,000,000	50	80,000,000	50	Disperindag
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan	%	14.01	20	838,191,000	20	740,092,000	20	788,092,000	20	836,092,000	20	884,092,000	20	Disperindag
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro	%	-8.22	-3	278,000,000	-2	270,000,000	-1	270,000,000	2	270,000,000	3	280,000,000	3	Disperindag
	PENANAMAN MODAL															
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Yang Sesuai Dengan SOP	%	90	93,5	749.283.543	94	801.171.000	94,5	896.437.000	95	966.017.000	95,5	1.004.520.000	95.5	DPMPTSP
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PM	Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, Informasi dan Sistem Informasi PM	%	10	10	61.629.000	10	75.000.000	10	90.000.000	10	100.000.000	10	110.000.000	10	DPMPTSP
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Investor PMA/PMDN	%	100	100	560,394,000	100	499,933,000	100	384,928,000	100	423,420,000	100	640,767,000	100	DPMPTSP
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase LOI yang ditindaklanjuti	%	100	100	163.850.000	100	496.398.000	100	506.676.000	100	705.876.000	100	628.226.000	100	DPMPTSP
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	10	15	85,582,000	20	94,141,000	25	103,555,000	30	113,911,000	35	125,302,000	35	DPMPTSP
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan	%	NA	36.36%	1,362,677,000	54.55%	2,076,500,000	65.91%	2,064,000,000	77.27%	2,364,000,000	88.64%	2,515,000,000	88.64%	Disporapar
		Persentase peningkatan pemuda yang dibina	%	NA	269.23%		27.08%		6.56%		6.15%		8.70%		8.70%	Disporapar
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase peningkatan prestasi di bidang olahraga	%	NA	25.00%	11,275,250,000	30.00%	13,621,725,000	30.77%	13,713,749,000	17.65%	14,474,749,000	25.00%	15,061,249,000	25.00%	Disporapar
		Persentase peningkatan atlet yang dibina	%	NA	4.55%		8.70%		13.33%		11.76%		10.53%		10.53%	Disporapar
		Persentase pelatih yang bersertifikat	%	NA	74.19%		77.42%		80.65%		83.87%		87.10%		87.10%	Disporapar

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Kinerja RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	%	NA	88.57%	279,000,000	91.43%	266,000,000	94.29%	276,500,000	97.14%	287,500,000	100.00%	297,500,000	100.00%	Disporapar
	STATISTIK															
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data	%	NA	14	775,170,000	24	800,000,000	33	880,000,000	39	1,068,587,000	45	1,064,800,000	45	Diskominsta
	PERSANDIAN															
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi	Nilai	17	24	510,786,000	34	208,900,000	47	213,900,000	84	223,240,000	84	363,000,000	84	Diskominsta
Nilai Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi		Nilai	0	18	32		30		48		48					
Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi		Nilai	0	32	47		47		47		106		106			
Nilai Pengelolaan Aset Informasi		Nilai	13	44	72		81		81		88		88			
Nilai Teknologi dan Keamanan Informasi		Nilai	0	20	20		65		65		80		80			
	KEBUDAYAAN															
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	%	89%	89	1,807,608,000	100	2,424,862,650	100	2,545,880,783	100	2,672,949,822	100	2,672,949,822	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%	67%	67	523,294,500	75	550,000,000	83	577,500,000	92	606,375,000	100	606,375,000	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	%	67%	67	70,834,000	67	463,000,000	67	486,150,000	67	510,457,500	67	510,457,500	67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	8%	12	197,983,000	12	207,882,150	14	218,276,258	17	229,190,070	19	240,649,574	19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan kunjungan museum	%	20%	20	962,483,615	20	1,010,607,796	20	1,061,138,186	20	1,114,195,095	20	1,114,195,095	20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PERPUSTAKAAN															
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pemerataan layanan perpustakaan	%	55	57	873,638,000	58	961,001,800	59	1,057,101,980	60	1,162,812,178	61	1,279,093,396	61	Dinas Perpustakaan & Arsip
Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan		%	49.75	50.25	50.5		50.75		51		51.25		51.5		Dinas Perpustakaan & Arsip	
Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan		%	57.91	62.91	65.41		67.91		70.41		72.91		72.91		Dinas Perpustakaan & Arsip	
Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan		%	20.02	21.02	22.02		23.02		24.02		25.02		25.02		Dinas Perpustakaan & Arsip	
Persentase Perpustakaan ber- SNP		%	30	35	40		45		50		55		55		Dinas Perpustakaan & Arsip	

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Kinerja RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Persentase peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	%	20.45	20.76	20.91	21.06	21.21	21.36	21.36	Dinas Perpustakaan & Arsip					
		Persentase peningkatan anggota perpustakaan	%	27.95	28.09	28.16	28.23	28.3	28.37	28.37	Dinas Perpustakaan & Arsip					
	KEARSIPAN															
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase berkas yang dikelola sesuai ketentuan	%	82	77	162,616,000	93	178,877,000	97	196,763,000	100	216,439,000	100	251,230,000	100	Dinas Perpustakaan & Arsip
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan	%	100	100	105,914,000	100	116,521,000	100	128,360,000	100	141,273,000	100	160,876,000	100	Dinas Perpustakaan & Arsip
	URUSAN PILIHAN															
	KELAUTAN DAN PERIKANAN															
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	NA	0.25	539,495,000	0.5	310,500,000	0.75	327,500,000	1	345,500,000	1.25	362,500,000	1.25	Dinas Pertanian dan Pangan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah total produksi olahan perikanan (ton)	Ton	230	232	96,819,000	234	100,000,000	236	105,000,000	238	110,000,000	240	115,000,000	240	Dinas Pertanian dan Pangan
	PARIWISATA															
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	%	NA	73.33%	354,279,000	80.00%	4,570,893,000	86.67%	1,256,682,500	86.67%	667,001,000	93.33%	742,801,000	93.33%	Disporapar
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	NA	7.14%	535,585,000	8.89%	630,343,000	10.20%	743,377,000	11.11%	856,715,000	12.50%	970,386,000	12.50%	Disporapar
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	%	NA	9.09%		10.83%		12.78%		13.33%		14.71%		14.71%	Disporapar
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang meningkat kapasitasnya	%	NA	2.83%	131,000,000	4.72%	136,600,000	4.72%	300,260,000	4.72%	340,286,000	4.72%	381,815,000	4.72%	Disporapar
		Persentase peningkatan Pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	%	NA	50.00%		44.44%		38.46%		33.33%		33.33%		33.33%	Disporapar
	PERTANIAN															
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pembibitan yang terpelihara	%	60.84	62.91	696,713,000	66.89	829,888,000	66.89	806,250,000	66.89	1,057,091,000	66.89	1,183,950,000	66.89	Dinas Pertanian & Pangan
		Persentase Peningkatan sarana Peternakan	%	NA	10		10		10		10		10		10	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian	%	4.17	#REF!	409,000,000	#REF!	663,000,000	#REF!	721,300,000	#REF!	639,930,000	#REF!	698,923,000	70.83	Dinas Pertanian & Pangan
		Persentase Peningkatan prasarana Peternakan	%	16.67	14.29		12.50		11.11		10		9.09		9.09	

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Kinerja RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	%	9	8	818,605,000	7	966,632,400	6	1,102,488,140	5	1,121,369,454	4	1,293,754,400	4	Dinas Pertanian & Pangan
		Persentase peningkatan produk pangan asal hewan yang ASUH	%	NA	2		2		2		2		2			
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani	%	100	81	167,105,000	82	184,000,000	83	202,500,000	84	222,550,000	86	245,205,000	100	Dinas Pertanian & Pangan
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan kelayakan usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaannya secara berkala	%	NA	10	33,391,000	10	41,700,000	10	52,100,000	10	65,200,000	10	81,500,000	10	Dinas Pertanian & Pangan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	%	NA	6.67	563,948,000	6.67	620,342,000	10	632,877,000	10	644,750,000	13.33	658,500,000	13.33	Dinas Pertanian & Pangan
		Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	NA	8		12		20		24		28		32	
	PERDAGANGAN															
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	%	36	40	4,215,812,000	45	4,878,893,000	50	5,271,283,000	55	5,835,111,000	60	6,336,624,000	60	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	3.68	<8	65,878,000	<8	80,000,000	<8	86,500,000	<8	93,500,000	<8	101,000,000	<8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	US\$	2,483,087	2,202,000	955,000,000	2,289,000	1,025,000,000	2,461,000	1,080,000,000	2,707,000	1,169,500,000	3,113,000	1,283,950,000	3,113,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	44.09	72.38	135,605,000	74.64	155,000,000	76.9	177,000,000	79.17	200,000,000	79.17	213,000,000	81.43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha	%	89.79	91.8	45,000,000	93.88	45,000,000	95.92	45,000,000	96	55,000,000	96	55,000,000	96	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	PERINDUSTRIAN															
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	1.05	1.19	14,587,696,000	1.47	1,463,904,000	1.74	1,581,364,000	1.99	1,817,707,000	3.35	2,073,527,000	3.35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	50	70	16,283,000	75	17,911,000	80	19,702,000	85	21,672,000	90	23,839,000	90	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha	%	0.65	0.74		0.75		0.81		0.84		0.87		0.87	

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Kinerja RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Ketersediaan informasi industri terkini dan lengkap	%	85	90	133,848,000	90	159,158,000	90	190,576,000	90	229,788,000	95	278,967,000	95	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	TRANSMIGRASI															
	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Organisasi Sedang	%	30	30,2	1,179,076,000	30,4	1,238,029,000	30,6	1,299,930,000	30,8	1,364,926,000	31	1,433,172,000	31	Bagian Organisasi
		Indeks Kepuasan Pimpinan	Nilai	-	79 (Baik)	2,246,373,000	81 (Baik)	2,500,000,000	83 (Baik)	2,750,000,000	85 (Baik)	3,000,000,000	86 (Baik)	3,250,000,000	88 (Baik)	Bagian Prokompim
		Indeks Kepuasan Pimpinan	Nilai	-	79 (Baik)	27,366,263,000	81 (Baik)	30,927,000,000	83 (Baik)	33,740,000,000	85 (Baik)	36,592,000,000	86 (Baik)	40,469,500,000	88 (Baik)	Bagian Umum
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	100	1,852,445,000	100	1,610,000,000	100	1,773,500,000	100	1,954,350,000	100	2,151,850,000	100	Bagian Pemerintahan
		Persentase Kerjasama daerah yang terfasilitasi	%	100	100	53,608,000	100	175,000,000	100	190,000,000	100	205,000,000	100	220,000,000	100	Bagian Pemerintahan
		Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	%	100	100	2,969,549,000	100	3,617,480,000	100	4,340,969,000	100	5,209,161,000	100	6,250,989,000	100	Bagian Kesra
		Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi	%	100	100	1,116,463,000	100	1,230,266,000	100	1,305,400,000	100	1,380,266,000	100	1,455,400,000	100	Bagian Hukum
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase progres fisik seluruh OPD	%	98.2	98.4	1,051,861,000	98.6	1,051,861,000	98.8	1,051,861,000	99	1,051,861,000	99.2	1,051,861,000	99.2	Bagian Administrasi Pembangunan
		Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	%	100	100	1,111,341,000	100	1,166,908,000	100	1,225,253,000	100	1,286,516,000	100	1,350,842,000	100	Bagian Perekonomian dan SDA
		Tingkat kematangan UKPBJ	level	level 1	Level 1	930.610.000	level 1	1,086,317,000	level 2	1,106,595,000	level 2	1,128,900,000	Level 3	1,153,435,000	Level 3	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD yang terlaksana	%	100	100	5,383,454,000	100	5,921,791,000	100	6,513,970,000	100	7,165,368,000	100	7,881,904,000	100	Sekretariat DPRD
	PERENCANAAN															
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	%	NA	10.27	403,655,000	20.55	630,000,000	34.25	770,000,000	68.49	727,000,000	95.89	887,000,000		Bappeda
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	NA	75	766,247,000	80	1,087,150,000	90	1,158,650,000	100	1,209,150,000	100	1,132,150,000	100	Bappeda

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Kinerja RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	DAERAH	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	%	NA	67		83		100		100		100		100	Bappeda
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	NA	67		67		100		100		85		85	Bappeda
	KEUANGAN															
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	%	100	100	16,542,435,000.00	100	7,640,150,650.00	100	7,759,558,188.00	100	7,882,309,591.00	100	8,119,716,302.00	100	BPKAD
		Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan	%	100	100		100		100		100		100		100	BPKAD
		Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	%	82.76	100		100		100		100		100		100	BPKAD
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	%	82.76	85.71	2,326,239,000.00	85.71	2,437,624,350.00	85.71	2,559,505,571.00	89.29	2,687,480,846.00	89.29	2,821,854,888.00	89.29	BPKAD
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	100	104.19	1,836,454,000.00	110.06	1,985,280,750.00	115.47	2,081,394,288.00	121.15	2,179,214,202.00	124.37	2,280,975,063.00	124.37	BPKAD
	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase capaian target aspek sistem merit	%	NA	95	2,756,766,000	95	2,581,822,000	95	9,600,822,000	95	2,671,822,000	95	2,686,322,000	95	BKPP
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	%	NA	29	3,089,534,000	31	2,725,000,000	33	2,600,000,000	35	2,500,000,000	37	2,350,000,000	37	BKPP
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	%	42.11%	0	170,300,000	25	475,000,000	41.17	505,000,000	42.31	560,000,000	44.44	655,000,000	44.44	Balitbang
		Persentase pemanfaatan hasil inovasi	%	10.09%	24	551,700,000	24	586,200,000	24	586,200,000	24	586,200,000	24	586,200,000	24	Balitbang
	PENGAWASAN															
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan	%	92.50%	92%	206,785,000	93%	223,000,000	94.50%	223,000,000	96%	232,000,000	97.5	244,000,000	97.5	Inspektorat
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi	%	22.50%	47.50%	515,754,000	60%	570,750,000	72.50%	572,750,000	85%	578,750,000	100%	578,750,000	100%	Inspektorat

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Kinerja RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	KEWILAYAHAN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	100	12,289,916,000	100	24,740,254,000	100	17,695,735,000	100	19,068,358,250	100	20,953,865,375	100	Kecamatan Magelang Tengah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	84,153,000	100	198,911,000	100	218,608,000	100	239,141,000	100	260,013,000	100	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan program koordinasi ketentrman dan ketertiban umum	%	100	100	1,093,696,000	100	1,213,766,000	100	91,230,000	100	101,343,000	100	111,450,000	100	
	PROGRAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	-	100	244,379,000	100	260,700,000	100	279,025,000	100	299,210,000	100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	10,790,889,000	100	12,924,996,000	100	13,198,492,000	100	14,511,690,000	100	15,785,523,000	100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	100	10,421,075,000	100	11,598,493,800	100	12,538,436,400	100	13,439,084,000	100	13,749,992,500	100	Kecamatan Magelang Utara
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	177,130,000	100	436,859,000	100	480,530,000	100	528,090,000	100	580,400,000	100	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan program koordinasi ketentrman dan ketertiban umum	%	100	100	102,762,000	100	137,050,000	100	145,650,000	100	160,150,000	100	176,050,000	100	
	PROGRAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	0	-	100	39,500,000	100	43,450,000	100	47,855,000	100	52,735,000	100	
	PROGRAM PEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupaan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	9,206,760,000	100	14,462,132,000	100	14,281,719,000	100	14,820,142,000	100	15,283,053,000	100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	100	11,907,121,000	100	13,298,348,000	100	14,137,761,000	100	15,555,246,000	100	16,986,239,000	100	Kecamatan Magelang Selatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	3,048,000	100	3,300,000	100	3,600,000	100	3,900,000	100	4,200,000	100	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan program koordinasi ketentrman dan ketertiban umum	%	100	100	418,282,000	100	485,842,000	100	86,335,200	100	94,870,000	100	104,054,000	100	

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Kinerja RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	3,120,000	100	4,000,000	100	4,800,000	100	5,200,000	100	5,800,000	100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	9,384,014,000	100	9,280,719,000	100	8,671,251,000	100	9,333,762,000	100	10,057,541,000	100	

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi 2 macam indikator. Indikator yang pertama adalah Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan kinerja kepala daerah. Indikator yang kedua ialah Indikator Kinerja Daerah yang bertujuan untuk menggambarkan ukuran keberhasilan dari aspek-aspek yang ada di dalamnya. Aspek-aspek tersebut adalah aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator-indikator tersebut disajikan pada sub bab berikut.

8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator kinerja utama Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

**Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Magelang**

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Nilai Pembangunan Masyarakat	Nilai	71,97	75,50	78,38	81,09	83,93
2	Nilai Penguatan Toleransi	Nilai	55	58	60	63	65
3	Nilai Penguatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai	72,91	80,43	87,95	94,61	97,86
4	Nilai stabilitas daerah	Nilai	91,31	92,20	93,09	93,98	94,87
5	Nilai pemajuan kebudayaan	Nilai	58,65	63,39	64,87	66,36	71,91
6	Nilai partisipasi masyarakat	Nilai	82	84	86	88	90
7	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80,56	81,25	81,94	82,64	83,34
8	Indeks Pendidikan	Indeks	0,755	0,764	0,773	0,782	0,791
9	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	17	17	17	17	17
10	Indeks Kesehatan	Indeks	0,876	0,877	0,878	0,878	0,879
11	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Ribu Rp	12.565	12.705	12.846	12.987	13.127

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
12	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,65	95,75	95,90	96,00	96,15
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,10	73,10	75,10	83,10	85,10
15	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83,91	84,41	84,91	85,41	85,91
16	Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)	Tingkat	30,2	30,4	30,6	30,8	31
17	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,645	0,6825	0,705	0,73	0,73
18	Indeks SPBE	Indeks	2,4	2,55	2,675	2,975	3,25
20	Maturitas SPIP	Nilai	3,391	3,568	3,745	3,921	4,000
21	Nilai SAKIP	Nilai	BB	BB	A	A	A
22	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	93,27	93,45	93,59	93,60	93,61
23	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,35-5,05	5,05-5,14	5,14-5,36	5,18-5,43	5,32-5,70
24	Persentase Penduduk Miskin	%	6,73-7,58	6,41-7,30	6,36-7,00	6,12-6,76	6,06-6,70
25	Ketimpangan Pendapatan	%	16,34	16,38	16,42	16,46	16,50
26	Persentase Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan	%	29,79	29,81	29,83	29,85	29,87
27	Persentase pertumbuhan investasi	%	16	16	16	16	16
28	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	3,00	3,05	3,10	3,18	3,26
29	Persentase PMKS	%	9,13	9,08	9,06	9,03	9,01
30	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	6,8-7,8	6,3-7,5	5,8-7,1	5,3-6,3	4,8-6,0
31	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
32	Indeks Kualitas Ruang Kota	Indeks	63,11	65,38	67,04	68,64	70,21
33	Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	90,36	90,86	91,36	91,86	92,36
34	Persentase kesesuaian	%	72	74	76	78	80

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
	pemanfaatan ruang						
35	Indeks aksesibilitas perkotaan	Indeks	54,49	63,59	68,70	73,80	78,90
36	Persentase Luas Kawasan Kumuh	%	0,81	0,27	0,00	0,00	0,00
37	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	48,00	49,00	50,00	51,00	52,00
38	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik	%	16	16,5	17	17,5	18
39	Indeks Resiliensi Daerah	Indeks	52,94	58,68	66,36	71,94	77,22
40	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	22,90	33,20	47,40	57,40	66,80
41	Skor PPH	Skor	90,59	91,29	92,03	92,74	93,24

8.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Kemiskinan	%	7,58	6,73-7,58	6,41-7,30	6,36-7,00	6,12-6,76	6,06-6,70	6,06-6,70
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,45	4,35-5,05	5,05-5,14	5,14-5,36	5,18-5,43	5,32-5,70	5,32-5,70
3	Pengeluaran per kapita	Ribu Rp	12.210	13.398	13.849	14.332	14.816	15.332	15.332
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	79,99	80,56	81,25	81,94	82,64	83,34	83,34
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,59	6,8-7,8	6,3-7,5	5,8-7,1	5,3-6,3	4,8-6,0	4,8-6,0
6	Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	%	19,09	19,20	19,35	19,45	19,50	19,65	19,65
7	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,39	10,54	10,62	10,71	10,80	10,89	10,89
8	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,14	14,54	14,75	14,97	15,19	15,42	15,42
9	Angka Harapan Hidup	Tahun	76,85	76,93	76,98	77,04	77,10	77,16	77,16
10	Pertumbuhan investasi	%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
11	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,27	95,65	95,75	95,90	96,00	96,15	96,15
B	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR								
1.1	PENDIDIKAN								
	Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	NA	100	100	100	100	100	100
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	NA	100	100	100	100	100	100
	Angka Partisipasi Murni Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)	%	NA	100	100	100	100	100	100
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	NA	91	92	93	94	95	95
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	NA	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	NA	100	100	100	100	100	100
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)	%	NA	100	100	100	100	100	100
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0	0,0032	0,0016	0	0	0	0
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0	0,05	0,04	0	0	0	0
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) Pendidikan Kesetaraan (Paket A/B/C)	%	NA	100	100	100	100	100	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	NA	100	100	100	100	100	100
	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	%	97,63	98	98,5	99	99,5	100	100
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV								
	- PAUD	%	65	66	67	68	69	70	70
	- SD/MI	%	95,3	95,6	95,7	95,8	95,9	96	96
	- SMP/MTs	%	95,71	97	97,25	97,5	98	98,5	98,5
1.2	KESEHATAN								
	Indeks Kesehatan	Indeks	0,875	0,876	0,877	0,878	0,878	0,879	0,879
	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka	138,79	140	130	120	110	100	100
	Angka Kematian Balita (AKBa per 1.000 kelahiran hidup	Angka	16,66	16	16	15	15	15	15
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Angka	13,88	13	13	13	12	12	12
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Angka	16	11	11	10	10	10	10
	Prevalensi malnutrisi/wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	%	NA	3	3	3	3	3	3
	Persentase warga negara usia lanjut (60 tahun ke atas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	85,1	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	%	NA	63	66	69	72	75	75
	Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular	%	NA	59	62	65	67	70	70
	Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	NA	70	72	75	77	80	80
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78	80	82	84	86	88	88
1.3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	Persentase kualitas infrastruktur wilayah	%	NA	75,14	76,88	78,75	82,05	84,50	84,50
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	NA	72	74	76	78	80	80
	Jumlah aksesibilitas sarana pemerintahan daerah yang sesuai universal desain	unit	NA	10	20	30	40	50	50
1.4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	Cakupan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman berkualitas	%	NA	51,47	52,52	54,53	58,65	59,79	59,79
	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni pada kawasan bencana dan relokasi program pemerintah	%	NA	90	90	90	90	90	90
	Luas kawasan permukiman kumuh	Ha	39,91	14,9	0	0	0	0	0
1.5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
	Persentase kriminalitas yang tertangani	%	73,88	80,5	81	81,5	82	82,5	82,5
	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Angka	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Angka	0	0	0	0	0	0	0
	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	%	NA	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Partisipasi Politik masyarakat dalam pemilu	%	77,41	0	0	78	0	0	78
	Nilai Penguatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	NA	99	99	99	99	99	99
	Persentase penurunan gangguan trantibum	%	NA	1	1	1	1	1	1
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	NA	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks	NA	35,29	41,18	47,06	52,94	58,82	58,82
	Rasio Resiko Dampak Bencana	Angka	NA	2	2	2	2	2	2
1.6	SOSIAL								
	Persentase Penurunan PMKS	%	NA	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
	Persentase penanganan PMKS	%	NA	100	100	100	100	100	100
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.1	TENAGA KERJA								
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	NA	65	68	71	73	76	80
	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	51,42	60	60	65	65	70	70
2.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	Sumbangan pendapatan perempuan	%	NA	43,18	43,41	43,53	43,66	43,88	43,88
	Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan	%	NA	15	15,2	15,2	15,2	15,4	15,4
	Rasio KDRT	%	0,04	0,04	0,04	0,04	0,35	0,35	0,35
2.3	PANGAN								
	Tingkat Ketersediaan Energi	%	NA	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Ketersediaan Protein	%	NA	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penguatan cadangan pangan	%	NA	20	22	25	27	30	30
2.4	PERTANAHAN								
	Persentase luas lahan bersertifikat	%	93,12	93,20	93,23	93,36	93,44	93,53	93,53
	Penyelesaian kasus tanah Negara (Penyelesaian kasus tanah)	%	NA	20	40	60	80	100	100
2.5	LINGKUNGAN HIDUP								
	Indeks Kualitas Air	Indeks	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	83,67	85.92	88.25	93.03	95.36	95.36	95.36
	Presentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan	%	NA	43,33	43,33	46,67	46,67	50,00	50,00

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	31,38	31,38	31,66	31,93	32,21	32,48	32,48
	Persentase Sampah yang Terkelola	%	84,11	88,05	90,65	93,65	97,15	99,65	99,65
2.6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	Nilai kualitas administrasi kependudukan	%	NA	84,37	88,07	91,21	94,63	95,83	95,83
	IKM OPD	Indeks	82,83	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	88,00
	Nilai tertib administrasi kependudukan	%	NA	99,10	99,20	99,30	99,38	99,50	99,50
	Cakupan pemanfaatan data kependudukan	%	NA	70,00	80,00	88,33	97,50	100,00	100,00
2.7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
	Persentase keswadayaan masyarakat	%	NA	40	42	45	48	50	50
	Persentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang	%	NA	59	65	71	76	82	82
2.8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	NA	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,2
	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	NA	8	7	7	6	6	6
2.9	PERHUBUNGAN								
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	%	NA	86	87	88	89	90	90
2.10	KOMUNIKASI, INFORMATIKA								
	Indeks SPBE	Indeks	3,21	2,4	2,55	2,675	2,975	3,25	3,25
	Nilai domain kebijakan SPBE;	Angka	3,21	2,9	3	3	3,3	3,5	3,5
	Nilai domain tata kelola SPBE;	Angka	0	2,7	2,7	2,8	2,8	3	3
	Nilai domain Manajemen SPBE	Angka	0	1,2	1,5	1,8	2,5	3	3
	Nilai domain layanan SPBE	Angka	0	2,8	3	3,1	3,3	3,5	3,5
2.11	KOPERASI DAN UMKM								
	Peningkatan omzet pelaku usaha mikro	%	-8,22	- 3	- 2	- 1	2	3	3
	Peningkatan volume usaha koperasi	Rp	41,227,671,003	41,928,541,411	43,895,483,280	45,939,758,280	48,065,748,585	50,278,072,095	50,278,072,095
2.12	PENANAMAN MODAL								
	Pertumbuhan Nilai investasi PMA PMDN	%	NA	16	16	16	16	16	16
	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Angka	NA	3	3	3	3	3	15

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan Budidaya	%	NA	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3.2	PARIWISATA								
	Persentase PAD sektor pariwisata	%	2,89	3,73	3,83	4,17	4,26	4,52	4,52
	Persentase kunjungan wisata kota	%	NA	100	100	100	100	100	100
	Lama kunjungan Wisata	Angka	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari
3.3	PERTANIAN								
	Produktivitas produksi pertanian	Ton/Ha	6,05	6,15	6,25	6,35	6,45	6,5	6,5
	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	%	NA	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
3.4	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
3.5	PERDAGANGAN								
	Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan	%	14,3	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65
3.6	PERINDUSTRIAN								
	Prosentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	%	16,12	16,14	16,16	16,18	16,20	16,22	16,22
3.7	TRANSMIGRASI								
4	URUSAN PENUNJANG								
4.1	FUNGSI LAIN								
	Persentase Pemenuhan Sasaran dan Area Perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	%	NA	80	90	100	100	100	100
	Persentase kebijakan bidang Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan Barang Jasa yang terpenuhi	%	NA	100	100	100	100	100	100
	Persentase kebijakan bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang terpenuhi	%	NA	100	100	100	100	100	100
	Persentase OPD dengan nilai SAKIP A	%	NA	80	90	100	100	100	100
	Nilai LPPD	Angka	NA	3,6000	3,7000	3,8000	3,9000	4,0000	4,0000
	Persentase dokumentasi dan publikasi kegiatan pimpinan	%	NA	100	100	100	100	100	100
	Tingkat kepuasan pimpinan	%	NA	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD)	Indeks	NA	70	72	75	78	80	80
	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	NA	68 (B)	69 (B)	70(B)	71(BB)	72(BB)	72(BB)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kec. Magelang Utara)	Indeks	80	80,5	81	81,5	82	82,5	82,5
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kec. Magelang Tengah)	Indeks	80	80,5	81	81,5	82	82,5	82,5
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kec. Magelang Selatan)	Indeks	80	80,5	81	81,5	82	82,5	82,5
4.2	KEUANGAN								
	Nilai Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	89,76	89,76	91,43	91,43	93,10	93,10	93,10
	Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	88,79	89,77	90,76	92,64	94,29	94,64	94,64
	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	32,02	36,16	34,61	35,64	36,69	36,69	36,69
	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	23,82	26,05	25,25	25,81	26,37	26,37	26,37
4.3	PERENCANAAN								
	Nilai SAKIP dari aspek perencanaan	%	22,49	24,5	25	25,5	26	26,5	26,5
	Persentase Tingkat efektivitas proses perencanaan pembangunan daerah dan kualitas dokumen perencanaan	%	53,25	76,0	81	86,5	92	93,25	93,25
4.4	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
	Indeks sistem merit	Indeks	NA	0,645	0,6825	0,705	0,73	0,73	0,73
	Nilai sistem merit	Angka	NA	B (250 - 324)	B (250 - 324)	B (250 - 324)	B (250 - 324)	B (250 - 324)	B (250 - 324)
4.5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	NA	17,02	36,17	55,32	76,60	100	100
	Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	%	NA	24	49	65,17	66,31	68,44	68,44
4.6	PENGAWASAN								
	Kapabilitas APIP	Angka	3	3,16	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
	MRI	Angka	2,12	2,29	2,47	2,65	2,82	3	3
	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Angka	6,9	7,5	8,1	8,2	8,3	8,4	8,4
	Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	3,38	3,4	3,4	3,42	3,43	3,45	3,45

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	87	88	89	91	93	95	95

BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi isu-isu/program-program strategis yang akan dilaksanakan, cara mencapainya, dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai Visi Kota Magelang Maju, Sehat, Bahagia. RPJMD menempatkan program pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan skala prioritas yang dimulai dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan.

Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Magelang periode Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Beberapa kaidah yang perlu dipedomani dalam pelaksanaan dokumen RPJMD ini, antara lain:

1. RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Magelang. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Magelang harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
2. RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan pembangunan jangka menengah di Kota Magelang yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. Pasca penetapan RPJMD, apabila terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara urusan pemerintahan yang diampunya dengan urusan pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus membuat renstra baru.

4. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam renstra/renja serta konsistensinya dengan RPJMD dilakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (perubahan kebijakan), dan terjadi perubahan yang mendasar seperti: terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.

Perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ini dapat diwujudkan dengan didukung komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, peran serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan, kondusifitas nasional dan global yang menjamin stabilitas ekonomi dan pembangunan, kemampuan adaptasi terhadap situasi disruptif dan peran serta masyarakat.

Melalui RPJMD ini diharapkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Magelang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dalam implementasinya didukung oleh seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat Kota Magelang. Dengan semangat gotong-royong seluruh pemangku kepentingan di Kota Magelang tetap terus dikembangkan dalam rangka mewujudkan visi “**Kota Magelang Maju, Sehat dan Bahagia**”. Pada akhirnya masyarakat akan semakin sejahtera dan pembangunan Kota Magelang akan memberikan sumbangan penting dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan cita-cita pembangunan nasional.

9.1 Pedoman Transisi

Dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2016-2021 nantinya maka untuk menjaga keberlanjutan pembangunan pada periode selanjutnya terutama sekali untuk tahun pertama kepemimpinan Kepala Daerah yang baru maka RPJMD ini tetap menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RAPBD Kota Magelang. Sinkronisasi dalam penyusunan RKPD pada tahun transisi juga tidak boleh terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN maupun RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang digunakan pada masa tersebut.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Magelang disusun untuk digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah maupun stakeholder yang berkepentingan terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Magelang untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi salah satu acuan bagi Perangkat Daerah dalam mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah terpilih untuk masa lima tahun ke depan. Sudah selayaknya Perangkat Daerah berkewajiban mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan melalui program kegiatan di setiap Perangkat Daerah. Gambaran pencapaian target-target tersebut akan terlihat pada evaluasi-evaluasi capaian kinerja yang dilakukan setiap tahunnya. Dari evaluasi ini akan diketahui target-target yang telah tercapai maupun target-target yang sedang dalam proses pencapaian maupun target-target yang perlu dorongan dan dukungan untuk pencapaiannya.

Dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, antara lain :

- a. Walikota berkewajiban untuk melakukan sosialisasi terkait dokumen RPJMD yang telah disusun kepada stakeholder yang terkait.
- b. Target-target yang telah tercantum didalam RPJMD Kota Magelang agar didukung oleh semua Perangkat Daerah maupun stakeholder melalui berbagai program dan kegiatan yang pelaksanaannya yang dilakukan secara terpadu, konsistensi, transparansi, inovatif, dan rasa tanggung jawab tinggi.
- c. RPJMD Kota Magelang menjadi pedoman dan perhatian bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis.
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.

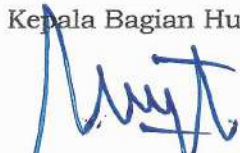
WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

MUCHAMAD NUR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



MARYANTO, SH.MH.

Pembina TK. I

NIP. 19680817 198903 1 002